



**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG
DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025-2045**



RPJPD



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.

10. Arah Kebijakan...

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
15. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
16. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah tersedianya dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
 - b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian Pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam pembangunan jangka menengah; dan
 - e. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;

e. BAB V...

- e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

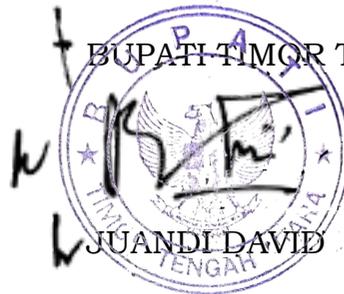
**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NO. 6/2024.

PENJELASAN...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: *Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*. Negara Nusantara yaitu: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia yang berkelanjutan, yaitu negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan Pembangunan social, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Timor Tengah Utara sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Timor Tengah Utara serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045, yaitu **“Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”**. Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selam 20 Tahun ke depan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 Tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rencana pembangunan. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- II. PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1
Cukup jelas.
 - Pasal 2
Cukup jelas.
 - Pasal 3
Cukup jelas.
 - Pasal 4
Cukup jelas.
 - Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 149.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025 - 2045

ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-i-

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Peta	ix
Bab I Pendahuluan	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum.....	I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.4
1.4 Maksud dan Tujuan	I.5
1.5 Sistematika Penulisan	I.6
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1 Geografi	II.1
2.1.2 Demografi	II.57
2.2 Kesejahteraan Masyarakat	II.59
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II.59
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II.67
2.3 Aspek Daya Saing.....	II.69
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II.69
2.3.2 Daya Saing SDM	II.77
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah	II.87
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II.91
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II.105
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II.107
2.5.1 Capaian	II.107
2.5.2 Rekomendasi	II.107
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II.108
2.6.1 Analisa Perkiraan dan Jumlah Penduduk	II.108
2.6.2 Proyeksi Penduduk	II.108
2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II.110
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II.113
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis	III.1
3.1 Permasalahan	III.1
3.1.1 Permasalahan Global	III.1
3.1.2 Permasalahan Nasional.....	III.4
3.1.3 Permasalahan Nusa Tenggara Timur.....	III.6
3.1.4 Permasalahan Kabupaten Timor Tengah Utara	III.15
3.2 Analisis Isu Strategis Daerah Kab.TTU	III.20
Bab IV Visi dan Misi Daerah.....	IV.1
4.1 Visi RPJPD Kab.TTU	IV.1
4.2 Sasaran Visi RPJPD Kab.TTU	IV.4
4.3 Misi RPJPD Kab.TTU	IV.5
4.4 Keselarasan Visi, Sasaran Visi, Misi RPJPD Timor Tengah Utara dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT	IV.7



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-ii-

Bab V	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah	V.1
	5.1 Arah Kebijakan.....	V.1
	5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.....	V.6
Bab VI	Penutup.....	VI.1



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-iii-

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	II.1
Tabel 2. 2	Produksi Tanaman Pangan di Kab.TTU Tahun 2018-2021 (ton)	II.4
Tabel 2. 3	Produksi Perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023 (ton)	II.5
Tabel 2. 4	Produksi Buah-Buahan di Kab.TTU Tahun 2019-2023 (kuintal)	II.6
Tabel 2. 5	Produksi Tanaman Sayur di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023 (kuintal).....	II.9
Tabel 2. 6	Produksi Tanaman Biofarmaka di Kab.TTU 2021-2023 (kg) .	II.11
Tabel 2. 7	Populasi Ternak dan Unggas di Kab.TTU Tahun 2019-2021 (ekor)	II.13
Tabel 2. 8	Produksi Perikanan di Kab.TTU Tahun 2019-2022.....	II.16
Tabel 2. 9	Data Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022	II.17
Tabel 2. 10	Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kabupaten Timor Tengah Utara	II.19
Tabel 2. 11	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten TTU	II.21
Tabel 2. 12	Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten TTU	II.22
Tabel 2. 13	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan.....	II.24
Tabel 2. 14	Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih.....	II.24
Tabel 2. 15	Jasa Lingkungan Penyedia Serat	II.25
Tabel 2. 16	Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar.....	II.25
Tabel 2. 17	Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir	II.26
Tabel 2. 18	Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana	II.27
Tabel 2. 19	Jasa Lingkungan Pemurnian Air.....	II.27
Tabel 2. 20	Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah.....	II.28
Tabel 2. 21	Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara	II.28
Tabel 2. 22	Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami.....	II.29
Tabel 2. 23	Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit	II.30
Tabel 2. 24	Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	II.30
Tabel 2. 25	Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata	II.31
Tabel 2. 26	Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam	II.31
Tabel 2. 27	Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	II.32
Tabel 2. 28	Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara	II.33
Tabel 2. 29	Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer	II.33
Tabel 2. 30	Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik	II.34
Tabel 2. 31	Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	II.34
Tabel 2. 32	Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati	II.35
Tabel 2. 33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.TTU	II.35
Tabel 2. 34	Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kabupaten Timor Tengah Utara.....	II.37
Tabel 2. 35	Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) Kabupaten Timor Tengah Utara	II.38
Tabel 2. 36	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kab.TTU	II.39
Tabel 2. 37	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kab.TTU	II.40
Tabel 2. 38	Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kab.TTU	II.42



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-iv-

Tabel 2. 39	Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kab.TTU	II.43
Tabel 2. 40	Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kab.TTU	II.44
Tabel 2. 41	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Timor Tengah Utara	II.45
Tabel 2. 42	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab.TTU	II.46
Tabel 2. 43	Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kab.TTU	II.47
Tabel 2. 44	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kab.TTU	II.49
Tabel 2. 45	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kab.TTU	II.50
Tabel 2. 46	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kab.TTU	II.51
Tabel 2. 47	Jumlah Penduduk di Kab.TTU Tahun 2019-2023.....	II.57
Tabel 2. 48	Kepadatan Penduduk di Kab.TTU 2023	II.58
Tabel 2. 49	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab.TTU Tahun 2023	II.58
Tabel 2. 50	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kab.TTU Tahun 2019 – 2023	II.59
Tabel 2. 51	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023	II.60
Tabel 2. 52	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) dan Persentasenya di Kab.TTU Tahun 2021 dan 2022.....	II.61
Tabel 2. 53	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 – 2022 (2018 = 100).....	II.62
Tabel 2. 54	Nilai Tukar Petani Perikanan dan Peternakan Kab.TTU Tahun 2022 (2018 = 100)	II.63
Tabel 2. 55	Nilai Tukar Nelayan di Kab.TTU Tahun 2019 – 2022 (2018 = 100).....	II.64
Tabel 2. 56	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015–2023	II.65
Tabel 2. 57	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab.TTU Tahun 2021-2023	II.65
Tabel 2. 58	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTU, IPM TTU dan IPM NTT Tahun 2020 – 2023.....	II.66
Tabel 2. 59	Grafik IPM TTU dan IPM NTT Tahun 2020 – 2023	II.66
Tabel 2. 60	Indeks Pembangunan Gender Kab.TTU Tahun 2017 – 2023.	II.67
Tabel 2. 61	IPG Perempuan Kab.TTU Tahun 2017 – 2023.....	II.68
Tabel 2. 62	Indeks Ketimpangan Gender di Kab.TTU Tahun 2018 – 2023	II.69
Tabel 2. 63	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kab.TTU Tahun 2019 – 2023	II.70
Tabel 2. 64	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (persen) di Kab.TTU Tahun 2019 – 2023	II.70
Tabel 2. 65	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Persentasenya di Kab.TTU Tahun 2019 – 2023.....	II.71
Tabel 2. 66	Pendapatan Perkapita Perduduk Kab. TTU Tahun 2020 – 2022	II.72



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-v-

Tabel 2. 67	Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	II.74
Tabel 2. 68	Rasio Kewirausahaan Kab.TTU 2013- 2021	II.76
Tabel 2. 69	Indeks Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara	II.78
Tabel 2. 70	Rekapitulasi UPLM Per Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	II.82
Tabel 2. 71	Besar Indeks Literasi Digital Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022	II.83
Tabel 2. 72	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU Menurut Jenis Kelamin	II.84
Tabel 2. 73	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2004-2022	II.85
Tabel 2. 74	Angka Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT	II.86
Tabel 2. 75	Data Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023	II.87
Tabel 2. 76	Penilaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	II.88
Tabel 2. 77	Tingkat Capaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur	II.88
Tabel 2. 78	Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kab.TTU	II.89
Tabel 2. 79	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten TTU	II.89
Tabel 2. 80	Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kebebasan	II.93
Tabel 2. 81	Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kesetaraan	II.95
Tabel 2. 82	Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	II.96
Tabel 2. 83	Penentuan Indeks Keamanan Manusia	II.98
Tabel 2. 84	Indeks Rasa Aman dan Nyaman Kab TTU	II.98
Tabel 2. 85	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten dan Kota di Prov. NTT	II.104
Tabel 2. 86	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) Kab.TTU	II.105
Tabel 2. 87	Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara 2018-2022	II.108
Tabel 2. 88	Analisis Proyeksi Penduduk Kab.TTU	II.109
Tabel 2. 89	Analisis Proyeksi Penduduk Perkecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara	II.109
Tabel 2. 90	Hasil Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara	II.110
Tabel 2. 91	Analisis Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Timor Tengah Utara	II.111
Tabel 2. 92	Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara	II.111
Tabel 2. 93	Analisis Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan	II.111
Tabel 2. 94	Proyeksi kebutuhan Rumah/Unit Tempat Tinggal Kab.TTU ..	II.112
Tabel 2. 95	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	II.112
Tabel 2. 96	Kebutuhan Sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara	II.112
Tabel 3. 1	Capaian Indikator TPB Kab.TTU Terhadap Target Nasional	III.1
Tabel 3. 2	Ketidaktercapaian TPB Kabupaten Timor Tengah Utara	III.2
Tabel 3. 3	Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara dibandingkan Wilayah Sekitarnya (Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat)	III.9



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-vi-

Tabel 3. 4	Potret Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2022...	III.14
Tabel 3. 5	Tabel Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan.....	III.21
Tabel 4. 1	Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara.....	IV.2
Tabel 4. 2	Sasaran Visi RPJP Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ..	IV.4
Tabel 4. 3	<i>Banchmarking</i> Masalah, Masalah Pokok, dan Isu Strategis menjadi Misi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045.....	IV.5
Tabel 4. 4	Keselarasannya Visi, Misi RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT	IV.7
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045	V.1
Tabel 5. 2	Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045	V.3
Tabel 5. 3	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045.....	V.7
Tabel 5. 4	Game Changers TTU Tahun 2025-2045	V.12



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-vii-

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah.....	I.5
Gambar 2. 1	Diagram Produksi Tanaman Pangan di Kab.TTU Tahun 2018-2021 (ton).....	II.4
Gambar 2. 2	Potensi Pertanian (Tanaman Pangan) di Kab.TTU	II.4
Gambar 2. 3	Diagram Produksi Perkebunan di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (ton).....	II.6
Gambar 2. 4	Potensi Perkebunan di Kab.TTU	II.6
Gambar 2. 5	Diagram Produksi Buah-Buahan di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (kuintal)	II.8
Gambar 2. 6	Diagram Produksi Tanaman Sayur di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (kuintal).....	II.10
Gambar 2. 7	Potensi Tanaman Sayur di Kab.TTU	II.10
Gambar 2. 8	Diagram Produksi Tanaman Biofarmaka di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (kg)	II.11
Gambar 2. 9	Diagram Populasi Ternak dan Unggas di Kab.TTU Tahun 2019-2021 (ekor)	II.16
Gambar 2. 10	Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) Alam	II.19
Gambar 2. 11	Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) Budaya	II.19
Gambar 2. 12	Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) Buatan Manusia	II.20
Gambar 2. 13	Diagram Kawasan Hutan Kabupaten TTU.....	II.21
Gambar 2. 14	Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II.41
Gambar 2. 15	Rawan Bencana Longsor.....	II.42
Gambar 2. 16	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kab.TTU.....	II.43
Gambar 2. 17	Rawan Bencana Banjir	II.44
Gambar 2. 18	Rawan Bencana Banjir Bandang.....	II.45
Gambar 2. 19	Rawan Bencana Tsunami	II.46
Gambar 2. 20	Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II.47
Gambar 2. 21	Rawan Bencana Cuaca Ekstrem.....	II.48
Gambar 2. 22	Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	II.49
Gambar 2. 23	Rawan Bencana Kekeringan	II.50
Gambar 2. 24	Rawan Bencana Likuifaksi.....	II.51
Gambar 2. 25	Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023.....	II.59
Gambar 2. 26	Grafik Rasio Gini Kab.TTU Utara Tahun 2018-2022	II.61
Gambar 2. 27	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Kab.TTU Tahun 2020 – 2022 (2018 = 100)	II.63
Gambar 2. 28	Grafik Indeks Pembangunan Gender di Kab.TTU Tahun 2017 - 2023	II.67
Gambar 2. 29	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kab.TTU Tahun 2017 – 2023.....	II.68
Gambar 2. 30	Grafik Indeks Ketimpangan Gender di Kab.TTU Tahun 2018 – 2023.....	II.69
Gambar 2. 31	Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Pembentuk Indeks Ekonomi Inklusif	II.73
Gambar 2. 32	Grafik Rasio Wirausaha Kabupaten Timor Tengah Utara 2013-2021	II.77
Gambar 2. 33	Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sekitarnya	II.77
Gambar 2. 34	Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sekitarnya	II.78
Gambar 2. 35	Indeks Pendidikan Kab.TTU dan Wilayah Sekitar	II.79
Gambar 2. 36	Literasi SD/Mi Kab.TTU Tahun 2021- 2023	II.80



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-viii-

Gambar 2. 37	Numerasi SD/Mi Kab.TTU Tahun 2019- 2023	II.80
Gambar 2. 38	Literasi SMP/MTs Kab.TTU Tahun 2019- 2023	II.80
Gambar 2. 39	Literasi SMP/MTs Kab.TTU Tahun 2019- 2023	II.81
Gambar 2. 40	Sebaran Hasil IPLM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	II.82
Gambar 2. 41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU	II.84
Gambar 2. 42	Skema Penyusunan IDI Tahun 2022	II.91
Gambar 2. 43	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2022.....	II.91
Gambar 2. 44	Aspek Indeks Demokrasi Tahun 2022.....	II.92
Gambar 2. 45	Aspek IDI Provinsi NTT, 2022	II.92
Gambar 2. 46	Skor Indikator Aspek Kebebasan Prov NTT, 2022	II.93
Gambar 2. 47	Skor Indikator Aspek Kesetaraan Prov NTT, 2022	II.94
Gambar 2. 48	Skor Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Prov. NTT, 2022.....	II.96
Gambar 2. 49	Skema Indeks Keamanan Manusia	II.98
Gambar 2. 50	Diagram Daya Saing Daerah Berkelanjutan	II.105
Gambar 2. 51	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Timor Tengah Utara dan kabupaten yang berdekatan.....	II.106
Gambar 3. 1	Latar Belakang Masyarakat yang Memberikan Aspirasi Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, sektor yang dianggap bermasalah dan perlu diperbaiki	III.19
Gambar 3. 2	Sektor yang Menjadi Permasalahan Menurut Aspirasi Masyarakat.....	III.19
Gambar 4. 1	Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara.....	IV.1
Gambar 4. 2	Diagram Konsep Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara.....	IV.3



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-ix-

DAFTAR PETA

Peta 2. 1	Orientasi Wilayah.....	II.2
Peta 2. 2	Batas Administrasi Wilayah.....	II.2
Peta 2. 3	Peta DPD di Kab. Timor Tengah Utara.....	II.18
Peta 2. 4	Peta KPPD di Kab. Timor Tengah Utara.....	II.18
Peta 2. 5	Kawasan Hutan.....	II.22
Peta 2. 6	Daya Dukung Air.....	II.23
Peta 2. 7	Area Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten TTU.....	II.38
Peta 2. 8	Rawan Gempa Bumi.....	II.52
Peta 2. 9	Rawan Longsor.....	II.52
Peta 2. 10	Rawan Longsor.....	II.53
Peta 2. 11	Rawan Banjir Bandang.....	II.53
Peta 2. 12	Rawan Tsunami.....	II.54
Peta 2. 13	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II.54
Peta 2. 14	Rawan Cuaca Ekstrim.....	II.55
Peta 2. 15	Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	II.55
Peta 2. 16	Rawan Kekeringan.....	II.56
Peta 2. 17	Rawan Likuifaksi.....	II.56



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-I.1-

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari sisten perencanaan pembangunan nasional yang penting. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Dalam setiap penyusunan dokumen daerah tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan dokumen antara pusat dan daerah.

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/kota perlu menyesuaikan dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. Hal tersebut dinyatakan pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 7 sampai dengan pasal 10, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ditinjau berdasarkan proses dan substansi. Dokumen RPJPD berorientasi pada proses menggunakan 4 (empat) pendekatan yakni pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif,



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-I.2-

pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Pada perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang meliputi holistik- tematik, integratif, dan spasial.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten, penting untuk mengkoordinasikan antara RPJPD dengan RPJPN agar tercipta keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat kolaboratif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Pertama, arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Kedua, RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 disusun secara stimulan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Ketiga, hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Keempat, kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2025- 2045. Kelima, berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara stimulan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW.

Secara detail pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersebut menyatakan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran tujuan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 Tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga 2045. RPJP Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun periode 2025-2045 disusun sebagai keberlanjutan dan kebaruan dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-I.3-

- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 8. Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-I.4-

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2024-2045;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024-2043; dan
 21. SEB Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan yang sekarang berlaku adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tahapan perencanaan



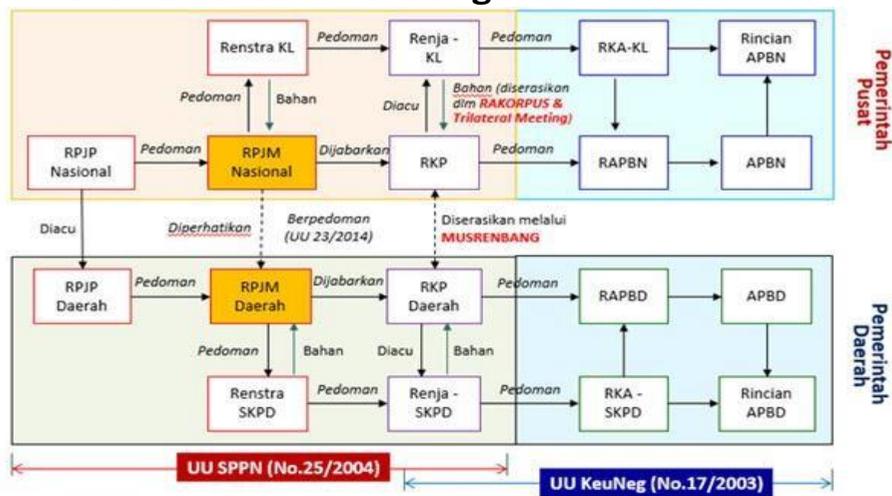
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-I.5-

pembangunan jangka panjang (20 Tahun), jangka menengah (5 Tahun) maupun jangka pendek (1 Tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah/ PD).

Pada tingkat pusat, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nasional) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk jangka pendek. Sedangkan pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk jangka pendek.

Gambar 1. 1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Dari perencanaan pembangunan tersebut, diperlukannya penyelarasan antara daerah dengan pusat yang ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras khususnya pada dokumen RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJP Daerah Tahun 2025-2045, baik dari periodisasi juga dalam pengaturannya. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa perencanaan pembangunan melingkupi seluruh cakupan dan satu kesatuan dari tingkat pusat hingga daerah. Perencanaan pembangunan juga dilakukan untuk mencapai target Indonesia Emas di Tahun 2045. Agenda-agenda penting untuk sampai ke sana diperlukan untuk mengimplementasikan transformasi pembangunan di wilayah.

Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah, perlunya keselarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta,



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-I.6-

sedangkan dokumen RPJPD sebagai arahan pembangunan berjalan. Penerjemahan RTRW dalam Rencana Pembangunan tercantum dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. Kedua dokumen tersebut saling sinergis dan saling mendukung, antara lain dalam jenis program utama, pembiayaan dan lokasi program. Salah satu peraturan yang digunakan sebagai dasar utama dalam penyelarasan antara RTRW dengan RPJPD terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263, bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 Tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud

Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk jangka waktu 20 Tahun yakni dari Tahun 2025 hingga 2045. Selain itu, RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW, dalam rangka, sebagai berikut:

1. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sekitar;
4. Menyediakan dokumen dan pedoman perencanaan pembangunan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan berdasarkan pada kondisi riil, potensi daerah dan proyeksi ke depan; dan
5. Sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam menyusun RPJM Daerah dan Renstra PD dan khususnya sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam pasal 20



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-I.7-

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Dokumen RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang mencakup Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum. Penyajian dalam bab ini meliputi; (1) data hasil evaluasi capaian pembangunan jangka panjang daerah sebelumnya; (2) hasil pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan analisis diagnostik; (3) gambaran kondisi tata kelola pemerintahan; (4) hasil analisis tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik; (5) hasil analisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah, serta program/proyek strategis yang secara signifikan dapat memengaruhi perkembangan daerah sesuai dengan amanat regulasi, berdasarkan RTRW, serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Menguraikan tentang permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah jangka panjang kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Memuat visi dan misi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 yang merupakan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045 dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkannya.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang terdiri dari Arah Kebijakan periode 2025-2029, periode 2030-2034, periode 2035-2039, dan periode 2040-2045, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan karakteristik daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 serta rumusan terkait Arah Kebijakan Super Prioritas (*Game Changers*).

Bab VI Penutup

Memuat ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD empat periode ke depan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-I.8-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.1-

**BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

A. Batas Administrasi

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Timor Provinsi NTT. Secara astronomis Kabupaten Timor Tengah Utara terletak antara 90 02' 48" LS - 90 37' 36" LS dan antara 1240 04' 02" BT-1240 46' 00" BT. Batas-batas wilayah administratif adalah:

Sebelah Selatan : Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sebelah Utara : Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu

Sebelah Barat : Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sebelah Timur : Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Luas wilayah daratan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah seluas 2.615,90 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi atas 24 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 11 kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Biboki Anleu dengan luas 289,68 km² atau 11,07% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Musi dengan luas 40,44 km² atau 1,55% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel luas wilayah menurut kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, peta orientasi Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap provinsi NTT dan peta batas administrasi Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Tabel 2. 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Biboki Anleu	289,7	13	Insana Fafinesu	75,77
2	Biboki Feotleu	114,9	14	Insana Tengah	119,6
3	Biboki Moenleu	148	15	Insana Utara	136,7
4	Biboki Selatan	140,7	16	Miomaffo Barat	118,7
5	Biboki Tanpah	60,55	17	Miomaffo Tengah	59,38
6	Biboki Utara	63,97	18	Miomaffo Timur	83,25
7	Bikomi Nilulat	40,45	19	Musi	40,44
8	Bikomi Selatan	135,4	20	Mutis	188,1
9	Bikomi Tengah	44,81	21	Naibenu	99,75
10	Bikomi Utara	49,43	22	Noemuti	134,3
11	Insana	252,8	23	Noemuti Timur	53,03
12	Insana Barat	91,78	24	Kota Kefamenanu	74,45
Jumlah					2.615,9

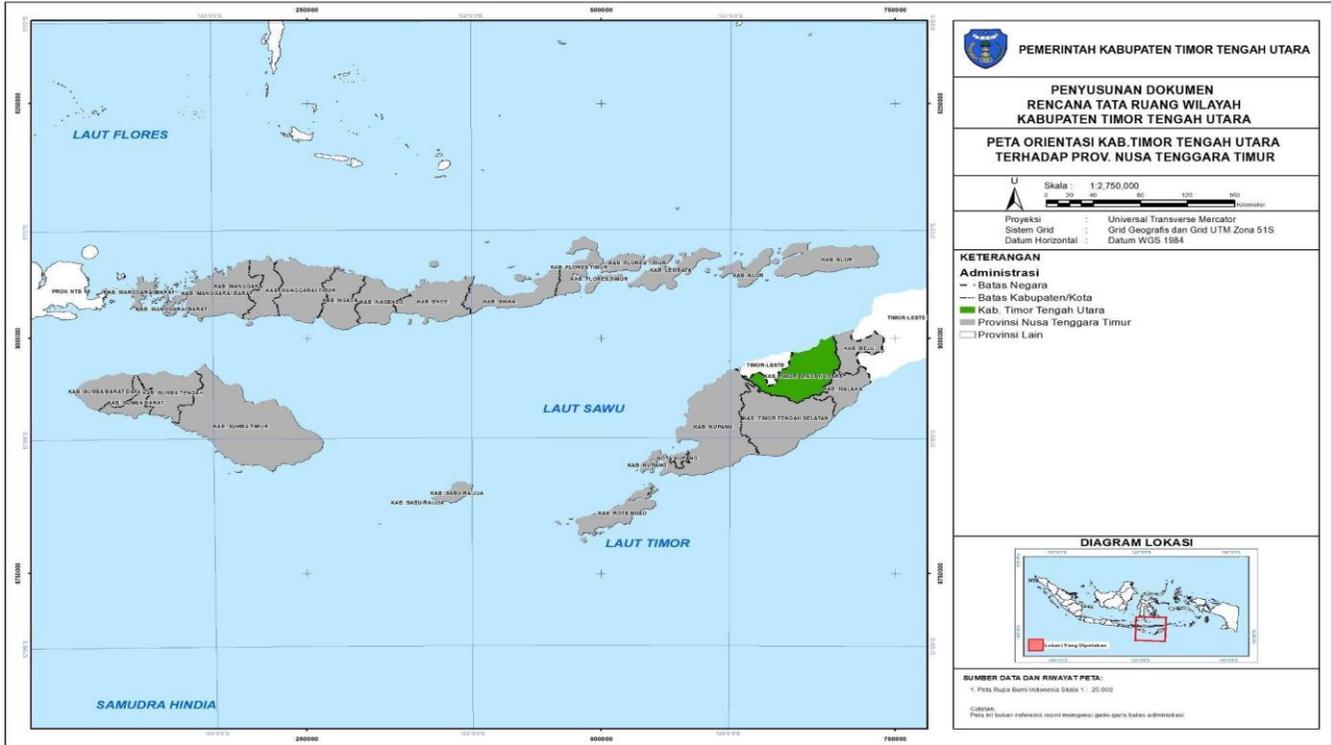
Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2022



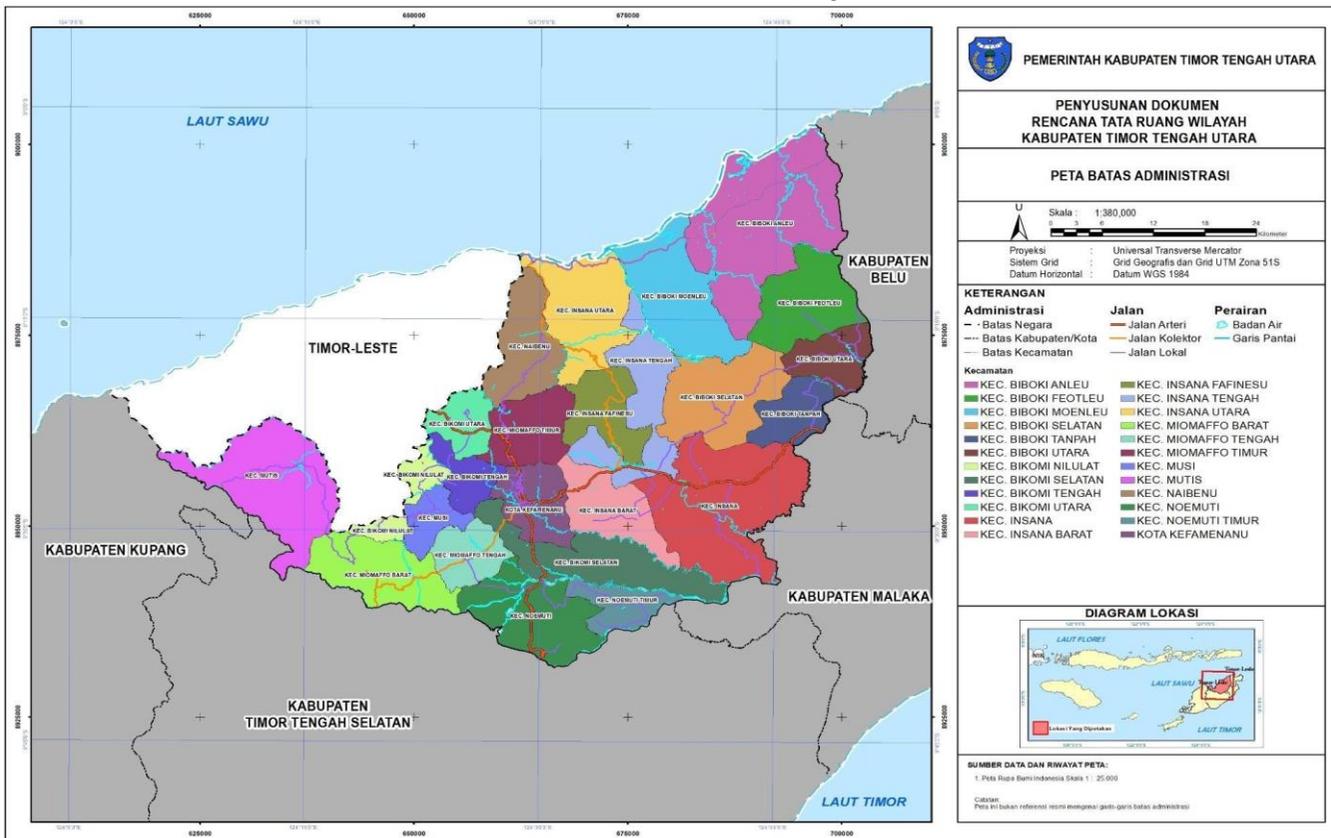
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.2-

Peta 2.1 Orientasi Wilayah



Peta 2.2 Batas Administrasi Wilayah



B. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara didalam pengembangan sistem perkotaan skala nasional yakni Kota Kefamenanu masuk dalam fungsi perkotaan Pusat



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.3-

Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kefamenanu memiliki berbagai potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan, diantaranya pada sektor pertanian, peternakan, ekonomi kerajinan tangan seperti Tenun, potensi pariwisata budaya serta potensi pariwisata alam seperti Tanjung Bastian, Gua Maria Bitauani, dan Pantai Wini.

Memiliki posisi wilayah berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga ditetapkan Pengembangan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan serta menuju Kawasan pertahanan dan keamanan. Serta ditetapkan jarak bebas aman kawasan khusus militer dengan guna lahan lainnya terutama permukiman. Sejalan hal tersebut untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara, dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2020. PLBN Napan merupakan salah satu dari 18 PLBN terpadu yang tersebar di seluruh kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain. Selain sebagai fungsi pertahanan PLBN Napan sekaligus sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, sehingga mampu mengurangi disparitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada dibagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Dimana:

1. Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
2. Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste.
3. Kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, da/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
 - i. Kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
 - ii. Seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
4. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.

Wilayah Timor Tengah Utara yang termasuk kedalam kawasan perbatasan adalah 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis.

C. Potensi Sumber Daya Alam

- 1) Pertanian
Komoditi tanaman pangan yang tersedia di Kabupaten Timor Tengah Utara



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.4-

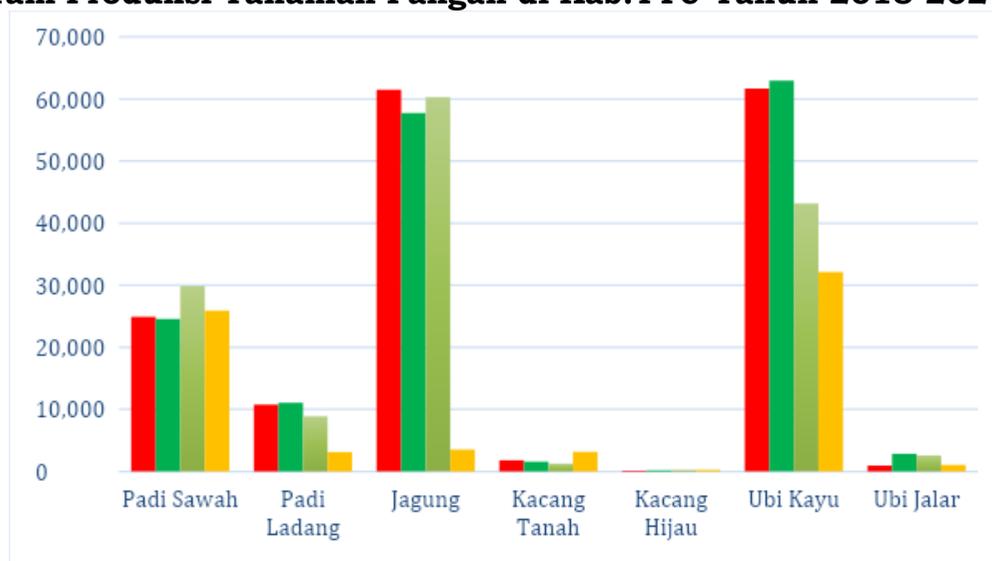
yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dalam kurun waktu 2018-2021, produksi padi sawah tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 29.848 ton. Produksi padi ladang tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebanyak 11.060 ton. Produksi jagung tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebanyak 61.469 ton. Produksi kacang tanah tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 3.162 ton. Produksi kacang hijau tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 264,65 ton. Produksi ubi kayu tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebanyak 62.944 ton. Produksi ubi jalar tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebanyak 2.834 ton. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2
Produksi Tanaman Pangan di Kab.TTU Tahun 2018-2021 (ton)**

No	Tanaman Pangan	Produks (Ton)				Jumlah
		2018	2019	2020	2021	
1	Padi Sawah	24.927	24.535	29.848	25.907	105.217
2	Padi Ladang	10.761	11.060	8.881	3.120	33.822
3	Jagung	61.469	57.711	60.306	3.519	183.005
4	Kacang Tanah	1.791	1.572	1.260	3.162	7.785
5	Kacang Hijau	135,09	197,50	264,65	252,80	850,04
6	Ubi Kayu	61.710	62.944	43.124	32.089	199.867
7	Ubi Jalar	934,80	2.834	2.584	1.041,20	7.394
Total		161.727,89	160.853,50	146.267,65	69.091,00	537.940

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten TTU, 2022

**Gambar 2. 1
Diagram Produksi Tanaman Pangan di Kab.TTU Tahun 2018-2021 (ton)**



**Gambar 2. 2
Potensi Pertanian (Tanaman Pangan) di Kab.TTU**





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.5-

2) Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 2021-2023 terdiri dari Kelapa, Kopi, dan Tembakau. Produksi perkebunan tertinggi adalah tanaman Kelapa, dengan jumlah produksi pada Tahun 2021 sebesar 859 ton, kemudian meningkat menjadi 1.025,66 ton pada Tahun 2022, dan mengalami penurunan menjadi 931,60 ton pada Tahun 2023. Produksi kopi mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir, dimana pada Tahun 2021 produksi mencapai 208,9 ton, menurun menjadi 164 ton pada Tahun 2022 dan semakin menurun pada Tahun 2023 menjadi 26 ton. Komoditi Tembakau mengalami peningkatan jumlah produksi pada Tahun 2023 menjadi sebesar 26ton, yang mana sebelumnya memiliki produksi sebesar 9,35 ton pada Tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3

Produksi Perkebunan di Kabupaten Timor Tenga Utara Tahun 2021-2023 (ton)

No.	Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
1	Miomaffo Barat	2021	34	24	-
		2022	31,66	107	2,3
		2023	25,1	5	2,5
2	Miomaffo Tengah	2021	16	13	-
		2022	16	13	2,25
		2023	14	5	2
3	Musi	2021	23	14	-
		2022	23	14	-
		2023	20	4	2
4	Mutis	2021	17	12	-
		2022	17	12	1,6
		2023	18,25	2	1
5	Miomaffo Timur	2021	42	11	-
		2022	42	-	2,2
		2023	43	-	2
6	Noemuti	2021	70	12	-
		2022	70	1	-
		2023	80	-	-
7	Bikomi Selatan	2021	33	7	-
		2022	33	-	1
		2023	7,5	-	1
8	Bikomi Tengah	2021	33	6	-
		2022	30	3	-
		2023	32	10	-
9	Bikomi Nilulat	2021	21	7	-
		2022	21	7	-
		2023	22	-	2
10	Bikomi Utara	2021	40	9	-
		2022	40	2	-
		2023	162,7	-	0,1
11	Naibenu	2021	19	5	-
		2022	19	1	-
		2023	17	-	0,2
12	Noemuti Timur	2021	56	14	-
		2022	56	4	-
		2023	57	-	-

No	Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
13	Kota Kefamenanu	2021	33	8	-
		2022	33	-	-
		2023	30	-	-
14	Insana	2021	55	8	-
		2022	55	-	-
		2023	51	-	-
15	Insana Utara	2021	33	6	-
		2022	33	-	-
		2023	32	-	0,1
16	Insana Barat	2021	39	3,6	-
		2022	39	-	-
		2023	35	-	0,1
17	Insana Tengah	2021	24	3	-
		2022	24	-	-
		2023	25	-	2
18	Insana Fafinesu	2021	41	8	-
		2022	41	-	-
		2023	43	-	2
19	Biboki Selatan	2021	44	4	-
		2022	44	-	-
		2023	45	-	3
20	Biboki Tanpah	2021	28	2	-
		2022	28	-	-
		2023	30	-	4
21	Biboki Moenleu	2021	36	3	-
		2022	36	-	-
		2023	36	-	-
22	Biboki Utara	2021	39	12,3	-
		2022	39	-	-
		2023	30	-	-
23	Biboki Anleu	2021	53	10	-
		2022	53	-	-
		2023	50	-	-
24	Biboki Feotleu	2021	30	7	-
		2022	30	-	-
		2023	28	-	-

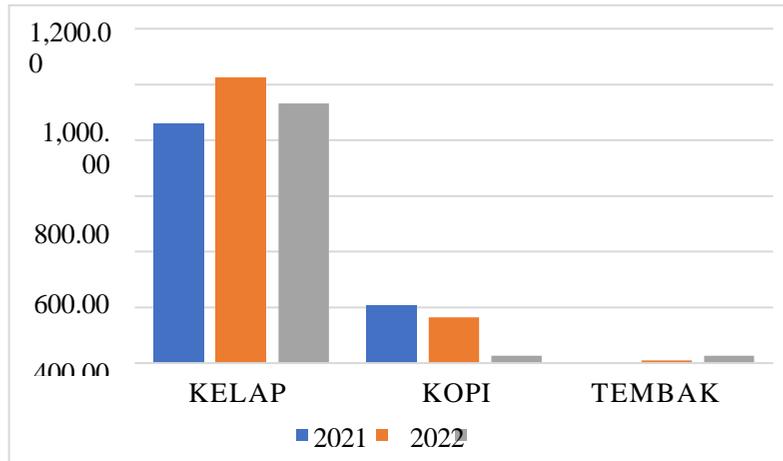
Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.6-

Gambar 2. 3
Diagram Produksi Perkebunan di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (ton)



Gambar 2. 4
Potensi Perkebunan di Kab.TTU



Produksi dan Hasil Pengolahan Kopi Kec. Bikomi Nilulat

3) Buah – Buah

Komoditi buah-buahan di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari Mangga, Jeruk Siam, Pisang, Pepaya, Salak, Alpukat dan Nenas. Dalam kurun waktu Tahun 2021-2023, beberapa produksi buah-buahan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan. Alpukat memiliki memiliki produksi tertinggi pada Tahun 2021 yakni sebesar 190.699,34 ton, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.070 ton pada Tahun 2022, dan terus menurun menjadi 689,86 ton pada Tahun 2023. Buah-buahan dengan produksi terendah dimiliki oleh buah Salak yakni sebesar 25 ton pada Tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Produksi Buah-Buahan di Kab.TTU Tahun 2019-2023 (kuintal)

No	Kecamatan	Tahun	Mangga	Jeruk Siam	Pisang	Pepaya	Salak	Alpukat	Nanas
1	Miomaffo Barat	2021	4.880,00	45.210,70	68.822,00	-	-	190.533,00	-
		2022	1.906,00	13.605,00	1.393,00	-	-	931,00	-
		2023	558,66	2.409,66	1.076,36	-	-	577,26	-
2	Miomaffo Tengah	2021	168,04	-	140	51,89	-	8,24	62,80
		2022	5	-	56	60	-	2,00	-
		2023	10	-	120	140	-	2,20	4,00
3	Musi	2021	-	-	-	-	-	-	-
		2022	5	-	10	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.7-

No	Kecamatan	Tahun	Mangga	Jeruk Siam	Pisang	Pepaya	Salak	Alpukat	Nanas
4	Mutis	2021	42,14	-	595,5	230	-	3,00	85,00
		2022	30	-	520	1	-	11,00	50,00
		2023	35,48	0,5	1.089,52	1.107,68	-	1,18	161,54
5	Miomaffo Timur	2021	7,84	3	36	63	-	-	7,00
		2022	44	24	40	-	-	-	15,00
		2023	4	4	160	82	-	-	10,00
6	Noemuti	2021	-	6,5	184	294	-	77,20	170,00
		2022	130	48	61	81	-	54,00	15,00
		2023	56,5	81,2	108	133,8	-	47,80	15,00
7	Bikomi Selatan	2021	-	102	63	-	-	-	-
		2022	-	-	754	404	-	-	36,00
		2023	1,9	-	537,76	301,01	-	-	12,36
8	Bikomi Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-
9	Bikomi Nilulat	2021	141,76	-	618	310	-	26,00	-
		2022	800	300	350	150	-	12,00	8,00
		2023	80	100	104	70	-	5,50	-
10	Bikomi Utara	2021	316,6	110	850	635	-	33,40	39,00
		2022	78	25	500	465	-	17,00	100,00
		2023	227	20	328	489,12	-	36	220,25
11	Naibenu	2021	2	975	20	10	-	-	10
		2022	4	-	30	2	-	-	2
		2023	11,52	16	177	94,15	-	4,7	31,06
12	Noemuti Timur	2021	-	-	32,52	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	12,24	-	-	-	-
13	Kota Kefamenanu	2021	146	-	224	177	-	-	3
		2022	30	1	124	50	25	1	1
		2023	30,6	-	204	77	-	-	-
14	Insana	2021	-	-	-	-	-	-	-
		2022	32	19	235	28	-	4	29
		2023	-	-	-	-	-	-	-
15	Insana Utara	2021	5	-	16	88	-	1,3	-
		2022	32	-	52	79	-	4	-
		2023	24,4	-	88	84	-	0,4	-
16	Insana Barat	2021	3,5	14,03	120	7,5	-	-	-
		2022	10	-	30	1	-	-	1
		2023	5	-	-	-	-	-	-
17	Insana Tengah	2021	-	-	-	200	-	2	-
		2022	180	-	203	307	-	-	40
		2023	325	22	-	490	-	12,42	400
18	Insana Fafinesu	2021	74,3	790,68	96	263	-	10,7	129
		2022	-	243	279	230	-	23	10
		2023	-	64,12	99	70	-	2,4	20
19	Biboki Selatan	2021	40	-	22	5	-	4,5	10



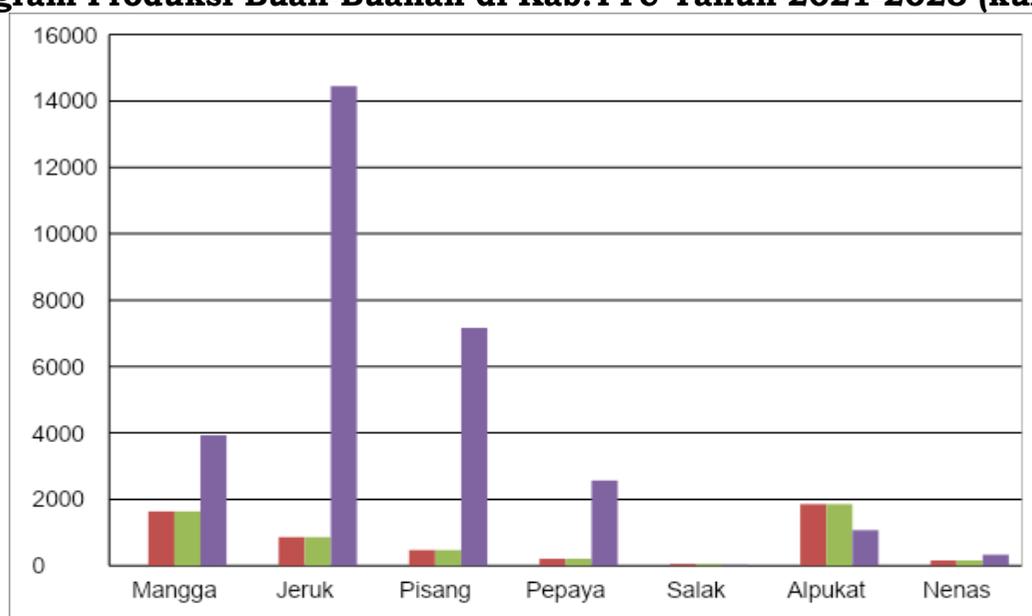
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.8-

No	Kecamatan	Tahun	Mangga	Jeruk Siam	Pisang	Pepaya	Salak	Alpukat	Nanas
		2022	300	180	587	14	-	-	15
		2023	3,5	1,8	41,96	96,53	-	-	8,2
20	Biboki Tanpah	2021	-	-	90	24,5	-	-	-
		2022	80	-	320	164	-	-	-
		2023	11	-	208	300	-	-	-
21	Biboki Moenleu	2021	2,5	-	37,5	10,6	-	-	-
		2022	40	-	170	30	-	-	-
		2023	300	-	430	128,38	-	-	-
22	Biboki Utara	2021	1.089,00	-	2.983,36	3.249,40	-	-	103
		2022	230	-	1.450,00	500	-	12	8
		2023	215,4	-	-	-	-	-	-
23	Biboki Anleu	2021	36,74	-	206,12	110,53	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-
24	Biboki Feotleu	2021	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024

Gambar 2. 5
Diagram Produksi Buah-Buahan di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (kuintal)



Komoditi tanaman sayur di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain Bawang Merah, Cabai Merah, Cabe Keriting, Cabe Rawit, Kentang Kubis, Tomat, Bawang Putih, Petsai, Dan Kacang Panjang. Dalam kurun waktu Tahun 2021-2023, tanaman Petai memiliki produksi tertinggi pada Tahun 2022 yakni sebesar 593 kuintal, dan tanaman Cabai Rawit memiliki jumlah tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 353,98 kuintal. Tanaman Cabai Besar memiliki jumlah produksi terendah dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir, dimana pada Tahun 2022 dengan jumlah produksi sebesar 25 kuintal dan menurun menjadi 24,8 kuintal pada Tahun 2023. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.9-

**Tabel 2. 5
Produksi Tanaman Sayur di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023
(kuintal)**

No	Kecamatan	Tahun	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Petsai	Kacang Panjang
1	Miomaffo Barat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	1	221	192	-	4	-	72	-	-
		2023	8	-	6	-	56	12	-	216	10	-
2	Miomaffo Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2023	-	-	-	2	-	-	5,12	-	1,48	0,12
3	Musi	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
		2023	2	1	-	4	-	-	5,5	1	1	4
4	Mutis	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-
		2023	0,14	-	-	127,68	0,3	-	-	0,44	0,51	-
5	Miomaffo Timur	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	6	-	-	4	-	-	-	3	3	-
		2023	6	-	-	-	-	-	1,5	2	7	-
6	Noemuti	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	2	2	1	-	1	-	-	2	2
		2023	-	2	0,8	-	-	1,8	0,9	-	1,5	-
7	Bikomi Selatan	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	40	-	-	-	-	173	10
		2023	-	-	0,7	0,8	-	-	9,2	-	75,2	4,6
8	Bikomi Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,14
9	Bikomi Nilulat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	2	-	-	9	-	-	-	1	5	-
		2023	1	-	-	5,4	1	-	4,75	1,25	4	-
10	Bikomi Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Naibenu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	2,6	-	-	1,2	-	0,7	-
12	Noemuti Timur	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kota Kefamenanu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	2	-	4	24	-	-	-	1	14	4
		2023	0,4	-	-	104	-	5	48	-	7	19
14	Insana	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	3	4	25	-	5	-	-	9	6
		2023	-	12,8	6,2	9,2	-	-	8,4	-	-	33,6
15	Insana Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	2	-	62	-	-	-	-	5	5
		2023	2	6	-	58	-	-	12	-	-	1
16	Insana Barat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	8	-	17	-	-	3	1
		2023	0,2	-	-	9,5	-	5,24	0,83	-	1,21	0,6
17	Insana Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	40	-	-	-	-	114	-
		2023	-	-	-	-	-	55	-	-	145,7	-
18	Insana Fafinesu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
19	Biboki Selatan	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
		2023	-	3	3,4	-	-	-	-	-	-	1
20	Biboki Tanpah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-
		2023	4	-	-	19,2	-	2	4	-	3	-
21	Biboki Moenleu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2023	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
22	Biboki Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	6	-	-	-	-	-	-	-	255	-



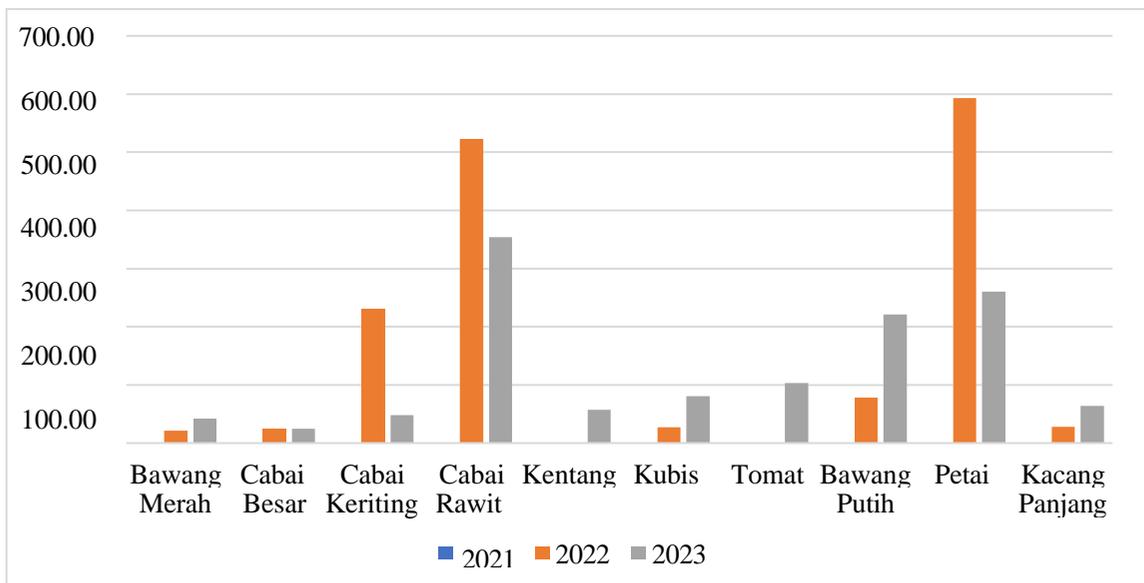
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.10-

No	Kecamatan	Tahun	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Petsai	Kacang Panjang
23	Biboki Anleu	2023	17,4	-	-	4,6	-	-	2,01	-	1,7	-
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
24	Biboki Feotleu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten TTU, 2022 dan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2023

Gambar 2. 6
Diagram Produksi Tanaman Sayur di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (kuintal)



Gambar 2. 7
Potensi Tanaman Sayur di Kab.TTU



Tanaman Sayur
Kec. Miomaffo Barat



Tanaman Sayur
Kec. Miomaffo Barat



Tanaman Sayur
Kec. Insana Tengah

4) **Tanaman Biofarmaka**

Komoditi tanaman biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 terdiri dari Jahe, Laos, dan Kencur. Pada Tahun 2023, tanaman jahe memiliki jumlah produksi tertinggi yakni sebesar 30.100 kg, dimana kondisi ini meningkat dari Tahun sebelumnya yaitu 4.704 Kg. Tanaman Laos memiliki jumlah produksi yang persisten yakni pada Tahun 2021 sebesar 4.294 Kg, meningkat pada Tahun 2022 menjadi 4.953 Kg, dan mencapai 12.645 Kg pada Tahun 2023. Tanaman kencur mengalami peningkatan menjadi 12.473 Kg, dimana pada



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.11-

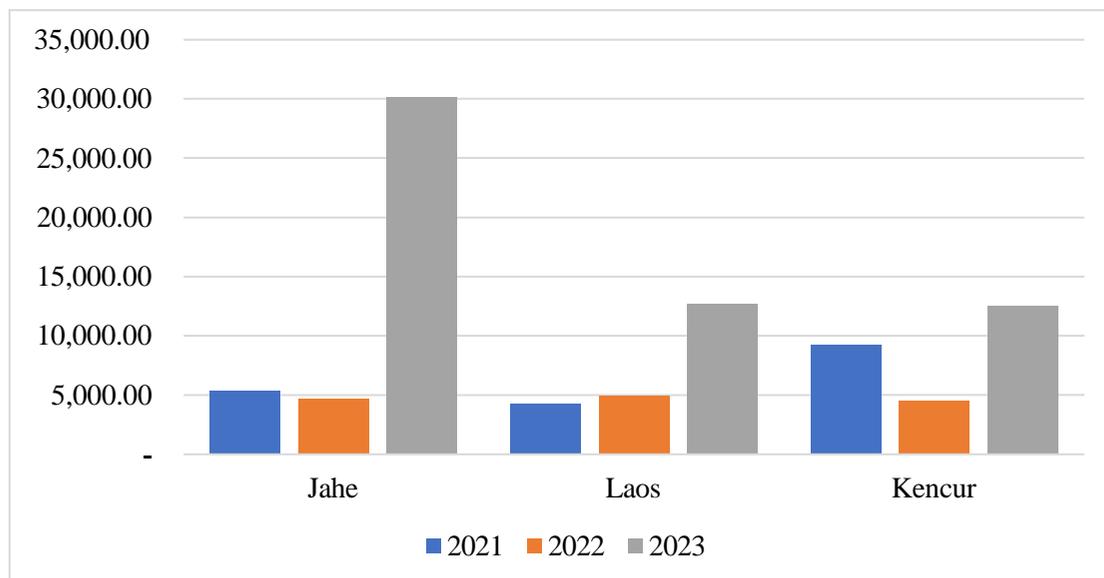
Tahun sebelumnya memiliki jumlah produksi sebesar 4.477 Kg. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 6
Produksi Tanaman Biofarmaka di Kab.TTU 2021-2023 (kg)**

No.	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur	No.	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur
1	Miomaffo Barat	2021	4.166,00	4.249,00	9.163,00	13	Kota Kefamenanu	2021	-	-	-
		2022	48	340	255			2022	17	3	-
		2023	7.738,00	3.064,00	10.263,00			2023	3	2	1
2	Miomaffo Tengah	2021	876	-	-	14	Insana	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
3	Musi	2021	-	-	-	15	Insana Utara	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	15	177	-
		2023	1.100,00	1.959,00	3			2023	100	93	-
4	Mutis	2021	-	-	-	16	Insana Barat	2021	-	-	-
		2022	1.168,00	2.900,00	2.010,00			2022	121	164	53
		2023	2.236,00	2.332,00	1.474,00			2023	39	48	47
5	Miomaffo Timur	2021	-	-	-	17	Insana Tengah	2021	-	-	-
		2022	2.600,00	80	139			2022	-	1.200,00	-
		2023	17.680,00	5.000,00	636			2023	400	-	-
6	Noemuti	2021	58	40	-	18	Insana Fafinesu	2021	-	-	-
		2022	22	39	-			2022	-	-	-
		2023	44	68	-			2023	-	-	-
7	Bikomi Selatan	2021	-	-	-	19	Biboki Selatan	2021	-	-	-
		2022	225	-	-			2022	-	-	-
		2023	475	-	-			2023	-	-	-
8	Bikomi Tengah	2021	-	-	-	20	Biboki Tanpah	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
9	Bikomi Nilulat	2021	2	2	-	21	Biboki Moenleu	2021	230	-	70
		2022	-	-	-			2022	30	50	20
		2023	-	-	-			2023	225	25	15
10	Bikomi Utara	2021	-	-	-	22	Biboki Utara	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	458	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
11	Naibenu	2021	-	-	-	23	Biboki Anleu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
12	Noemuti Timur	2021	-	3	-	24	Biboki Feotleu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	60	54	-

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024

**Gambar 2. 8
Diagram Produksi Tanaman Biofarmaka di Kab.TTU Tahun 2021-2023 (kg)**





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.12-

5) **Peternakan**

Populasi ternak dan unggas di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri atas sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam pedaging, itik dan bebek. Dalam kurun waktu 2019-2021, populasi ternak tertinggi yaitu sapi potong Tahun 2020 sebanyak 136.659 ekor. Populasi unggas tertinggi dalam kurun waktu 2019-2021 yaitu ayam kampung Tahun 2021 sebanyak 269.708 ekor. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.13-

**Tabel 2. 7
Populasi Ternak dan Unggas di Kab.TTU Tahun 2019-2021 (ekor)**

No.	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)										
			Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik	Bebek	Jumlah
1	Miomaffo Barat	2019	5.221		192	122		2.684	4.929	600	4.929	600	11.058
		2020	5.517		211	130		2.963	5.440	600	4.929	600	11.569
		2021	5.557		244	163		3.197	5.864				5.864
2	Miomaffo Tengah	2019	2.029	10		484		1.341	4.434	400	4.434	400	9.668
		2020	2.144		10	508		1.480	4.894	400	4.434	400	10.128
		2021	216		12	589		1.594	5.271				5.271
3	Musi	2019	1.708			483		1.632	4.214	400	4.214	400	9.228
		2020	2.135			507		1.802	4.651	400	4.214	400	9.665
		2021	2.151			587		1.941	5.009				5.009
4	Mutis	2019	9.131	72	432	4.480		6.646	10.811	100	10.811	100	21.822
		2020	9.567	59	462	4.708		7.336	11.933	100	10.811	100	22.944
		2021	9.637	63	535	5.477		7.913	12.864				12.864
5	Miomaffo Timur	2019	4.623	10	54	1.846		3.261	8.341	1.200	8.341	1.200	19.082
		2020	4.885	10	58	1.940		3.601	9.208	1.200	8.341	1.200	19.949
		2021	4.921	10	67	2.249		388	9.918				9.918
6	Noemuti	2019	4.708	15	23	652		3.399	10.290	800	10.290	800	22.180
		2020	4.974	15	26	684		3.752	11.358	800	10.290	800	23.248
		2021	501	15	30	793		4.041	12.232				12.232
7	Biboki Selatan	2019	4.592	38	25	649	32	3.315	7.183	700	7.183	700	15.766
		2020	4.853	38	29	681	32	3.659	7.929	700	7.183	700	16.512
		2021	4.889	38	34	790	32	3.941	8.539				8.539
8	Biboki Tengah	2019	2.182			779		1.248	6.701	400	6.701	400	14.202
		2020	2.305			819		1.378	7.397	400	6.701	400	14.898
		2021	2.322			948		1.484	7.966				7.966
9	Bikomi Nilulat	2019	2.318			822		1.769	5.613	100	5.613	100	11.426
		2020	2.450			864		1.952	6.195	100	5.613	100	12.008
		2021	2.468			1		2.102	6.671				6.671
10	Bikomi Utara	2019	5.392		21	5.962	12	4.497	10.260	5.300	10.260	5.300	31.120
		2020	5.696		25	6.265	12	4.963	11.326	5.300	10.260	5.300	32.186
		2021	5.738		29	7.254	12	5.345	12.198	7.000			19.198



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.14-

No.	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)										
			Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik	Bebek	Jumlah
11	Naibenu	2019	2.699	4		1.666		2.823	7.828	100	7.828	100	15.856
		2020	2.852		4	1.751		3.116	8.642	100	7.828	100	16.670
		2021	2.873		5	2.027		3.356	9.307				9.307
12	Noemuti Timur	2019	3.775			125		1.504	2.856	300	2.856	300	6.312
		2020	3.995			133		1.662	3.152	300	2.856	300	6.608
		2021	4.024			154		179	3.394				3.394
13	Kota Kefamenanu	2019	3.930	18	85	365		5.004	15.992	15.000	15.992	15.000	61.984
		2020	4.123	18	93	385		5.523	17.653	15.000	15.992	15.000	63.645
		2021	4.153	16	108	451		595	19.013	40.000			59.013
14	Insana	2019	9.538	42	28	886		4.872	22.938	4.000	22.938	4.000	53.876
		2020	10.076	42	32	930		5.378	25.319	4.000	22.938	4.000	56.257
		2021	1.015	43	37	1.078		5.792	27.267				27.267
15	Insana Utara	2019	6.399	75	95	4.072		4.123	8.037	2.000	8.037	2.000	20.074
		2020	6.761	74	104	4.280		4.551	8.871	2.000	8.037	2.000	20.908
		2021	681	74	120	4.961		4.904	9.556				9.556
16	Insana Barat	2019	5.661		16	1.267		3.474	10.170	200	10.170	200	20.740
		2020	5.982		16	1.331		3.835	11.226	200	10.170	200	21.796
		2021	6.026		19	1.542		413	12.090				12.090
17	Insana Tengah	2019	6.236	32	19	1.282		2.827	10.408	600	10.408	600	22.016
		2020	6.589	32	44	1.347		3.120	11.488	600	10.408	600	23.096
		2021	6.637	32	51	1.562		3.361	12.373				12.373
18	Insana Fafinesu	2019	4.866			719		1.011	2.833	300	2.833	300	6.266
		2020	5.141			754		1.116	3.127	300	2.833	300	6.560
		2021	5.179			873		1.202	3.367				3.367
19	Biboki Selatan	2019	7.142	113	195	2.406		4.573	7.879	500	7.879	500	16.758
		2020	7.493	112	213	2.528		5.047	8.697	500	7.879	500	17.576
		2021	7.548	114	247	2.939		5.441	9.372				9.372
20	Biboki Tanpah	2019	4.007	19	16	998		2.016	9.754	400	9.754	400	20.308
		2020	4.234	19	16	1.049		2.225	10.767	400	9.754	400	21.321
		2021	4.265	19	19	1.215		2.397	11.595				11.595
21	Biboki Moenleu	2019	8.844	19	19	4.045		5.502	8.405	300	8.405	300	17.410
		2020	9.290	19	19	4.251		6.074	9.277	300	8.405	300	18.282



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.15-

No.	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)										
			Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik	Bebek	Jumlah
		2021	9.358	19	22	4.922		6.542	9.991				9.991
22	Biboki Utara	2019	6.929		22	2.675		4.010	22.373	500	22.373	500	45.746
		2020	7.321		26	2.811		109	24.695	500	22.373	500	48.068
		2021	7.375		30	3.256		118	26.595				26.595
		2019	13.273	364	27	9.269		9.023	19.656	600	19.656	600	40.512
23	Biboki Anleu	2020	13.922	361	31	9.741		9.960	21.696	600	19.656	600	42.552
		2021	14.024	353	36	11.278		10.727	23.365				23.365
		2019	4.122	12	10	1.026		1.572	4.956	200	4.956	200	10.312
24	Biboki Feotleu	2020	4.354	12	10	1.065		1.734	5.470	200	4.956	200	10.826
		2021	4.386	12	12	1.233		1.868	5.891	0	0	0	5.891
		2019	129.325	843	1.279	47.080	44	82.126	226.861	35.000	226.861	35.000	523.722
Jumlah		2020	136.659	811	1.429	49.462	44	86.336	250.411	35.000	226.861	35.000	547.272
Jumlah		2021	115.944	808	1.657	56.342	44	78.841	269.708	47.000	-	-	316.708

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten TTU, 2022

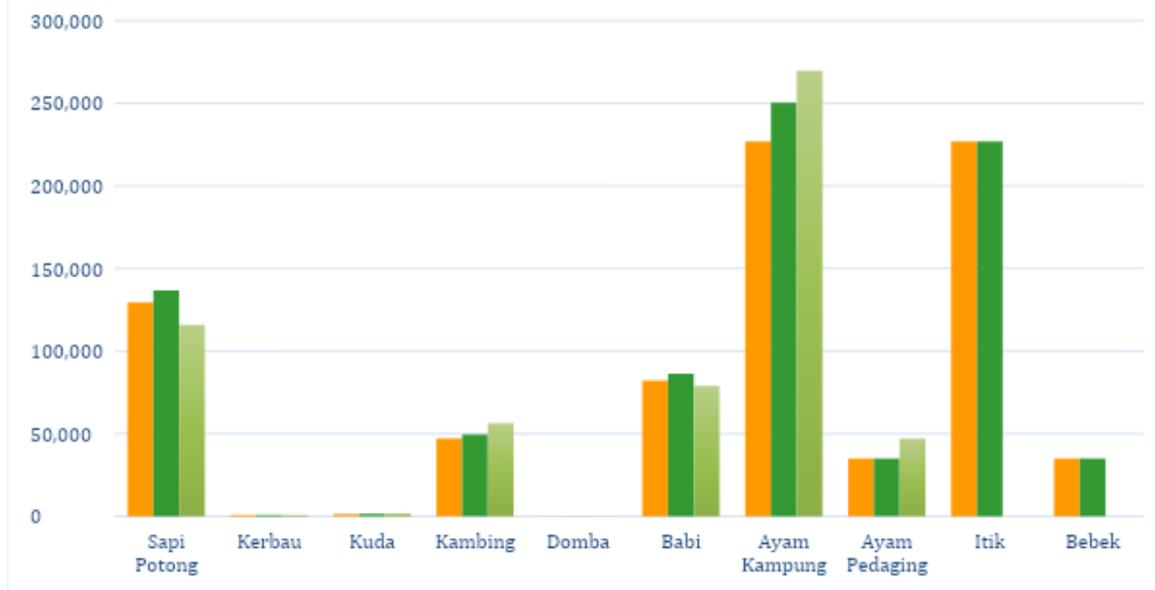


**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.16-

Gambar 2. 9

Diagram Populasi Ternak dan Unggas di Kab.TTU Tahun 2019-2021 (ekor)



6) Perikanan

Dalam kurun waktu 2019-2022, produksi perikanan tertinggi terjadi Tahun 2020 sebanyak 847,775 ton. Jenis ikan dengan produksi tertinggi yaitu tembang sebanyak 1030,22 ton. Jenis ikan dengan produksi terendah yaitu kurisi sebanyak 4,6 ton. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 8
Produksi Perikanan di Kab.TTU Tahun 2019-2022**

No	Perikanan	Produksi (Ton)				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Cakalang	2,1	2,25	2,2	0	6,55
2	Tongkol	142,3	192,2	150,3	192,2	677
3	Tembang	243,55	265,075	256,52	265,075	1030,22
4	Kombong	103,33	107,33	107,33	107,33	425,31
5	Layang	225,3	209,05	205,3	209,02	848,67
6	Cendro	16,81	16,875	15,8	0	49,485
7	Julung- Julung	11,3	10,3	10,3	0	31,9
8	Kerapu	1,5	1,275	1,465	0	4,24
9	Kurisi	1,35	1,875	1,375	0	4,6
10	Ekor Kuning	11,7	15,775	13,755	0	41,23
11	Ikan Lainnya	14,79	25,76	23,79	74,12	138,47
Jumlah		774,02	847,775	788,125	847,745	3.257,67

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten TTU, 2022 dan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2023

7) Industri

Kegiatan industri di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengalami perkembangan yaitu Industri Kecil Menengah (IKM). Perkembangan tersebut terjadi karena IKM dibangun menggunakan modal relatif kecil-besar, penggunaan teknologi yang masih terbatas, tenaga kerja berkisar 10-200 orang, pemasaran hanya skala lokal dan skal regional. Jumlah IKM di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2022 sebanyak 200 unit. Kecamatan Kota Kefamenanu memiliki jumlah IKM tertinggi yaitu 65 unit. Kecamatan Naibenu memiliki jumlah IKM terendah yaitu 1 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.17-

**Tabel 2. 9
Data Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
2022**

No	Kecamatan	Jumlah IKM (unit)	Jenis IKM
1	Biboki Anleu	23	garam yodium, beras, krupuk jagung, aneka kripik, garam
2	Biboki Moenleu	9	beras, dendeng ikan
3	Biboki Utara	2	keripik pisang
4	Bikomi Selatan	8	beras, kripik, stik jagung, aneka kue & bakso, aneka kripik, kopi, VCO, porang
5	Bikomi Tengah	2	tempe, aneka kripik
6	Bikomi Utara	22	keripik pisang, aneka keripik, rempeyek, camilan
7	Insana	2	garam yodium, keripik pisang
8	Insana Barat	9	stik jagung, krupuk jagung, tortila, aneka keripik, jamur kelor
9	Insana Fafinesu	2	aneka keripik
10	Insana Tengah	2	gula merah, beras
11	Insana Utara	15	garam yodium, abon ikan, beras, krupuk jagung, garam, aneka camilan
12	Kota Kefamenanu	65	abon, dendeng, roti, beras, tempe, tahu, garam yodium, manisan, keripik, aneka kue kering, manisan asam, dodol, tengteng, donat, kacang, kacang telur, aneka cake, kue bahan lokal, emping jagung, gula merah, vitalok, aneka keripik, fermentasi anggur pisang, aneka camilan, sambal lu'at, kue rambut, cuka apel, VCO, abon ikan, keripik pisang, marning jagung
13	Miomaffo Barat	7	keripik talas, herbal sarang walet, aneka keripik
14	Miomaffo Tengah	3	aneka kue basah, dodol asam, keripik pisang
15	Miomaffo Timur	9	garam yodium, padi, aneka keripik, VCO
16	Musi	6	keripik pisang, kacang-kacangan,aneka keripik
17	Naibenu	1	jamu kelor
18	Noemuti	9	garam yodium, manisan asam, beras, garam, anggur pisang
19	Noemuti Timur	4	Beras
20	Biboki Feotleu	-	-
21	Biboki Selatan	-	-
22	Biboki Tanpah	-	-
23	Bikomi Nilulat	-	-
24	Mutis	-	-
Jumlah		200	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Timor Tengah Utara, 2022

8) Pariwisata

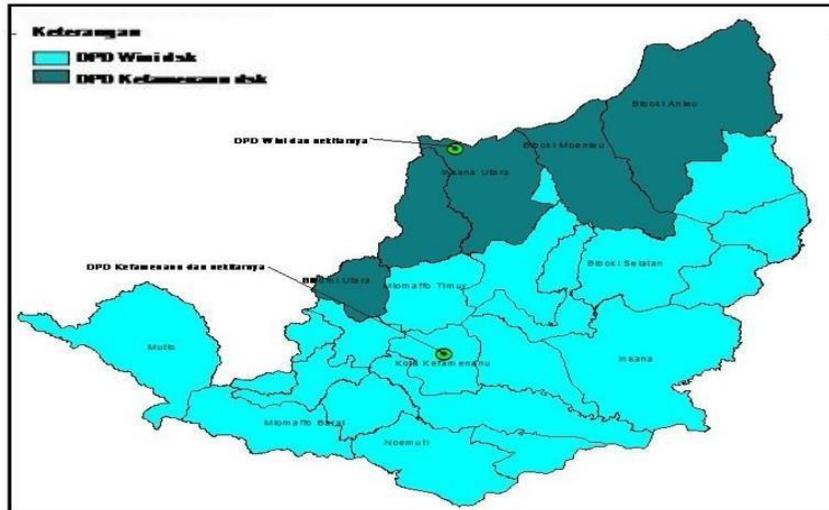
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2021 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2025. Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara, telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 2 Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD), dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).



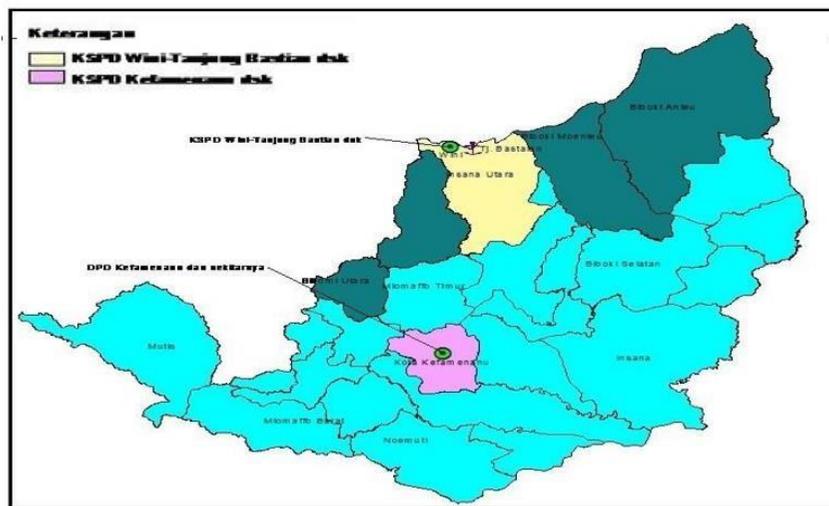
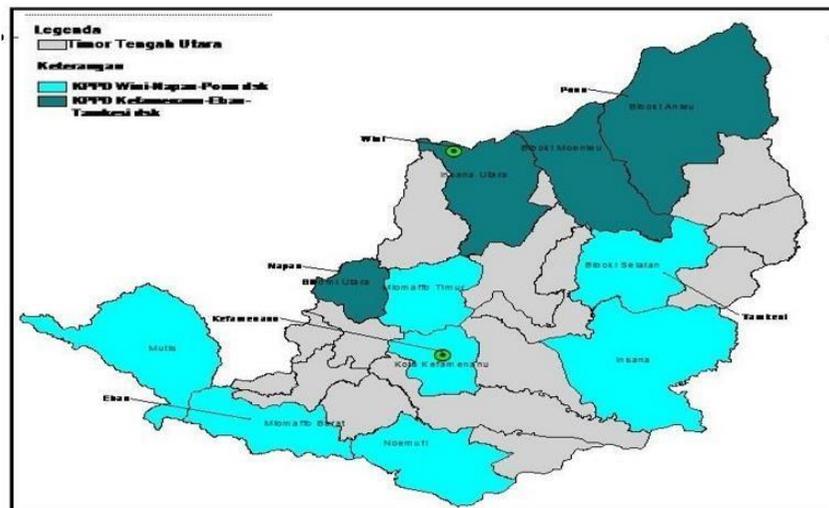
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.18-

**Peta 2.3
Peta DPD di Kab. Timor Tengah Utara**



**Peta 2.4
Peta KPPD di Kab. Timor Tengah Utara**



Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara juga menjabarkan tentang Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) yang terdiri atas DTWD alam, DTWD



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.19-

budaya dan DTWD buatan manusia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10
Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Objek Wisata	Kecamatan	Jenis DTWD
1	Air Terjun Pah Koto	Mutis	DTWD Alam
2	Air Mutis Babnain	Mutis	DTWD Alam
3	Puncak Tunnoer		DTWD Alam
4	Pantai Tanjung Bastian	Insana Utara	DTWD Alam
5	Pantai Oebubun	Biboki Moenleu	DTWD Alam
6	Faularan	Biboki Anleu	DTWD Alam
7	Perbukitan Manufonu	Insana Utara	DTWD Alam
8	Kampung Adat Maslete	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
9	Taman Doa Bukit Neonat	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
10	Upacara Kure Neomuti	Noemuti	DTWD Budaya
11	Wisata Sejarah Kota Kefamenanu di Noetoko	Miomaffo Barat	DTWD Budaya
12	Gua Maria Bitauni	Insana	DTWD Budaya
13	Istana Raja Oelolok	Insana	DTWD Budaya
14	Kampung Adat Tamkesi	Biboki Selatan	DTWD Budaya
15	Pos Lintas Batas Negara Wini	Insana Utara	DTWD Buatan Manusia
16	Perlintasan Batas Napan	Bikomi Utara	DTWD Buatan Manusia
17	Kolam Renang Taekas	Miomaffo Timur	DTWD Buatan Manusia
18	Kolam Renang Oeluan	Noemuti	DTWD Buatan Manusia

Sumber: PERDA No. 9 Tahun 2021 tentang RIPPARDA Kabupaten TTU Tahun 2022-2025

Gambar 2. 10
Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) Alam



Gambar 2. 11
Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) Budaya

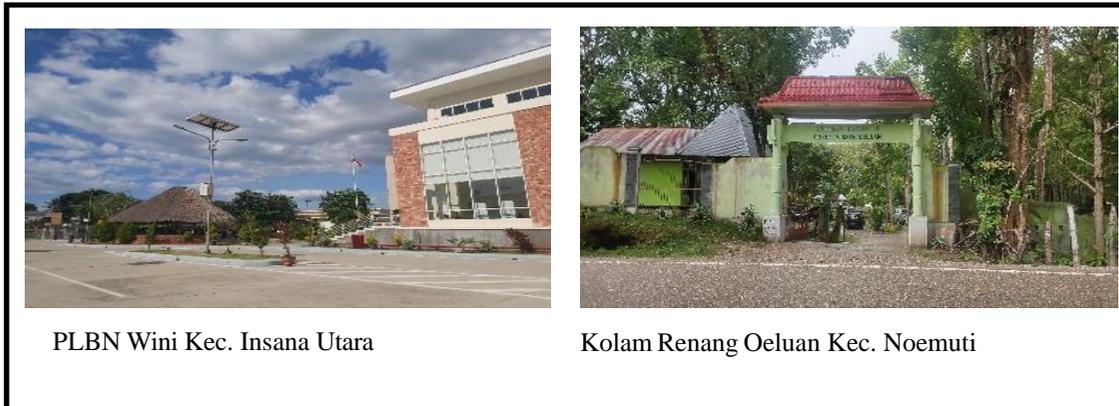




**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.20-

Gambar 2. 12
Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) Buatan Manusia



PLBN Wini Kec. Insana Utara

Kolam Renang Oeluan Kec. Noemuti

D. Kualitas Lingkungan Hidup

1) Kehutanan

Klasifikasi kawasan hutan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 41.669,27 Ha atau sekitar 37,44% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara.

Cagar Alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya memiliki kekhasan satwa, tumbuhan dan ekosistem atau berupa ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar Alam di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 2.426,83 Ha atau sekitar 2,18% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan. Hutan produksi di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 12.981,86 Ha atau sekitar 11,67% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Hutan produksi di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 53.909,22 atau sekitar 48,44% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 300,78 Ha atau sekitar 0,27% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel Luas Kawasan Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara berikut.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

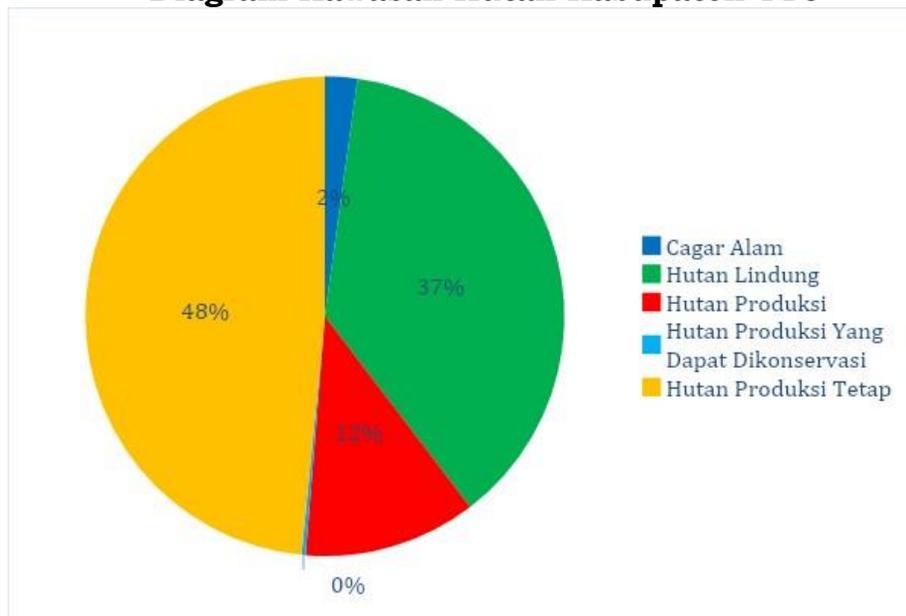
-II.21-

**Tabel 2. 11
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten TTU**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Cagar Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi	Hutan Produksi Tetap
1	Biboki Anleu	-	695,37	428,13	-	7.525,01
2	Biboki Feotleu	-	965,80	-	-	8.781,58
3	Biboki Moenleu	-	-	-	-	5.991,19
4	Biboki Selatan	-	4.035,97	-	-	7.819,84
5	Biboki Tanpah	-	-	-	-	2.597,59
6	Biboki Utara	-	123,66	-	-	2.064,48
7	Bikomi Nilulat	-	669,70	-	-	0,00
8	Bikomi Selatan	-	72,33	6.830,20	-	-
9	Bikomi Tengah	-	51,23	-	-	-
10	Bikomi Utara	-	1.810,21	-	-	-
11	Insana	-	518,93	-	300,78	5.892,47
12	Insana Barat	-	3.907,22	0,00	-	-
13	Insana Fafinesu	-	5.145,43	-	-	190,29
14	Insana Tengah	-	6.190,81	-	-	1.967,64
15	Insana Utara	-	1.051,37	-	-	8.943,06
16	Miomaffo Barat	639,66	3.293,72	-	-	388,84
17	Miomaffo Tengah	-	-	-	-	1.086,00
18	Miomaffo Timur	-	4.474,22	-	-	-
19	Musi	-	5,34	-	-	574,11
20	Mutis	1.787,17	3.110,11	-	-	-
21	Naibenu	-	3.866,62	-	-	87,13
22	Noemuti	-	-	4.136,56	-	-
23	Noemuti Timur	-	-	1.199,43	-	-
24	Kota Kefamenanu	-	1.681,23	387,53	-	-
Kabupaten TTU		2.426,83	41.669,27	12.981,86	300,78	53.909,22

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2022

**Gambar 2. 13
Diagram Kawasan Hutan Kabupaten TTU**

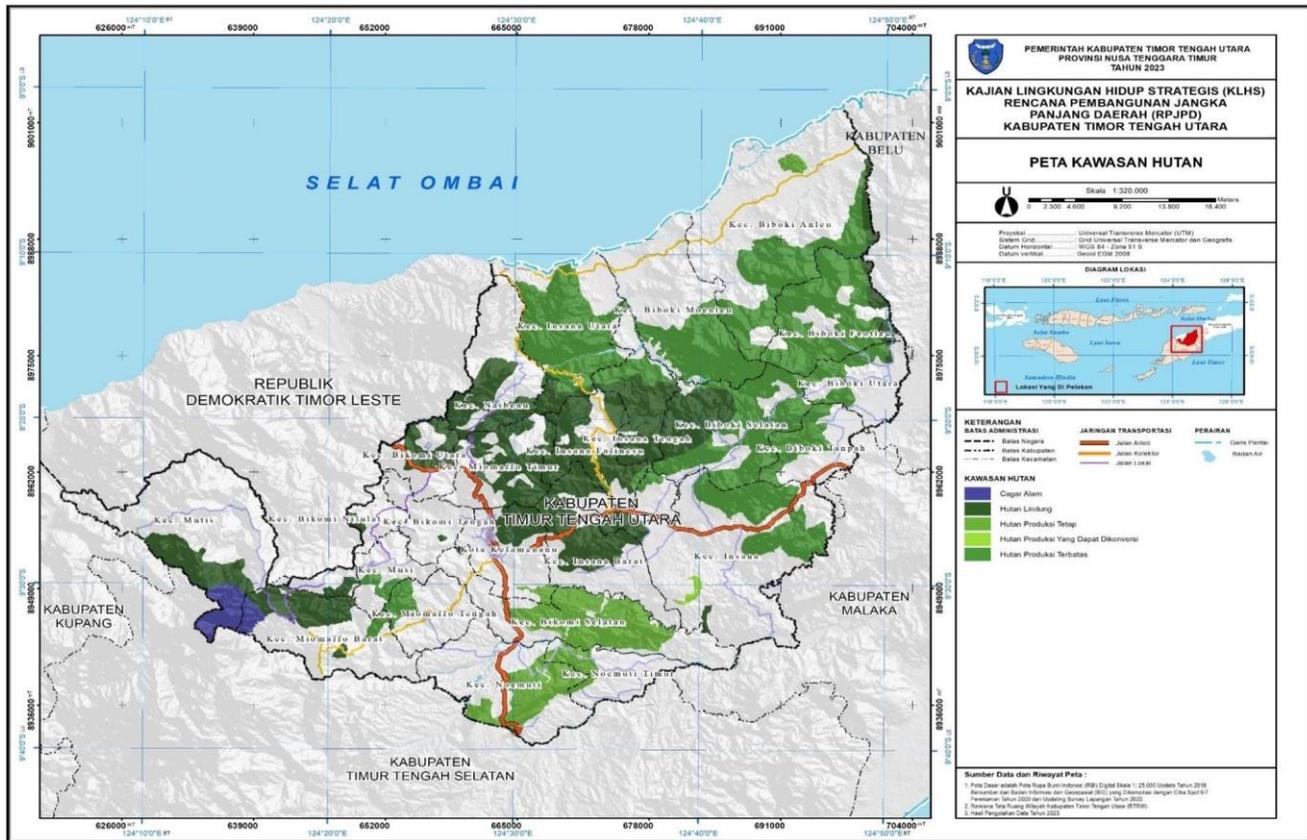




**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.22-

**Peta 2.5
Kawasan Hutan**



- 2) Daya Dukung Lingkungan
- a) Daya dukung air berdasarkan system grid
- Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi dengan wilayah belum terlampaui seluas 174472.49 ha. Adapun wilayah dengan daya dukung air telah terlampaui seluas 86970.69 ha. Wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui menandakan bahwa wilayah tersebut masih menyimpan cadangan ketersediaan air yang lebih besar dibandingkan permintaan penduduk.

**Tabel 2. 12
Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten TTU**

No	Kecamatan	Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Kec. Biboki Anleu	21.429.40	7.538.04	28.967.44
2	Kec. Biboki Feotleu	7.028.81	4.457.63	11.486.44
3	Kec. Biboki Moenleu	9.293.05	5.509.53	14.802.57
4	Kec. Biboki Selatan	9.317.20	4.747.68	14.064.88
5	Kec. Biboki Tanpah	2.410.54	3.643.99	6.054.53
6	Kec. Biboki Utara	1.841.73	4.555.31	6.397.04
7	Kec. Bikomi Nilulat	1.356.14	2.639.41	3.995.55
8	Kec. Bikomi Selatan	10.555.23	2.980.44	13.535.67
9	Kec. Bikomi Tengah	394.92	4.085.70	4.480.62
10	Kec. Bikomi Utara	4.107.72	834.81	4.942.54
11	Kec. Insana	17.006.95	8.276.19	25.283.14
12	Kec. Insana Barat	7.003.35	2.174.99	9.178.34
13	Kec. Insana Fafinesu	5.143.77	2.432.74	7.576.51



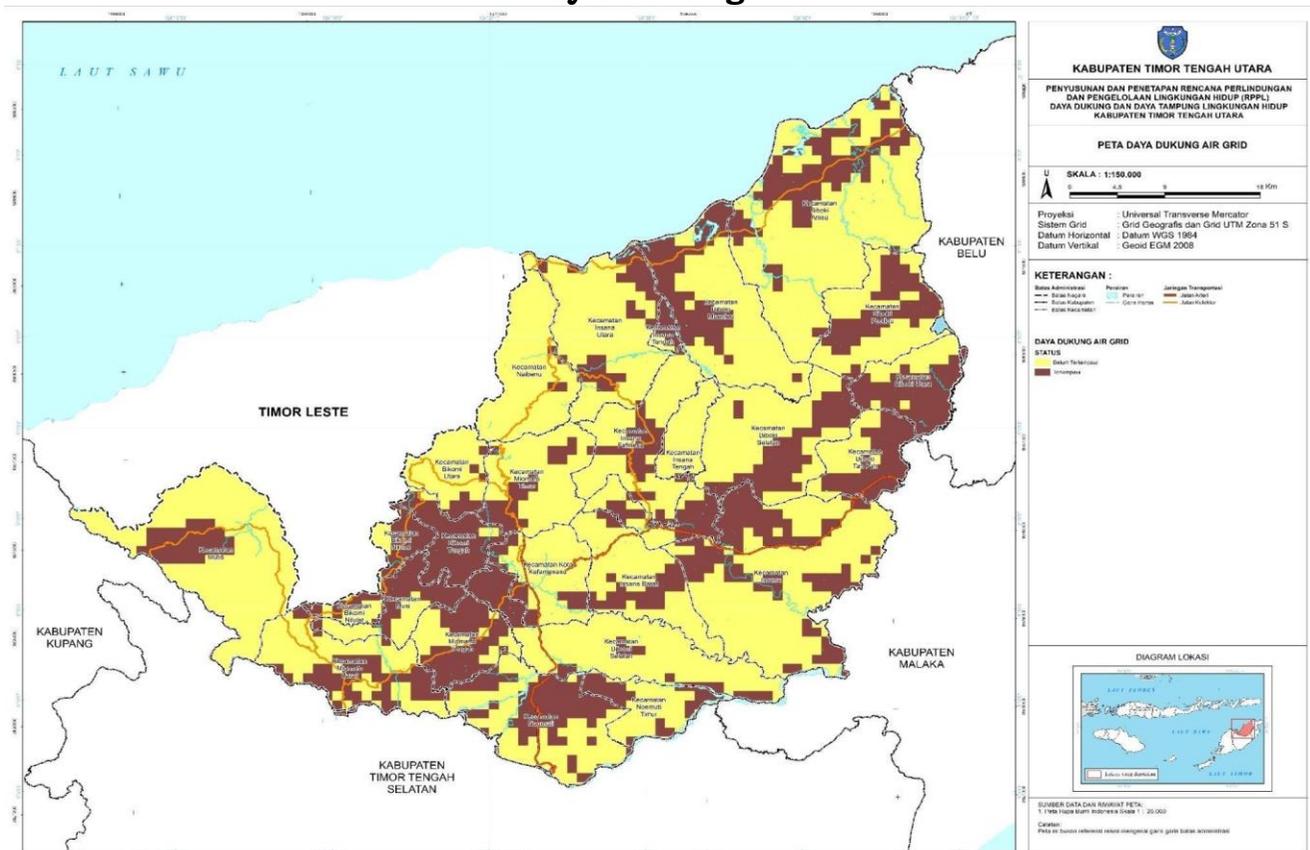
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.23-

No	Kecamatan	Daya Dukung Air Grid (Ha)		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
14	Kec. Insana Tengah	8.450.22	3.511.26	11.961.48
15	Kec. Insana Utara	10.655.12	2.923.72	13.578.84
16	Kec. Miomaffo Barat	7.361.47	4.505.71	11.867.18
17	Kec. Miomaffo Tengah	1.851.91	4.085.68	5.937.59
18	Kec. Miomaffo Timur	6.222.49	2.102.29	8.324.78
19	Kec. Musi	1.109.97	2.933.70	4.043.67
20	Kec. Mutis	15.833.59	2.976.60	18.810.19
21	Kec. Naibenu	9.629.34	345.30	9.974.64
22	Kec. Noemuti	7.527.85	5.903.41	13.431.26
23	Kec. Noemuti Timur	3.314.09	1.989.31	5.303.39
24	Kota Kefamenanu	5.627.63	1.817.26	7.444.89
Grand Total		174.472.49	86.970.69	261.443.18

Sumber: RPPLH Kabupaten Timor Tengah Utara, 2023

Peta 2. 6
Daya Dukung Air



b) Jasa Lingkungan Hidup
Jasa lingkungan hidup penyedia pangan

Jasa Lingkungan untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.24-

**Tabel 2. 13
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan**

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	15.267,90	1.073,13	8.811,09	3.690,18	1220,55	30.062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	17.361,02	0,00	1.817,07	0,00	0,00	19.178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	10.506,31	943,58	1.907,05	1.415,44	875,97	15.648,35
Kecamatan Biboki Selatan	8.459,00	205,10	2.471,33	0,00	37,59	11.173,02
Kecamatan Biboki Tanpah	4.200,13	547,70	90,57	5.301,40	137,92	10.277,72
Kecamatan Biboki Utara	3.611,07	37,07	1.608,53	1.134,07	137,44	6.528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	7.151,51	6,75	0,00	0,00	0,00	7.158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	7.717,46	2.241,97	1.868,49	1.452,19	675,76	13.955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	6.858,89	317,98	94,06	0,00	240,57	7.511,50
Kecamatan Bikomi Utara	8.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,96
Kecamatan Insana	14.716,58	5.129,65	2.453,46	2.682,27	285,33	25.267,29
Kecamatan Insana Barat	3.042,34	1.961,06	1.528,46	1.016,31	1.736,69	9.284,85
Kecamatan Fafinesu	7.992,35	1.225,09	179,19	124,06	0,00	9.520,68
Kecamatan Tengah	5.156,65	1.549,43	1.081,68	845,30	32,61	8.665,67
Kecamatan Utara	3.713,75	2.766,45	5.268,78	1.441,35	1.136,08	14.326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1.988,53	923,46	2.152,35	212,55	0,00	5.276,88
Kecamatan Miomaffo Barat	9.608,19	890,08	173,17	129,31	0,00	10.800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	2.961,14	486,34	2.733,73	51,15	3,06	6.235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	8.016,66	542,08	373,37	0,00	4,54	8.936,65
Kecamatan Musi	6.249,23	1.325,23	0,96	0,00	0,00	7.575,42
Kecamatan Mutis	16.913,89	1.911,45	0,00	38,83	0,00	18.864,17
Kecamatan Naibenu	6.700,41	64,84	2.994,59	0,00	35,04	9.794,88
Kecamatan Noemuti	9.672,90	26,47	2,11	3.448,03	191,40	13.340,91
Kecamatan Noemuti Timur	4.036,59	6,14	95,61	862,38	272,05	5.272,78
Total	190.112,44	24.181,07	37.705,64	23.844,84	7.022,60	28.2866,58

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup penyedia air bersih

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan), dan air tanah (termasuk mataair), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

**Tabel 2. 14
Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih**

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	0,00	28.631,12	727,70	279,35	424,68	30.062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	19.178,08	0,00	0,00	0,00	19.178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	534,94	4.113,62	10.999,79	0,00	0,00	15.648,35
Kecamatan Biboki Selatan	0,00	13.681,83	0,00	0,00	0,00	13.681,83
Kecamatan Biboki Tanpah	0,00	10.277,72	0,00	0,00	0,00	10.277,72
Kecamatan Biboki Utara	0,00	6.528,19	0,00	0,00	0,00	6.528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	7.158,26	0,00	0,00	0,00	7.158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	11363,13	2.241,97	350,77	0,00	0,00	13.955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	0,00	7.511,50	0,00	0,00	7.511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	0,00	8.209,96	0,00	0,00	8.209,96
Kecamatan Insana	0,00	0,00	25.267,29	0,00	0,00	25.267,29
Kecamatan Insana Barat	0,00	4.281,45	4.696,43	306,97	0,00	9.284,85
Kecamatan Insana Fafinesu	0,00	9.520,68	0,00	0,00	0,00	9.520,68
Kecamatan Insana Tengah	0,00	884,91	613,46	1.149,95	6.017,35	8.665,67
Kecamatan Insana Utara	8.185,91	6.140,51	0,00	0,00	0,00	14.326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	0,00	0,00	4.608,96	0,00	2.434,30	7.043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	0,00	0,00	10.800,75	0,00	0,00	10.800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	0,00	0,00	6.235,42	0,00	0,00	6.235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	0,00	0,00	8.936,65	0,00	0,00	8.936,65



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.25-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Musi	0,00	1,01	3.199,48	4.374,97	0,00	7.575,47
Kecamatan Mutis	18.864,12	0,05	0,00	0,00	0,00	18.864,17
Kecamatan Naibenu	4.732,22	0,00	0,00	0,00	5.062,66	9.794,88
Kecamatan Noemuti	0,00	0,00	4.888,99	84.25,44	26,47	13.340,91
Kecamatan Noemuti Timur	0,00	0,00	0,00	52.72,78	0,00	5.272,78
Total	43.680,3	112.639,39	97.047,15	19.809,47	13.965,48	28.7141,82

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup penyedia serat

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis.

**Tabel 2. 15
Jasa Lingkungan Penyedia Serat**

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	852,47	3398,87	16477,02	7992,78	113,25	28834,39
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	1817,07	17361,02	0,00	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	1059,58	722,64	11516,13	2021,34	328,66	15648,35
Kecamatan Biboki Selatan	0,00	5938,57	45354,16	0,00	0,00	51292,74
Kecamatan Biboki Tanpah	3181,84	8478,28	3680,98	48,68	2208,79	6528,19
Kecamatan Biboki Utara	0,00	1619,76	3643,27	0,00	1265,16	7158,26
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	6,75	7151,51	0,00	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	589,72	3417,42	8917,52	101,55	929,67	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	334,49	7177,01	0,00	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	0,00	8209,96	0,00	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	2660,88	7163,76	15611,73	0,00	23,80	25460,17
Kecamatan Insana Barat	1300,92	2708,36	5275,57	0,00	0,00	9284,85
Kecamatan Insana Fafinesu	125,61	1750,78	7644,29	0,00	0,00	9520,68
Kecamatan Tengah	1404,01	2524,18	4737,32	0,15	0,00	8665,67
Kecamatan Utara	1550,38	8062,14	3162,17	1551,73	0,00	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1585,82	2232,02	3225,42	0,00	0,00	7043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	1,66	1063,26	9608,19	1,17	126,48	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	43,64	3125,10	3059,16	0,00	7,52	6235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	88,70	61,52	8786,43	0,00	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	0,00	1325,23	6250,19	0,00	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	0,00	1911,45	16902,87	19,86	18,97	18853,15
Kecamatan Naibenu	0,00	2852,97	6747,78	194,13	0,00	9794,88
Kecamatan Noemuti	1778,48	2950,70	4972,30	266,86	3372,57	13340,91
Kecamatan Noemuti Timur	0,00	195,09	3943,25	4,81	1129,63	5272,78
Total	16.223,72	63.660,41	229.415,26	12.203,05	9.524,49	320.586,61

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup penyedia bahan bakar

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan bakar, kayu, dan fosil baik yang berasal dari energi fosil seperti minyak bumi dan batubara, serta sumber energi alternatif dari alam seperti: tenaga air mikrohidro, tenaga matahari, tenaga angin, dan panas bumi.

**Tabel 2. 16
Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar**

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	17,34	12903,86	8270,19	8742,22	129,24	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	11204,30	6156,72	1817,07	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	823,89	5238,93	7213,39	2030,91	341,22	15648,35
Kecamatan Biboki Selatan	0,00	2276,79	9958,44	1446,59	0,00	13681,83



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.26-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Tanpah	0,00	2757,49	4061,22	3459,01	0,00	10277,72
Kecamatan Biboki Utara	0,00	2351,48	2462,93	1713,78	0,00	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	1158,48	5999,77	0,00	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	0,37	4490,08	7131,52	2196,77	137,13	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	317,98	6859,04	334,49	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	0,00	8209,96	0,00	0,00	8209,96
Kecamatan Insana		7244,11	12569,69	5598,26	48,11	25460,17
Kecamatan Insana Barat	284,61	3550,57	1841,51	3608,16	0,00	9284,85
Kecamatan Insana Fafinesu	1,56	39,94	9175,92	303,27	0,00	9520,68
Kecamatan Tengah	552,69	310,04	6111,63	1663,73	27,58	8665,67
Kecamatan Insana Utara	508,43	347,71	5986,28	7451,10	32,89	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1373,27	1626,44	1705,01	2338,55	0,00	7043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	0,00	8160,20	2388,42	174,84	77,30	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	0,00	629,99	2915,52	2152,56	537,35	6235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	88,70	786,28	8000,15	61,52	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	0,00	1596,07	5979,35	0,00	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	0,00	7798,73	11065,44	0,00	0,00	18864,17
Kecamatan Naibenu	0,00	811,44	5971,29	3012,15	0,00	9794,88
Kecamatan Noemuti	2921,34	3986,76	3446,59	2794,81	0,00	13149,50
Kecamatan Noemuti Timur	188,95	3790,75	685,16	335,87	272,05	5272,78
Total	6.761,14	83.378,43	14.4165,13	51.235,65	1.602,89	287.143,25

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pengaturan tata air dan banjir

Tata air dan banjir atau Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*).

Tabel 2. 17
Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	7357,15	1361,70	6921,86	4000,38	9485,25	29126,34
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	0,00	6156,72	1811,38	11209,98	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	2906,04	1750,43	5243,98	1225,49	4522,40	15648,35
Kecamatan Biboki Selatan	242,10	2,63	8651,39	2145,29	2640,42	13681,83
Kecamatan Biboki Tanpah	710,95	281,03	4366,80	2160,21	2758,73	10277,72
Kecamatan Biboki Utara	0,00	131,09	1296,66	2717,13	2383,30	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	0,00	5999,77	0,00	1158,48	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	213,06	280,46	6201,36	4450,29	2810,70	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	865,86	317,98	5993,03	334,63	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,02	0,00	8209,94	0,00	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	1689,85	0,00	13518,68	5282,03	4969,61	25460,17
Kecamatan Insana Barat	1817,32	54,76	2830,29	3884,69	2487,57	11074,64
Kecamatan Fafinesu	596,42	59,07	8646,05	0,76	218,39	9520,68
Kecamatan Tengah	801,37	12,17	6398,61	524,32	929,20	8665,67
Kecamatan Utara	2915,64	914,80	5938,02	942,70	3615,27	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	66,15	817,44	1763,56	4348,45	47,66	7043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	0,00	77,30	2340,91	50,83	8331,72	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	0,00	7,52	2861,13	2250,58	1116,19	6235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	750,06	542,08	7265,32	377,91	1,29	8936,65
Kecamatan Musi	0,00	0,00	5978,39	0,96	1596,07	7575,42
Kecamatan Mutis	0,00	0,00	11046,47	373,78	7443,92	18864,17
Kecamatan Naibenu	1451,44	0,00	4734,60	1497,33	2111,51	9794,88
Kecamatan Noemuti	1815,17	2792,71	5945,66	731,29	2056,08	13340,91
Kecamatan Noemuti Timur	13,00	239,21	243,79	1554,20	3222,58	5272,78
Total	24.211,59	9.642,37	138.552,99	40.664,65	75.116,33	288.187,93

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.27-

Jasa lingkungan hidup pencegahan dan perlindungan terhadap bencana

Karakteristik fisik alam, seperti bentang alam dan ketinggian memiliki hubungan yang erat dengan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah.

Tabel 2. 18
Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	0,00	16402,93	11432,38	892,08	1335,46	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	17361,02	0,00	0,00	1817,07	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	11811,49	2792,12	293,51	718,89	0,00	15616,02
Kecamatan Biboki Selatan	12235,24	37,59	1409,00	0,00	0,00	13681,83
Kecamatan Biboki Tanpah	4747,83	137,92	3230,53	2161,45		10277,72
Kecamatan Biboki Utara	3680,34	137,44	0,00	2710,41	0,00	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	7158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	9221,35	610,84	660,03	3267,97	195,70	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	7177,01	240,57	0,00	93,91	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	8209,94	0,00	0,00	0,02	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	14035,01	484,25	2895,84	7951,62	93,45	25460,17
Kecamatan Insana Barat	2976,41	2125,37	1373,48	2809,59	0,00	9284,85
Kecamatan Fafinesu	9217,41	0,02	124,06	179,19	0,00	9520,68
Kecamatan Tengah	6231,50	50,92	1230,57	1125,23	27,45	8665,67
Kecamatan Utara	7298,09	1941,97	988,51	1661,10	2436,19	14325,87
Kecamatan Kota Kefamenanu	3366,87	1766,38	1550,39	359,62	0,00	7043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	10498,27	0,00	2,83	299,65	0,00	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	3545,51	3,06	43,64	2635,70	0,00	6227,91
Kecamatan Miomaffo Timur	8284,79	4,54	73,47	573,86	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	7575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	18825,34	0,00	19,86	18,97	0,00	18864,17
Kecamatan Naibenu	6030,57	177,87	0,00	3586,45	0,00	9794,88
Kecamatan Noemuti	9349,22	2,11	266,86	3531,32	0,00	13149,50
Kecamatan Noemuti Timur	3101,09	95,61	4,81	1799,22	272,05	5272,78
Total	191.937,97	27.011,51	25.599,76	38.193,31	4.360,30	287.102,85

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pemurnian air

Pemurnian air secara alami memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan aktivitas bakteri alam dalam mengurai bahan organik.

Tabel 2. 19
Jasa Lingkungan Pemurnian Air

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	855,15	6572,28	7860,25	14685,35	89,82	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	6156,72	1811,38	11209,98	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	968,00	6125,47	3434,31	7452,11	0,00	17979,88
Kecamatan Biboki Selatan	10,08	9699,23	1332,10	2640,42	0,00	13681,83
Kecamatan Biboki Tanpah	0,00	5029,06	281,13	2896,65	2070,88	10277,72
Kecamatan Biboki Utara	37,07	1303,02	1539,64	2514,39	1134,07	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	5999,77	0,00	1158,48	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	150,37	6688,98	2117,81	4486,65	512,07	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	6551,57	959,92	0,00	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	8209,96	0,00	0,00	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	145,51	14378,87	3964,84	6949,55	21,39	25460,17
Kecamatan Insana Barat	673,30	4647,83	2255,56	1708,16	0,00	9284,85
Kecamatan Fafinesu	1,58	9050,07	250,64	218,39	0,00	9520,68
Kecamatan Tengah	667,00	6710,65	376,28	911,74	0,00	8665,67
Kecamatan Utara	548,52	7286,77	2716,74	3774,38	0,00	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1373,27	2847,96	935,09	442,26	0,00	5598,58
Kecamatan Miomaffo Barat	0,00	2340,91	1,65	8409,02	49,17	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	0,00	2861,13	2250,58	1610,05	0,00	6721,77
Kecamatan Miomaffo Timur	88,70	8556,49	233,19	1,29	0,00	8879,67



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.28-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Musi	0,00	5978,39	0,96	1596,07	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	159,52	11046,47	0,00	7639,22	18,97	18864,17
Kecamatan Naibenu	5,83	5251,15	2173,34	2364,55	0,00	9794,88
Kecamatan Noemuti	1807,06	3061,02	3112,74	4971,63	388,46	13340,91
Kecamatan Noemuti Timur	101,75	66,79	462,04	4023,82	618,37	5272,78
Total	7.592,72	146.420,57	38.070,22	91.664,16	4.903,19	288.650,86

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pengolahan dan pengurai limbah

Zat organik dalam air limbah mampu dinetralkan oleh ekosistem karena ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralkan, mengurai serta menyerap limbah atau sampah yang diterima.

Tabel 2. 20

Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	0,00	2353,21	15077,02	9385,02	3247,60	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	6156,72	13021,36	0,00	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	773,19	5464,30	6107,94	2239,28	954,56	15539,26
Kecamatan Biboki Selatan	0,00	9723,80	3584,32	0,00	0,00	13308,12
Kecamatan Biboki Tanpah	0,00	1184,96	6835,29	0,00	2257,48	10277,72
Kecamatan Biboki Utara	0,00	1365,93	3897,10	0,00	1265,16	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	5999,77	1158,48	0,00	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	0,37	8558,12	4366,17	70,31	960,91	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	5993,18	1518,32	0,00	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	8209,96	0,00	0,00	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	0,00	14988,44	10447,92	0,00	23,80	25460,17
Kecamatan Insana Barat	284,61	4157,09	4843,15	0,00	0,00	9284,85
Kecamatan Fafinesu	1,56	8520,45	998,68	0,00	0,00	9520,68
Kecamatan Tengah	558,71	5761,34	2345,47	0,15	0,00	8665,67
Kecamatan Utara	508,43	4600,15	6420,08	2707,18	70,56	14306,40
Kecamatan Kota Kefamenanu	1373,27	2005,59	3664,40	0,00	0,00	7043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	0,00	2338,07	8335,04	1,17	126,48	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	0,00	2915,52	3312,39	0,00	7,52	6235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	88,70	8009,87	838,08	0,00	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	0,00	5979,35	1596,07	0,00	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	0,00	11186,13	7639,22	19,86	18,97	18864,17
Kecamatan Naibenu	0,00	5472,98	4127,78	185,91	8,21	9794,88
Kecamatan Noemuti	0,00	4917,57	4783,91	266,86	3372,57	13340,91
Kecamatan Noemuti Timur	0,00	1094,48	3043,87	3,76	1130,67	5272,78
Total	3.588,83	136.956,99	117.962,03	14.879,50	13.444,48	286.831,84

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pemelihara kualitas udara

Kawasan yang memiliki vegetasi dan berada pada topografi tinggi, memiliki kemampuan pemeliharaan kualitas udara yang lebih baik jika dibandingkan dengan kawasan tanpa vegetasi.

Tabel 2. 21

Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	4173,36	2792,37	18330,81	4545,57	220,75	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	6156,72	0,00	11204,30	1811,38	5,68	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	6807,36	1265,79	7270,14	305,06	0,00	15648,35
Kecamatan Biboki Selatan	9968,52	0,00	2266,71	1072,88	373,71	13681,83
Kecamatan Biboki Tanpah	1990,34	186,60	5939,33	2160,21	0,00	10276,48
Kecamatan Biboki Utara	1365,93	131,09	2314,41	2647,87	68,89	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	5999,77	0,00	1158,48	0,00	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	6438,03	1034,43	3191,09	3292,33	0,00	13955,88



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.29-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Bikomi Tengah	6859,04	317,98	0,00	334,49	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	8209,94	0,02	0,00	0,00	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	10829,86	1820,01	5919,85	5937,85	931,21	25438,78
Kecamatan Insana Barat	1742,85	26,10	2868,40	4129,36	390,82	9157,53
Kecamatan Fafinesu	9177,49	0,00	164,00	0,74	178,45	9520,68
Kecamatan Tengah	6115,66	332,01	1300,65	161,32	0,00	7909,64
Kecamatan Utara	5760,42	937,83	3283,18	1027,88	3317,10	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1652,29	1184,18	1992,66	2126,00	0,00	6955,12
Kecamatan Miomaffo Barat	2338,07	78,47	8161,86	50,83	171,52	10800,75
Kecamatan Miomaffo Tengah	2915,52	7,52	673,63	2152,56	486,20	6235,42
Kecamatan Miomaffo Timur	7498,51	1301,86	74,76	61,52	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	5978,39	0,00	1596,07	0,00	0,00	7574,46
Kecamatan Mutis	11186,13	19,86	7639,22	18,97	0,00	18864,17
Kecamatan Naibenu	5482,25	524,76	708,58	1490,44	1588,84	9794,88
Kecamatan Noemuti	4564,53	3253,85	4783,91	704,81	0,00	13307,10
Kecamatan Noemuti Timur	152,83	528,02	3043,87	1548,06	0,00	5272,78
Total	133.363,81	15.742,75	93.885,89	35.580,14	7.733,17	286.305,76

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup penyerbukan alami

Habitat tersebut seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

Tabel 2. 22

Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	691,77	2706,00	4426,26	21649,00	589,83	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	0,00	0,00	19178,08	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	941,35	584,06	1506,44	12102,77	513,73	15648,35
Kecamatan Biboki Selatan	0,00	10,08	1484,95	12186,80	0,00	13681,83
Kecamatan Biboki Tanpah	0,00	662,26	3729,55	3628,44	2257,48	10277,72
Kecamatan Biboki Utara	0,00	37,07	6,35	5219,60	1265,16	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	0,00	6,75	7151,51	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	48,43	1990,12	3244,53	7880,27	792,53	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	317,98	1106,44	6087,09	0,00	7511,50
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	0,02	0,00	8209,94	0,00	8209,96
Kecamatan Insana	99,49	3470,13	9688,46	12180,71	21,39	25460,17
Kecamatan Insana Barat	284,61	680,65	4443,68	2859,60	0,00	8268,54
Kecamatan Insana Fafinesu	1,58	405,58	1539,96	7573,56	0,00	9520,68
Kecamatan Insana Tengah	598,61	716,74	2587,06	4763,24	0,02	8665,67
Kecamatan Insana Utara	508,43	1241,61	3516,10	8126,57	933,71	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1373,27	817,44	2491,28	2361,28	0,00	7043,27
Kecamatan Miomaffo Barat	0,00	0,00	529,98	5697,92	7,52	6235,42
Kecamatan Miomaffo Tengah	0,00	1,17	891,75	9781,36	126,48	10800,75
Kecamatan Miomaffo Timur	88,70	1058,95	480,64	7308,37	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	0,00	0,00	1325,23	6250,19	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	0,00	179,38	1947,23	16718,59	18,97	18864,17
Kecamatan Naibenu	0,00	775,43	761,67	8232,13	25,65	9794,88
Kecamatan Noemuti	4702,70	645,59	4620,04	3181,17	0,00	13149,50
Kecamatan Noemuti Timur	188,95	1047,16	272,05	2905,99	858,62	5272,78
Total	9.527,88	17.347,42	50.606,39	201.234,16	7.411,08	286.126,94

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pengendalian hama dan penyakit

Ekosistem mampu mengendalikan hal tersebut karena dalam ekosistem terdapat habitat spesies trigger dan pengendali hama penyakit.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.30-

Tabel 2. 23
Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	488,11	4444,54	11063,90	9761,13	4305,17	30062,86
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	7968,10	11209,98	0,00	0,00	19178,08
Kecamatan Biboki Moenleu	67,82	6814,99	6036,97	2238,25	490,32	15648,35
Kecamatan Biboki Selatan	192,39	9746,47	3740,33	2,63	0,00	13681,83
Kecamatan Biboki Tan Pah	3586,43	1531,96	2758,73	191,80	2208,79	10277,72
Kecamatan Biboki Utara	0,00	2841,18	2421,85	0,00	1265,16	6528,19
Kecamatan Bikomi Nilulat	6,75	5993,03	1158,48	0,00	0,00	7158,26
Kecamatan Bikomi Selatan	2801,95	4329,34	5793,36	350,77	680,45	13955,88
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	0,00	558,70	0,00	0,00	558,70
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	2841,18	2421,85	0,00	1265,16	6528,19
Kecamatan Insana	4973,32	11803,49	7971,59	495,09	23,80	25267,29
Kecamatan Insana Barat	1417,43	2189,34	4806,26	871,82	0,00	9284,85
Kecamatan Insana Fafinesu	1291,62	7951,59	218,41	59,07	0,00	9520,68
Kecamatan Insana Tengah	2753,05	4840,95	945,31	126,33	0,02	8665,67
Kecamatan Insana Utara	3306,12	4557,36	4150,80	1188,30	1123,83	14326,42
Kecamatan Kota Kefamenanu	1691,84	1870,46	3086,36	394,60	0,00	7043,27
Kecamatan Miomafo Barat	891,75	1449,64	8331,72	78,47	49,17	10800,75
Kecamatan Miomafo Tengah	529,98	4480,65	1217,27	7,52	0,00	6235,42
Kecamatan Miomafo Timur	88,70	8057,14	790,81	0,00	0,00	8936,65
Kecamatan Musi	1325,23	4653,16	1597,03	0,00	0,00	7575,42
Kecamatan Mutis	1751,93	9434,19	7443,92	215,16	18,97	18864,17
Kecamatan Naibenu	20,91	7204,85	2374,99	160,27	33,86	9794,88
Kecamatan Noemuti	0,00	4598,33	2181,81	5980,90	579,87	13340,91
Kecamatan Noemuti Timur	0,00	164,79	3784,61	432,97	890,42	5272,78
Total	27.185,33	119.766,74	96.065,05	22.555,08	12.935,00	278.507,20

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup budaya tempat tinggal dan ruang hidup

Jasa Lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Tabel 2. 24
Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	9189,13	498,56	10568,17	1939,12	0,00	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	428,39	0,00	1,29	656,84	0,00	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	9498,11	980,06	14136,80	2900,90	1287,84	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	6065,45	0,00	821,25	1606,24	2855,93	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	2443,94	9,42	3426,15	0,00	266,81	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	1716,83	0,00	2761,82	357,50	1,72	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	7354,89	184,14	0,00	0,00	286,73	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	16048,89	373,69	2349,68	1769,63	89,93	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	1774,66	0,00	86,55	0,00	0,00	1861,22
Kecamatan Bikomi Utara	1716,83	0,00	2761,82	357,50	1,72	4837,87
Kecamatan Insana	10642,41	3001,70	8391,59	328,59	1355,75	23720,04
Kecamatan Insana Barat	19808,94	1449,72	2855,05	283,40	2,41	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	1389,08	20,02	2601,39	160,29	35,07	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	10207,12	956,33	4356,05	3998,30	479,86	19997,67
Kecamatan Insana Utara	5324,95	564,92	4842,85	5262,71	25,73	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	1675,23	1515,06	88,37	201,47	124,22	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	7402,15	543,55	2307,44	0,00	205,84	10458,98
Kecamatan Miomafo Tengah	5233,43	390,84	1850,53	1596,31	1205,78	10276,89
Kecamatan Miomafo Timur	4831,39	524,85	24,80	572,07	89,41	6042,52
Kecamatan Musi	780,29	1590,30	0,00	10,50	32,90	2413,99
Kecamatan Mutis	5496,08	39,65	429,50	2,72	238,32	6206,27
Kecamatan Naibenu	4027,67	33,81	1699,27	935,85	1103,54	7800,14
Kecamatan Noemuti	7773,78	2437,70	2266,53	426,00	0,00	12904,01



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.31-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Noemuti Timur	5842,76	171,56	2952,97	13,21	0,00	8980,50
Total	146.672,40	15.285,89	71.579,86	23.379,15	9.689,51	266.606,81

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup fungsi rekreasi dan ekowisata

Berdasarkan hasil Analisa tersebut dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 5 (lima) klasifikasi untuk pengadaan budaya rekreasi dan ekowisata.

Tabel 2. 25

Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	16491,08	1378,09	437,48	2163,09	1725,24	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	32,22	0,00	625,90	428,39	0,00	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	17622,75	348,02	4040,02	4309,59	2483,32	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	8405,21	44,08	0,00	2855,93	43,65	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	4184,77	9,42	0,00	1952,12	0,00	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	3118,93	0,00	1,56	1717,38	0,00	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	7533,35	5,68	286,73	0,00	0,00	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	5016,28	0,56	23,56	12355,74	3235,67	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	86,55	0,00	0,00	1767,62	7,04	1861,22
Kecamatan Bikomi Utara	3118,93	0,00	1,56	1717,38	0,00	4837,87
Kecamatan Insana	11795,46	877,86	9097,75	785,00	1163,97	23720,04
Kecamatan Insana Barat	6214,99	0,00	16284,78	531,72	1368,03	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	2797,83	1036,37	0,00	352,84	18,81	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	10885,06	3132,64	3230,98	1255,18	1493,82	19997,67
Kecamatan Insana Utara	12229,98	841,28	778,07	1184,40	987,43	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	1960,84	871,03	367,17	403,96	1,34	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	2812,66	0,00	7495,24	20,68	130,40	10458,98
Kecamatan Miomafo Tengah	4771,07	0,00	5270,86	0,00	234,96	10276,89
Kecamatan Miomafo Timur	686,28	0,00	4668,03	524,85	163,37	6042,52
Kecamatan Musi	792,04	1589,06	32,90	0,00	0,00	2413,99
Kecamatan Mutis	104,18	328,04	2304,90	733,77	2735,37	6206,27
Kecamatan Naibenu	4628,96	0,00	0,00	337,19	2833,99	7800,14
Kecamatan Noemuti	2266,53	645,28	6071,07	3818,77	102,36	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	2952,97	0,00	1882,36	6,35	4138,82	8980,50
Total	130.508,92	11.107,41	62.900,94	39.221,96	22.867,59	266.606,81

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup budaya estetika alam

Berdasarkan hasil Analisa tersebut dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 5 klasifikasi untuk pengadaan budaya estetika alam.

Tabel 2. 26

Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika Alam

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	5489,09	2783,89	2657,38	922,59	10342,04	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	1054,29	0,00	30,94	0,00	1,29	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	10948,19	1416,30	14921,84	775,87	741,50	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	3148,68	44,08	1452,46	5977,72	725,92	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	1546,10	68,48	65,64	913,05	3553,04	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	1713,93	0,00	298,49	0,00	2825,45	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	286,73	5,68	178,46	0,00	7354,89	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	13926,95	0,00	2619,70	1681,37	2403,79	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	1799,08	0,00	50,72	11,41	0,00	1861,22
Kecamatan Bikomi Utara	1713,93	0,00	298,49	0,00	2825,45	4837,87
Kecamatan Insana	10569,46	52,08	2019,26	1516,71	9562,53	23720,04



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.32-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Insana Barat	17240,87	542,59	1362,82	2149,89	3103,35	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	321,65	1067,62	18,81	32,33	2765,44	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	4384,11	3144,59	4638,81	4889,44	2940,72	19997,67
Kecamatan Insana Utara	2881,95	1503,81	4676,33	2246,65	4712,43	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	866,53	871,03	0,00	393,51	1473,27	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	7495,24	130,40	0,00	506,98	2326,36	10458,98
Kecamatan Miomafo Tengah	6867,17	234,96	390,84	1,65	2782,27	10276,89
Kecamatan Miomafo Timur	5381,34	0,00	95,22	89,41	476,55	6042,52
Kecamatan Musi	43,40	1589,06	1,24	0,00	780,29	2413,99
Kecamatan Mutis	5318,20	64,45	329,43	455,81	38,39	6206,27
Kecamatan Naibenu	839,63	890,30	2880,05	104,12	3086,04	7800,14
Kecamatan Noemuti	9971,29	666,19	0,00	0,00	2266,53	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	3688,87	2528,15	0,00	6,35	2757,13	8980,50
Total	117.496,69	17.603,66	38.986,92	22.674,89	69.844,66	266.606,81

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi.

Tabel 2. 27

Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	9206,05	3839,02	6088,45	2751,77	309,69	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	1,29	221,78	237,55	625,90	0,00	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	2483,32	16722,73	9385,08	212,58	0,00	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	306,98	516,65	10465,93	59,32	0,00	11348,87
Kecamatan Biboki Tan Pah	3284,85	594,95	1776,79	430,65	59,07	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	1601,46	1521,31	1713,54	1,56	0,00	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	465,19	7360,57	0,00	0,00	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	3006,78	3449,66	13130,63	1021,17	23,58	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	0,00	2044,40	24,42	0,00	2068,83
Kecamatan Bikomi Utara	1601,46	1521,31	1713,54	1,56	0,00	4837,87
Kecamatan Insana	6616,08	12096,87	4014,23	52,08	940,78	23720,04
Kecamatan Insana Barat	12383,81	4050,33	7962,98	0,00	2,41	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	2601,39	242,68	325,35	1036,42	0,00	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	3000,32	4909,12	6186,64	3132,80	2768,80	19997,67
Kecamatan Insana Utara	429,01	8447,56	4880,92	1815,51	448,15	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	379,35	440,30	2470,51	72,64	241,55	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	7867,77	2404,28	0,00	0,00	186,92	10458,98
Kecamatan Miomafo Tengah	5622,61	2782,27	1597,96	0,00	274,05	10276,89
Kecamatan Miomafo Timur	4668,03	590,73	258,61	525,15	0,00	6042,52
Kecamatan Musi	1,24	0,00	2379,86	0,00	32,90	2413,99
Kecamatan Mutis	35,71	4144,20	277,92	0,00	1748,43	6206,27
Kecamatan Naibenu	4038,84	1997,56	873,44	0,00	890,30	7800,14
Kecamatan Noemuti	5496,09	2436,43	3817,49	645,28	508,72	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	2332,31	2936,21	1714,13	54,77	1943,08	8980,50
Total	76.964,74	76.331,15	90.676,53	12.463,57	10.378,44	266.814,42

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pendukung siklus hara

Hara diperlukan untuk produksi bahan organik baik pada tingkat trofik produser ataupun konsumen yang umumnya berada dalam lingkungan abiotik dengan konsentrasi yang lebih rendah dari pada yang dibutuhkan untuk aktivitas pertumbuhan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.33-

Tabel 2. 28
Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	4555,69	2992,65	5053,11	9593,53	0,00	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	237,55	223,06	0,00	625,90	0,00	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	4767,07	13128,74	5138,03	5050,58	719,29	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	138,55	10763,93	44,08	402,31	0,00	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	276,19	625,25	2409,17	72,21	2763,49	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	0,00	877,45	2068,93	0,00	1891,49	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	0,00	7539,03	0,00	286,73	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	3835,76	3781,98	12605,29	373,67	35,13	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	1767,62	0,00	269,74	0,00	50,72	2088,08
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	877,45	2068,93	0,00	1891,49	4837,87
Kecamatan Insana	755,29	4593,61	12000,63	2094,11	4276,41	23720,04
Kecamatan Insana Barat	7041,18	4238,68	2400,61	926,64	9792,42	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	0,00	391,37	1181,83	31,25	2601,39	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	10,08	8246,69	11264,65	87,54	388,71	19997,67
Kecamatan Insana Utara	3005,39	5109,50	6313,64	1053,81	538,82	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	306,48	447,81	2423,92	183,19	242,95	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	20,68	563,06	259,48	2364,68	7251,07	10458,98
Kecamatan Miomaffo Tengah	1831,27	931,74	275,70	2241,37	4996,82	10276,89
Kecamatan Miomaffo Timur	0,02	4920,80	620,38	501,33	0,00	6042,52
Kecamatan Musi	10,50	0,00	2402,25	1,24	0,00	2413,99
Kecamatan Mutis	39,60	238,36	2079,20	1542,85	2306,25	6206,27
Kecamatan Naibenu	839,63	2373,89	4586,62	0,00	0,00	7800,14
Kecamatan Noemuti	37,58	124,06	4830,76	4702,96	3208,64	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	1697,58	5122,78	1943,08	209,54	7,52	8980,50
Total	31.173,72	70.572,86	89.779,06	32.058,70	43.249,33	266.833,68

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pendukung produksi primer

Ekosistem dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen dan pengikat karbon.

Tabel 2. 29
Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	9218,91	5178,76	4478,16	3189,92	129,23	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	1,29	625,90	428,39	30,94	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	4772,51	8627,90	2253,21	3945,03	9205,05	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	306,98	233,88	7908,44	2899,57	0,00	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	0,00	2060,15	3066,53	1000,97	18,66	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	0,00	1716,83	2248,60	872,44	0,00	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	7539,03	286,73	0,00	0,00	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	3769,48	8485,82	3049,98	3340,22	1986,32	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	0,00	0,00	86,55	1774,66	0,00	1861,22
Kecamatan Bikomi Utara	0,00	1716,83	2248,60	872,44	0,00	4837,87
Kecamatan Insana	0,00	5772,83	12667,93	5176,30	102,98	23720,04
Kecamatan Insana Barat	25,65	3088,13	10040,72	3808,10	7436,93	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	1016,35	32,68	2797,83	320,16	38,83	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	3975,70	5516,97	7965,55	165,30	2374,16	19997,67
Kecamatan Insana Utara	679,27	2584,02	9512,08	571,88	2673,90	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	181,62	2785,16	329,75	128,45	179,37	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	72,56	3037,91	7329,59	0,00	18,92	10458,98
Kecamatan Miomaffo Tengah	234,96	2124,58	6592,81	0,00	1324,54	10276,89
Kecamatan Miomaffo Timur	476,57	4692,80	184,93	688,22	0,00	6042,52
Kecamatan Musi	0,00	2412,75	1,24	0,00	0,00	2413,99
Kecamatan Mutis	35,66	3583,66	2578,68	8,26	0,00	6206,27
Kecamatan Naibenu	3296,71	1043,69	2111,54	494,41	853,78	7800,14
Kecamatan Noemuti	2287,44	6725,06	3853,92	0,00	37,58	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	37,98	2131,19	2356,62	2757,13	1697,58	8980,50
Total	30.388,35	81.091,93	94.575,91	32.441,85	28.108,77	266.606,81

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.34-

Jasa lingkungan hidup penyediaan sumber daya genetik

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati (kehati) baik flora maupun fauna.

Tabel 2. 30
Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	2699,52	3255,48	6836,04	7655,27	1748,66	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	816,74	237,55	1,29	30,94	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	0,00	5514,69	8068,91	4471,67	10748,43	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	95,33	197,86	10748,70	306,98	0,00	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	72,21	18,80	5590,93	0,00	464,37	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	1,17	0,55	4831,14	0,00	5,01	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	5,68	7641,62	0,00	178,46	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	1181,43	4694,84	14731,55	23,43	0,56	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	1767,62	0,00	138,05	0,00	0,00	1905,67
Kecamatan Bikomi Utara	1,17	0,55	4831,14	0,00	5,01	4837,87
Kecamatan Insana	940,08	2002,08	18816,90	78,56	1882,42	23720,04
Kecamatan Insana Barat	2,41	7436,93	13874,47	0,00	3085,71	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	3,76	340,23	3843,04	0,00	18,81	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	2918,48	1998,62	10887,97	3157,30	1035,31	19997,67
Kecamatan Insana Utara	551,34	1728,73	10262,05	286,90	3192,15	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	127,11	252,01	2682,38	181,62	361,24	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	93,24	0,00	9879,43	0,00	486,30	10458,98
Kecamatan Miomaffo Tengah	1594,34	1,97	7748,85	931,74	0,00	10276,89
Kecamatan Miomaffo Timur	0,02	476,85	872,85	0,00	4692,80	6042,52
Kecamatan Musi	32,90	11,75	2369,35	0,00	0,00	2413,99
Kecamatan Mutis	39,60	464,02	3831,75	35,66	1835,23	6206,27
Kecamatan Naibenu	0,00	356,80	6792,97	650,37	0,00	7800,14
Kecamatan Noemuti	20,91	682,86	9507,71	2692,53	0,00	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	0,00	1764,40	7167,93	48,17	0,00	8980,50
Total	12.142,62	32.022,45	172.193,29	20.521,50	29.771,41	266.651,27

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pengaturan iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan Jasa Lingkungan berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon.

Tabel 2. 31
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	5421,84	9574,31	6239,38	908,37	51,08	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	238,83	190,84	30,94	625,90	0,00	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	2735,99	18378,82	2050,71	1960,10	3678,09	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	417,54	3082,21	7427,81	421,32	0,00	11348,87
Kecamatan Biboki Tan Pah	339,01	3764,46	568,92	9,42	1464,51	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	1,17	3124,88	0,00	0,00	1711,82	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	0,00	7647,30	178,46	0,00	0,00	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	303,44	9576,26	1198,85	1094,64	8458,62	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	24,42	0,00	0,00	11,41	68,88	104,72
Kecamatan Bikomi Utara	1,17	3124,88	0,00	0,00	1711,82	4837,87
Kecamatan Insana	895,42	17853,15	4969,39	2,08	0,00	23720,04
Kecamatan Insana Barat	765,24	13084,12	9184,85	1365,32	0,00	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	323,97	3778,03	50,06	52,35	1,43	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	7159,31	2399,78	3781,17	1746,58	4910,83	19997,67
Kecamatan Insana Utara	3617,95	7265,25	1635,81	788,75	2713,38	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	516,89	1779,77	180,94	255,72	871,03	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	93,24	7737,37	2551,61	57,84	18,92	10458,98



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.35-

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Miomaffo Tengah	2526,08	4996,82	2361,51	392,49	0,00	10276,89
Kecamatan Miomaffo Timur	0,02	5403,47	24,78	614,26	0,00	6042,52
Kecamatan Musi	0,00	11,75	813,19	0,00	1589,06	2413,99
Kecamatan Mutis	47,82	2800,49	3127,86	230,11	0,00	6206,27
Kecamatan Naibenu	1459,70	4694,66	416,67	1229,11	0,00	7800,14
Kecamatan Noemuti	446,91	5996,39	2679,52	1,27	3779,91	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	10,19	2814,68	3861,31	2294,33	0,00	8980,50
Total	27.346,15	139.079,67	53.333,72	14.061,36	31.029,41	264.850,31

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

Jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas

Ekosistem memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan flora dan fauna sehingga melestarikan keanekaragaman hayati wilayah.

Tabel 2. 32

Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas atau Keanekaragaman Hayati

Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu	2960,71	4502,11	4545,46	9403,93	782,77	22194,98
Kecamatan Biboki Feotleu	0,00	429,67	656,84	0,00	0,00	1086,51
Kecamatan Biboki Moenleu	1682,02	6156,03	10976,80	6544,67	3444,19	28803,71
Kecamatan Biboki Selatan	138,98	153,78	7893,21	3162,90	0,00	11348,87
Kecamatan Biboki Tan pah	129,20	3974,42	95,16	473,76	1473,77	6146,31
Kecamatan Biboki Utara	873,06	2247,98	0,00	5,01	1711,82	4837,87
Kecamatan Bikomi Nilulat	5,68	286,73	0,00	178,46	7354,89	7825,76
Kecamatan Bikomi Selatan	1271,11	7184,48	2770,10	273,52	9132,62	20631,82
Kecamatan Bikomi Tengah	1975,52	0,00	11,41	0,00	68,88	2055,82
Kecamatan Bikomi Utara	873,06	2247,98	0,00	5,01	1711,82	4837,87
Kecamatan Insana	5176,21	13523,53	940,78	1983,33	2096,19	23720,04
Kecamatan Insana Barat	266,07	9792,42	937,69	12947,66	455,69	24399,53
Kecamatan Insana Fafinesu	3,76	4098,24	82,39	0,00	21,45	4205,84
Kecamatan Insana Tengah	3164,75	2234,74	9414,67	4180,99	1002,54	19997,67
Kecamatan Insana Utara	630,46	7481,13	6054,58	860,79	994,19	16021,16
Kecamatan Kota Kefamenanu	128,45	557,14	215,46	540,61	2162,69	3604,35
Kecamatan Miomafo Barat	93,24	7251,07	57,84	505,22	2551,61	10458,98
Kecamatan Miomaffo Tengah	1594,34	4996,82	390,84	933,70	2361,19	10276,89
Kecamatan Miomaffo Timur	163,39	5239,80	614,56	24,78	0,00	6042,52
Kecamatan Musi	0,00	10,50	814,43	0,00	1589,06	2413,99
Kecamatan Mutis	495,46	2317,19	1522,73	1870,89	0,00	6206,27
Kecamatan Naibenu	232,21	3841,01	2119,41	1157,03	450,47	7800,14
Kecamatan Noemuti	20,91	3333,98	1028,66	2304,12	6216,34	12904,01
Kecamatan Noemuti Timur	0,00	68,64	4237,41	4492,70	181,76	8980,50
Total	21.878,58	91.929,38	55.380,44	51.849,06	45.763,95	266.801,41

Sumber: Dokumen DDDT LH Kabupaten TTU, 2023

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung dengan mengacu pada perhitungan mengacu Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Tabel 2. 33

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.TTU

Indikator	Baseline	
	2021	2022
Indeks Kualitas Air	55,56	47,22
Indeks Kualitas Udara	92,75	93,02
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	83,04	70,03
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,81	70,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2021 sebesar 62,81 dan pada 2022



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.36-

sebesar 70,76. Adapun menurut kesepakatan tim pokja pada forum internal, target hingga Tahun 2053 atau 30 Tahun mendatang, indeks kualitas hidup sebesar 98. Dengan demikian berarti bahwa setiap Tahun memerlukan laju pertumbuhan sebesar 0,09. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan bahwa diperlukan konsistensi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, sementara pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat penting sehingga anggaran kegiatan diprioritaskan dalam program tersebut.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.37-

**Tabel 2. 34
Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kabupaten Timor Tengah Utara**

Indikator	Baseline		SE MENLHK 4/2021		Laju pertumbuhan		Tahun ke-1		Periode ke-1											
	2021	2022	2023	2024	Baseline	SE MENLHK 4/ 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
Indeks Kualitas Air	55,56	47,22	52,8	52,9	0	0	52,8	52,9	52,91	52,91	52,92	52,92	52,93	52,93	52,94	52,95	52,95			
Indeks Kualitas Udara	92,75	93,02	90,12	90,23	0	0	93,02	93,03	93,03	93,04	93,04	93,05	93,05	93,06	93,07	93,07	93,08			
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	83,04	70,03	58,85	60,27	-0,16	0,02	70,03	70,05	70,08	70,1	70,13	70,15	70,17	70,2	70,22	70,25	70,27			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,81	70,76	68,85	69,24	0,13	0,01	72,86	72,91	72,92	72,93	72,94	72,95	72,96	72,97	72,98	72,99	73			
<i>lanjutan....</i>																				
Periode ke-2										Periode ke-3										
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
52,96	52,96	52,97	52,97	52,98	52,99	52,99	53	53	53,01	53,01	53,02	53,02	53,03	53,04	53,04	53,05	53,05	53,06	53,06	53,07
93,08	93,09	93,09	93,1	93,11	93,11	93,12	93,12	93,13	93,13	93,14	93,14	93,15	93,16	93,16	93,17	93,17	93,18	93,18	93,19	93,2
70,3	70,32	70,34	70,37	70,39	70,42	70,44	70,46	70,49	70,51	70,54	70,56	70,58	70,61	70,63	70,66	70,68	70,71	70,73	70,75	70,78
73	73,01	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,07	73,08	73,09	73,1	73,1	73,2	73,13	73,14	73,15	73,16	73,17	73,18	73,19	73,2

Sumber: Hasil Analisis 2023



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.38-

4) Area Bernilai Konservasi Tinggi

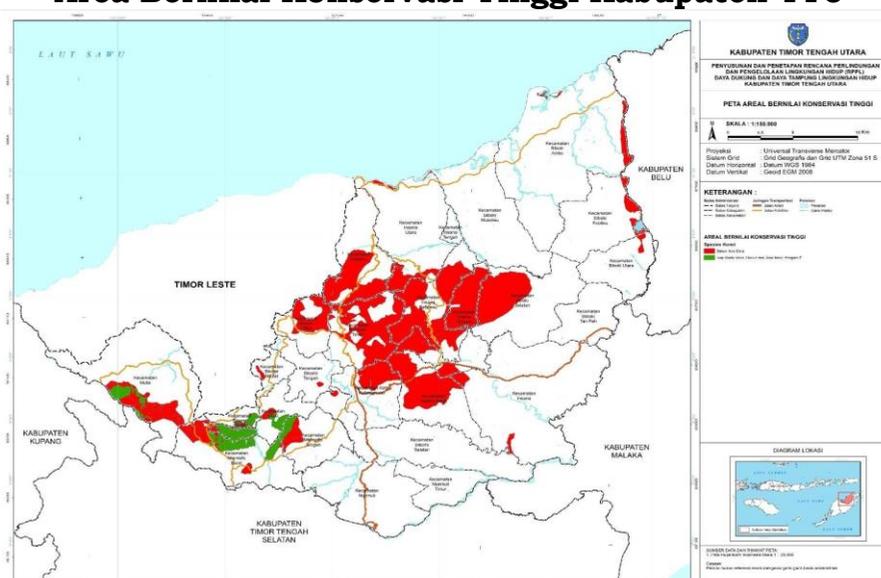
Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki wilayah bernilai konservasi tinggi seluas 41.938,54 Ha. Nilai Konservasi Tinggi (NKT) didefinisikan sebagai nilai-nilai biologis, ekologis, sosial dan budaya yang dianggap penting di tingkat nasional, regional dan global. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi wilayah bernilai konservasi di kawasan produksi untuk melengkapi upaya konservasi di kawasan konservasi/lindung. Berikut adalah tabel persebaran NKT di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 2. 35
Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) Kabupaten Timor Tengah Utara

Kecamatan	Spesies Kunci (Isap Madu timor, Decu timor, Anis timor, Pergamt *) Ha	Area Bernilai Konservasi Tinggi (Ha)
Kecamatan Biboki Anleu		873.13
Kecamatan Biboki Feotleu		727.79
Kecamatan Biboki Moenleu		19.63
Kecamatan Biboki Selatan		4026.29
Kecamatan Biboki Utara		173.67
Kecamatan Bikomi Nilulat	322.16	553.91
Kecamatan Bikomi Selatan		72.96
Kecamatan Bikomi Tengah		51.17
Kecamatan Bikomi Utara		1814.63
Kecamatan Insana		518.59
Kecamatan Insana Barat		4099.57
Kecamatan Insana Fafinesu		6053.20
Kecamatan Insana Tengah		4782.82
Kecamatan Insana Utara		1437.08
Kecamatan Kota Kefamenanu		1617.74
Kecamatan Miomafo Tengah	416.44	0.00
Kecamatan Miomafo Barat	1363.15	2353.18
Kecamatan Miomafo Timur		4885.76
Kecamatan Musi	1279.74	1031.13
Kecamatan Mutis	798.96	3161.55
Kecamatan Naibenu		3684.73
Grand Total	4180.46	41938.54

Sumber: BKSDA, 2021

Peta 2. 7
Area Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten TTU



5) Rencana Aksi Mitigasi Pengendalian Perubahan Iklim (FOLU NET Sink)
Berdasarkan kondisi Kawasan hutan dan non-hutan, maka Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT berpotensi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pencapaian target



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.39-

penurunan emisi Gas rumah kaca (GRK) nasional terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini untuk mendukung kebijakan penyimpanan karbon dengan pendekatan carbon net sink Tahun 2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Melalui pembahasan dari 4 bidang yaitu pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi serta instrument dan informasi telah ditetapkan 8 rencana aksi mitigasi berbasis spatial pada lokasi yang sudah ditentukan. 8 rencana aksi mitigasi tersebut mencakup mencegah degradasi lahan mineral; degradasi konsesi terencana; pembangunan hutan tanaman; penerapan pengkayaan hutan alam; penerapan RIL-C; peningkatan cadangan karbon dengan rotasi; peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi, serta perlindungan areal konservasi tinggi.

Arahan pelaksanaan aksi mitigasi terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu RO 1 hingga RO 11 berada pada semua kabupaten/kota, pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial, pada Areal Penggunaan Lain, pada kawasan konservasi, dan pada semua kabupaten/kota untuk RO 3- RO 11. Adapun Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada arahan aksi mitigasi RO 11 yaitu Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 22.477,55 Ha, dimana konservasi keanekaragaman hayati program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang mencakup; (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi, (3) Konservasi Spesies dan Genetik, dan (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, serta juga merupakan bagian dari program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pembinaan konservasi di luar kawasan hutan negara. Kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Lokasi prioritas untuk perlindungan areal konservasi tinggi pada berbagai fungsi Kawasan hutan. Berikut adalah tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi rencana kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 2. 36

**Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink
2030 Kab.TTU**

No	Kecamatan	RO11 (Ha)
1	Kec. Biboki Anleu	585.69
2	Kec. Biboki Feotleu	500.32
3	Kec. Biboki Moenleu	6.05
4	Kec. Biboki Selatan	2361.11
5	Kec. Biboki Utara	103.30
6	Kec. Bikomi Nilulat	549.82
7	Kec. Bikomi Selatan	5.22
8	Kec. Bikomi Tengah	45.71
9	Kec. Bikomi Utara	235.09
10	Kec. Insana	487.68



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.40-

No	Kecamatan	RO11 (Ha)
11	Kec. Insana Barat	1727.16
12	Kec. Insana Fafinesu	2657.22
13	Kec. Insana Tengah	2286.09
14	Kec. Insana Utara	609.14
15	Kec. Miomaffo Barat	2473.35
16	Kec. Miomaffo Tengah	80.46
17	Kec. Miomaffo Timur	2972.91
18	Kec. Musi	230.86
19	Kec. Mutis	1495.27
20	Kec. Naibenu	1540.38
21	Kec. Noemuti	1.03
22	Kota Kefamenanu	1523.72
Grand Total		22477.55

Sumber: Rencana Kerja Indonesia's Folu Netsink 2030 Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

E. Kebencanaan

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain adalah kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir bandang, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan cuaca ekstrim, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan banjir. Berikut adalah data rill kejadian bencana di Kabupaten TTU.

1) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kab.TTU

Kecamatan	Indeks Risiko Gempa Bumi (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	2.776,44	14.564,90	11.626,40	28.967,75
Biboki Feotleu	1.230,74	9.070,54	1.185,15	11.486,44
Biboki Moenleu	529,08	9.657,03	4.616,59	14.802,70
Biboki Selatan	2.133,63	8.597,58	3.333,67	14.064,88
Biboki Tanpah	646,94	2.062,48	3.345,11	6.054,53
Biboki Utara	331,37	3.029,43	3.036,23	6.397,04
Bikomi Nilulat	405,31	2.216,44	1.423,61	4.045,36



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.41-

Kecamatan	Indeks Risiko Gempa Bumi (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bikomi Selatan	64,94	4.339,82	9.130,91	13.535,67
Bikomi Tengah	1,67	1.865,56	2.613,40	4.480,63
Bikomi Utara	347,21	3.248,53	1.347,56	4.943,30
Insana	218,98	10.417,15	14.647,01	25.283,14
Insana Barat	487,21	2.575,60	6.115,53	9.178,34
Insana Fafinesu	1.615,46	4.316,58	1.644,47	7.576,51
Insana Tengah	867,76	5.783,96	5.309,76	11.961,48
Insana Utara	3.695,39	6.400,81	3.578,15	13.674,35
Miomaffo Barat	2.779,21	5.312,96	3.775,01	11.867,18
Miomaffo Tengah	424,98	2.491,31	3.021,31	5.937,59
Miomaffo Timur	1.873,12	4.556,32	1.895,34	8.324,78
Musi	672,89	2.225,39	1.145,53	4.043,82
Mutis	1.992,55	10.491,31	6.326,34	18.810,19
Naibenu	3.093,41	4.993,74	1.887,57	9.974,71
Noemuti	-	3.424,06	10.007,20	13.431,26
Noemuti Timur	15,86	1.423,51	3.864,02	5.303,39
Kota Kefamenanu	486,92	1.772,27	5.185,70	7.444,89
Total	26.691,09	124.837,26	110.061,58	261.589,93

Sumber: Data INARISK, 2022

Gambar 2. 14
Rawan Bencana Gempa Bumi



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi gempa bumi terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 28.967,75 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Musi dengan total sebesar 4.043,82.

2) Longsor

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

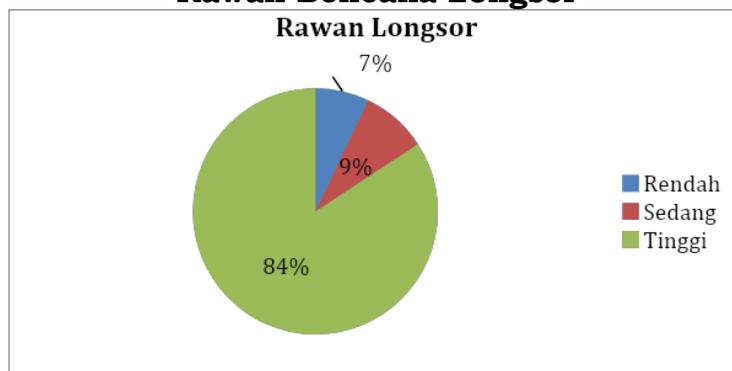
-II.42-

Tabel 2. 38
Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kab.TTU

Kecamatan	Indeks Risiko Longsor (Ha)				Total
	Tidak Rawan	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	15481,03	881,02	608,89	11.996,80	28.967,74
Biboki Feotleu	768,58	770,4	479,57	9.467,89	11.486,44
Biboki Moenleu	6404,91	752,91	671,04	6.973,84	14.802,70
Biboki Selatan	2044,33	857,06	512,07	10.651,43	14.064,89
Biboki Tanpah	3340,61	181,42	120,21	2.412,29	6.054,53
Biboki Utara	4147,2	142,05	179,9	1.927,88	6.397,03
Bikomi Nilulat	661	378,17	172,01	2.834,18	4.045,36
Bikomi Selatan	9628,19	815,59	2.142,90	949	13.535,68
Bikomi Tengah	2143,52	276,82	172,79	1.887,50	4.480,63
Bikomi Utara	882,74	135,41	144,6	3.780,55	4.943,30
Insana	13504,45	1.523,63	4.126,62	6.128,44	25.283,14
Insana Barat	5945,88	330,59	1.054,32	1.847,55	9.178,34
Insana Fafinesu	1052,5	409,19	171,52	5.943,30	7.576,51
Insana Tengah	5636,21	552,3	364,41	5.408,55	11.961,47
Insana Utara	4243,16	399,21	284,92	8.747,06	13.674,35
Miomaffo Barat	1503,34	568,37	368,45	9.427,01	11.867,17
Miomaffo Tengah	3447,78	165,65	162,84	2.161,32	5.937,59
Miomaffo Timur	1029,38	397,54	304,34	6.593,52	8.324,78
Musi	512,37	290,91	203	3.037,53	4.043,81
Mutis	477,88	478,04	222,47	17.631,81	18.810,20
Naibenu	1009,3	224,85	170,2	8.570,36	9.974,71
Noemuti	10120,41	452,67	412,87	2.445,31	13.431,26
Noemuti Timur	3804,75	111,68	560,56	826,4	5.303,39
Kota Kefamenanu	5574,51	152,71	104,18	1.613,48	7.444,88
Total	103364,03	11.248,21	13.714,67	133.263,02	261.589,93

Sumber: Data INARISK, 2022

Gambar 2. 15
Rawan Bencana Longsor



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi longsor terdapat pada kecamatan Mutis dengan total sebesar 18.332,31 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Noemuti Timur dengan total sebesar 1.498,64.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.43-

**Gambar 2. 16
Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kab.TTU**



3) Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 39
Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kab.TTU**

Kecamatan	Indeks Risiko Banjir (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	25,92	2.866,47	2.765,14	5.657,52
Biboki Feotleu	-	2,10	-	2,10
Biboki Moenleu	5,84	1.215,51	1.128,03	2.349,38
Biboki Selatan	-	249,24	302,78	552,02
Biboki Tanpah	-	347,21	168,26	515,47
Biboki Utara	-	619,17	511,37	1.130,53
Bikomi Nilulat	-	26,87	52,47	79,33
Bikomi Selatan	-	519,98	928,52	1.448,50
Bikomi Tengah	-	135,08	144,64	279,71
Bikomi Utara	-	17,99	9,33	27,32
Insana	0,62	762,21	1.372,46	2.135,29
Insana Barat	-	312,81	500,31	813,12
Insana Fafinesu	0,62	46,22	70,22	117,06
Insana Tengah	8,19	797,60	844,67	1.650,46
Insana Utara	32,91	961,47	812,57	1.806,95
Miomaffo Barat	-	44,16	68,52	112,68
Miomaffo Tengah	1,51	109,04	216,15	326,70
Miomaffo Timur	-	21,29	44,77	66,06
Musi	-	12,93	31,11	44,04
Mutis	-	40,20	15,88	56,08
Naibenu	-	34,82	83,66	118,48
Noemuti	-	382,81	799,86	1.182,67
Noemuti Timur	-	271,00	474,35	745,35
Kota Kefamenanu	-	373,47	494,84	868,31
Total	75,62	10.169,67	11.839,90	22.085,19

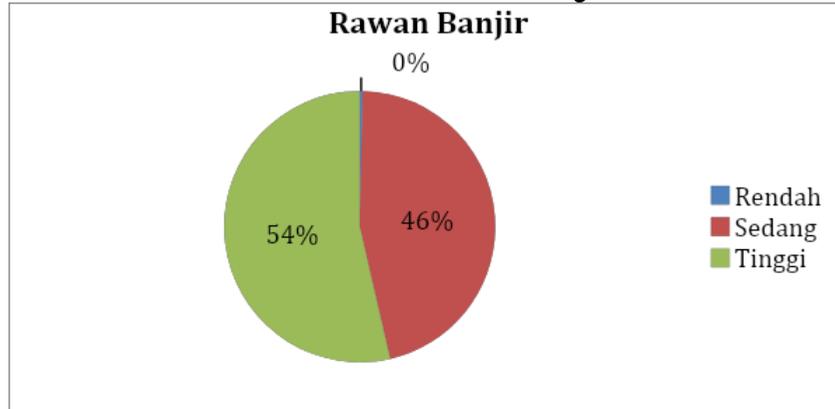
Sumber: Data INARISK, 2022



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.44-

**Gambar 2. 17
Rawan Bencana Banjir**



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi banjir terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 5.657,52 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Biboki Feotleu dengan total sebesar 2.10.

4) Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda- benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjuanan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 40
Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kab.TTU**

Kecamatan	Indeks Risiko Banjir Bandang (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	222,48	710,65	1.641,50	2.574,63
Biboki Feotleu	5,64	58,95	325,57	390,16
Biboki Moenleu	91,46	185,91	407,14	684,52
Biboki Selatan	34,14	99,32	307,91	441,37
Biboki Tanpah	3,26	63,35	262,45	329,06
Biboki Utara	18,40	44,74	195,77	258,90
Bikomi Nilulat	6,85	27,27	144,80	178,91
Bikomi Selatan	61,74	266,29	906,63	1.234,66
Bikomi Tengah	22,12	78,28	279,06	379,46
Bikomi Utara	9,01	42,83	107,75	159,59
Insana	53,68	248,51	852,24	1.154,43
Insana Barat	19,76	84,38	227,80	331,94
Insana Fafinesu	4,22	31,58	108,08	143,88
Insana Tengah	94,70	270,72	834,44	1.199,87
Insana Utara	145,55	234,68	694,28	1.074,51



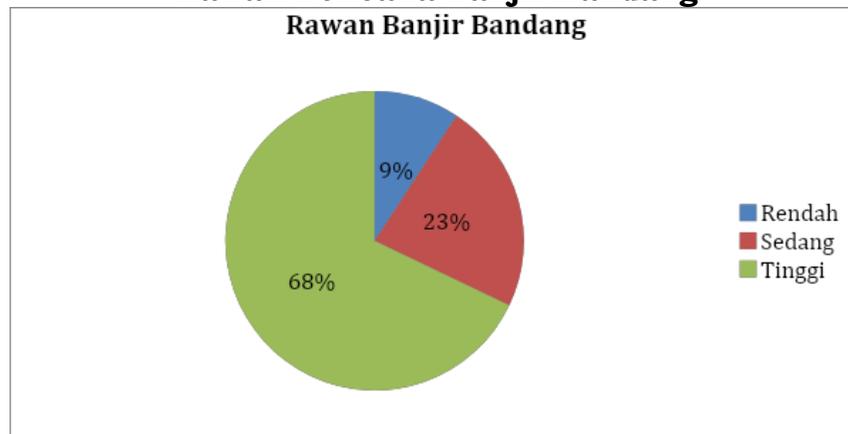
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.45-

Kecamatan	Indeks Risiko Banjir Bandang (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Miomaffo Barat	48,56	99,35	327,49	475,40
Miomaffo Tengah	-	9,78	24,69	34,47
Miomaffo Timur	119,82	94,34	217,92	432,08
Musi	23,22	33,87	115,00	172,10
Mutis	260,88	208,65	527,31	996,85
Naibenu	12,47	56,74	277,48	346,68
Noemuti	36,23	136,55	519,97	692,75
Noemuti Timur	27,53	83,68	348,56	459,76
Kota Kefamenanu	75,62	276,14	593,66	945,42
Total	1.397,36	3.446,56	10.247,48	15.091,39

Sumber: Data INARISK, 2022

Gambar 2. 18
Rawan Bencana Banjir Bandang



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi banjir bandang terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 2.574,63 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Miomaffo Tengah dengan total sebesar 34,47.

5) Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41
Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kecamatan	Indeks Risiko Tsunami (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	16,93	17,32	348,65	382,90
Biboki Moenleu	2,53	6,78	234,23	243,54
Insana Utara	11,43	26,06	280,97	318,46
Total	30,88	50,16	863,85	944,90

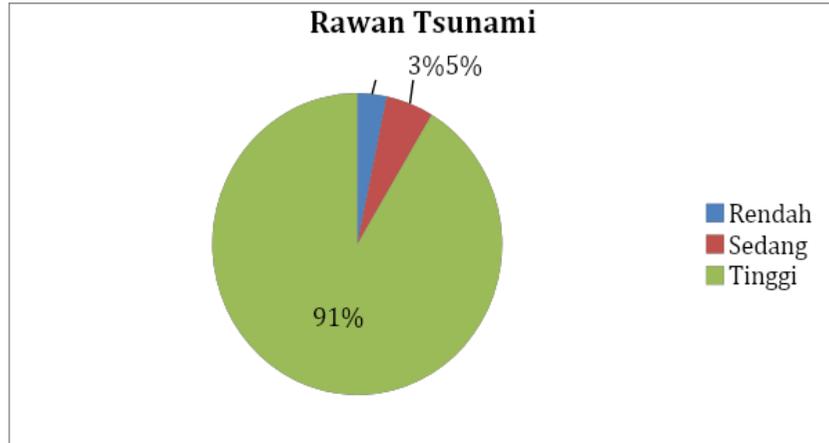
Sumber: Data INARISK, 2022



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.46-

**Gambar 2. 19
Rawan Bencana Tsunami**



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi tsunami terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 382,90 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Biboki Moenleu dengan total sebesar 243,54.

6) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (hutan, semak, dll). Penyebab kebakaran hutan dan lahan secara garis besar dikarenakan oleh 2 hal yaitu kebakaran yang terjadi karena alam itu sendiri dan kebakaran yang terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran yang terjadi akibat alam misalnya karena petir, kemarau panjang sehingga matahari akan membakar tanaman yang kering melalui hal sederhana seperti adanya percikan api karena pembiasan cahaya dari kaca/ kaleng yang mengkilap. Kebakaran oleh manusia misalnya hutan sengaja dibakar karena ingin membuka lahan baru. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 42
Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab.TTU**

Kecamatan	Indeks Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	11.972,75	8.929,96	298,30	21.201,01
Biboki Feotleu	9.421,43	471,88	-	9.893,31
Biboki Moenleu	6.920,36	4.166,97	3,84	11.091,18
Biboki Selatan	11.590,84	0,20	-	11.591,03
Biboki Tanpah	3.034,48	331,91	-	3.366,39
Biboki Utara	3.516,99	97,60	-	3.614,58
Bikomi Nilulat	2.941,23	460,22	-	3.401,44
Bikomi Selatan	6.372,28	3.518,89	1.433,55	11.324,72
Bikomi Tengah	3.824,45	69,25	-	3.893,69
Bikomi Utara	3.776,38	159,61	-	3.935,99
Insana	14.628,31	3.502,30	990,19	19.120,80
Insana Barat	3.549,84	3.021,94	322,23	6.894,01
Insana Fafinesu	4.674,49	2.270,92	-	6.945,41
Insana Tengah	4.670,81	3.566,21	1.887,68	10.124,70
Insana Utara	3.293,40	4.409,03	2.540,39	10.242,83



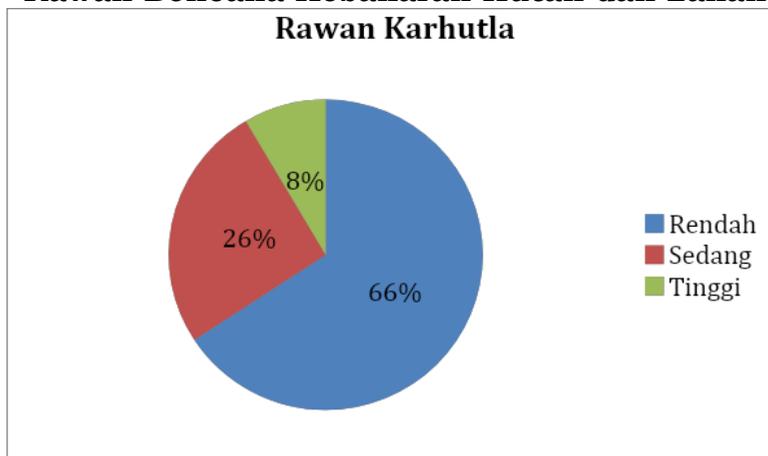
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.47-

Kecamatan	Indeks Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Miomaffo Barat	6.631,46	2.450,64	95,22	9.177,31
Miomaffo Tengah	3.379,23	1.402,47	13,23	4.794,93
Miomaffo Timur	6.700,60	300,51	-	7.001,11
Musi	2.657,74	861,01	-	3.518,75
Mutis	3.162,44	4.581,33	8.325,69	16.069,46
Naibenu	7.720,38	1.070,72	-	8.791,10
Noemuti	4.076,26	5.546,51	1.013,75	10.636,53
Noemuti Timur	3.553,06	-	-	3.553,06
Kota Kefamenanu	2.345,92	1.479,31	428,45	4.253,68
Total	134.415,14	52.669,36	17.352,53	204.437,03

Sumber: Data INARISK, 2022

Gambar 2. 20
Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Rawan Karhutla



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi kebakaran hutan dan lahan terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 21.201,01 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Biboki Tanpah dengan total sebesar 3.366,39.

7) Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan adalah kejadian cuaca atau kondisi iklim yang tidak biasa dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan ekosistem alam. Peristiwa ini bisa berlangsung singkat, seperti hujan lebat, tornado, siklon tropis, pembekuan, gelombang panas, dan banjir. Namun, ada juga yang bertahan lama, contohnya kekeringan dan kebakaran hutan ketika musim kemarau. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43
Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kab.TTU

Kecamatan	Indeks Risiko Cuaca Ekstrim (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	12.545,77	4.873,04	2.033,86	19.452,68
Biboki Moenleu	2.211,90	1.559,38	1.213,44	4.984,72
Biboki Selatan	894,46	60,77	51,73	1.006,96



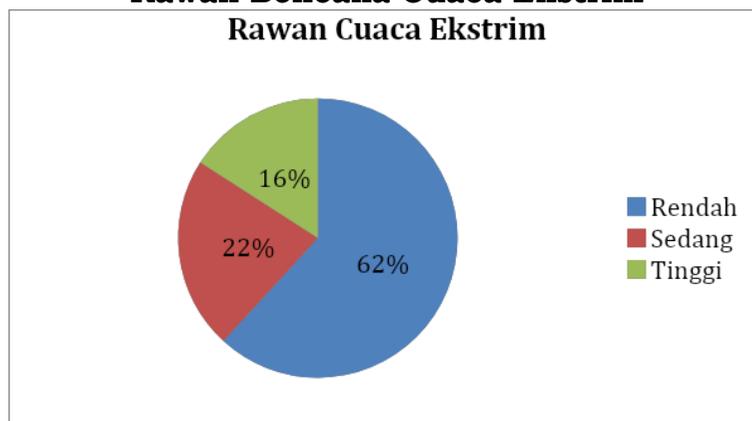
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.48-

Kecamatan	Indeks Risiko Cuaca Ekstrim (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Biboki Tanpah	373,67	491,60	1.177,46	2.042,73
Biboki Utara	3,23	10,10	1.207,50	1.220,83
Bikomi Nilulat	434,86	19,19	0,53	454,59
Bikomi Selatan	8.373,78	2.678,93	1.504,06	12.556,76
Bikomi Tengah	1.088,13	399,03	59,22	1.546,37
Bikomi Utara	87,23	10,42	-	97,65
Insana	12.690,89	3.694,20	2.048,48	18.433,58
Insana Barat	3.053,23	1.362,07	2.015,29	6.430,59
Insana Fafinesu	26,91	147,92	122,25	297,08
Insana Tengah	4.104,40	1.761,85	1.044,17	6.910,42
Insana Utara	3.376,85	1.571,45	561,24	5.509,54
Miomaffo Barat	856,48	156,08	-	1.012,56
Miomaffo Tengah	3.059,41	248,37	-	3.307,78
Miomaffo Timur	1.150,35	-	-	1.150,35
Musi	0,59	3,17	-	3,77
Mutis	74,41	18,54	-	92,96
Naibenu	1.042,47	18,10	-	1.060,57
Noemuti	8.108,94	3.265,72	2.051,16	13.425,82
Noemuti Timur	3.460,92	870,93	943,69	5.275,53
Kota Kefamenanu	2.107,98	1.697,84	1.768,82	5.574,64
Total	69.126,87	24.918,72	17.802,90	111.848,49

Sumber: Data INARISK, 2022

**Gambar 2. 21
Rawan Bencana Cuaca Ekstrim**



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi cuaca ekstrim terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 19.452,68 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Musi dengan total sebesar 3,77.

8) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya di laut maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang ekstrim terjadi karena adanya angin kencang / puting beliung, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.49-

gelombang ekstrim adalah sekitar 10-100km/jam. Gelombang ekstrim di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai yang disebut dengan Abrasi. Abrasi adalah fenomena alam yang selalu menjadi masalah di lingkungan pantai. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44

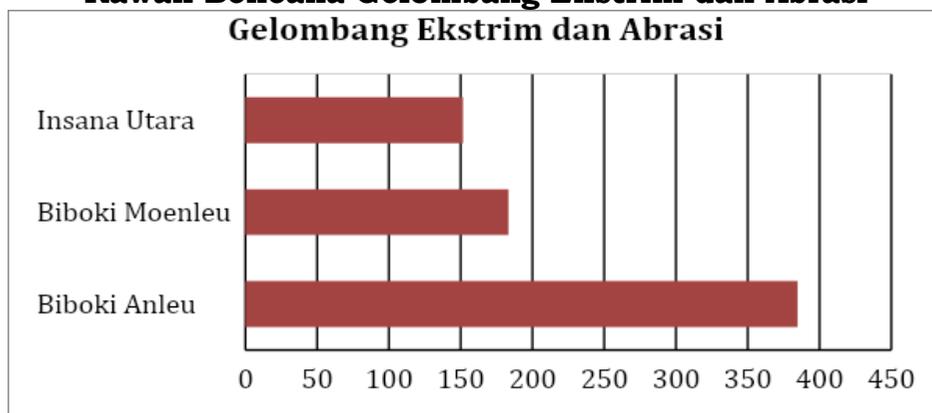
Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kab.TTU

Kecamatan	Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi (Ha)	Total
Biboki Anleu	384,69	384,69
Biboki Moenleu	183,25	183,25
Insana Utara	151,58	151,58
Total	719,52	719,52

Sumber: Data INARISK, 2022

Gambar 2. 22

Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi gelombang ekstrim dan abrasi terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 384,69 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Insana Utara dengan total sebesar 151,58.

9) Kekeringan

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga ber Tahun- Tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus- menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.50-

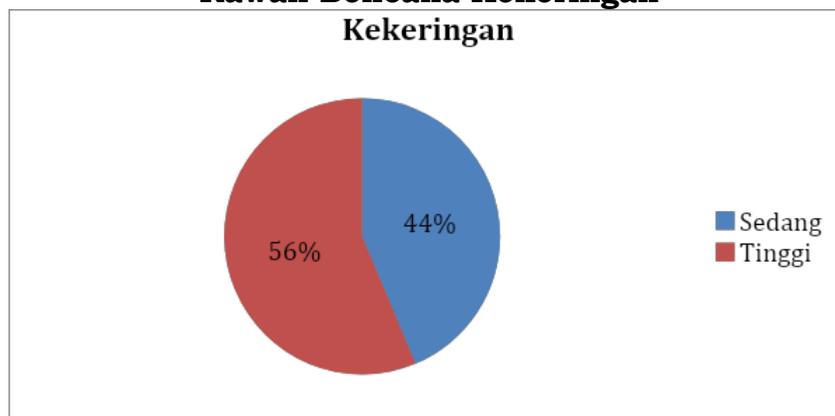
tabel berikut:

Tabel 2. 45
Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kab.TTU

Kecamatan	Indeks Risiko Kekeringan (Ha)		Total
	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	28.967,75	-	28.967,75
Biboki Feotleu	11.486,44	-	11.486,44
Biboki Moenleu	14.802,70	-	14.802,70
Biboki Selatan	13.250,25	814,63	14.064,88
Biboki Tanpah	6.054,53	-	6.054,53
Biboki Utara	6.397,04	-	6.397,04
Bikomi Nilulat	-	4.045,36	4.045,36
Bikomi Selatan	-	13.535,67	13.535,67
Bikomi Tengah	-	4.480,63	4.480,63
Bikomi Utara	-	4.943,30	4.943,30
Insana	756,60	24.526,54	25.283,14
Insana Barat	-	9.178,34	9.178,34
Insana Fafinesu	3.611,59	3.964,92	7.576,51
Insana Tengah	6.804,04	5.157,44	11.961,48
Insana Utara	13.674,35	-	13.674,35
Miomaffo Barat	-	11.867,18	11.867,18
Miomaffo Tengah	-	5.937,59	5.937,59
Miomaffo Timur	399,31	7.925,47	8.324,78
Musi	-	4.043,82	4.043,82
Mutis	-	18.810,19	18.810,19
Naibenu	8.048,80	1.925,91	9.974,71
Noemuti	-	13.431,26	13.431,26
Noemuti Timur	-	5.303,39	5.303,39
Kota Kefamenanu	-	7.444,89	7.444,89
Total	114.253,40	147.336,53	261.589,93

Sumber: Data INARISK, 2022

Gambar 2. 23
Rawan Bencana Kekeringan



Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi kekeringan terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 28.967,75 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Musi dengan total sebesar 4.043,82.

- 10) Likuifaksi
Likuifaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.51-

kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba. Likuifaksi hampir sebagian besar terjadi pada tanah jenis pasir, terutama jenis pasir lepas. Data INARISK Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

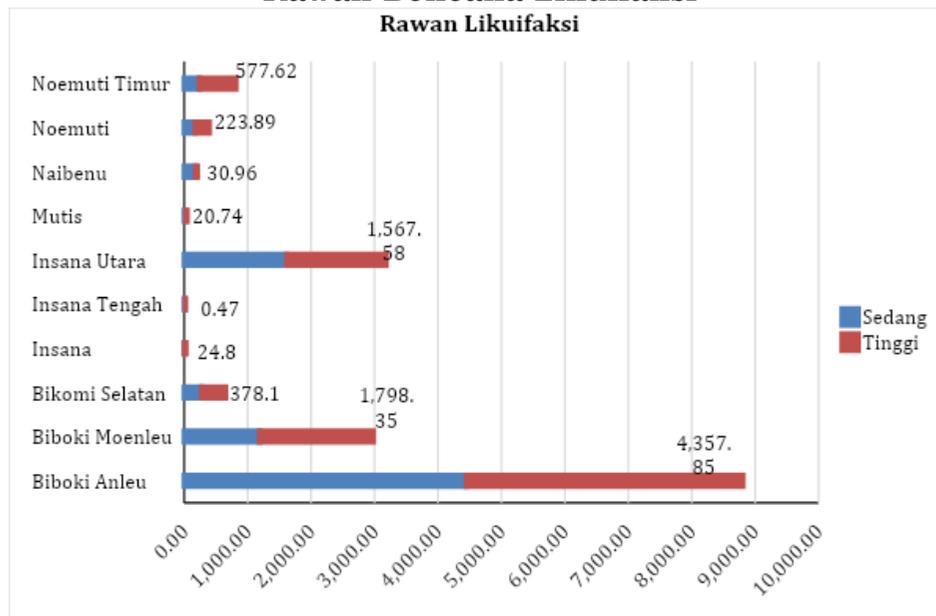
Tabel 2. 46

Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kecamatan	Indeks Risiko Likuifaksi (Ha)		Total
	Sedang	Tinggi	
Biboki Anleu	4.449,68	4.357,85	8.807,53
Biboki Moenleu	1.186,85	1.798,35	2.985,20
Bikomi Selatan	275,86	378,10	653,97
Insana	4,47	24,80	29,27
Insana Tengah	17,03	0,47	17,50
Insana Utara	1.615,76	1.567,58	3.183,34
Mutis	26,67	20,74	47,40
Naibenu	179,57	30,96	210,53
Noemuti	172,78	223,89	396,67
Noemuti Timur	240,26	577,62	817,88
Total	8.168,93	8.980,37	17.149,31

Sumber: Data INARISK, 2022

**Gambar 2. 24
Rawan Bencana Likuifaksi**



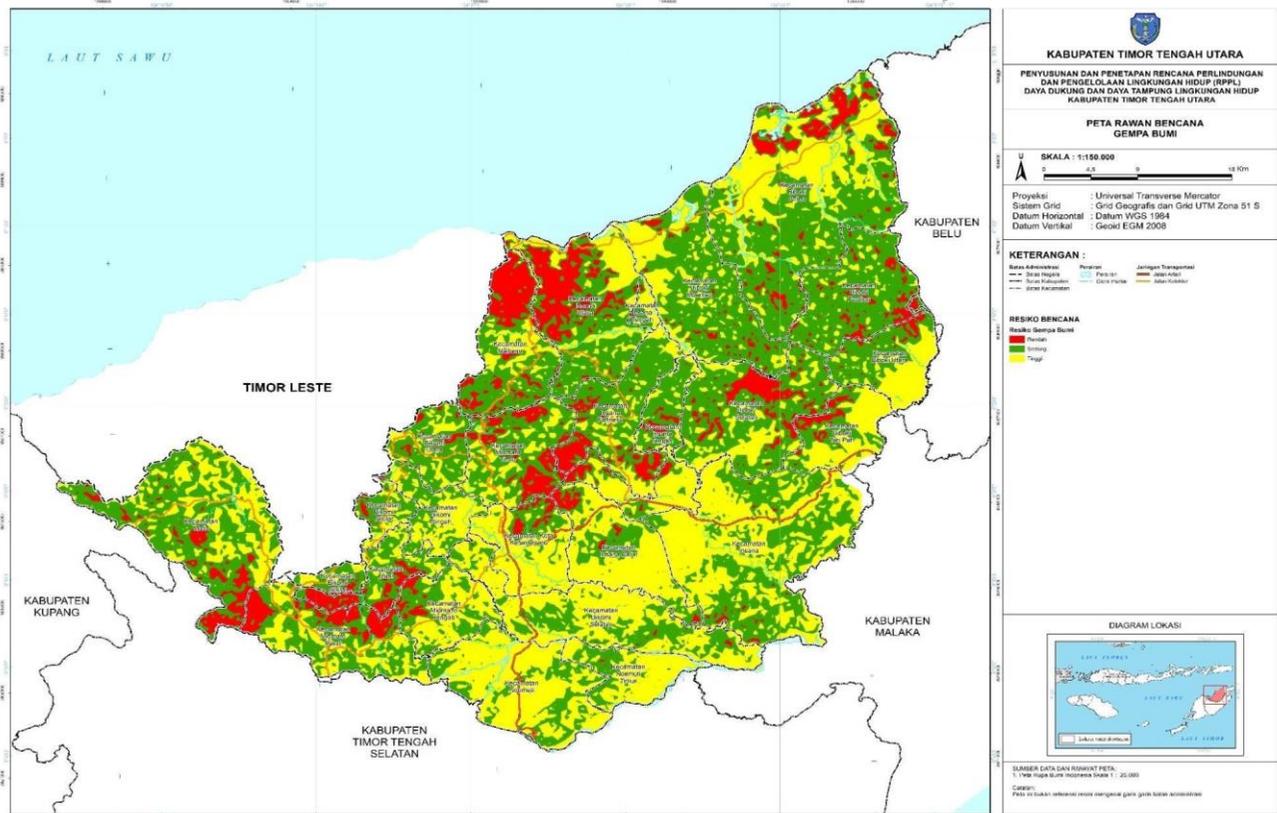
Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa resiko bencana terjadinya rawan tinggi likuifaksi terdapat pada kecamatan Biboki Anleu dengan total sebesar 8.807,53 sedangkan untuk jumlah rawan bencana paling rendah terdapat pada kecamatan Insana Tengah dengan total sebesar 17,50.



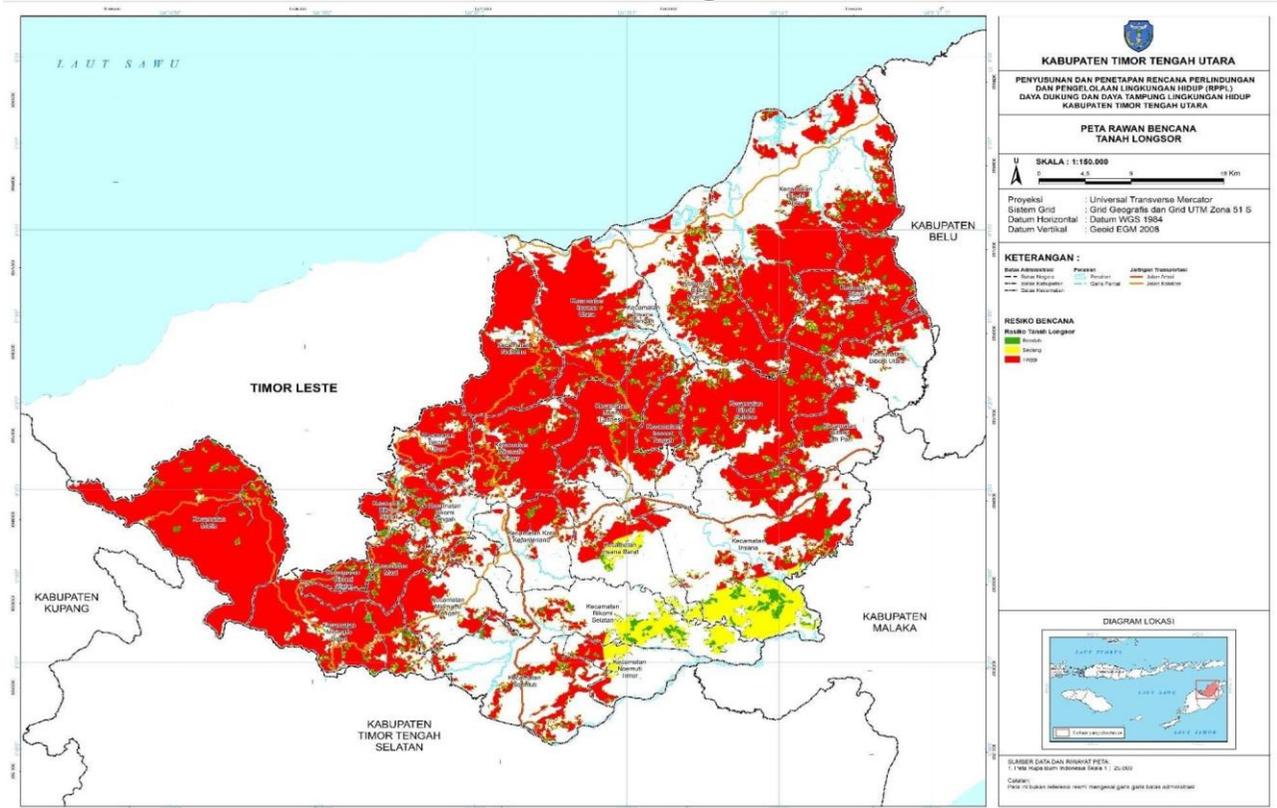
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.52-

Peta 2. 8 Rawan Gempa Bumi



Peta 2. 9 Rawan Longsor

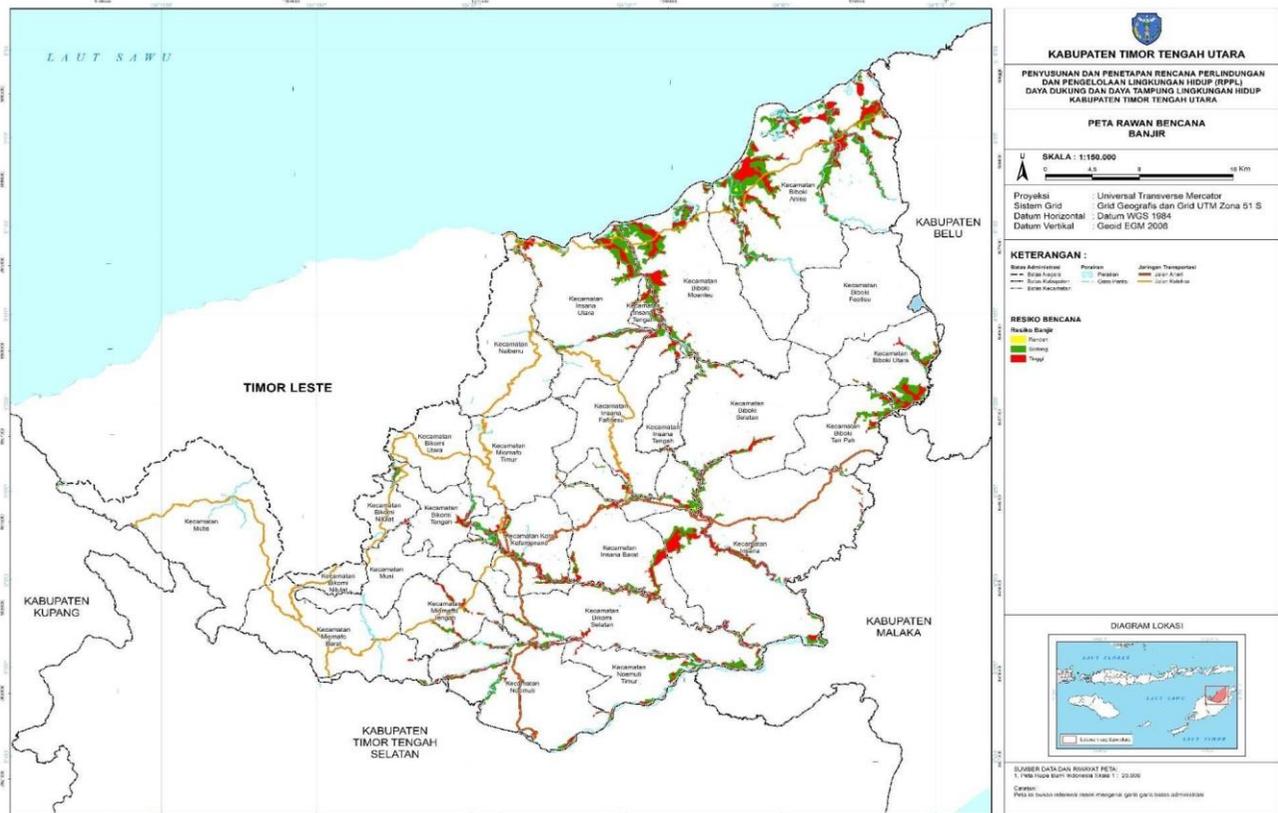




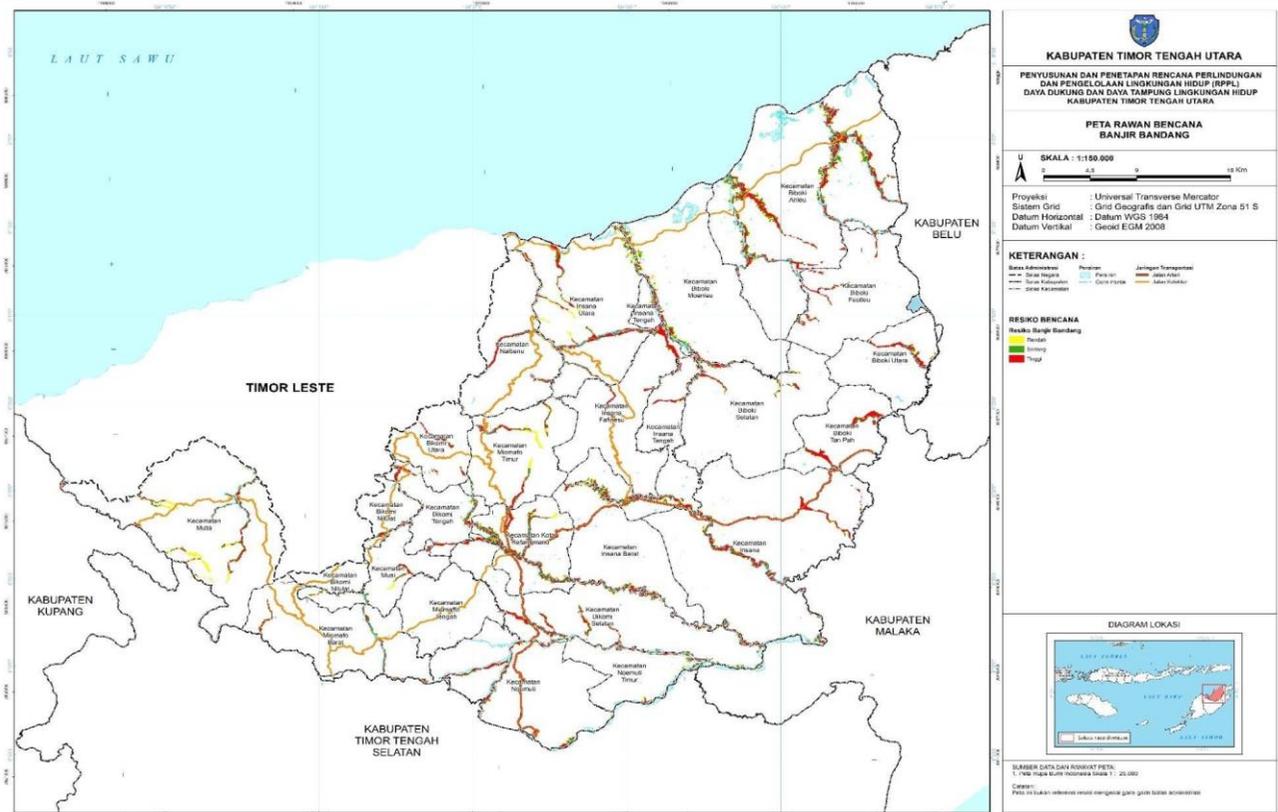
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.53-

Peta 2. 10 Rawan Longsor



Peta 2. 11 Rawan Banjir Bandang

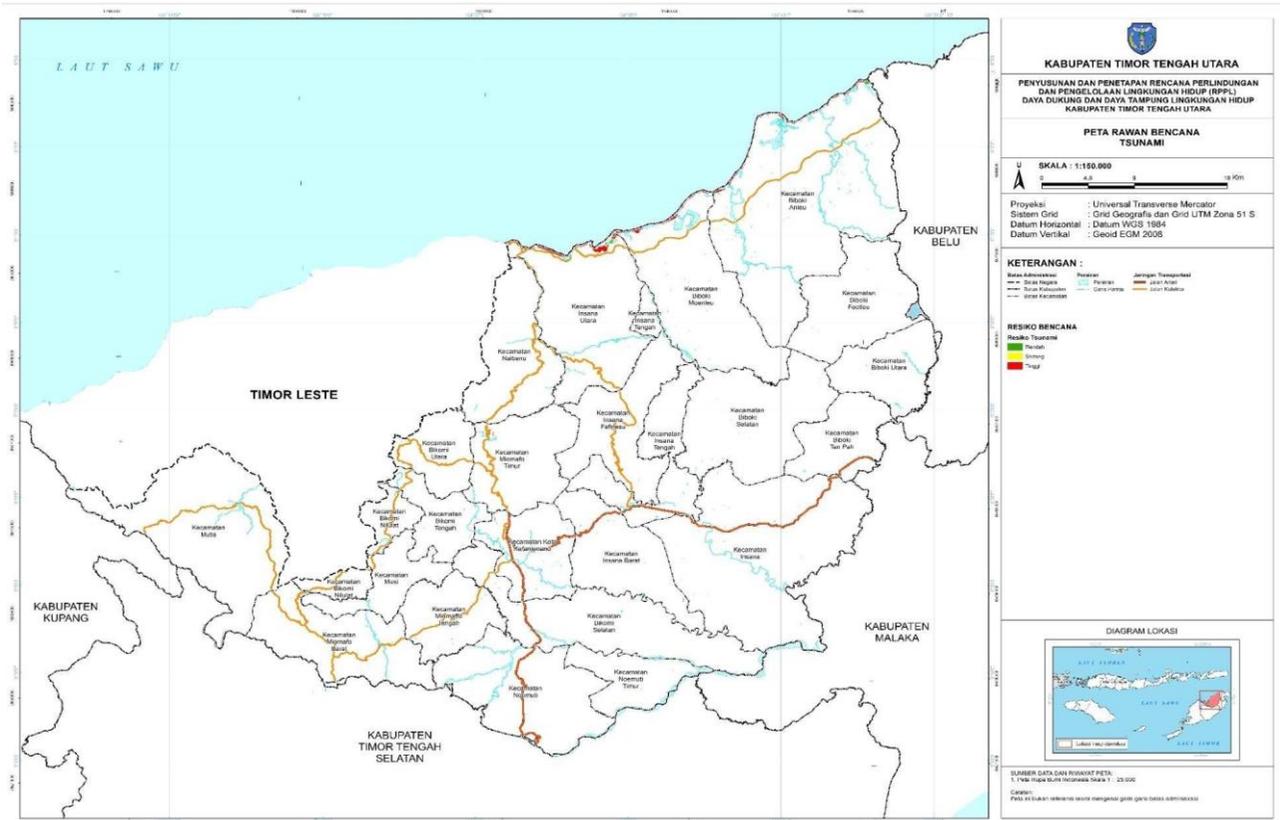




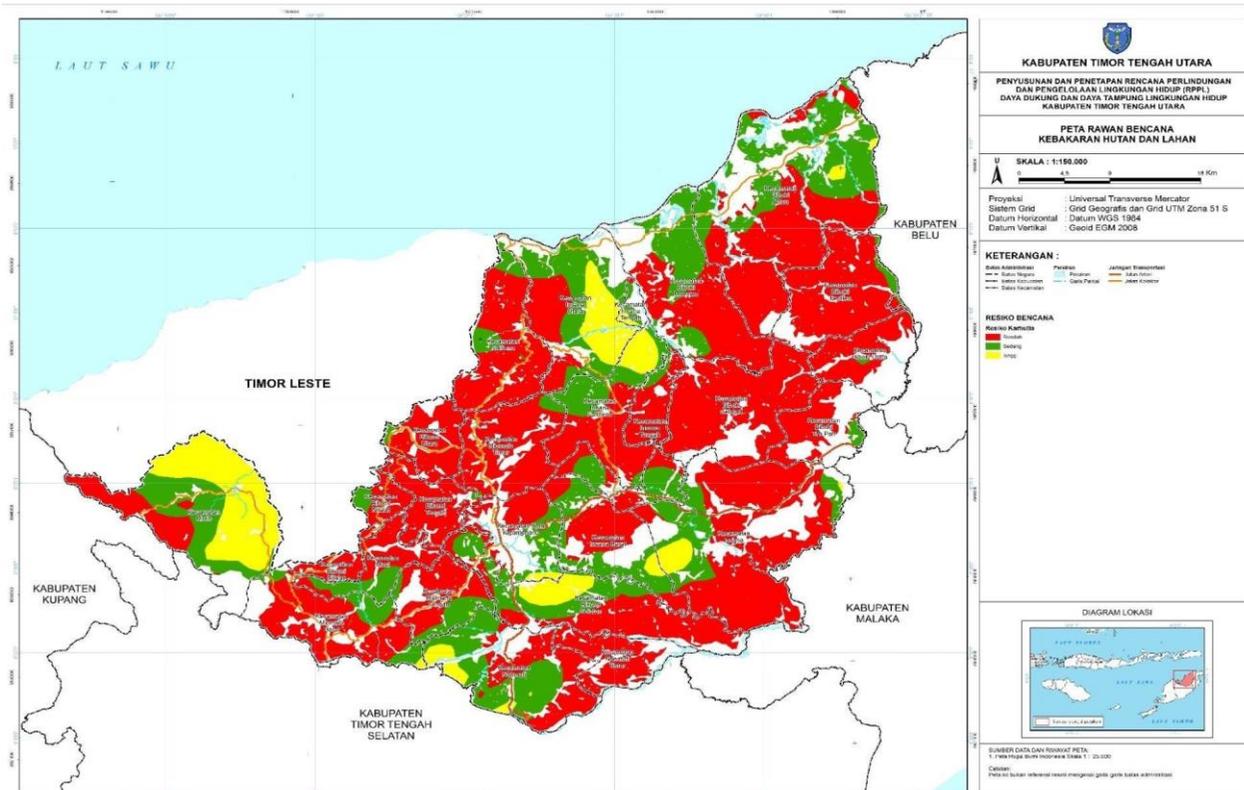
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.54-

Peta 2.12 Rawan Tsunami



Peta 2.13 Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

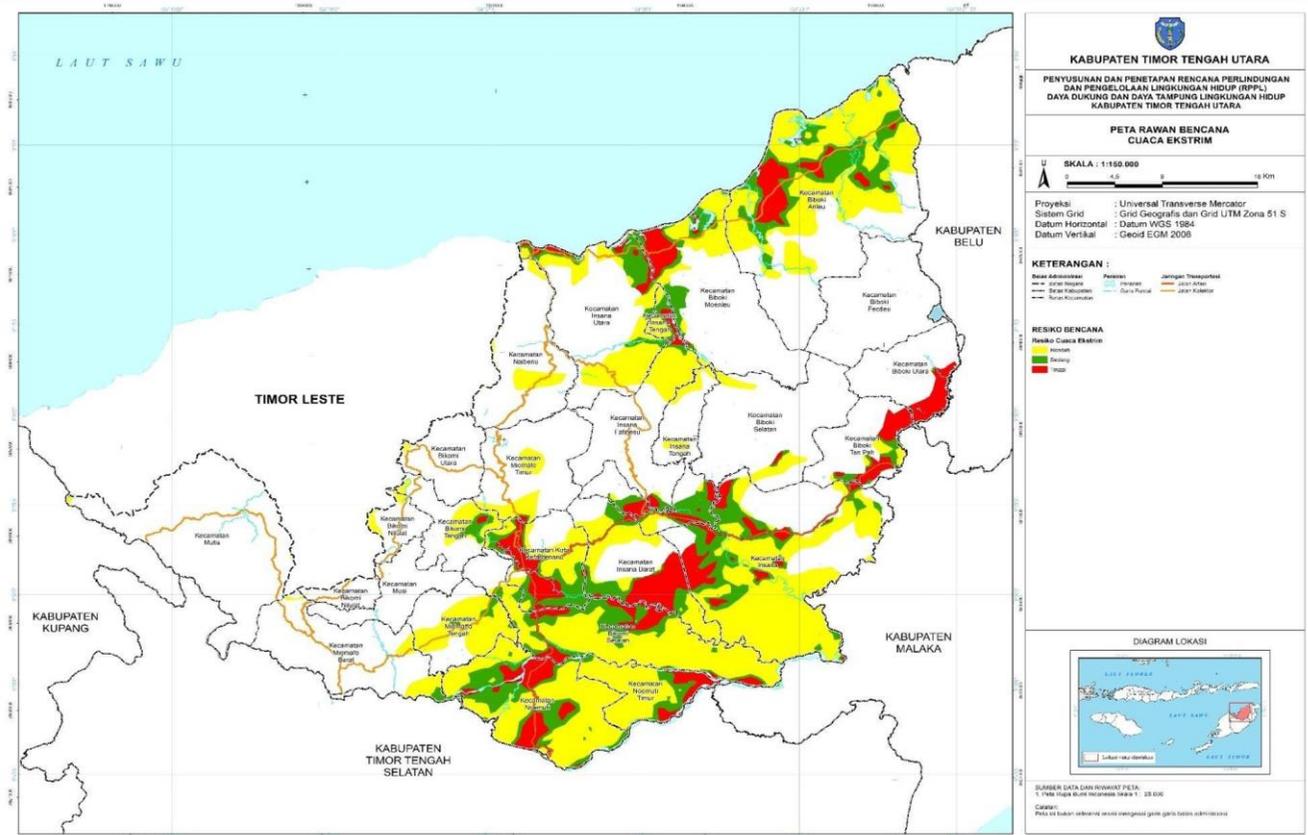




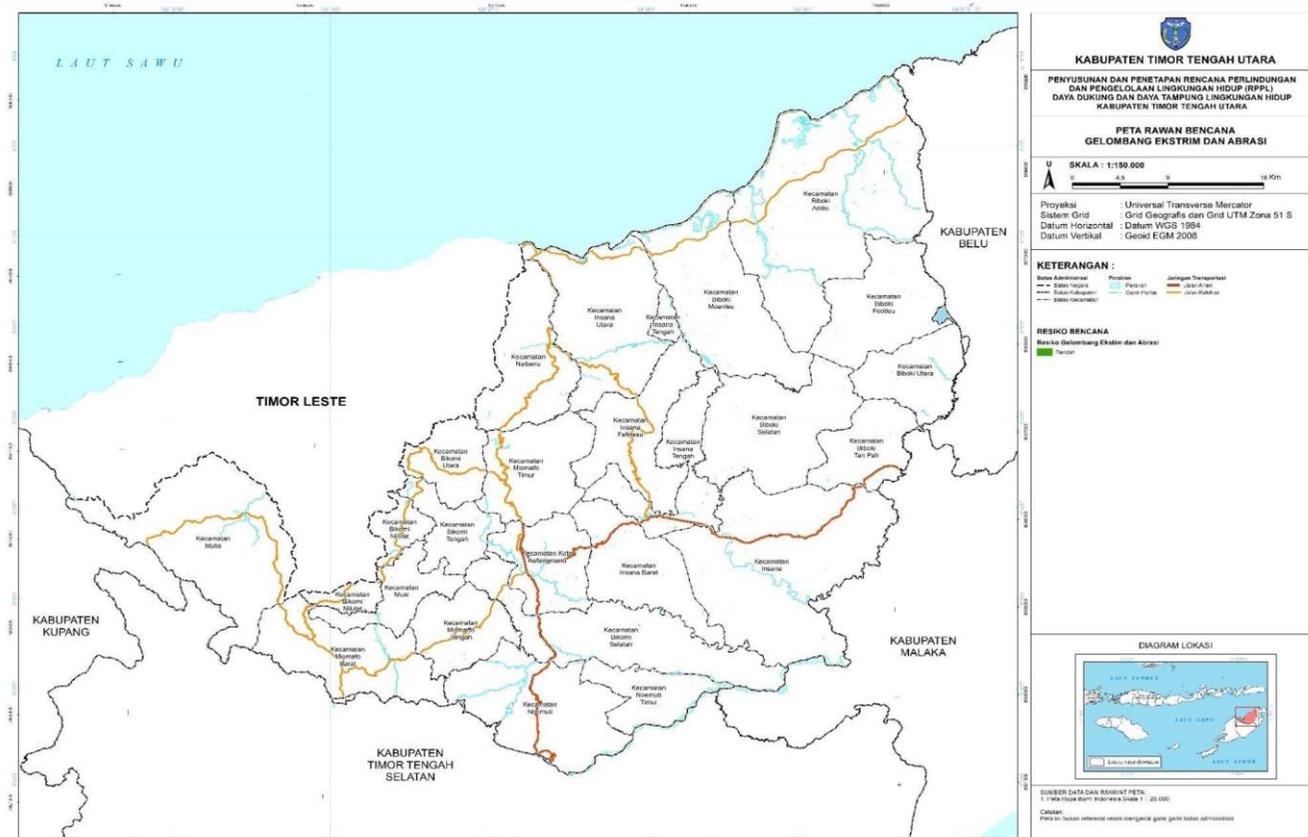
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.55-

Peta 2.14 Rawan Cuaca Ekstrim



Peta 2.15 Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi

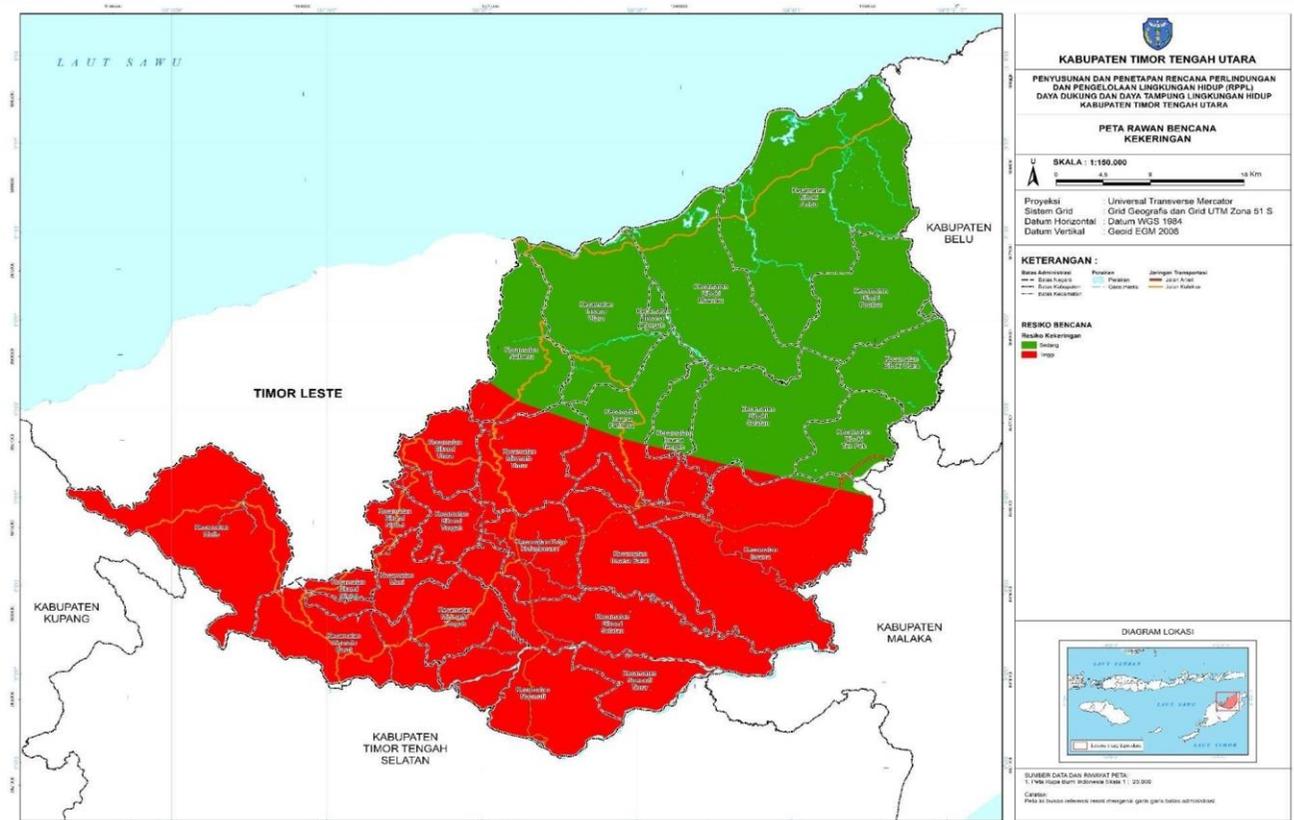




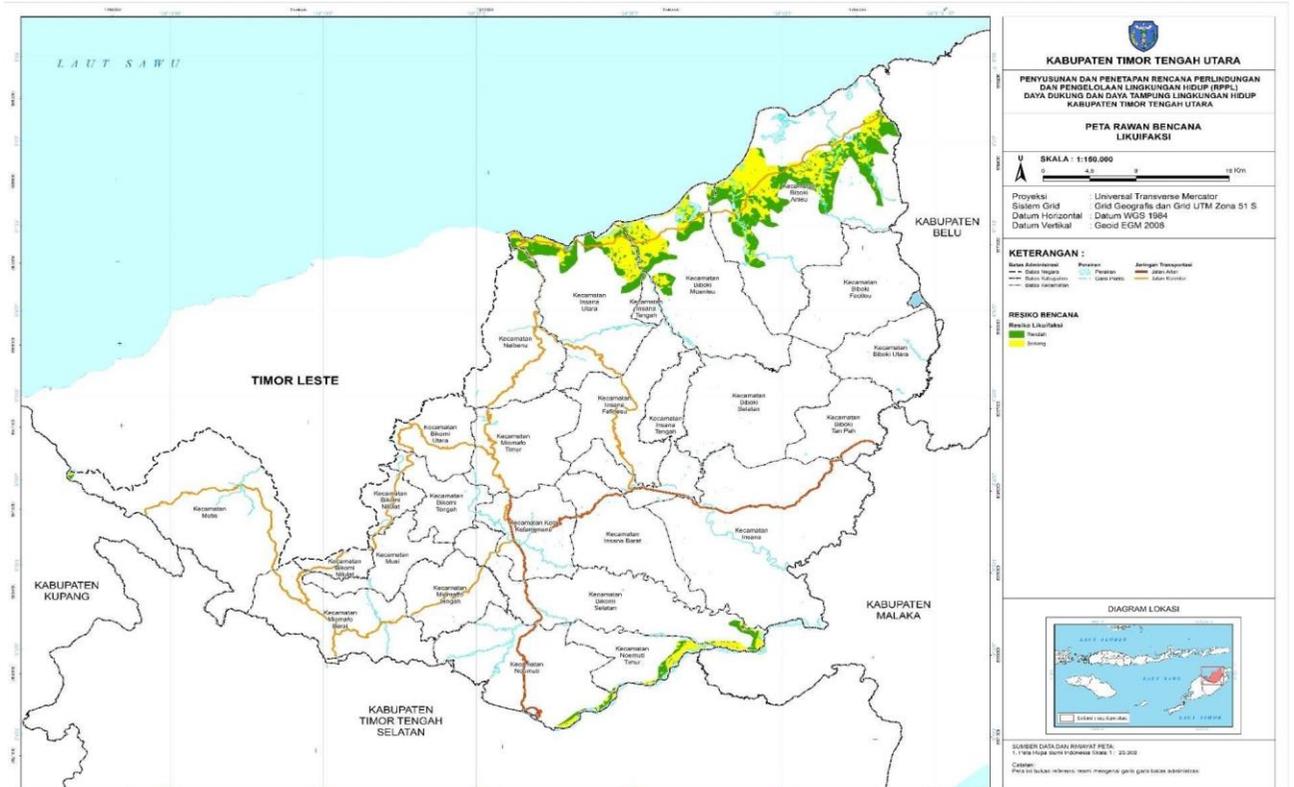
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.56-

Peta 2.16 Rawan Kekeringan



Peta 2.17 Rawan Likuifaksi





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.57-

2.1.2 Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk umumnya mengikuti dan cenderung berorientasi ke wilayah/ daerah yang memiliki aktivitas lebih ramai atau terdapat potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa. Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dari Tahun 2021- 2023, yakni pada Tahun 2021 terdapat 262.698 jiwa, meningkat pada Tahun 2022 menjadi 268.067 jiwa, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 271.277 jiwa. Dimana pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 259.829 jiwa dan pada Tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 276.150 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 47
Jumlah Penduduk di Kab.TTU Tahun 2019-2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Miomaffo Barat	16.429	15.337	15.413	15.634	15.724
2	Miomaffo Tengah	6.546	6.081	6.162	6.302	6.329
3	Musi	4.980	4.740	4.806	4.918	4.991
4	Mutis	7.498	7.150	7.201	7.320	7.378
5	Miomaffo Timur	13.310	12.417	12.601	12.906	13.111
6	Noemuti	13.485	12.743	12.922	13.224	13.423
7	Bikomi Selatan	11.601	11.188	11.323	11.566	11.717
8	Bikomi Tengah	8.154	7.613	7.695	7.850	7.941
9	Bikomi Nilulat	5.091	4.800	4.847	4.940	4.992
10	Bikomi Utara	6.636	6.252	6.317	6.442	6.514
11	Naibenu	5.853	5.576	5.634	5.746	5.811
12	Noemuti Timur	4.548	4.270	4.325	4.420	4.481
13	Kota Kefamenanu	49.725	47.766	48.202	49.095	49.589
14	Insana	22.500	20.996	21.282	21.771	22.089
15	Insana Utara	10.574	10.166	10.311	10.555	10.715
16	Insana Barat	11.416	10.660	10.840	11.125	11.324
17	Insana Tengah	11.700	10.491	10.618	10.847	10.988
18	Insana Fafinesu	6.273	5.898	5.991	6.142	6.245
19	Biboki Selatan	10.324	9.393	9.457	9.610	9.684
20	Biboki Tanpah	5.861	5.620	5.643	5.719	5.746
21	Biboki Moenleu	8.378	8.021	8.116	8.288	8.393
22	Biboki Utara	11.973	11.269	11.361	11.561	11.665
23	Biboki Anleu	18.790	17.128	17.350	17.738	17.985
24	Biboki Feotleu	4.505	4.254	4.281	4.384	4.379
Total		276.150	259.829	262.698	268.067	271.277

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2023

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 yaitu 104 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota Kefamenanu yaitu 666 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Biboki Feotleu yaitu 38 jiwa/km². Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Kepadatan Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.58-

**Tabel 2. 48
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Luas (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Miomaffo Barat	15.724	118,67	133
2	Miomaffo Tengah	6.329	59,38	107
3	Musi	4.991	40,44	123
4	Mutis	7.378	188,1	39
5	Miomaffo Timur	13.111	83,25	157
6	Noemuti	13.423	134,31	100
7	Bikomi Selatan	11.717	135,36	87
8	Bikomi Tengah	7.941	44,81	177
9	Bikomi Nilulat	4.992	40,45	123
10	Bikomi Utara	6.514	49,43	132
11	Naibenu	5.811	99,75	58
12	Noemuti Timur	4.481	53,03	84
13	Kota Kefamenanu	49.589	74,45	666
14	Insana	22.089	252,83	87
15	Insana Utara	10.715	136,74	78
16	Insana Barat	11.324	91,78	123
17	Insana Tengah	10.988	119,61	92
18	Insana Fafinesu	6.245	75,77	82
19	Biboki Selatan	9.684	140,65	69
20	Biboki Tanpah	5.746	60,55	95
21	Biboki Moenleu	8.393	148,03	57
22	Biboki Utara	11.665	63,97	182
23	Biboki Anleu	17.985	289,68	62
24	Biboki Feotleu	4.379	114,86	38
Jumlah		271.277	2.615,90	104

Sumber: Hasil Analisa, 2024

B. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur maka jumlah penduduk pada Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini didominasi oleh penduduk yang berusia 5-9 Tahun yaitu 28.033 jiwa. Pada tabel dibawah diketahui bahwa sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk usia lanjutnya berjumlah sedikit. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 49
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab.TTU Tahun 2023**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumah
1	0-4	13.378	12.978	26.356
2	5-9	14.330	13.703	28.033
3	10-14	12.891	12.415	25.306
4	15-19	12.297	11.760	24.057
5	20-24	12.056	11.466	23.522
6	25-29	11.222	10.515	21.737
7	30-34	10.131	9.895	20.026
8	35-39	8.424	8.947	17.371
9	40-44	8.015	8.505	16.520
10	45-49	6.914	7.327	14.241
11	50-54	6.433	6.758	13.191
12	55-59	5.906	6.126	12.032
13	60-64	4.734	5.018	9.752
14	65-69	3.644	3.807	7.451



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.59-

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15	70-74	2.619	2.636	5.255
16	75+	3.094	3.333	6.427

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi berisikan indikator-indikator perekonomian seperti laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, NTP/NTN/NTPI, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Tabel 2. 50
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kab.TTU Tahun 2019 – 2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	5,10
2020	-0,65
2021	2,36
2022	2,80
2023	3,00

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2024

Gambar 2. 25
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTU pada Tahun 2019 sebesar 5,10 persen mengalami penurunan hingga -0,65 persen di Tahun 2020, penurunan angka pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh kondisi Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 masih ada pengaruh kondisi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir dan dengan munculnya varian baru virus Covid 19, namun ada peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,36 persen. Pada Tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,80 persen, hingga Tahun 2023 meningkat mencapai angka 3,00.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.60-

Tabel 2. 51
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	-0,33	3,73	3,97	2,31
2	Pertambangan dan Penggalian	13,34	-29,61	0,51	2,09	3,48
3	Industri Pengolahan	7,23	-4,34	-1,78	5,4	7,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,92	18,1	7,97	4,92	11,3
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Dau Ulang	3,25	6,14	7,54	2,59	2,64
6	Konstruksi	4,53	-8,26	5,31	-0,27	7,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,02	-3,12	3,06	7,27	5,71
8	Transportasi dan Pergudangan	5,02	-7,39	2,78	2,27	3,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	-9,08	1,52	5,16	5,06
10	Informasi dan Komunikasi	4,31	14,97	2,5	4,42	4,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	7,73	2	1,11	2,14
12	Real Estat	0,09	-1,38	2,35	3,24	2,6
13	Jasa Perusahaan	5,07	-36,26	-13,42	3,43	2,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	8,05	3,86	-1,19	0,85	0,17
15	Jasa Pendidikan	6,37	1,39	-2,27	-0,25	2,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,15	3,62	6,54	1,27	3,01
17	Jasa Lainnya	3,2	-12,2	-3,76	1,74	3,12
PDRB		5,1	-0,65	2,36	2,8	3

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2024

Pengelompokan kategori lapangan usaha PDRB ADHK dalam 21 kategori yakni dari kategori A (lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan) sampai dengan kategori R,S,T,U (lapangan usaha jasa lainnya). Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan PDRB ADHK yaitu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (A), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G), penyediaan akomodasi dan makan minum (I), informasi dan komunikasi (J), real estate (L), jasa perusahaan (M,N), dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan (O).

B. Indeks Gini

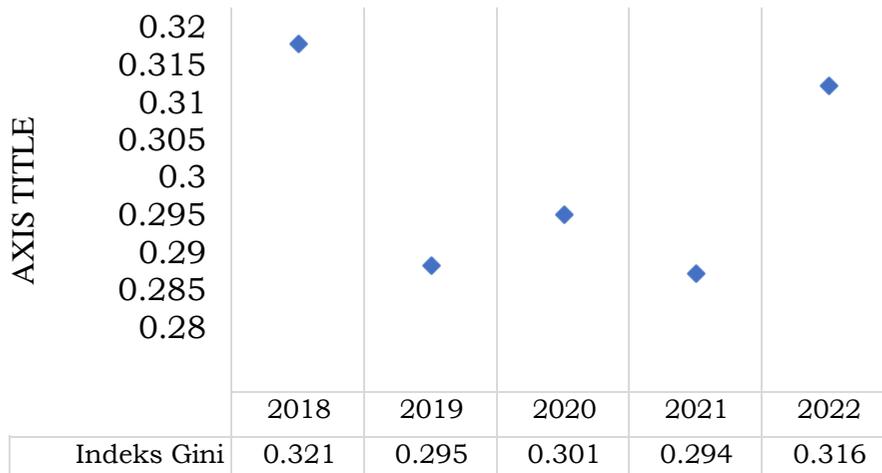
Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.61-

**Gambar 2. 26
Grafik Rasio Gini Kab.TTU Utara Tahun 2018-2022**



Dilihat dari angka gini ratio Kabupaten Timor Tengah Utara diatas, Tahun 2021 sebesar 0,294 menjadi 0,316 di Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,022. Pada indikator makro di TTU Tahun 2022 terjadi peningkatan pada IPM, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan mengalami penurunan baik persentase dan jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang berkurang. Namun jika dilihat angka ketimpangan/gini ratio pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,316 tetapi masih dalam tingkatan ketimpangan rendah (distribusi pendapatan <0,4). Perkembangan pembangunan selalu ada perubahan pada distribusi pendapatan penduduk yang dalam penghitungan gini rasionya dikelompokkan dalam 10 kelas pendapatan (decil). Dengan angka gini ratio dapat memberikan gambaran bahwa distribusi pendapatan selalu tidak merata/sempurna pada setiap kelompok pendapatan dan pembangunan yang ada sudah memberikan pemerataan pada semua lapisan masyarakat baik pada penduduk berpendapatan tinggi, menengah atau rendah ataukah masih ada kesenjangan dan hanya dinikmati oleh segelintir penduduk terutama yang berada pada tingkat pendapatan tinggi.

**Tabel 2. 52
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) dan Persentasenya di Kab.TTU Tahun 2021 dan 2022**

2021			2022		
Makanan	Non Makanan	Jumlah	Makanan	Non Makanan	Jumlah
506.542 (62,98%)	297.808 (37,02%)	804.350 (100%)	449.457 (56,27%)	349.295 (43,27%)	798.952 (100%)

Sumber: BPS, Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan 2022

Rata – rata pengeluaran per kapita sebulan mengalami penurunan dibanding Tahun 2021 sebesar Rp. 804.350 menjadi Rp. 798.752 di Tahun 2022. Walaupun ada penurunan rata – rata pengeluaran tetapi ada pergeseran pengeluaran pada kelompok makanan dan non makanan sebesar 6,71 persen di Tahun 2022 (kelompok makanan dari 62,98 persen pada 2021 turun menjadi 56,27 persen di Tahun 2022 dan kelompok non makanan dari 37,02 persen di Tahun 2021 naik menjadi 43,73 persen di Tahun 2022). Pengeluaran utama



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.62-

masih pada pemenuhan kebutuhan pokok makan dan minum. Berikut disajikan tabel 2.11 untuk rata – rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas makanan dan non makanan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 dan 2022.

C. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara umum NTP menghasilkan 3 klasifikasi, diantaranya adalah:

- NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

a. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Nilai tukar usaha petani di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir. Pada Tahun 2020 memiliki rata-rata sebesar 97,75%, menurun menjadi 96,23% diTahun 2021, menurun menjadi 96,23% diTahun 2021, terus menurun menjadi 95,70% diTahun 2022. Kabupaten Timor Tengah Utara penurunan sebesar 2% pada periode 2020 – 2022 dan NTP <100 menunjukkan petani mengalami defisit dan pendapatan petani turun.

**Tabel 2. 53
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 – 2022 (2018 = 100)**

Bulan	Nilai Tukar Petani		
	2020	2021	2022
Januari	97,99	98,45	96,83
Februari	98,12	97,33	96,85
Maret	97,47	96,13	96,60
April	97,97	95,88	96,07
Mei	97,50	95,83	95,21
Juni	97,97	95,51	95,55
Juli	97,92	95,96	95,67
Agustus	97,22	95,71	95,49



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

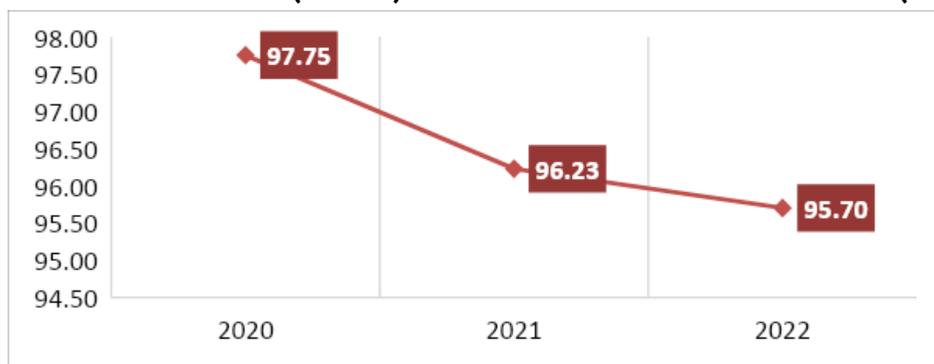
-II.63-

Bulan	Nilai Tukar Petani		
	2020	2021	2022
September	97,07	95,81	95,41
Oktober	97,74	95,97	95,01
November	97,86	95,67	94,88
Desember	98,22	96,49	94,86
Rata-Rata	97,75	96,23	95,70

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023 (Hasil Olah)

Gambar 2. 27

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Kab.TTU Tahun 2020 – 2022 (2018 = 100)



Pada Tahun 2022, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki rata-rata nilai tukar petani perikanan sebesar 96,02% dan nilai tukar petani peternakan sebesar 108,30%. Dalam seTahun terakhir nilai tukar petani dan peternakan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hasil rata-rata dalam seTahun, nilai tukar petani <100 dimana kenaikan harga produksi ternak relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Sedangkan nilai tukar petani peternakan >100, menunjukkan harga produksi perikanan naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

Tabel 2. 54

Nilai Tukar Petani Perikanan dan Peternakan Kab.TTU Tahun 2022 (2018 = 100)

Bulan	Nilai Tukar Petani Perikanan (%)	Nilai Tukar Petani Peternakan (%)
Januari	95,44	107,90
Februari	95,55	107,59
Maret	96,49	107,92
April	96,06	108,08
Mei	95,92	108,11
Juni	96,51	107,86
Juli	96,95	108,21
Agustus	97,30	107,83
September	96,73	108,52
Oktober	95,73	109,39
November	95,08	109,00
Desember	94,44	109,21
Rata-Rata	96,02	108,30

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023 (Hasil Olah)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.64-

b. Nilai Tukar Nelayan

Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir nilai tukar nelayan mengalami penurunan secara persisten sebesar 4,52%. Pada Tahun 2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 96,07%, menurun menjadi 94,20% diTahun 2020, diTahun berikutnya 2021 menjadi 92,55 dan terus menurun menjadi 91,55% diTahun 2022. Penurunan ini menggambarkan kondisi nelayan mengalami defisit sehingga pendapatan nelayan turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2. 55
Nilai Tukar Nelayan di Kab.TTU Tahun 2019 – 2022 (2018 = 100)

Bulan	Nilai Tukar Nelayan (%)			
	2019	2020	2021	2022
Januari	97,10	95,58	93,71	93,11
Februari	95,85	95,97	93,69	91,76
Maret	96,28	94,80	92,38	91,60
April	94,99	94,23	93,48	91,03
Mei	94,49	93,39	93,83	90,72
Juni	95,87	94,90	93,14	91,18
Juli	95,31	95,37	93,07	91,51
Agustus	96,53	94,28	92,75	91,70
September	96,59	92,86	91,26	92,01
Oktober	96,92	92,66	91,14	91,37
November	96,51	92,59	90,97	91,23
Desember	96,39	93,82	91,17	91,36
Rata-Rata	96,07	94,20	92,55	91,55

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023 (Hasil Olah)

D. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kondisi yang fluktuatif. Pada Tahun 2015-2018 mengalami penurunan sebesar 2,89% menjadi 22,31%, dimana pada Tahun 2015 penduduk miskin mencapai 25,20%. Kemudian meningkat menjadi 22,45% pada Tahun 2019, dan kembali menurun menjadi 22,28% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 22,62%, kemudian mengalami penurunan 1,12% pada Tahun 2022 menjadi 21,05%, dan pada Tahun 2023 menurun menjadi 21,85%. Lebih jelasnya mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.65-

Tabel 2. 56
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015–2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	290.296	61,96	25,20
2016	316.487	59,34	24,07
2017	335.517	58,59	23,52
2018	343.965	56,09	22,31
2019	363.162	56,94	22,45
2020	386.990	56,98	22,28
2021	394.818	58,33	22,62
2022	440.155	55,88	21,50
2023	485.744	57,19	21,85

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. International Labor Organization (ILO) menyampaikan dua bentuk pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terpaksa. Pengangguran terbuka adalah seseorang dalam kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja selama periode tertentu dan bersedia menerima atau mencari pekerjaan. Sedangkan setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri yang selama periode tertentu terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir. Pada Tahun 2021 adalah 3,88, kondisi ini menurun menjadi 3,51 pada Tahun 2022, dan terus menurun mencapai angka 1,98 pada Tahun 2023. Proporsi tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh perempuan, yakni pada Tahun 2023 berada diangka 2,24. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab.TTU Tahun 2021-2023

Jenis Kelamin	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Laki-Laki	2021	1,15
	2022	6,29
	2023	1,72
Perempuan	2021	6,99
	2022	0,49
	2023	2,24
Jumlah	2021	3,88
	2022	3,51
	2023	1,98

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.66-

kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan Human Development Report (HDR). IPM terdiri dari tiga indeks yakni indeks kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dari ketiga indeks tersebut terdapat empat indikator penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH) dari indeks kesehatan, harapan lama sekolah (HLS) dan rata – rata lama sekolah (RLS) dari indeks pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita disesuaikan (PPP) dari indeks standar hidup.

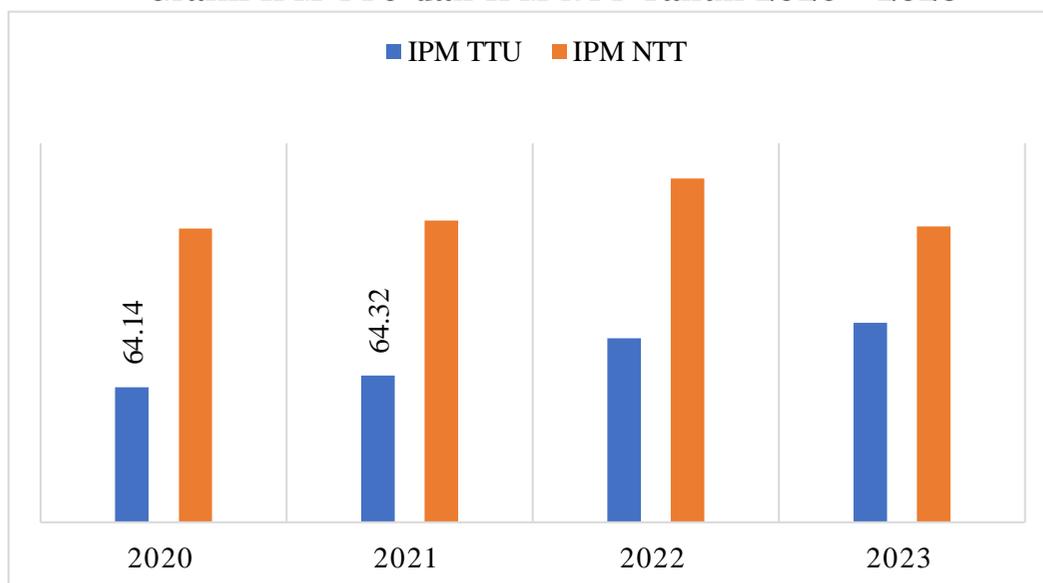
IPM Kabupaten TTU pada Tahun 2023 sebesar 65,16 mengalami peningkatan 0,25 dari Tahun 2022 yakni sebesar 64,91. Dari keempat indikator penyusun IPM Kabupaten TTU semuanya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten TTU pada Tahun 2023 berdampak pada meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten TTU. Jika dibandingkan, IPM Kabupaten TTU masih berada di bawah angka IPM Provinsi NTT sebesar 66,68 dengan selisih 1,52. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten TTU juga perlu ditingkatkan terus agar kedepannya minimal bisa setara dengan IPM tingkat Provinsi NTT. Berikut ditampilkan tabel terkait indikator IPM, nilai IPM Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2020 s/d 2023.

Tabel 2. 58
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTU, IPM TTU dan IPM NTT Tahun 2020 – 2023

Indikator IPM	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,93	67,03	67,27	67,61
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,46	13,47	13,49	13,35
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,82	7,96	8,01	8,16
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	6.713,00	6.691,00	6.933,00	6.889,00
IPM TTU	64,14	64,32	64,91	65,16
IPM NTT	66,65	66,78	67,44	66,68

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024

Tabel 2. 59
Grafik IPM TTU dan IPM NTT Tahun 2020 – 2023





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.67-

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya membahas indikator-indikator seperti Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

A. Indeks Pembangunan Gender

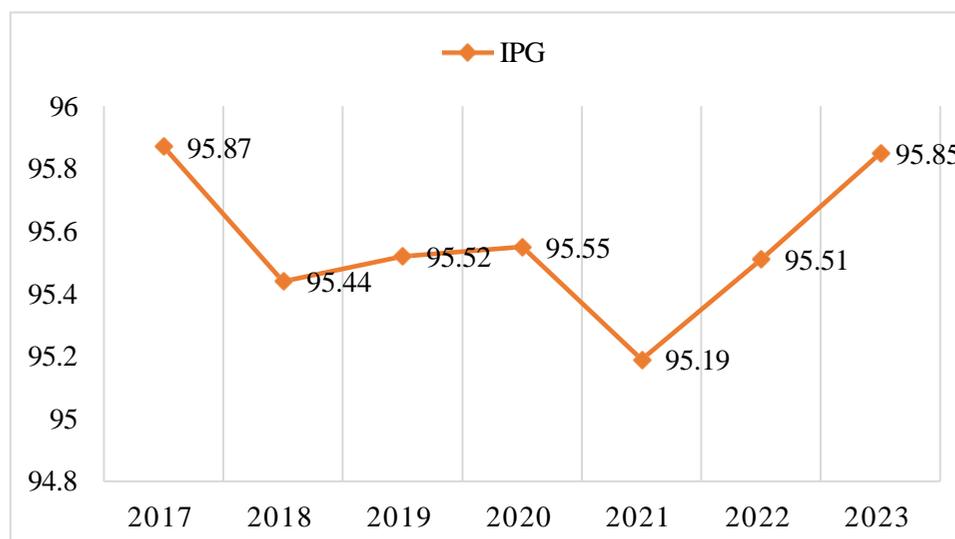
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada Tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 2. 60
Indeks Pembangunan Gender Kab.TTU Tahun 2017 – 2023

Tahun	IPG
2017	95,87
2018	95,44
2019	95,52
2020	95,55
2021	95,19
2022	95,51
2023	95,85

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2024

Gambar 2. 28
Grafik Indeks Pembangunan Gender di Kab.TTU Tahun 2017 - 2023



IPG di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami perkembangan yang



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.68-

fluktuatif. Pada Tahun 2017 memiliki nilai sebesar 95,87 kemudian menurun menjadi 95,44 di Tahun 2018, meningkat kembali menjadi 95,52 di tahun 2019 hingga Tahun 2020 menjadi 95,55. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 95,19, pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 95,51 dan terus meningkat mencapai 95,85 pada Tahun 2023. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki nilai rata-rata IPG >95, dimana nilai ini mendekati angka 100 yang artinya diindikasikan rendahnya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

B. Indeks Pemberdayaan Gender Perempuan

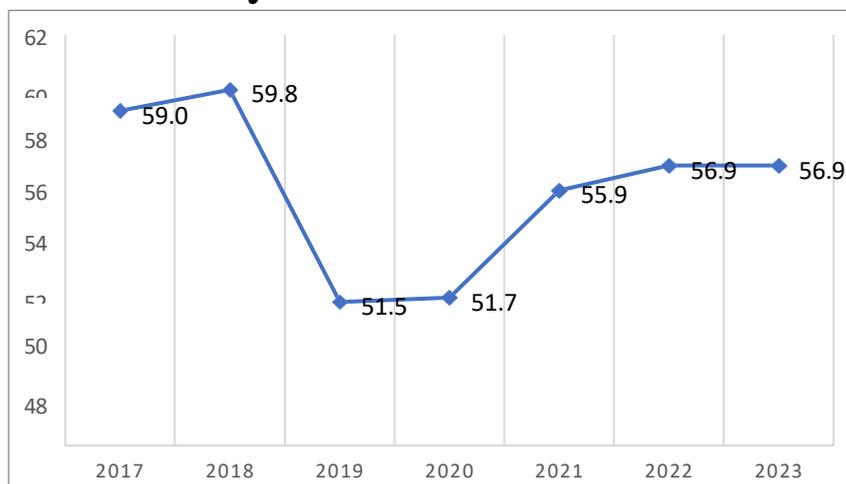
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

**Tabel 2. 61
IPG Perempuan Kab.TTU Tahun 2017 – 2023**

Tahun	IPG Perempuan
2017	59,04
2018	59,86
2019	51,59
2020	51,76
2021	55,94
2022	56,91
2023	56,91

Sumber: BPS Provinsi NTT, Tahun 2024

**Gambar 2. 29
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kab.TTU Tahun 2017 – 2023**



IPG di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2017 angka IDG di Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 59,04, kemudian meningkat menjadi 59,86 di Tahun 2018. Pada



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.69-

Tahun 2019 angka IDG menurun hingga menjadi 51,59 dan menjadi 51,76 diTahun 2020. Angka IDG meningkat kembali diTahun 2021 menjadi 55,94 dan terus meningkat mencapai 56,91 diTahun 2022 dan 2023.

C. Indeks Ketimpangan Gender

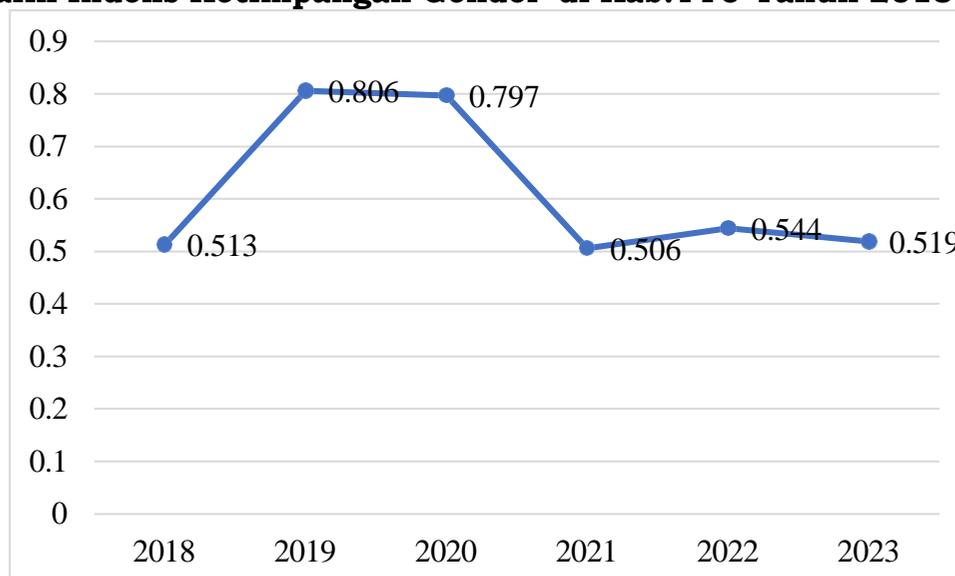
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan IKG di Kabupaten Timor Tengah Utara terlihat fluktuatif, pada Tahun 2018 memiliki nilai 0,513 yang meningkat menjadi 0,806 diTahun 2019. DiTahun 2020 IKG menurun menjadi 0,797, nilai ini terus menurun menjadi 0,504 diTahun 2021, kemudian mengalami peningkatan diTahun 2022 menjadi 0,544. Pada Tahun 2023 indeks ketimpangan gender di Kab. TTU menurun menjadi 0,519. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 62
Indeks Ketimpangan Gender di Kab.TTU Tahun 2018 – 2023

Tahun	IKG
2018	0,513
2019	0,806
2020	0,797
2021	0,506
2022	0,544
2023	0,519

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2024

Gambar 2. 30
Grafik Indeks Ketimpangan Gender di Kab.TTU Tahun 2018 – 2023



2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan ukuran



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.70-

utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Tabel 2. 63
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kab.TTU Tahun 2019 – 2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	5,10
2020	-0,65
2021	2,36
2022	2,80
2023	3,00

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTU pada Tahun 2019 sebesar 5,10 persen mengalami penurunan hingga -0,65 persen di Tahun 2020, penurunan angka pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh kondisi Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 masih ada pengaruh kondisi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir dan dengan munculnya varian baru virus Covid 19, namun ada peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,36 persen. Pada Tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,80 persen. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 meningkat menjadi 3,00 persen.

Tabel 2. 64
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (persen) di Kab.TTU Tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.209,82 (3,91%)	1.205,88 (-0,33)	1.250,82 (3,73%)	1.300,49 (3,97%)	1.330,59 (2,31%)
2	Pertambangan dan Penggalian	55,25 (13,3%)	38,89 (-29,6%)	39,09 (0,51%)	39,83 (1,89%)	41,21 (3,48%)
3	Industri Pengolahan	31,73 (7,23%)	30,36 (-4,34%)	29,82 (-1,78)	31,43 (5,4%)	33,86 (7,72%)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,49 (0,92%)	1,76 (18,1%)	1,9 (7,97%)	1,99 (4,92%)	2,21 (11,3%)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,58 (3,25%)	0,62 (6,14%)	0,67 (7,54%)	0,68 (2,59%)	0,7 (2,64%)
6	Konstruksi	297,77 (4,53%)	273,18 (-8,26%)	287,68 (5,31%)	286,91 (-0,3%)	309,46 (7,86%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	141,59 (8,02%)	137,18 (-3,12%)	141,38 (3,06%)	151,66 (7,27%)	160,32 (5,71%)
8	Transportasi dan Pergudangan	172,09 (5,02%)	159,38 (-7,39%)	163,81 (2,78%)	167,52 (2,27%)	173,54 (3,59%)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,58 (4,49%)	16,89 (-9,08%)	17,15 (1,52%)	18,03 (5,16%)	18,94 (2,06%)
10	Informasi dan Komunikasi	170,14 (4,31%)	195,61 (14,97%)	200,5 (2,5%)	209,36 (4,42%)	217,83 (4,05%)
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	50,76	64,69	55,98	56,4	57,61



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.71-

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
		(2,43%)	(7,73%)	(2%)	(1,12%)	(2,14%)
12	Real Estat	70,55 (0,01%)	69,58 (- 1,38%)	71,21 (2,35%)	73,52 (3,24%)	75,43 (2,6%)
13	Jasa Perusahaan	2,84 (5,07%)	1,81 (-36,3%)	1,57 (3,43%)	1,62 (3,43%)	1,66 (2,52%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	452,07 (8,05%)	469,52 (3,86%)	463,91 (1,19%)	467,86 (0,85%)	468,64 (0,17%)
15	Jasa Pendidikan	163,53 (6,37%)	165,8 (1,39%)	162,04 (2,27%)	161,63 (-0,3%)	166,07 (2,75)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,34 (4,15%)	40,76 (3,62%)	43,43 (6,54%)	43,98 (1,27%)	45,3 (3,01%)
17	Jasa lainnya	21,68 (3,2%)	19,03 (012,2%)	18,32 (- 3,76%)	18,63 (1,74%)	19,21 (3,12%)
Total		2.899,82 (5,10%)	2.880,93 (-0,65%)	2.949,05 (2,36%)	3.031,55 (2,80%)	3.122,6 (3%)

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2024

Pengelompokan kategori lapangan usaha PDRB ADHK dalam 21 kategori yakni dari kategori A (lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan) sampai dengan kategori R,S,T,U (lapangan usaha jasa lainnya). Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan PDRB ADHK yaitu pada lapangan usaha industri pengolahan (C), jasa perusahaan (M,N), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O), jasa pendidikan (P) dan jasa lainnya (R,S,T,U) dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2021 ke Tahun 2022 penurunan hanya terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan (P). Seluruh kategori lapangan usaha mengalami peningkatan pada Tahun 2023.

Jika dilihat sumbangan terbesar untuk PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2019 sampai pada Tahun 2022 masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu dari pertama dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kedua dari sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan ketiga dari sektor lapangan usaha konstruksi. Besaran nilai dan persentase perubahannya dapat dilihat pada tabel 2.8. Dari ketiga sektor utama tersebut secara rata-rata dari 2019 sampai 2022 mempunyai sumbangan persentase rata-rata sebesar 66,725 persen (66,72 persen pada Tahun 2019, 66,58 persen pada 2020, 66,88 persen pada 2021 dan 66,72 persen pada 2022) dari total pdrb. Dengan sektor terbesar penyumbang pdrd dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama empat Tahun terakhir mengalami peningkatan dari 39,53 persen pada 2019, 39,82 persen pada 2020, 40,28 persen pada 2021, 40,95 persen pada 2022 dan mengalami penurunan menjadi 40,79% pada Tahun 2023.

Tabel 2. 65

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Persentasenya di Kab.TTU Tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.616,21 (39,53%)	1.625,62 (39,82%)	1.701,00 (30,28%)	1.840,04 (40,95%)	1.965,8 (40,79%)
2	Pertambangan dan Penggalian	73,83 (1,81%)	53,92 (1,32%)	54,97 (1,3%)	57,73 (1,28%)	60,93 (1,26%)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.72-

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
3	Industri Pengolahan	46,86 (1,15%)	45,89 (1,12%)	45,55 (1,08%)	48,98 (1,09%)	55,61 (1,15%)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16 (0,05%)	2,56 (0,06%)	2,81 (0,07%)	3,09 (0,07%)	3,56 (0,07%)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,74 (0,02%)	0,79 (0,02%)	0,86 (0,02%)	0,89 (0,02%)	0,92 (0,03%)
6	Konstruksi	425,98 (10,42%)	390,25 (9,56%)	420,88 (9,97%)	445,28 (9,91%)	496,62 (10,03)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,95 (5,5%)	224,72 (5,5%)	236,09 (5,59%)	264,5 (5,89%)	299,05 (6,21%)
8	Transportasi dan Pergudangan	218 (5,33%)	203,1 (4,98%)	210 (4,97%)	230,32 (5,13%)	255,01 (5,29%)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,75 (0,61%)	22,48 (0,55%)	22,81 (0,54%)	24,53 (0,55%)	26,61 (0,55%)
10	Informasi dan Komunikasi	200,02 (4,89%)	228,06 (5,59%)	235,91 (5,59%)	247,84 (5,52%)	259,4 (5,38%)
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	78,62 (1,92%)	84,62 (2,07%)	89,87 (2,13%)	97,01 (2,16%)	100,79 (2,09%)
12	Real Estat	97,69 (2,39%)	93,81 (2,3%)	95,5 (2,26%)	106,98 (2,38%)	114,62 (2,38%)
13	Jasa Perusahaan	4,43 (0,11%)	2,9 (0,07%)	2,54 (0,06%)	2,75 (0,06%)	2,91 (0,06%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	685,84 (16,77%)	701,98 (17,2%)	702,13 (16,63%)	712,82 (15,86%)	740,87 (15,37%)
15	Jasa Pendidikan	291,22 (7,12%)	302,38 (7,41%)	302,38 (7,06%)	298,27 (6,76%)	322,5 (6,69%)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,26 (1,5%)	66,88 (1,64%)	66,88 (1,71%)	72,18 (1,64%)	78,92 (1,64%)
17	Jasa lainnya	36,3 (0,89%)	32,32 (0,79%)	32,32 (0,74%)	31,32 (0,75%)	35,31 (0,73%)
Total		4.088,8 (100%)	4.082,27 (100%)	4.227,7 (100%)	4.493,42 (100%)	4.819,44 (100%)

Sumber: BPS Kabupaten TTU

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Pendapatan per kapita dapat dilihat dari jumlah Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada suatu daerah. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu Tahun di suatu daerah tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Tabel 2. 66
Pendapatan Perkapita Peruduk Kab. TTU Tahun 2020 – 2022

Tahun	PDRB Kab.TTU ADHB (Milyar Rp)	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Perubahan % PDRB Perkapita
2019	4.088,80	16.082,22	+5,93
2020	4.082,27	15.756,93	-2,02
2021	4.227,70	2.949,05	-81,28
2022	4.493,42	3.031,55	+2,80
2023	4.819,44	3.122,60	+3,00

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024 (diolah)



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.73-

Dari tabel di atas diperoleh informasi rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu Tahun di Kabupaten TTU sejak Tahun 2019 mengalami kenaikan pendapatan hingga 2022 kecuali di Tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 dari 5,93 persen menjadi -2,02 persen, kemudian menurun drastis pada Tahun 2021 sebesar -81,28%. Penurunan di Tahun 2020-2021 disebabkan faktor utama karena dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 kondisi rata-rata pendapatan penduduk membaik, dilihat dari peningkatan sebesar 2,80%. Kondisi ini semakin membaik dikarenakan mengalami peningkatan sebesar 3,00% pada Tahun 2023.

C. Indeks Ekonomi Inklusif

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia, melalui Bappenas, mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. *World Economic Forum* (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Indeks ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks ini ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 sub pilar serta 21 indikator pembentuk. (Sumber: <https://inklusif.bappenas.go.id/indeks>).

Gambar 2. 31
Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Pembentuk Indeks Ekonomi Inklusif





KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.74-

SUB-PILAR 1.2: KESEMPATAN KERJA

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi.

Indikator:

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh
- Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas

SUB-PILAR 2.2: KEMISKINAN

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan.

Indikator:

- Persentase Penduduk Miskin
- Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari

SUB-PILAR 3.2: INFRASTRUKTUR DASAR

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

Indikator:

- Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak
- Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri

SUB-PILAR 1.3: INFRASTRUKTUR EKONOMI

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi.

Indikator:

- Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN
- Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam
- Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang

SUB-PILAR 3.3: KEUANGAN INKLUSIF

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Indikator:

- Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif
- Rasio Kredit Perbankan UMKM

Berdasarkan data yang diunggah oleh Bappenas, dapat dilihat bahwa indeks ekonomi inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kenaikan dari 2011 hingga 2021. Pada 2011, nilai indeks adalah 4,22 sementara 10 Tahun kemudian yaitu 2021 nilai indeks sebesar 5,28. Hal ini cukup baik, terutama dibandingkan rerata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2011 sebesar 3,72 dan pada 2021 sebesar 5,24. Meskipun demikian nilai indeks ekonomi inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara masih lebih rendah dibandingkan nilai rerata Indonesia, yaitu 4,79 pada 2011 dan 6 pada 2021.

Tabel 2. 67

Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

KABUPATEN /KOTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	3,88	4,42	4,08	4,23	4,13	4,21	4,42	4,57	4,64	4,66	5,03
Sumba Timur	4,05	4,51	4,23	4,42	4,5	4,56	4,61	4,72	4,87	4,76	5,1
Kupang	4,68	5,44	4,75	4,8	4,7	4,67	4,74	4,66	4,7	4,61	4,71
Timor Tengah Selatan	3,72	4,48	4,18	4,27	4,21	4,31	4,47	4,48	4,5	4,46	4,79
Timor Tengah Utara	4,22	4,86	4,54	4,66	4,55	4,87	4,91	5	5,1	5,04	5,28
Belu	4,07	4,74	4,61	4,59	4,74	4,89	4,93	4,86	5,13	5,18	5,39
Alor	4,18	4,73	4,4	4,5	4,53	4,58	4,75	4,64	4,93	4,93	5,22
Lembata	4,28	5	4,52	4,37	4,53	4,58	4,75	4,66	4,91	4,78	4,91
Flores Timur	4,58	5,29	4,82	5,03	5,12	5,15	5,21	5,25	5,41	5,25	5,41
Sikka	4,65	5,39	4,78	4,68	4,77	4,86	4,93	5,02	5,12	5,04	5,22
Ende	4,88	5,43	4,92	5,05	4,99	5,1	5,14	5,06	5,25	5,2	5,54
Ngada	4,8	5,5	4,96	5,13	5,2	5,27	5,38	5,3	5,47	5,28	5,51
Manggarai	4,51	5,05	4,69	4,73	4,8	4,9	5,22	5,09	5,32	5,2	5,5
Rote Ndao	3,76	4,34	4,04	4,24	4,19	4,33	4,49	4,54	4,6	4,61	4,86
Manggarai Barat	3,74	4,35	4,12	4,18	4,11	4,32	4,4	4,95	4,59	4,48	4,65
Sumba Tengah					3,84	3,85	4	4,11	4,33	4,36	4,58
Sumba Barat Daya			3,75	3,75	4,04	3,84	3,98	4,29	4,14	4,14	4,44



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.75-

KABUPATEN /KOTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nagekeo	4,42	5,14	4,64	4,72	4,68	4,79	4,87	4,82	4,9	4,95	5,02
Manggarai Timur	3,63	4,4	3,99	4,14	4,14	4,24	4,64	4,6	4,58	4,36	4,59
Sabu Raijua				3,73	3,69	3,83	4,21	4,32	4,42	4,39	4,59
Malaka											
Kota Kupang	5,59	6,26	5,58	5,69	5,67	5,77	5,84	6,17	6,06	5,85	5,96
Nusa Tenggara Timur	3,72	3,87	4,06	4,24	4,26	4,57	4,80	4,82	4,97	4,65	5,24
Indonesia	4,79	4,83	5,11	5,24	5,42	5,66	5,76	5,77	5,97	5,54	6,00

Sumber: Bappenas, (online) <https://inklusif.bappenas.go.id/data diakses 2023>

Indeks ekonomi inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara, apabila dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya, secara umum pada 2011 nilai indeks masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kupang. Namun selama kurun waktu 10 Tahun terjadi pergeseran, dimana pada 2021 indeks Kabupaten Timor Tengah Utara lebih rendah dibandingkan Kabupaten Belu, dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Meskin jika dibandingkan rerata nasional, masih berada di bawahnya. Namun demikian, kenaikan tersebut perlu diapresiasi karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dijangkau secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara.

D. Indeks Ekonomi Hijau

Indonesia telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GEI), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

GEI Indonesia akan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Melalui implementasi GEI, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1-6,5% per Tahun hingga 2050, intensitas emisi berkurang hingga 68% pada Tahun 2045, dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada Tahun 2030.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Strategi ini dianggap sebagai pengubah permainan bagi Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan tema “Recover together, recover stronger”, Indonesia berharap menjadi pemrakarsa utama dan contoh bagi negara lain dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau. Saat ini pengukuran indeks ekonomi hijau di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum dilakukan, sehingga untuk indeks ini belum dapat ternilai dan terukur.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.76-

E. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Populasi wirausaha adalah populasi wirausaha pemula ditambah populasi wirausaha mapan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 Lampiran I).

$$\text{Rasio Wirausaha} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula} + \text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

Populasi wirausaha pemula dan wirausaha mapan dihitung berdasarkan pendekatan sebagai berikut:

1. Wirausaha pemula
 - a. Pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik
 - b. Memiliki jiwa kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku
 - c. Memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Wirausaha mapan
 - a. Pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik
 - b. Memiliki jiwa kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku
 - c. Memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif dan berkelanjutan, dengan kriteria:
 - 1) Sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan;
 - 2) Adanya penambahan jumlah karyawan, dan/atau investasi dan/atau omset, dan/atau lokasi produksi sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio kewirausahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan di 2013 nilai rasio lebih tinggi yaitu 56,3 dan mengalami penurunan pada 2015 menjadi 46,83, meskipun pada 2017 mengalami kenaikan menjadi 55,01 dan 2021 menjadi 55,08.

Tabel 2. 68
Rasio Kewirausahaan Kab.TTU 2013- 2021

Tahun	Populasi Wirausaha	Populasi Angkatan Kerja	Rasio Wirausaha
2013	60.789	107.971	56,30
2015	54.774	116.972	46,83
2017	66.992	121.784	55,01
2021	75.767	137.570	55,08

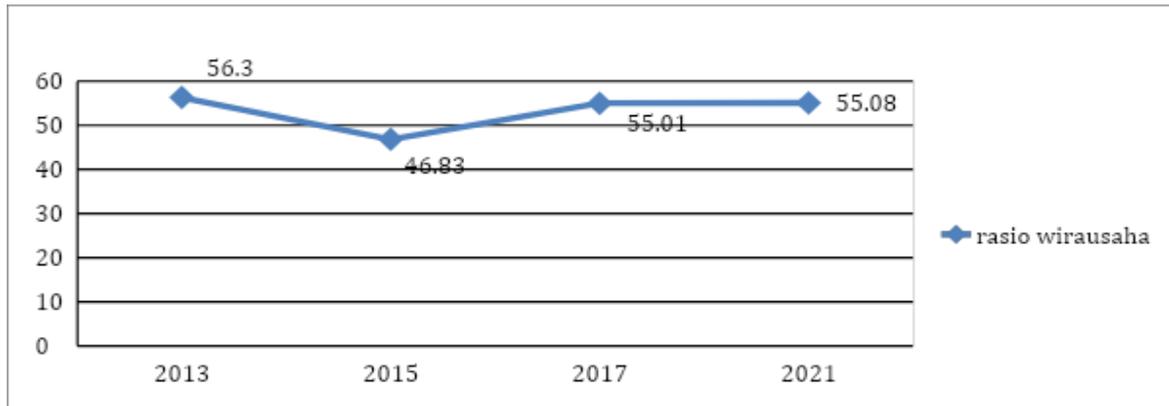
Sumber: Hasil analisis 2023



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.77-

Gambar 2. 32
Grafik Rasio Wirausaha Kabupaten Timor Tengah Utara 2013-2021



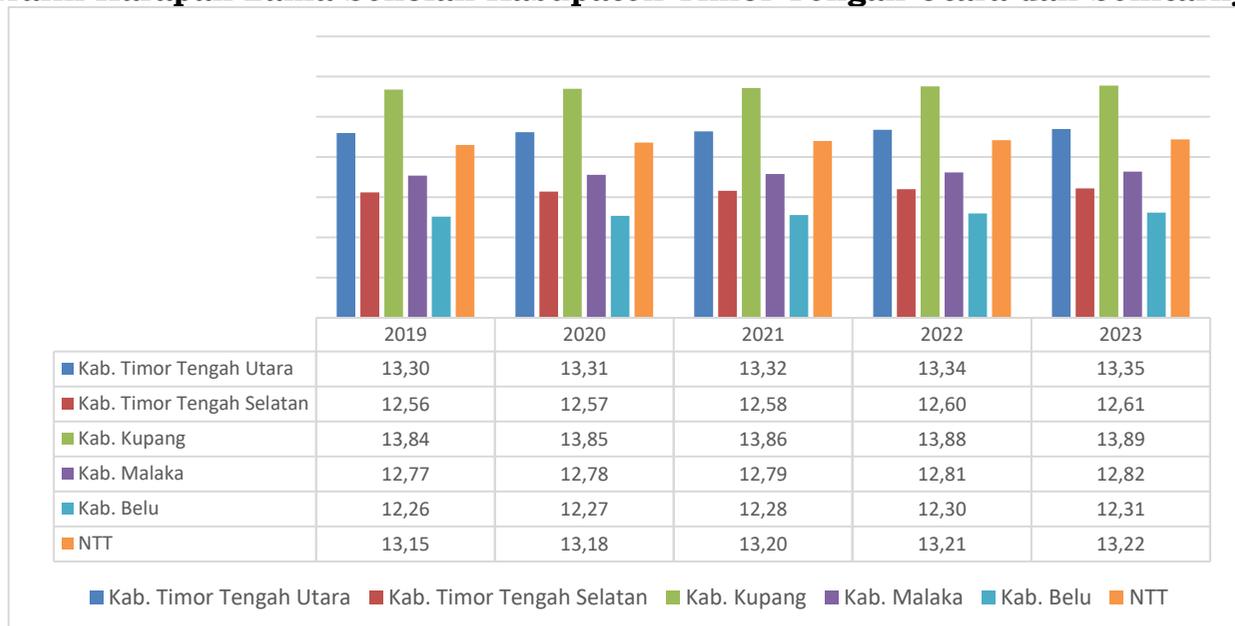
2.3.2 Daya Saing SDM

A. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dihitung melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir, angka harapan lama sekolah Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat secara persisten. Dari Tahun 2019 berada pada angka 13,30 mengalami peningkatan menjadi 13,35 pada Tahun 2023. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki angka harapan lama sekolah lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka yang dimiliki Provinsi NTT yakni sebesar 13,22. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 33
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sekitarnya



(Sumber: BPS NTT 2024)



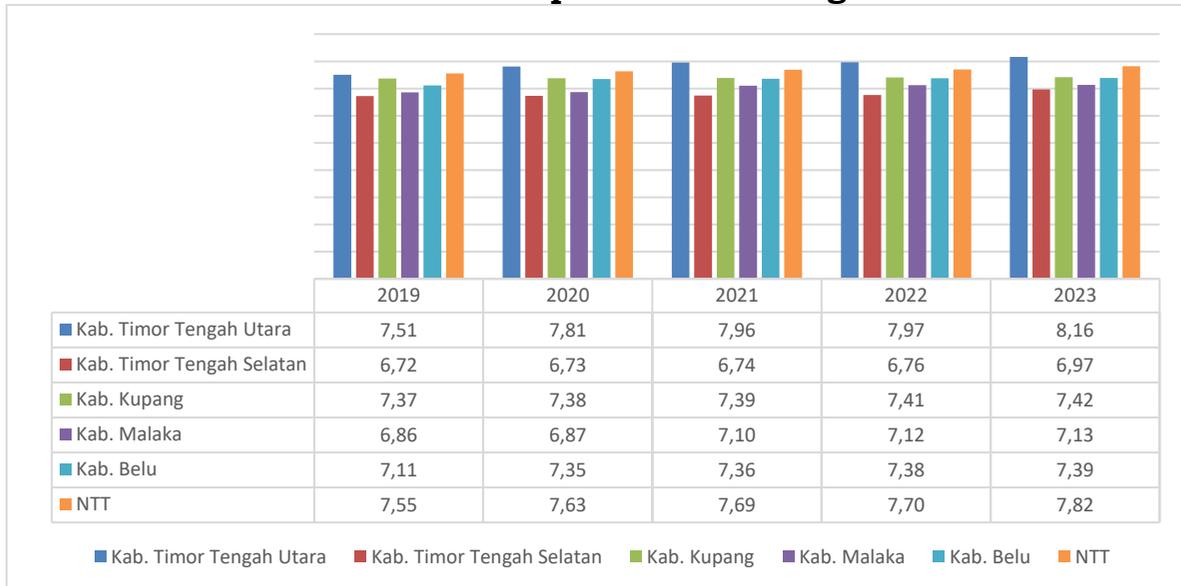
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.78-

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki peningkatan yang terjadi secara konsisten. Pada Tahun 2019 memiliki nilai sebesar 7,51 kemudian meningkat menjadi 7,81 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,96, meningkat menjadi 7,97 pada Tahun 2022, dan meningkat mencapai 8,16 pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi NTT serta wilayah sekitarnya, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki nilai yang lebih tinggi. Adapun rata-rata lama sekolah pada Tahun 2023 adalah 7,82. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara menempuh masa pendidikan lebih lama dibandingkan wilayah lain di sekitar bahkan rata-rata provinsi.

Gambar 2. 34

Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sekitarnya



(Sumber: BPS NTT 2024)

Setelah mengetahui kondisi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, maka dapat dihitung indeks pendidikan dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pendidikan}} = (I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}) / 2$$

Hasil dari perhitungan indeks pendidikan, nilai indeks pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2019 sebesar 10,41, kemudian meningkat secara konsisten mencapai 10,76 pada Tahun 2023. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki indeks pendidikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi NTT yang memiliki nilai sebesar 10,52. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 69

Indeks Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara

Kota/Kabupaten	Indeks Pendidikan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Timor Tengah Utara	10,41	10,56	10,64	10,66	10,76
Kab. Timor Tengah Selatan	9,64	9,65	9,66	9,68	9,79
Kab. Kupang	10,61	10,62	10,63	10,65	10,66



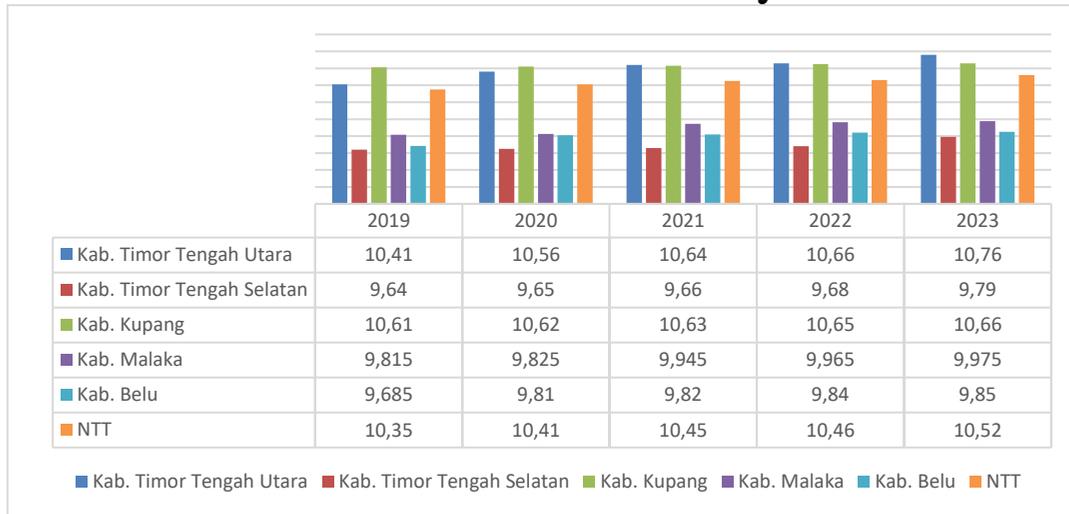
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.79-

Kota/Kabupaten	Indeks Pendidikan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Malaka	9,815	9,825	9,945	9,965	9,975
Kab. Belu	9,685	9,81	9,82	9,84	9,85
NTT	10,35	10,41	10,45	10,46	10,52

Sumber: Hasil Perhitungan, 2024

Gambar 2. 35
Indeks Pendidikan Kab.TTU dan Wilayah Sekitar



(Sumber: BPS NTT 2023)

B. Angka Literasi/Numerasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Literasi dan numerasi adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi dan numerasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat Indonesia

Pada jenjang SD, secara umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 capaian literasinya mencapai 42,03, angka ini berada dibawah angka capaian literasi provinsi NTT yakni sebesar 44,09. Angka numerasi pada jenjang SD di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2022 adalah 32,46, dimana kondisi ini masih berada dibawah angka numerasi provinsi NTT yakni sebesar 33,33.

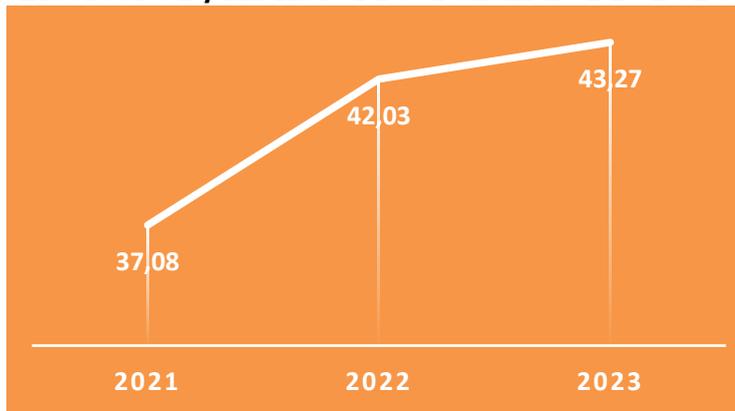
Pada jenjang SMP Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki angka capaian numerasi berada diatas angka Provinsi NTT yakni sebesar 52,28, dimana angka literasi provinsi adalah 46,02. Sedangkan angka capaian numerasi berada dibawah capaian angka provinsi NTT, yakni sebesar 52,28 dan angka capaian numerasi provinsi adalah 54,01.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

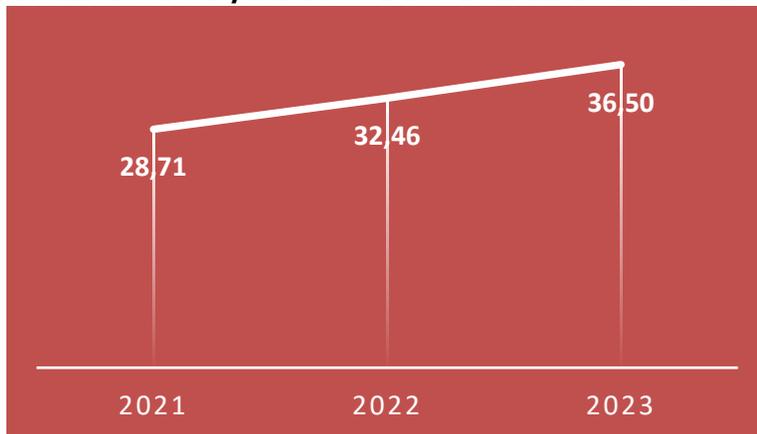
-II.80-

Gambar 2. 36
Literasi SD/Mi Kab.TTU Tahun 2021- 2023



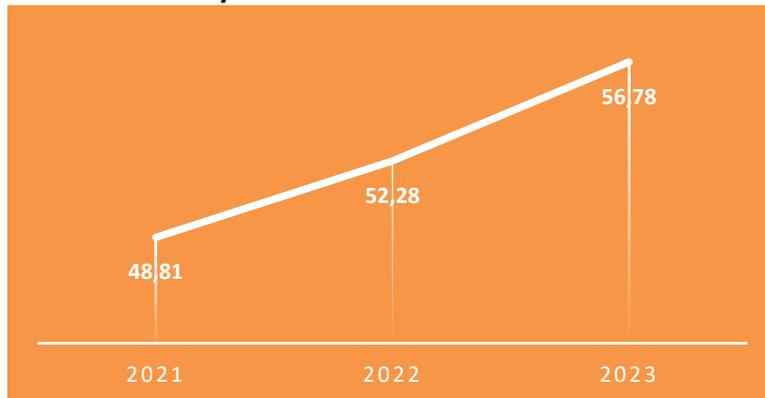
Sumber Data : Hasil Asesmen Nasional

Gambar 2. 37
Numerasi SD/Mi Kab.TTU Tahun 2019- 2023



Sumber Data : Hasil Asesmen Nasional

Gambar 2. 38
Literasi SMP/MTs Kab.TTU Tahun 2019- 2023



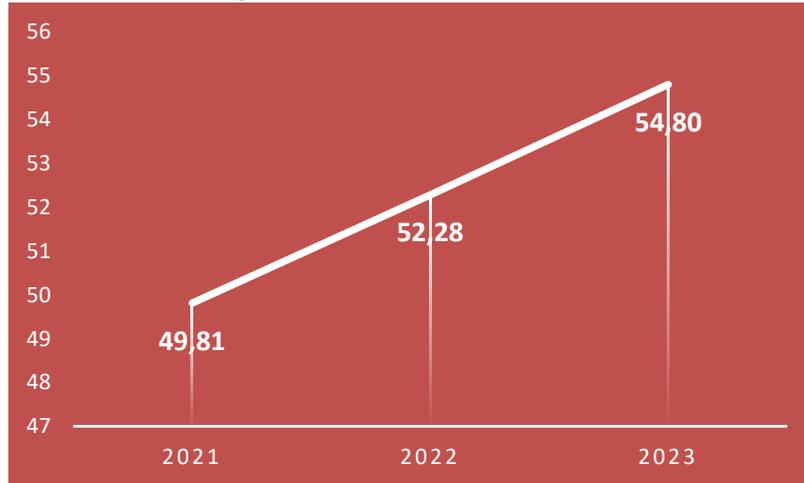
Sumber Data : Hasil Asesmen Nasional



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.81-

Gambar 2. 39
Literasi SMP/MTs Kab.TTU Tahun 2019- 2023



Sumber Data : Hasil Asesmen Nasional

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Literasi di Kabupaten Timor Tengah Utara ditingkatkan melalui sosialisasi budaya baca pada 14 sekolah pada 2021. Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 2 komponen yaitu unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan komponen aspek masyarakat (AM), sebagai berikut:

$$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

UPLMi: variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat AM: jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan

Rumus ini merupakan kumpulan dari rumus pengukuran rasio dari tujuh (7) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat beserta pembagiannya dari komponen Aspek Masyarakat.

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu:

- 1) Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1);
- 2) Ketercukupan koleksi (UPLM2);
- 3) Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3);
- 4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4);
- 5) Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5);
- 6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6);
- 7) Jumlah anggotaperpustakaan

(UPLM7); Aspek masyarakat terdiri dari beberapa komponen:

- (1) Populasi Penduduk
- (2) Populasi Civitas Sekolah
- (3) Populasi Civitas Akademika



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.82-

(4) Populasi Penduduk Bekerja

Gambar 2. 40
Sebaran Hasil IPLM di Provinsi Nusa Tenggara Timur



(Sumber: Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Nasional, 2023)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2023, indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 70,67 dan termasuk dalam kategori sedang. Angka ini termasuk lebih tinggi dibandingkan rerata provinsi yaitu 56,78. Pencapaian nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 56,78 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 70
Rekapitulasi UPLM Per Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO	Kabupaten/Kota	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	IPLM	Interpretasi
1	Alor	0,29	0,35	0,14	0,04	1	1	1	54,56	Sedang
2	Belu	0,6	1	1	0,06	1	1	1	80,78	Tinggi
3	Ende	0,3	0,23	0,1	0,03	0,52	1	1	45,35	Rendah
4	Flores Timur	0,32	0,5	0,1	0,04	1	0,52	1	43,45	Rendah
5	Kupang	0,36	0,27	0,06	0,02	1	0,25	0,1	29,39	Sangat Rendah
6	Lembata	0,43	1	0,25	0,07	1	1	1	67,81	Sedang
7	Malaka	0,61	0,49	0,68	0,05	1	1	1	69,01	Sedang
8	Manggarai	0,23	0,01	0,12	0,04	1	0,79	0,74	41,89	Rendah
9	Manggarai Barat	0,21	0,17	0,27	0,04	0,66	1	1	47,88	Rendah
10	Manggarai Timur	0,24	0,56	0,47	0,05	1	1	1	61,79	Sedang
11	Nagekeo	0,54	0,51	0,15	0,1	1	1	1	61,5	Sedang
12	Ngada	0,47	0,4	0,25	0,25	1	1	1	62,43	Sedang
13	Rote Ndao	0,47	0,28	0,22	0,04	0,92	1	1	56,19	Sedang
14	Sabu Raijua	0,45	0,42	0,51	0,05	1	1	1	63,28	Sedang
15	Sikka	0,74	0,37	0,21	0,24	0,34	1	1	55,84	Sedang



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.83-

NO	Kabupaten/Kota	UPLM 1	UPLM 2	UPLM 3	UPLM 4	UPLM 5	UPLM 6	UPLM 7	IPLM	Interpretasi
16	Sumba Barat	0,51	0,27	-	0,1	1	1	1	55,32	Sedang
17	Sumba Barat Daya	0,33	0,25	0,04	0,15	1	1	1	53,52	Sedang
18	Sumba Tengah	0,56	0,49	-	0,16	1	1	1	60,02	Sedang
19	Sumba Timur	0,31	1	0,12	0,06	0,43	0,67	1	51,46	Sedang
20	Timor Tengah Selatan	0,33	0,45	0,04	0,04	1	1	1	55,13	Sedang
21	Timor Tengah Utara	0,65	0,32	1	0,04	0,93	1	1	70,67	Sedang
22	Kota Kupang	0,73	0,19	0,37	0,03	1	1	1	61,81	Sedang
	Nusa Tenggara Timur	0,44	0,43	0,28	0,08	0,9	0,92	0,95	56,78	Sedang

(Sumber: Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Nasional, 2023)

D. Indeks Literasi Digital

Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

Belum ada perhitungan indeks literasi digital di tingkat kabupaten/kota. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki indeks sebesar 3,6 pada 2021 dan termasuk 7 teratas Indonesia.

Tabel 2. 71
Besar Indeks Literasi Digital Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2021-2022

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2022	3,54	Skor Indeks 2021	3,49

Sumber: Status Literasi Digital Indonesia 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK merupakan persentase penduduk usia



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.84-

15 Tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, TPAK Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2022, kemudian menurun pada Tahun 2023, dengan proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Pada Tahun 2020, Kabupaten TTU memiliki nilai TPAK sebesar 78,13%, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 78,41%, terus meningkat pada Tahun 2022 mencapai 79,95%. Kemudian pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,64% sehingga menjadi 75,77%.

Tabel 2. 72

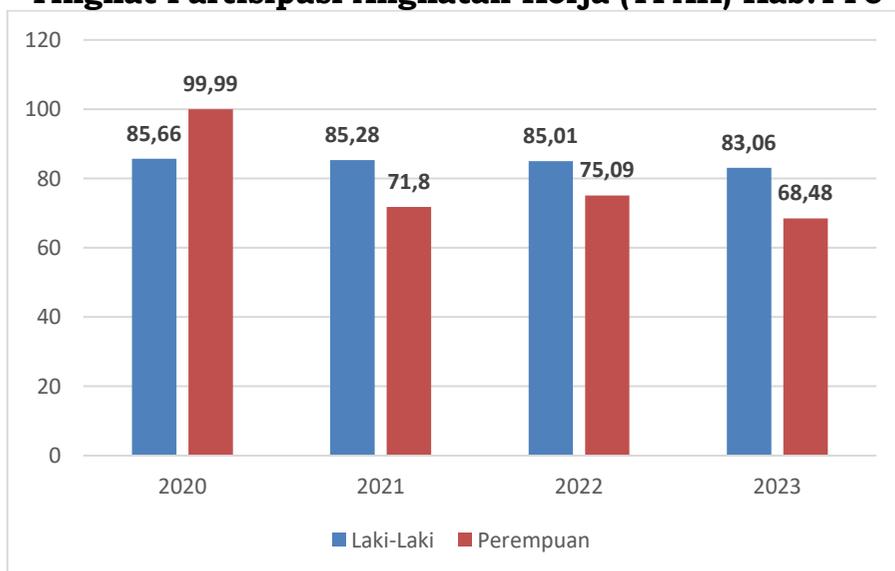
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Laki-Laki	2020	85,66
	2021	85,28
	2022	85,01
	2023	83,06
Perempuan	2020	99,99
	2021	71,8
	2022	75,09
	2023	68,48
Jumlah	2020	78,13
	2021	78,41
	2022	79,95
	2023	75,77

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara 2024

Gambar 2. 41

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.85-

**Tabel 2. 73
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2004-2022**

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki+Perempuan Menurut Kabupaten Kota (Perkotaan+Pedesaan)																		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	91,07	67,29	85,96	73,06	73,43	69,72	70,08	72,83	71,19	72,76	69,09	67,38	58,77	63,97	69,8	71,06	74,14	73,95	78,83
Sumba Timur	80,26	64,36	80,07	76,42	69	71,8	71,57	71,03	71,35	70,34	66,12	70,3	72,05	77,08	68,25	72,13	72,39	79,66	81,36
Kupang	68,49	80,29	68,49	77,92	71,93	72,01	65,15	73,67	67,92	68,6	70,01	65,35	69,45	69,94	60,07	72,15	73,76	75,32	76,93
Timor Tengah Selatan	61,7	83,06	69,7	70,62	68,44	69,32	70,99	74,07	76,13	71,68	77,37	71,75	65,32	75,96	69,52	74,47	78,59	82,44	83,13
Timor Tengah Utara	81,93	83,9	81,08	79,46	75,76	77,04	78,06	73,39	72,58	72,2	67,17	74,43	74,28	75,04	70,24	78,13	78,41	79,95	75,74
Belu	79,88	77,2	74,55	70,49	67,21	69,01	75,23	72,57	75,15	68,69	72,19	70,03	70,55	65,62	63,48	70,23	70,81	66,63	69,47
Alor	72,73	78,77	68,77	76,39	67,71	73,09	73,87	71,44	76,22	74,64	73,72	71,33	76,4	65,83	69,85	75,27	72,4	75,07	80,84
Lembata	74	78,44	74,03	72,76	71,7	74,5	72,96	71,94	70,68	65,1	65,21	69,85	67,51	68,06	68,73	68,95	68,24	71,89	77,49
Flores Timur	79,01	85,56	68,53	76	70,4	69,37	69,73	71,12	75,27	73,65	70,17	74,62	64,49	68,98	66,57	71,79	71,8	74,56	72,5
Sikka	86,59	88,63	71,54	67,4	72,44	70,92	74,37	70,77	59,93	57,68	58,51	70,45	67,23	70,63	65,51	73,42	73,92	71,62	74,35
Ende	79,93	79,53	78,63	75,55	75,76	73,71	75,02	68,33	73,13	67,97	70,59	73,67	66,67	73,63	71,65	72,22	77,57	75,53	74,69
Ngada	79,95	66,17	71,88	77	69,91	75,08	75,49	73,05	71,9	72,64	75,73	70,8	66,97	70,89	71,04	71,49	72,49	78,56	74,78
Manggarai	86,72	95,52	81,41	85,87	79,99	79,69	80,93	70,87	72,52	69,16	68,17	68,87	60,5	73,14	70,54	76,53	77,6	78,52	79,14
Rote Ndao	66,67	79,53	72,72	73,38	67,37	67,27	68,4	73,95	67,74	75,56	75,55	70,81	77	72,98	69,46	73,07	74,16	73,2	68,99
Manggarai Barat	91,04	90,07	77,71	83,12	81,17	75,98	79,16	74,62	68,1	69,33	72,52	71,39	77,87	67,24	72,87	78,52	73,18	80,46	70,71
Sumba Tengah	-	-	-	-	67,31	70,4	76,41	75,32	68,73	70,73	69,73	63,45	56,41	63,4	67,97	69,98	69,12	76,71	78,79
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	72,01	73,67	72,77	72,86	74,13	72,1	68,81	69,65	72,27	79,68	78,33	77,91	83,33	77,22	80,15
Nagekeo	-	-	-	-	69	73,38	76,29	73,8	70,07	72,27	71,85	74,3	65,39	63,8	67,14	70,05	67,19	71,02	76,86
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	84,36	79,44	75,53	77,04	71,77	74,18	72,32	86,44	67,88	79,67	81,73	81,95	82,55	80,33
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	58,69	64,16	56,69	68,25	74,66	75,72	69,22	75,11	68,82	76,71	76,14
Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,73	76,12	71,76	70,1	67,47	70,1	76,38	73,48
Kota Kupang	56,08	73,27	61,74	54,25	57,67	60	59,84	61,89	56,94	57,3	55,83	54,03	59	57,67	58,75	64,14	62,34	61,33	64,75
Nusa Tenggara Timur	77,39	79,45	74,36	74,28	71,16	72,09	72,77	71,72	70,58	68,72	68,91	69,25	69,09	70,17	68,5	73,11	73,78	75,23	75,72

Sumber: BPS NTT 2023



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.86-

F. Angka Ketergantungan

Dependency ratio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio

Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan Kabupaten Timor Tengah mengalami penurunan dari 2017 sebesar 67,6 menjadi 60,2 pada 2022. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kupang pada 2022 sebesar 46,68 maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 55,56.

Tabel 2. 74
Angka Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Wilayah	Angka Ketergantungan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	72,59	71,65	68,88	70,88	60,29	60,57
Sumba Timur	64,49	63,30	64,86	62,03	53,43	60,43
Kupang	67,94	62,96	61,14	66,04	56,12	46,68
Timor Tengah Selatan	72,02	72,72	67,66	67,68	58,89	58,69
Timor Tengah Utara	67,60	69,06	62,29	65,16	54,29	60,20
Belu	64,65	63,49	62,11	62,14	53,96	52,97
Alor	62,94	63,49	62,07	63,14	54,70	59,44
Lembata	68,97	68,71	67,39	67,60	58,50	67,44
Flores Timur	65,91	70,71	64,52	65,60	58,29	55,14
Sikka	60,03	59,25	55,99	58,30	51,19	59,12
Ende	57,77	56,96	55,57	59,80	49,46	48,94
Ngada	68,10	68,39	65,51	66,40	55,04	52,18
Manggarai	69,50	65,77	66,03	66,74	57,14	55,78
Rote Ndao	71,79	73,97	64,84	66,90	56,89	68,62
Manggarai Barat	76,86	77,68	72,15	76,10	61,33	61,53
Sumba Tengah	77,11	76,07	74,67	75,02	63,86	66,46
Sumba Barat Daya	85,98	88,98	82,22	82,36	65,15	69,81
Nagekeo	69,66	69,07	65,43	67,17	55,47	55,51
Manggarai Timur	70,84	70,08	68,00	68,90	58,66	55,06
Sabu Raijua	76,66	79,25	76,50	72,78	59,96	64,94
Malaka	72,57	74,83	69,79	72,31	58,13	54,39
Kota Kupang	40,84	40,60	40,56	42,12	35,40	35,70
Nusa Tenggara Timur	66,52	66,34	63,41	64,89	54,88	55,66

Sumber: BPS NTT 2024

G. Stunting

Di Indonesia, berdasarkan data Asian Development Bank, pada Tahun 2022 persentase *Prevalence of Stunting Among Children Under 5 Years of Age* di Indonesia sebesar 31,8 persen. Jumlah tersebut, menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di wilayah Asia Tenggara. Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Wilayah prioritas stunting juga terus ditingkatkan dari



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.87-

Tahun ke Tahun.

Stunting adalah masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting saat ini menjadi prioritas untuk pemerintah Indonesia termasuk di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan target angka penurunan stunting mencapai 14 % di Tahun 2024 (Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Antropometri Anak Nomor 2 Tahun 2020, 2020). Wilayah prioritas stunting juga terus ditingkatkan dari Tahun ke Tahun.

Angka stunting Kab. TTU dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami penurunan, dari 25% pada Tahun 2021, menurun 1% pada Tahun 2022, dan mengalami penurunan menjadi 23% pada Tahun 2023. Namun Kab. TTU memiliki nilai stunting lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka stunting dengan Provinsi NTT dan Nasional. Pada Tahun 2023, Provinsi NTT memiliki nilai stunting sebesar 15% jika dibandingkan dengan angka nasional yakni 21,5%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Data Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023

Kota/Kabupaten	Stunting (%)		
	2021	2022	2023
Kab. Timor Tengah Utara	25	24	23
Kab. Timor Tengah Selatan	32	28	22
Kab. Kupang	22	20	13
Kab. Malaka	21	16	16
Kab. Belu	18	14	11
NTT	21	18	15
Nasional	24,4	21,6	21,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi suatu hal mutlak dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Dengan infrastruktur yang memadai, akses pengembangan ekonomi rakyat, penumbuhan investasi dan akses masyarakat terhadap pelayanan berbagai bidang menjadi lebih baik. Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran efektivitas pembangunan tiap jenis infrastruktur mengadopsi dan memodifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich yakni dengan pendekatan teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni : (i) ketersediaan fisik (*availability*) (ii) kualitas fisik (*quality*) (iii) kesesuaian (*appropriateness*) (iv) pemanfaatan (*utility*) dan (iv) penyerapan tenaga kerja (*job creation*). Serta (f) kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap perekonomian.

- Ketersediaan Fisik (*availability*);
- Kualitas Fisik (*quality*);
- Kesesuaian (*Appropriateness*);



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.88-

- d. Efektifitas Pemanfaatan (Utility);
- e. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)
- f. Kontribusi pada Perekonomian.

**Tabel 2. 76
Penilaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**

Nilai	Keterangan	Indikasi Penilaian
0	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur tidak optimal	Belum berdampak terhadap layanan kualitas infrastruktur.
0,5	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sudah dilakukan namun belum optimal	Sudah optimal melihat kondisi capaian dan target, namun perlu peningkatan kembali menuju optimal.
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur optimal	Sudah optimal melihat kondisi keterbutuhan masyarakat.

A. Ketersediaan Fisik

Bahwa dalam setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan output yang berupa barang secara fisik. Hal ini diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik. Dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, capaian kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten TTU dilihat dalam 4 indikator, yakni presentase layanan sarana dan prasarana, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%), rasio akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%), serta rasio jaringan irigasi. Dalam kaitannya poin 1 yakni ketersediaan secara fisik dalam hal ini penggunaan anggaran belanja, pada Tahun rencana Tahun 2021 dan target ketersediaan infrastruktur tersebut dilihat dalam capaiannya pada akhir 2022, masih belum sesuai target. Sehingga upaya penilaian pada poin 1, masih belum mumpuni ketersediaan fisiknya (availability). Pada tabel dibawah ini dapat dilihat indikator yang terukur dalam melihat layanan infrastruktur yang ada:

**Tabel 2. 77
Tingkat Capaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur**

Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2022)	Realisasi Akhir Periode (Tahun 2022)	Capaian Kinerja RPJMD	Predikat
Presentase Layanan Sarpras	54,39	100	63,51	63,51	Rendah
Capaian Indikator Tujuan				63,51	
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35,43	41,32	37,24	90,13	Tinggi
Capaian Indikator Tujuan				90,13	
Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83,12	96,89	82,64	85,29	Tinggi
Capaian Indikator Tujuan				85,29	
Rasio Jaringan Irigasi (%)	9,96	14,94	10,51	70,35	Tinggi
Capaian Indikator Tujuan				84,24	
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				86,55	Tinggi

Sumber: Dok. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 Kab TTU



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.89-

Berdasarkan Dokumen Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025. Data capaian persentase layanan sarana dan prasarana pada awal Tahun 2021 yakni 54,39%, dengan target capaian 100%, diperoleh realisasi akhir periode Tahun 2022 yakni 63,51% yang masih terkategori rendah. Namun untuk indikator Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik, Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk, dan rasio jaringan irigasi dalam predikat tinggi (namun ketersediaan air bersih dan jaringan irigasib Optimalnya pemenuhan Jaringan Irigasi jika dibandingkan dengan kawasan pertanian). Pada Tahun 2022, untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan data LKPJ Tahun 2022, telah dianggarkan sebesar Rp.94.412.456.926,00 dengan realisasi Rp. 68.477.517.025,00 (terserap 72,53 %). Dalam upaya peningkatan indeks kualitas layanan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan fisik di Kab. TTU, penting penganggaran yang ada dapat terserap sempurna untuk kemaslahatan masyarakat di Kab. TTU. Sehingga penilaian indeks untuk ketersediaan fisik adalah (0,5).

B. Kualitas Fisik

Kualitas fisik adalah kualitas output yang dihasilkan. Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang baik dan optimal. Pada penilaian aspek ini, diambil salah satu aspek infrastruktur yang ada di Kab. Timor Tengah Utara yakni prasarana jalan. Prasarana Jalan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan data BPS Tahun 2023 disebutkan bahwa sebagian jalan sudah menggunakan aspal namun masih terdapat jalan kerikil, tanah, dan lainnya sebesar 441,58 Km, dimana 359,04 Km permukaan jalan kerikil dan 82,54 Km jalan dengan permukaan tanah. Jika dilihat dari tren perkembangan dari Tahun 2019-2023 penggunaan perkerasan jalan aspal sepanjang 407,27 Km.

Tabel 2. 78

Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten TTU

Jenis Permukaan	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	356,70	356,70	371,73	387,40	407,27
Kerikil	276,50	276,50	393,97	376,62	359,04
Tanah	215,70	215,70	83,16	84,69	82,54
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	848,90	848,90	848,90	848,85	848,85

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Angka, 2024

Jika ditinjau dari kondisi jalannya, pada Tahun 2023 sepanjang 18,8 Km jalan dengan kondisi rusak dan 457,34 Km dengan kondisi rusak berat. Kondisi ini meningkat jika dilihat pada kurun waktu 2019-2020 kondisi jalan rusak dan sangat rusak mengalami penurunan menjadi 50 %. Sehingga sampai saat ini pemerintah telah berupaya mengoptimalkan kualitas fisik pembangunan jalan yang baik bagi masyarakatnya. Pada tabel dibawah ini akan merupakan data kualitas jalan di Kabupaten Timor Tengah Utara:

Tabel 2. 79

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten TTU

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	420,2	295,5	215,3	316,15	318,57



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.90-

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Sedang	-	124,4	149,6	59,14	54,08
Rusak	130,5	130,5	10,1	15,56	18,86
Rusak Berat	298,2	298,2	473,9	458,01	457,34
Jumlah	848,9	848,5	848,9	848,85	848,85

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Angka, 2023

Berdasarkan hal tersebut diatas, peningkatan indeks kualitas layanan infrastruktur dalam hal ini kualitas fisik di Kab TTU (ditinjau dalam kondisi jalan) masih kurang. Sehingga penilaian indeks untuk kualitas fisik adalah (0,5).

C. Kesesuaian (*Appropriateness*)

Kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat. Melihat keterbutuhan akan layanan infrastruktur di Kab. TTU, sehingga kesesuaian dinilai (1).

D. Efektifitas Pemanfaatan (*Utility*)

Tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output maka semakin besar pula tingkat efektifitasnya. Melihat keterbutuhan akan layanan infrastruktur di Kab. TTU, sehingga efektifitas pemanfaatan dinilai (1).

E. Penyerapan Tenaga Kerja (*Job Creation*)

melihat kurun waktu Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,26% dari 5,77% di Tahun 2005 menjadi 3,51% pada Tahun 2022. Sehingga penyerapan tenaga kerja di Kab. TTU dinilai (0,5).

F. Kontribusi pada Perekonomian

Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 sebesar 3,39% dan mengalami penurunan sebesar 0,59% menjadi 2,8% di Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar 6,2%-6,5%, jika dibandingkan dengan realiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tengah Utara, masih terdapat selisih sebesar 3,4%-3,7% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi masih menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan hal tersebut peningkatan kualitas layanan infrastruktur diharapkan lebih baik dilakukan di Kab TTU, sehingga besar harapan dapat menunjang pertumbuhan perekonomian di Kab TTU. Sehingga penilaian indeks untuk kontribusi pada perekonomian adalah (0,5). Indeks layanan kualitas infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan penilaian diatas, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,67.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

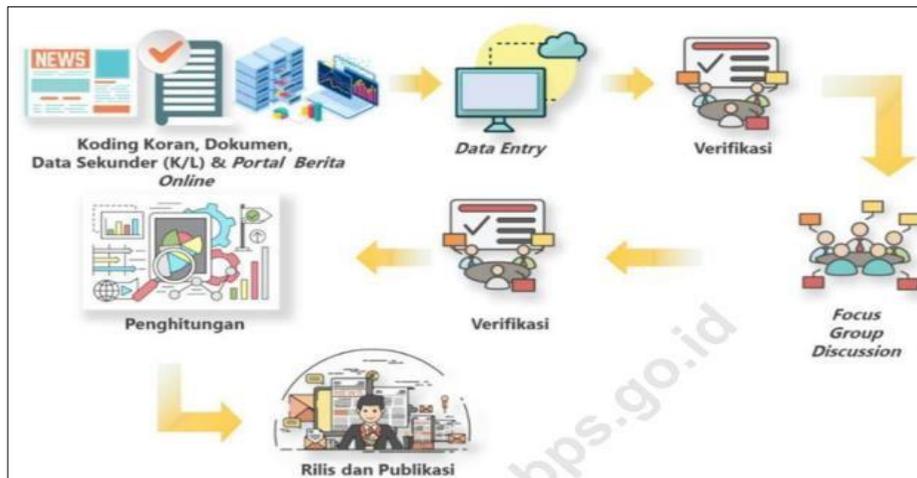
-II.91-

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Demokrasi

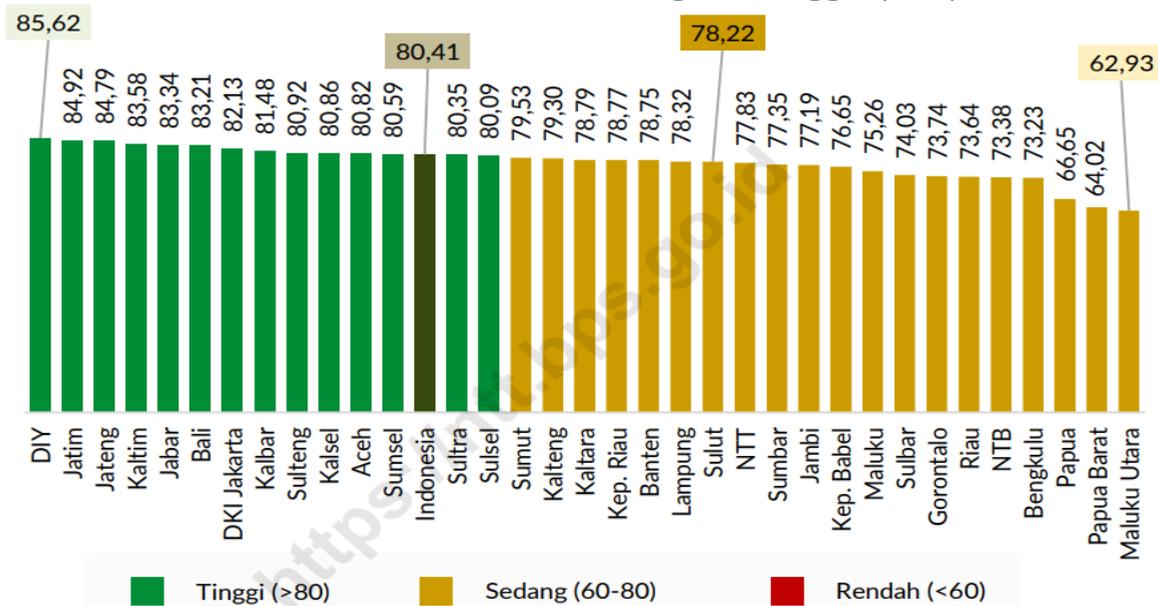
Pada tahun 2022 Provinsi telah melakukan upaya revisi terkait pengukuran indeks demokrasi yang telah dilakukan setiap Tahun pada Tahun sebelumnya baik dalam penentuan indikator, metode, dan keterlibatan banyak pihak.

Gambar 2. 42
Skema Penyusunan IDI Tahun 2022



Gambar 2. 43

Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2022 Sebanyak 14 provinsi memiliki nilai IDI berkategori tinggi (>80).



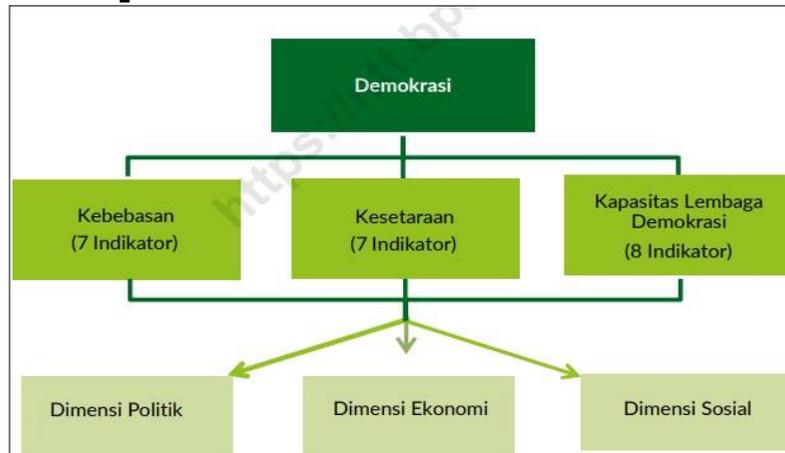
Selanjutnya, 20 provinsi berada pada kategori sedang (60-80), dan tidak ada provinsi yang angka IDI-nya berkategori rendah (<60). IDI nasional 2022 adalah sebesar 80,41 dengan kategori tinggi. Ada 12 provinsi yang memiliki capaian IDI di atas nilai nasional. DI Yogyakarta menduduki peringkat pertama yaitu mencapai nilai IDI sebesar 85,62, diikuti dengan Jawa Timur (84,92) dan Jawa Tengah (84,79). Sementara itu, Maluku Utara merupakan provinsi dengan capaian nilai IDI terendah yaitu sebesar 62,93. IDI Provinsi NTT menempati posisi 22 dari 34 provinsi di Indonesia.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.92-

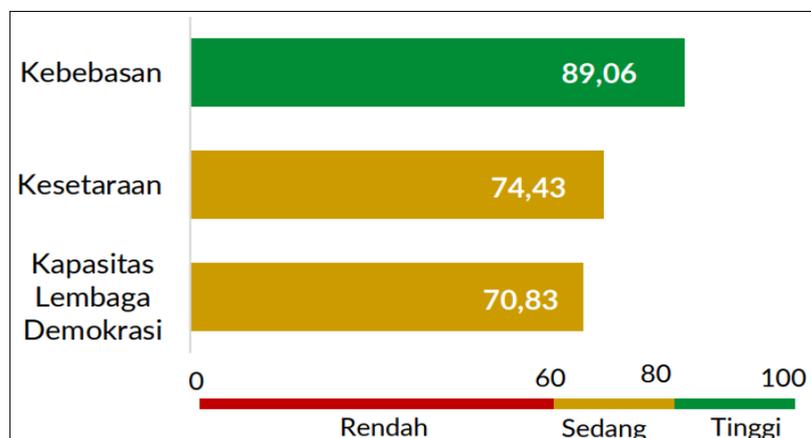
**Gambar 2. 44
Aspek Indeks Demokrasi Tahun 2022**



Menurut perspektif demonopolisasi, maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor- sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek keseimbangan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusivitas) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati keseimbangan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Serta aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan keseimbangan. terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek keseimbangan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut.

IDI Provinsi NTT 2022 sebesar 77,83. Angka ini menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan “sedang”. Aspek kebebasan memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan 2 aspek lain yaitu sebesar 89,06 atau berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, aspek keseimbangan sebesar 74,43 atau berkategori sedang dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 70,83 atau berkategori sedang.

**Gambar 2. 45
Aspek IDI Provinsi NTT, 2022**





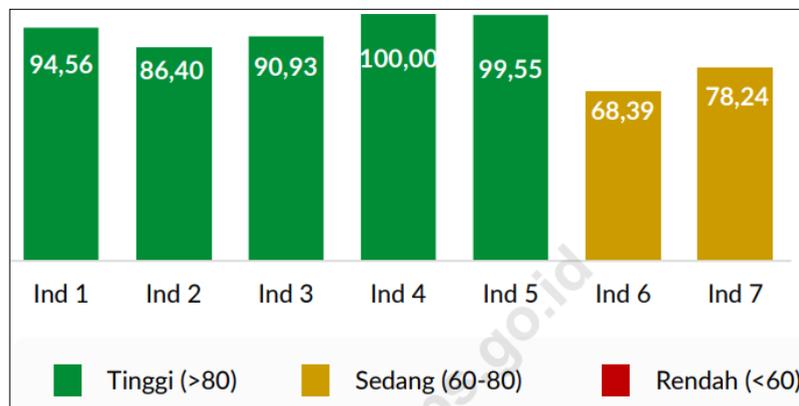
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.93-

Aspek kebebasan Provinsi NTT memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan 2 aspek lain terutama disebabkan tidak adanya kejadian yang menghambat kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan (indikator 4). Aspek ini tidak memiliki indikator yang bernilai rendah. Kapasitas lembaga demokrasi Provinsi NTT merupakan aspek terendah. Hal ini tidak terlepas dari belum baiknya transparansi anggaran APBN yang dokumennya dapat diakses melalui website pemprov (indikator 20), dan cukup rendahnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (indikator 21).

1. Aspek Kebebasan

Gambar 2. 46
Skor Indikator Aspek Kebebasan Prov NTT, 2022



Tabel 2. 80
Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kebebasan

Indikator Aspek Kesetaraan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Timor Tengah Utara
1. Kesetaraan Gender	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Capaiannya rendah, artinya prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.	Dalam indikator ini dapat dinilai baik, melihat terdapat diskusi “Ranperda pajak darah dan retribusi daerah kabupaten TTU harmonis, Harapkan beri manfaat bagi kesejahteraan masyarakat” Sumber: https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/14721-ranperda-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-kabupaten-ttu-harmonis-marciana-harapkan-beri-manfaat-bagi-kesejahteraan-masyarakat Atau ketika terdapat headline “target PAD Tahun 2023 turun, DPRD pertanyakan kinerja pemerintah kelola objek pajak di TTU” Sumber: https://ttu.victorynews.id/ttu/pr-3445696249/target-pad-tahun-2023-turun-dprd-pertanyakan-kinerja-pemerintah-kelola-objek-pajak-di-ttu Sehingga dapat diperhitungkan upaya hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR dan pemerintah daerah berjalan baik.
3. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha tinggi. Ada penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha menunjukkan terdapatnya	Kab TTU telah memiliki informasi pasar kerja online yang berjalan sepanjang tahun 12 bulan, sehingga transparansi kegiatan didalamnya dapat dimanfaatkan seluruh



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.94-

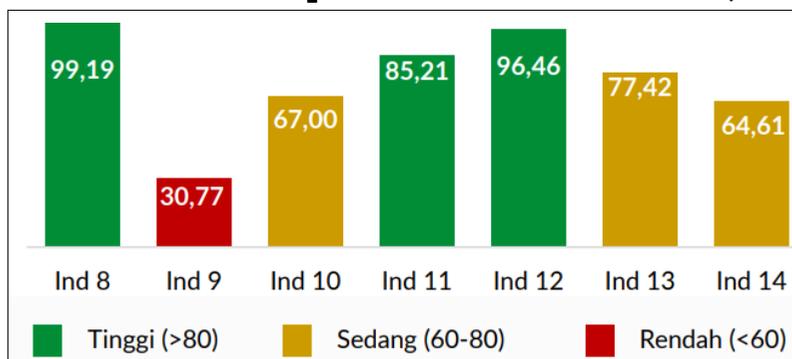
Indikator Aspek Kesetaraan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Timor Tengah Utara
	potensi kerjasama dalam penetapan output, harga, dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.	lapisan masyarakat.
4. Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
5. Kesetaraan Kesempatan kerja antarwilayah	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
6. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Provinsi NTT belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, angka partisipasi murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga.	Kab TTU pada Tahun 2022 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yakni 99,41 dengan target 100% 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan yakni 88,75% dengan target 100% 3. Kab. TTU dilayani fasilitas kesehatan 3 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 15 puskesmas rawat inap dan 11 puskesmas non rawat inap 4. Angka partisipasi murni SD (97,96%) SMP (68,71%), dan SMA (54,31%); Angka partisipasi kasar SD (117%) SMP (84,83%), dan SMA (72,98%). 4 poin dalam pemenuhan kebutuhan akan akses pada layanan dasar di Kab TTU sebenarnya telah baik sehingga, indikator 14 pada aspek kesetaraan di Kab TTU telah memenuhi kesetaraan.

Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

Berdasarkan kesimpulan diatas, Indikator 2, Indikator 6, dan Indikator 7 pada aspek kebebasan yang dinilai masih belum maksimal pada Prov. Nusa Tenggara Timur, pada Kabupaten Timor Tengah Utara untuk ketiga indikator tersebut masih belum maksimal pelaksanaannya yakni indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat, indikator pemenuhan hak-hak pekerja dan indikator pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Aspek Kesetaraan

**Gambar 2. 47
Skor Indikator Aspek Kesetaraan Prov NTT, 2022**





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.95-

**Tabel 2. 81
Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kesetaraan**

Indikator Aspek Kesetaraan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Timor Tengah Utara
8. Kesetaraan Gender	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Capaiannya rendah, artinya prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.	Dalam indikator ini dapat dinilai baik, melihat terdapat diskusi “Ranperda pajak darah dan retribusi daerah kabupaten TTU harmonis, Harapkan beri manfaat bagi kesejahteraan masyarakat” Sumber: https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/14721-ranperda-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-kabupaten-ttu-harmonis-marciana-harapkan-beri-manfaat-bagi-kesejahteraan-masyarakat Atau ketika terdapat headline “target PAD Tahun 2023 turun, DPRD pertanyakan kinerja pemerintah kelola objek pajak di TTU” Sumber: https://ttu.victorynews.id/ttu/pr-3445696249/target-pad-tahun-2023-turun-dprd-pertanyakan-kinerja-pemerintah-kelola-objek-pajak-di-ttu Sehingga dapat diperhitungkan upaya hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR dan pemerintah daerah berjalan baik.
10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Persaingan usaha di daerah belum mengarah pada persaingan usaha tinggi. Ada penguasaan pasar oleh beberapa pelaku usaha menunjukkan terdapatnya potensi kerjasama dalam penetapan output, harga, dan lain sebagainya, yang mengarah pada persaingan usaha yang rendah.	Kab TTU telah memiliki informasi pasar kerja online yang berjalan sepanjang tahun 12 bulan, sehingga transparansi kegiatan didalamnya dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat.
11. Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
12. Kesetaraan Kesempatan kerja antarwilayah	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Provinsi NTT belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, angka partisipasi murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga.	Kab TTU pada Tahun 2022 5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yakni 99,41 dengan target 100% 6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan yakni 88,75% dengan target 100% 7. Kab. TTU dilayani fasilitas kesehatan 3 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 15 puskesmas rawat inap dan 11 puskesmas non rawat inap 8. Angka partisipasi murni SD (97,96%) SMP (68,71%), dan SMA (54,31%); Angka partisipasi kasar SD (117%) SMP (84,83%), dan SMA (72,98%). 4 poin dalam pemenuhan kebutuhan akan akses pada layanan dasar di Kab TTU



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.96-

Indikator Aspek Kesetaraan	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Timor Tengah Utara
		sebenarnya telah baik sehingga, indikator 14 pada aspek kesetaraan di Kab TTU telah memenuhi kesetaraan.

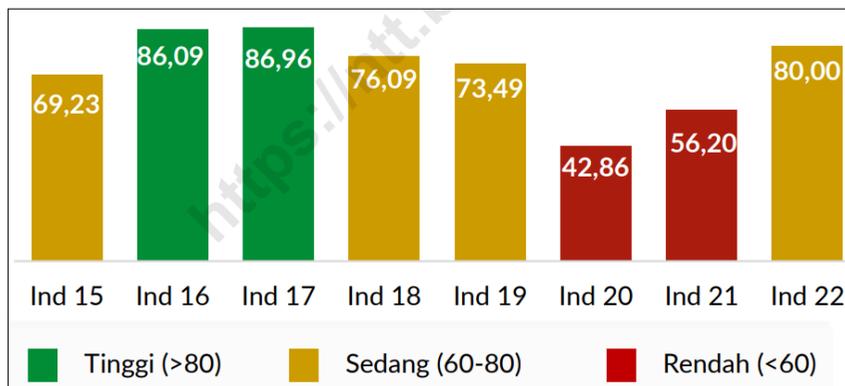
Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

Berdasarkan kesimpulan diatas, Indikator 9, Indikator 10, dan Indikator 14 pada aspek kapasitas kesetaraan yang dinilai masih belum maksimal pada Prov. Nusa Tenggara Timur, pada Kabupaten Timor Tengah Utara indikator nomor 9 (Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan), indikator 10 (Anti monopoli sumber daya ekonomi), dan indikator 14 (Kesetaraan dalam pelayanan dasar) telah dilakukan dengan baik. Sehingga pada aspek penilaian kesetaraan di Kab TTU pada tiap indikator penilaian sudah baik.

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Gambar 2. 48

Skor Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Prov. NTT, 2022



Tabel 2. 82

Persandingan Penilaian Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Timor Tengah Utara
15. Kinerja Lembaga Legislatif	Jumlah peraturan daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.	Dalam LKPJ Tahun 2022, disebutkan pembahasan rancangan peraturan daerah dalam ini merujuk terlaksananya pembahasan Ranperda ditargetkan 2 dokumen yang rampung, dengan realisasi 2 dokumen pula yang rampung. Hal ini mengindikasikan realisasi telah terlaksana 100%. Hal ini mengindikasikan kinerja legislatif dalam aspek kapasitas lembaga demokrasi terkait jumlah peraturan daerah yang disahkan dapat berjalan sesuai dengan baik
16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
17. Netralitas Penyelenggara Pemilu	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat Pemerintah	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.97-

Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Keterangan Penilaian Prov NTT	Pemfokusan pada Kabupaten Timor Tengah Utara
19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama
20. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	minimnya informasi APBD yang tersedia di website Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	Pada Website Pemerintahan Kabupaten TTU belum ada pempublikasian Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah
21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	masih rendahnya kinerja birokrasi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud mencakup kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.	Kab. TTU memiliki program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dalam hal ini indikator kinerja meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (dalam LKPJ Tahun 2022), dengan terealisasi 100% dan tidak terdapat kendala dan permasalahan apapun. Sehingga mengindikasikan pelayanan publik telah berjalan baik. Saat ini Pemerintah Kabupaten TTU merencanakan juga memiliki 3 inovasi yaitu MITON (Manajemen Informasi Terpadu Online), GERTAK BUMI (Gerakan Pertanian Berbasis Eko Enzim Untuk Menjaga Bumi) dan EKO LIT (Ekosistem-Literasi).
22. Pendidikan politik pada kader partai politik	Dinilai Sudah Baik	Merujuk penilaian yang telah baik pada Prov NTT, diindikasikan Kab TTU juga memiliki nilai yang sama

Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

Berdasarkan kesimpulan diatas, Indikator 15, Indikator 20, dan Indikator 21 pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang dinilai masih belum maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara indikator nomor 15 (Kinerja Lembaga Legislatif) dan indikator 21 (Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik) telah dilakukan dengan baik, namun untuk indikator 20 terkait indikator transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah belum ternilai dengan baik karena pada Website Pemerintahan Kabupaten TTU belum ada pempublikasian Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Indeks Rasa Aman

Indeks aman dan nyaman manusia Indonesia menurut bappenas dapat dilihat dari 4 dimensi yakni dimensi keamanan dari bencana (kesiapsiagaan dan risiko bencana), dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial (pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis, pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri), dimensi perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan (kebebasan politik dan pemikiran, kebebasan berkeyakinan, dan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.98-

kebebasan dari diskriminasi), terakhir dimensi keamanan dan kekerasan (kriminalitas, kekerasan komunal, kekerasan negara-masyarakat).

**Gambar 2. 49
Skema Indeks Keamanan Manusia**



Sumber: Indeks Keamanan Manusia Indonesia, Bappenas 2015

Dalam pendekatan penentuan indeks keamanan di Kab Timor Tengah Utara, berdasarkan dimensi untuk pengukuran indeks aman dan nyaman dengan penilaian sebagai berikut:

**Tabel 2. 83
Penentuan Indeks Kemanan Manusia**

Nilai	Keterangan	Indikasi Penilaian
0	Rasa Aman dan Nyaman Tidak Baik	Ada kasus atau kejadian atau potensi kerentanan tinggi didalam varibel penilaian
0,5	Rasa aman dan Nyaman Sedang	Terdapat poin yang belum dilakukan dalam upaya peningkatan rasa aman dan nyaman didalam varibel Penilaian
1	Rasa Aman dan Nyaman Baik	Tidak ada kasus atau kejadian yang mengganggu rasa aman dan nyaman di dalam varibel penilaian.

**Tabel 2. 84
Indeks Rasa Aman dan Nyaman Kab TTU**

Dimensi	Indikator	Analisis	Nilai
Dimensi keamanan dari bencana	Kesiapsiagaan Bencana	Upaya Kesiapsiagaan bencana yang telah ada yakni: a) Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam b) Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman c) Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.99-

Dimensi	Indikator	Analisis	Nilai
		<p>d) Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan (dari target 157 unit rumah, yang terealisasi sebanyak 156 unit rumah) (Sumber: LKPJ Tahun 2022)</p> <p>Upaya Kesiapsiagaan bencana yang belum ada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Jumlah desa yang memiliki simulasi bencanab) Jumlah desa yang memiliki petunjuk keselamatan bencanac) Jumlah desa yang memiliki dana antisipasi/ mitigasi bencana alam	
	Risiko Bencana	<p>Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki risiko bencana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Banjir (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir. 53,61% berpotensi tinggi terhadap risiko banjir dari total luasan daerah rawan banjir. Sedangkan 46% risiko rendah dan sedang)2. Banjir Bandang (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir bandang. 67,90% berpotensi tinggi terhadap risiko banjir dari total luasan daerah rawan banjir. Sedangkan 32,09% risiko rendah dan sedang).3. Cuaca Ekstrem (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah)4. Gelombang Ekstrem dan abrasi (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah)5. Gempa Bumi (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan sedang)6. Kebakaran hutan dan lahan (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan rendah)7. Kekeringan (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. 56,32% berpotensi tinggi terhadap risiko kekeringan dari total luasan daerah kekeringan. Sedangkan 43,67% risiko sedang)8. Likuifaksi (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. 52,36% berpotensi tinggi terhadap risiko likuifaksi)	0



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.100-

Dimensi	Indikator	Analisis	Nilai
		<p>dari total luasan daerah likuifasi. Sedangkan 47,53% risiko sedang)</p> <p>9. Tanah Longsor (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. 84,22% berpotensi tinggi terhadap risiko tanah longsor dari total luasan daerah risiko tanah longsor. Sedangkan 15,77% risiko rendah dan sedang)</p> <p>10. Tsunami (Data INARISK tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi. 91,42% berpotensi tinggi terhadap risiko Tsunami dari total luasan daerah risiko tsunami. Sedangkan 8,57% risiko rendah dan sedang).</p> <p>Dari 10 risiko bencana terdapat 7 risiko bencana di Kabupaten TTU dengan tingkat kerawanan tinggi, berdasarkan data INARISK 2022.</p>	
Dimensi pemenuhan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis	<p>a) Angka harapan hidup (Angka harapan hidup Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, terselenggaranya Program Lingkungan Sehat melalui pengawasan sanitasi, air bersih, disinfektan dan kantong pembungkus kaporit, tersedianya obat dan perbekalan kesehatan, adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terselenggaranya peningkatan sumber daya kesehatan, terselenggaranya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang baik, terselenggaranya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.)</p> <p>b) Rumah tangga dengan kondisi rumah yang baik (atap, lantai, dinding). Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni. Capaian kinerja Rumah Layak Huni pada akhir periode RPMJD (Tahun 2021) sebesar 54,44% dengan Predikat Rendah. Hal-hal yang mempengaruhi pembangunan rumah layak huni rendah adalah : a. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni b. Keterbatasan fisik daerah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki rumah melalui program BERARTI (Sumber: Evaluasi RPJPD TTU 2005-2025)</p> <p>c) Akses rumah tangga terhadap sumber air bersih (dari PDAM dan SPAM pedesaan)</p>	0,5
	Pemenuhan	Tingkat pengangguran terbuka	0,5



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.101-

Dimensi	Indikator	Analisis	Nilai
	terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri	<p>Angka pengangguran dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,26% dari 5,77% di tahun 2005 menjadi 3,51% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan dalam RPJMN sebesar 3,6-4,3, maka angka pengangguran di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah melampaui target RPJMN. Meskipun angka pengangguran sudah melampaui target RPJMN tahun 2024, tetapi pengangguran masih menjadi masalah serius di Kabupaten Timor Tengah Utara yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dikarenakan target yang ingin dicapai pada akhir tahun periode RPJMD (2026) sebesar 3,19.</p> <p>Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2021 SD 97,96; SMP 68,71; SMA 54,31 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2021 SD 117; SMP 84,83; SMA 72,98</p>	
Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas kebhinekaan	Kebebasan politik dan pemikiran	<p>Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (Tidak ada) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (Tidak ada) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (Tidak ada) Aturan tertulis yang membatasi kebebasan dalam menjalankan agamanya (Tidak ada)</p>	1
	Kebebasan Berkeyakinan	Sudah berjalan dengan baik	1
	Kebebasan dari diskriminasi	Sudah berjalan dengan baik	1
Dimensi keamanan dan kekerasan	Kriminalitas	<p>Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.</p> <p>Jumlah Kasus Kriminal di Kabupaten Timor Tengah Utara Periode I sampai dengan Periode IV RPJPD mengalami fluktuasi. Periode I RPJPD</p>	0,5
	Kekerasan Komunal		
	Kekerasan Negara-Masyarakat		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.102-

Dimensi	Indikator	Analisis	Nilai
		tingkat capaian sebesar 85,11%, periode II RPJPD tingkat capaian kasus kriminal sebesar 22,81%, selanjutnya pada periode III mengalami peningkatan menjadi 100%, pada periode IV RPJPD mengalami penurunan yang signifikan dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 2,21%. Hal yang menyebabkan adanya Kasus Kriminal di Kabupaten Timor Tengah Utara ialah : 1. Faktor Internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. 2. Faktor Eksternal yang menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat adalah keadaan dalam pengaruh Alkohol yang membuat seseorang melakukan tindak pidana.	
Rata-Rata Indeks Rasa Aman dan Nyaman Kab TTU			0,56

Sumber: Analisis, 2024 dari berbagai data yang diolah

C. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai beberapa target indikator kinerja berkaitan dengan indeks ketentraman dan ketertiban, yakni Capaian Kinerja Pembangunan. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilihat pada indikator kinerja pembangunan daerah yakni Cakupan patroli petugas Satpol PP, Kegiatan pembinaan politik daerah, dan Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Pada Tahun 2016 cakupan patroli petugas satpol pp dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, pada Tahun 2017 sebanyak 82 kali dan pada Tahun 2018 sebanyak 85 kali sedangkan pada Tahun 2019 sebanyak 85 kali. Kegiatan pembinaan politik daerah selama kurun waktu Tahun 2016 – 2019 dilakukan setiap Tahun 7 kali sedangkan, Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan bela Negara pada Tahun 2016 sebanyak 10 orang, Tahun 2017 sebanyak 20 Orang dan Tahun 2018 sebanyak 10 orang sedangkan pada Tahun 2019 meningkat 10 orang menjadi 20 orang sedangkan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 6 (enam) Peraturan.

Aparat Linmas sampai Tahun 2018 berjumlah 1.954 orang, sehingga rasionya mencapai 129/10.000 penduduk sedangkan Tahun 2019 berjumlah 1940 Orang. Artinya bahwa setiap 10.000 jiwa dilayani oleh 129 orang anggota Linmas. Jumlah Pos Kamling sebanyak 194 pada 194 desa/kelurahan, dimana setiap desa/kelurahan memiliki 1 (satu) Pos Kamling. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi salah satu kewenangan



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.103-

yang telah diberikan kepada daerah kabupaten untuk dikelola secara otonom. Arah dan fokus dari urusan ini adalah untuk memantapkan tekad dan cita-cita mewujudkan NKRI serta mengembangkan demokrasi pada level lokal secara sehat dengan melakukan pembinaan politik kepada masyarakat dan lembaga-lembaga *non-government*. Terhadap urusan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan banyak hal dengan menggunakan beberapa alat ukur yakni jumlah kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta jumlah kegiatan pembinaan politik daerah. Sampai dengan kondisi terakhir, jumlah LSM sebanyak 57 sedangkan OKP sebanyak 14.

D. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan hidup beragama juga menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Karena tanpa kerukunan, bangsa Indonesia justru akan semakin terpuruk dalam bayang-bayang konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Kementerian Agama baru saja mempublikasikan bahwa indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dalam 3 Tahun terakhir. Pada Tahun 2021 sebesar 72,39, indeks naik menjadi 73,09 pada 2022. Sementara pada 2023, indeks KUB kembali naik menjadi 76,02. Kerukunan hidup beragama menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Pada Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi terkait kerukunan umat beragamanya dengan nilai indeks KUB 81,07. Masyarakat NTT meyakini dengan kerukunan semua umat bisa menjalankan ibadahnya dengan damai dan nyaman. Antar umat beragama saling jaga satu sama lain tempat ibadahnya dan proses pelaksanaan ibadahnya.

Kabupaten Timor Tengah Utara berada di Provinsi NTT, mengingat Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang paling tinggi, yakni 81,07, sedangkan jika dilihat pada tingkat Nasional Indeks KUB nya 72,39, yang menjelaskan Prov. NTT melampaui nilai Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan Kabupaten Timor Tengah Utara juga memiliki nilai KUB yang baik. Kondisi tersebut terindikasi pula dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki program indikator kinerja tiap Tahunnya yakni jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama; Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional telah dilakukan.

E. Indeks Daya Saing Daerah

1. Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

Indeks daya saing suatu daerah (IDSD) diukur untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif, yang mampu merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Skor IDSD 2023 pada tingkatan Nasional yakni 3,44, terdapat 15 Provinsi yang IDSD nya telah melampaui nilai Nasional, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, memiliki nilai IDSD yakni 3,42. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 12 pilar pengukuran, yakni institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki indeks dibawah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.104-

rata-rata yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari berbagai pilar penilaian, kecuali pada pilar 3 dan 5 yakni adopsi TIK dan kesehatan, dimana nilai NTT 3,00 dan 3,54 sedangkan pada Kab TTU lebih tinggi yakni 4,00 dan 3,64. IDSD Kab. TTU tidak memiliki skor, mengingat terdapat beberapa pilar tidak ada data untuk di Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel diawah ini:

Tabel 2. 85
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten dan Kota di Prov. NTT

Nama Provinsi	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Prov NTT	4,11	2,21	3,00	3,45	3,54	3,46	4,92	3,18	3,03	4,09	2,64	3,39	3,42
Rata-rata kab/kota	3,90	1,57	3,69	3,51	3,58	3,10	3,51	2,97	1,11	3,50	2,31	1,76	2,84
Sumba Barat	3,92	1,55	3,39	0,16	3,64	2,84	4,21	2,71	1,86	3,26	1,33	1,40	2,81
Sumba Timur	4,04	1,30	3,17	3,82	3,49	3,16	2,95	2,90	1,08	3,71	1,46	2,69	2,81
Kab. Kupang	3,68	1,65	3,39	3,50	3,48	3,24	2,80	2,74	0,34	3,80	3,74	1,69	2,86
Timor Tengah Selatan	3,99	1,58	3,47	3,57	3,59	3,71	2,94	2,45	0,80	3,80	1,75	1,60	2,69
Timor Tengah Utara	3,35	1,38	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,20	1,34	3,57	1,85	2,52	2,89
Belu	3,80	1,74	4,04	3,25	3,48	2,98	4,46	3,22	2,08	3,58	3,78	1,13	3,13
Alor	4,00	1,24	3,63	3,76	3,23	3,09	3,67	3,30	1,65	3,41	-	1,67	-
Lembata	3,74	1,78	3,69	3,12	3,65	3,12	3,77	3,20	0,91	3,16	-	1,21	-
Flores Timur	3,91	1,91	3,97	3,33	3,51	3,12	4,41	3,12	1,56	3,65	2,13	1,62	3,02
Sikka	3,90	1,33	4,02	3,33	3,68	2,98	3,68	3,09	1,74	3,63	-	2,53	-
Ende	3,72	1,37	3,95	3,70	3,52	3,35	3,83	2,99	1,68	3,73	1,60	2,25	2,97
Ngada	3,94	1,61	3,59	3,22	3,71	3,38	3,33	2,76	1,60	3,47	2,01	1,92	2,88
Manggarai	4,10	1,97	3,75	3,66	3,64	3,20	4,13	2,63	1,77	3,58	4,17	2,60	3,27
Rote Ndao	3,97	1,32	3,56	3,33	3,48	3,16	2,99	2,98	0,47	3,40	1,75	1,21	2,63
Manggarai Barat	-	1,64	3,76	3,89	3,66	3,05	2,85	3,06	0,53	3,47	2,28	1,80	-
Sumba Tengah	3,85	1,34	2,87	3,89	3,74	2,96	3,45	2,96	0,70	2,97	1,77	1,22	2,64
Sumba Barat Daya	3,52	1,40	3,52	3,44	3,75	2,49	3,67	2,91	0,54	3,48	2,11	1,54	2,70
Nagekeo	-	1,24	3,63	3,40	3,65	3,22	2,67	2,94	0,63	3,24	3,38	1,69	-
Manggarai Timur	4,03	1,45	3,34	3,59	3,71	2,91	3,06	2,69	0,53	3,42	2,02	0,91	2,64
Sabu Raijua	3,89	1,79	3,51	3,46	3,14	3,09	3,23	2,79	0,42	2,98	2,79	0,69	2,65
Malaka	-	1,78	3,82	3,52	3,48	2,81	3,04	2,54	-	3,38	2,11	0,78	-
Kota Kupang	4,19	2,25	5,00	3,20	3,85	4,24	5,00	4,16	-	4,34	1,84	3,86	-

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, Tahun 2024. BRIN. Keterangan:

Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK, Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan

Pilar 6: Keterampilan, Pilar 7: Pasar produk, Pilar 8: Pasar tenaga kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar 10: Ukuran pasar, Pilar 11: Dinamisme bisnis, Pilar 12: Kapabilitas inovasi

2. Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Tahun 2023

Daya saing daerah secara berkelanjutan merupakan manifestasi komitmen bangsa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Daya saing daerah berkelanjutan dimaknai sebagai keunggulan kompetitif daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan, dan kinerja dalam jangka panjang guna menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan keberlanjutan ekonomi, mewujudkan kete sosial, serta pelaksanaan tata kelola berkelanjutan. Kajian ini menghadirkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai akselerator implementasi komitmen global terkait SDGs. Pada pilar lingkungan lestari, diharapkan hal ini menjadi agenda prioritas ke depan terutama dalam mendukung pembangun berkelanjutan di daerah. Sedari dini, pembangunan daerah mulai memprioritaskan pemeliharaan lingkungan dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan dinamika risiko bencana di daerah. Refleksi atas kinerja pilar ekonomi berkelanjutan menuntut daerah untuk melakukan daya dukung wilayah, optimalisasi sektor basis lestari, kemandirian fiskal menjadi agenda prioritas dalam peningkatan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.105-

**Gambar 2. 50
Diagram Daya Saing Daerah Berkelanjutan**



**Tabel 2. 86
Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) Kab.TTU**

Kabupaten	Lingkungan Lestari	Ekonomi Berkelanjutan	Inklusi Sosial	Tata Kelola Berkelanjutan	Nilai IDSDB	Rank
Timor Tengah Utara	47,218	37,879	70,143	39,657	47,228	324,000
Timor Tengah Selatan	36,239	54,726	63,302	30,378	44,191	355,000
Kupang	42,391	55,935	66,562	31,925	47,378	322,000
Malaka	43,756	39,822	67,093	26,368	41,902	371,000
Belu	48,825	46,129	38,151	73,058	44,200	

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Tahun 2024. BRIN.

Hasil pemeringkatan IDSDB pada daerah kategori tinggi tersebar pada setiap region (Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi) kecuali Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki nilai IDSDB sebesar 47,228, nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya kecuali dengan Kabupaten Kupang yang memiliki nilai sebesar 47,378.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Indeks Birokrasi

Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2021 sebesar 44,54 dan pada 2022 sebesar 49,03.

B. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas)

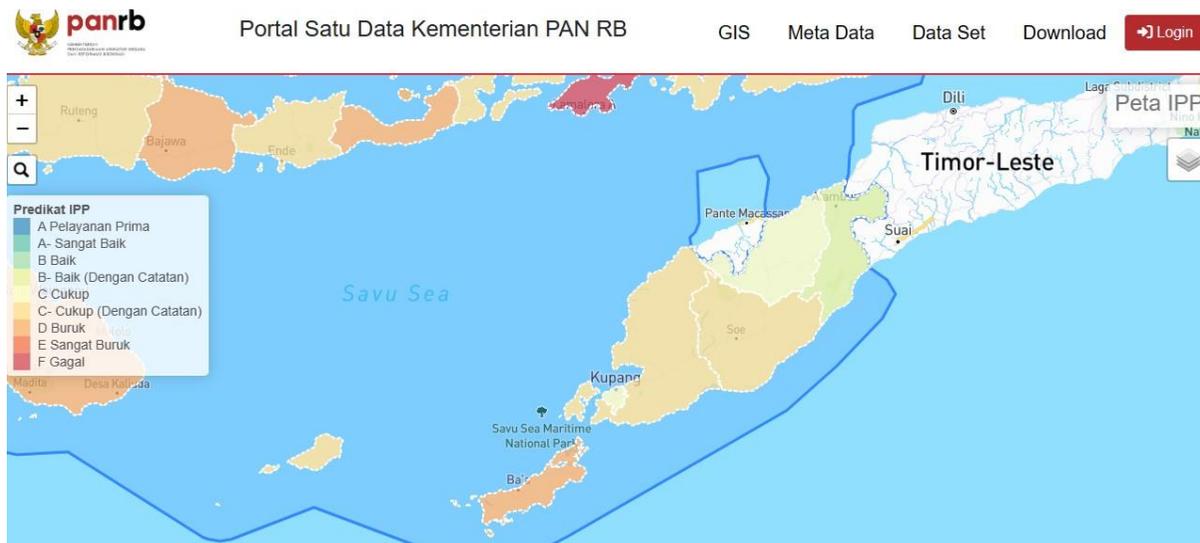


KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.106-

dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Gambar 2. 51
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Timor Tengah Utara dan kabupaten yang berdekatan



(Sumber: Satu Data - GIS KAB/KOTA (menpan.go.id))

Indeks pelayanan public di Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk kategori C (cukup). Hal ini termasuk lebih rendah dibandingkan Kabupaten Belu yang mendapat nilai B- (baik dengan catatan), namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang yang mendapat nilai C- (cukup dengan catatan). Nilai tersebut sama dengan Kota Kupang yang mendapat C.

C. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penilaian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki skor indeks sebesar 62,53 dan termasuk dalam kategori sangat inovatif bersama 8 provinsi lain di Indonesia. Adapun Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki skor sebesar 25,13 atau dalam kategori kurang inovatif. Hal ini masih kalah dibandingkan Kabupaten Belu yang memiliki skor 49,28 (inovatif), Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki skor 37,47 (inovatif), serta Kabupaten Kupang yang memiliki skor 35,08 (inovatif). Meskipun demikian, hasilnya masih lebih baik dibandingkan Kota Kupang yang memiliki skor 19,44 (kurang inovatif).



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.107-

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Indeks SPBE Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2021 sebesar 1,8 dan pada 2022 sebesar 1,83.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Capaian

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2022 maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait capaian dalam RPJPD sebagai berikut:

- 1) Beberapa indikator yang ada dalam RPJPD belum mencapai target perencanaan RPJPD seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk dan Jumlah kasus kriminal hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni belum optimalnya Pendataan dan screening ibu hamil belum dilaksanakan secara maksimal, belum optimalnya pemanfaatan buku pemantauan akseptor, belum optimalnya Pemantauan kantong persalinan, ronda siaga 7 di puskesmas belum berjalan maksimal, kurangnya kerja sama antara petugas dan kader dalam pendampingan calon ibu bersalin untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan serta adanya persalinan di luar faskes kesehatan sehingga tidak terpenuhi 5 indikator pelayanan Bayi Baru Lahir, pengetahuan masyarakat tentang gizi pada makanan, tidak cukupnya ketersediaan pangan yang memadai dan gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit kronis, misalnya diare kronis atau TBC. Serta Faktor Internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan faktor eksternal yang menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat adalah keadaan dalam pengaruh alokohol yang membuat seseorang melakukan tindak pidana;
- 2) Beberapa indikator RPJPD dan RPJMD tidak dapat diukur tingkat capaian kinerjanya karena tidak tersedianya data, adapun indikator yang tidak dapat diukur karena adanya target kinerja yang bernilai nol;
- 3) Indikator-indikator yang sudah mencapai target dalam RPJPD namun masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditingkatkan seperti Persentase penurunan tingkat kemiskinan, Persentase pertumbuhan ekonomi, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Pendapatan per kapita, Persentase Panjang jalan kabupaten yang berkualitas baik, Kualitas layanan pemerintah daerah, Opini penilaian atas pengelolaan keuangan daerah, Persentase dana perimbangan terhadap APBD, Kesesuaian pengembangan Kota Kefa, Kesesuaian pengembangan Pantai Utara, Kesesuaian pengembangan Kawasan Perbatasan;
- 4) Indikator-indikator yang termuat dalam RPJPD dan sudah mencapai target yakni Persentase angka melek huruf, angka kelulusan sekolah, angka partisipasi murni serta Alokasi Dana Desa;

2.5.2 Rekomendasi

Hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005- 2022 adalah:

- 1) Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa indikator yang belum mencapai target seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.108-

- Bayi, Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk dan Jumlah kasus kriminal untuk melakukan penanganan yang lebih baik;
- 2) Perlu adanya penataan, penguatan lembaga, serta verifikasi dan validasi dan sektoral;
 - 3) Pemerintah daerah perlu memperhatikan indikator-indikator makro yang meskipun secara keseluruhan sudah mencapai target perencanaan tapi masih membutuhkan penangan serius yakni Persentase penurunan tingkat kemiskinan, Persentase pertumbuhan ekonomi, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Pendapatan per kapita, Persentase Panjang jalan kabupaten yang berkualitas baik, Kualitas layanan pemerintah daerah, Opini penilaian atas pengelolaan keuangan daerah, Persentase dana perimbangan terhadap APBD, Kesesuaian pengembangan Kota Kefa, Kesesuaian pengembangan Pantai Utara, Kesesuaian pengembangan Kawasan Perbatasan;
 - 4) Pemerintah daerah perlu mempertahankan dan atau meningkatkan Indikator-indikator yang sudah mencapai target RPJPD seperti Persentase angka melek huruf, angka kelulusan sekolah, angka partisipasi murni serta Alokasi Dana Desa;
 - 5) Dalam penyusunan RPJMD pemerintah daerah wajib memperhatikan atau berpedoman pada RPJPD.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisa Perkiraan dan Jumlah Penduduk

Dinamika perkembangan penduduk akan mempengaruhi strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pada suatu wilayah. Perkembangan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara sempat menurun pada Tahun 2020 akibat pandemic covid-19. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017-2019 jumlah penduduk mengalami kenaikan pada Tahun 2020 kemudian menurun. Dalam 5 Tahun perkembangan Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,007 %. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis perkiraan jumlah dan perkembangan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2. 87

Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Total	Selisih Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan
2018	256.174	-	-
2019	276.150	19.976	7,798
2020	259.829	-16.321	-5,910
2021	262.698	2.869	1,104
2022	268.067	5.369	2,044
Rata - Rata Laju Pertumbuhan Penduduk			1,007

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2 Proyeksi Penduduk

Oleh karena keterbatasan data, perhitungan perkiraan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan dengan menggunakan pola distribusi penduduk 5 Tahun kebelakang (2018-2022) dengan asumsi bahwa pola distribusi ini tidak mengalami perubahan sampai akhir Tahun rencana. Adapun metode yang digunakan yaitu metode Geometric. Proyeksi penduduk di Kabupaten Timor Tengah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.109-

Utara, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$P_t = P_o (1 + r)^t$ Dimana:

P_t = Jumlah penduduk pada Tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada

Tahun awal r =

Pertumbuhan rata-rata

t = Selisih Tahun

Metode ini merupakan perkiraan jumlah penduduk didasarkan atas adanya tingkat pertumbuhan penduduk pada Tahun sebelumnya yang relatif tetap. Hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara digunakan sebagai dasar perhitungan di segala bidang.

Tabel 2. 88
Analisis Proyeksi Penduduk Kab.TTU

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk
2022	268.067
2025 - 2029	282.436
2030 - 2034	298.869
2035 - 2039	317.591
2040 - 2045	338.864

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara maka diketahui jumlah penduduk akan mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sampai Tahun 2045.

Tabel 2. 89
Analisis Proyeksi Penduduk Perkecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Geometri				
		2030	2035	2040	2045	Rata - Rata
1	Miomaffo Barat	15.465	15.298	15.133	14.970	15.217
2	Miomaffo Tengah	6.216	6.131	6.047	5.964	6.089
3	Musi	5.453	6.046	6.704	7.433	6.409
4	Mutis	6.989	6.674	6.372	6.085	6.530
5	Miomaffo Timur	13.945	15.067	16.280	17.590	15.720
6	Noemuti	14.292	15.447	16.694	18.043	16.119
7	Bikomi Selatan	11.721	11.878	12.038	12.199	11.959
8	Bikomi Tengah	8.401	8.990	9.621	10.297	9.327
9	Bikomi Nilulat	5.393	5.888	6.428	7.017	6.182
10	Bikomi Utara	6.665	6.896	7.135	7.382	7.020
11	Naibenu	6.090	6.454	6.840	7.249	6.658
12	Noemuti Timur	4.703	5.005	5.326	5.667	5.175
13	Kota Kefamenanu	56.770	65.645	75.907	87.774	71.524
14	Insana	23.218	24.762	26.408	28.164	25.638
15	Insana Utara	10.819	11.090	11.368	11.653	11.233
16	Insana Barat	11.880	12.686	13.546	14.465	13.144
17	Insana Tengah	10.204	9.599	9.030	8.495	9.332
18	Insana Fafinesu	6.840	7.617	8.482	9.445	8.096
19	Biboki Selatan	9.079	8.577	8.103	7.655	8.353
20	Biboki Tanpah	4.990	4.354	3.799	3.315	4.115
21	Biboki Moenleu	8.114	7.944	7.777	7.613	7.862
22	Biboki Utara	11.822	12.088	12.361	12.640	12.228
23	Biboki Anleu	18.971	20.290	21.701	23.209	21.043



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.110-

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Geometri				
		2030	2035	2040	2045	Rata - Rata
24	Biboki Feotleu	4.395	4.443	4.491	4.540	4.467
Jumlah		282.436	298.869	317.591	338.864	309.440

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan analisis proyeksi penduduk dengan metode Geometric maka diketahui bahwa proyeksi penduduk paling tinggi yaitu di Kota Kefamanu dengan rata rata 82.706 Jiwa sedangkan proyeksi penduduk paling rendah yaitu di Biboki Tanpah dengan rata rata 3590 jiwa. Rata rata proyeksi penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu 329.578 Jiwa.

Tabel 2. 90

Hasil Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Hasil Proyeksi Kepadatan Penduduk			
		2030	2035	2040	2045
1	Miomaffo Barat	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
2	Miomaffo Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Musi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
4	Mutis	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	Miomaffo Timur	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
6	Noemuti	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
7	Bikomi Selatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Bikomi Tengah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
9	Bikomi Nilulat	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
10	Bikomi Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
11	Naibenu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
12	Noemuti Timur	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
13	Kota Kefamenanu	Sangat Padat	Sangat Padat	Sangat Padat	Sangat Padat
14	Insana	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
15	Insana Utara	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
16	Insana Barat	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
17	Insana Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
18	Insana Fafinesu	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
19	Biboki Selatan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
20	Biboki Tanpah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
21	Biboki Moenleu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
22	Biboki Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
23	Biboki Anleu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
24	Biboki Feotleu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara maka diketahui bahwa Kecamatan sangat padat penduduk Tahun 2030 – 2045 adalah Kota Kefamenanu.

2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

A. Jaringan Energi

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.111-

Tabel 2. 91
Analisis Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik (450 VA/ Jiwa) dan 40% untuk Sarana Lingkungan			
		2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	268.067	282.435	298.868	317.591	338.864
Proyeksi Kebutuhan Rumah	53.613	56.487	59.774	63.518	67.773
Proyeksi Kebutuhan Listrik/ Rumah	120.630.150	127.096.151	134.490.971	142.916.061	152.488.932
Proyeksi Kebutuhan listrik/sarana lingkungan	48.252.060	50.838.460	53.796.388	57.166.425	60.995.573

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis diatas maka diketahui bahwa kebutuhan akan listrik pertiap rumah mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sampai Tahun 20452 begitupula dengan kebutuhan listrik untuk sarana lingkungan mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sampai Tahun 2045.

B. Jaringan Air Minum

Berdasarkan SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing bahwa penggunaan air bersih 120 Liter/Penghuni/Hari. Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan air minum maka diketahui bahwa dari Tahun 2022 – 2042 mengalami peningkatan kebutuhan air minum.

Tabel 2. 92
Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Minum (Liter/Hari)			
		2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	268.067	282.436	298.869	317.591	338.864
Proyeksi Kebutuhan Rumah	2.234	2.354	2.491	2.647	2.824

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Jaringan Persampahan

Berdasarkan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan sampah di permukiman bahwa Kota Besar = 3 L/org/hari sedangkan Kota Kecil = 2,5 L/org/hari. Berdasarkan analisis proyeksi timbunan sampah di Kabupaten Timor Tengah Utara maka diketahui timbunan sampah mengalami peningkatan dari Tahun 2022 – 2045.

Tabel 2. 93
Analisis Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Minum (2,5 Liter/Hari)			
		2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	268.067	282.436	298.869	317.591	338.864
Proyeksi Timbulan Sampah	670.168	706.090	747.172	793.978	847.161

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Kebutuhan Unit Rumah

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa 1 kk terkecil rata-rata terdiri dari 5 orang (ayah + ibu + 3 anak) maka hasil analisis kebutuhan unit rumah sebagai



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.112-

berikut

Tabel 2. 94
Proyeksi kebutuhan Rumah/Unit Tempat Tinggal Kab.TTU

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal (Unit)			
		2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	268.067	282.436	298.869	317.591	338.864
Proyeksi Kebutuhan Rumah	53.613	56.487	59.774	63.518	67.773

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka disimpulkan bahwa kebutuhan rumah dari Tahun 2023 sampai Tahun 2045 terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.

E. Sarana Prasana Kesehatan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa jumlah penduduk pendukung untuk rumah sakit yaitu 120.000 jiwa, Puskesmas 120.000 Jiwa, Balai Pengobatan 120.000 Jiwa, puskesmas pembantu 30.000 Jiwa dan posyandu sebanyak 1.250 Jiwa. Berdasarkan penduduk pendukung ini maka dihasilkan analisis sebagai berikut:

Tabel 2. 95
Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Uraian	Sarana Kesehatan	Sarana Kesehatan Ekstising	Proyeksi Kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan			
			2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk			282.436	298.869	317.591	338.864
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit	3	2	2	3	3
	Puskesmas	26	2	2	3	3
	Puskesmas Pembantu	40	9	10	11	11
	Balai Pengobatan	6	2	2	3	3
	Posyandu	506	226	239	254	271

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara maka diketahui bahwa jumlah sarana prasarana kesehatan Tahun 2045 kurang dari jumlah ekstising yang ada sehingga tidak perlu adanya penambahan fasilitas kesehatan

F. Sarana Prasarana Pendidikan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa penduduk pendukung untuk Taman Kanak Kanak (TK) 1.250 Jiwa, Sekolah Dasar (SD) 1.600 Jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.800 Jiwa dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 4.800 Jiwa

Tabel 2. 96
Kebutuhan Sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Sarana Pendidikan	Sarana Pendidikan Ekstising	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan			
			2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk			282.436	298.869	317.591	338.864
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	TK		226	239	254	271
	SD	273	177	187	198	212
	SMP	93	59	62	66	71
	SMA	30	59	62	66	71

Sumber: Hasil Analisis, 2023



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-II.113-

Berdasarkan hasil proyeksi sarana dan prasarana pendidikan maka diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana pendidikan untuk sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak ada penambahan unit dikarenakan jumlah Ekstising melebihi jumlah proyeksi. Taman Kanak Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu penambahan unit dikarenakan jumlah proyeksi melebihi jumlah ekstising, masing masing 250-unit untuk Taman Kanak Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 41 unit untuk Tahun 2045.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki pengembangan pusat wilayah di Kecamatan Kota Kefamenanu sebagai pusat pemerintahan skala regional, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional dan pusat transportasi skala regional. Selain itu, kecamatan Kota Kefamenanu berfungsi sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan, pusat pemerintahan skala regional, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional dan pusat transportasi skala regional.

Proyek strategis nasional yang sedang berjalan adalah Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang Wini. PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh dengan melewati Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua dapat langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km. Kabupaten TTU akan memiliki dua bangunan megah yang dapat dimanfaatkan menjadi titik destinasi wisata di Provinsi NTT.

Beberapa program yang fokus untuk didorong dalam mendukung kemajuan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara selama 20 Tahun dan dalam kaitannya untuk mendukung kedudukan Nusa Tenggara Timur sebagai 'Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara" diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Program yang Kaitannya dengan Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara
 1. Sistem Pusat Permukiman (Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan)
 - a) Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Kefamenanu
 - b) Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Perkotaan Kefamenanu
 - c) Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Perkotaan Wini di Kecamatan Insana Utara
 - d) Program Pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang bukan pusat PKL sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) Perkotaan Eban di Kecamatan Miomaffo Barat, Perkotaan Oeluan di Kecamatan Noemuti, dan Perkotaan Bitauini di Kecamatan Insana.
 - e) Program Pengembangan PPL berupa Pusat Pelayanan Lingkungan Permukiman yaitu :
 - Perkotaan Napan di Kecamatan Bikomi Utara;



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.114-

- Perkotaan Oenenu Utara di Kecamatan Bikomi Tengah;
 - Perkotaan Oesena di Kecamatan Miomaffo Timur;
 - Perkotaan Oepuah Selatan di Kecamatan Biboki Monleu;
 - Perkotaan Ponu di Kecamatan Biboki Anleu;
 - Perkotaan Bakitolas di Kecamatan Naebenu;
 - Perkotaan Maubesi di Kecamatan Insana Tengah;
 - Perkotaan Fafinesu di Kecamatan Insana Fafinesu;
 - Perkotaan Bijaepasu di Kecamatan Miomaffo Tengah;
 - Perkotaan Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - Perkotaan Oeolo di Kecamatan Musi;
 - Perkotaan Naekake di Kecamatan Mutis;
 - Perkotaan Manufui di Kecamatan Biboki Selatan;
 - Perkotaan Teba Timur di Kecamatan Biboki Tanpah;
 - Perkotaan Boronubaen di Kecamatan Biboki Utara;
 - Perkotaan Manumean di Kecamatan Biboki Feotleu;
 - Perkotaan Haekto di Kecamatan Noemuti Timur;
 - Perkotaan Naiola di Kecamatan Bikomi Selatan.
2. Sistem jaringan Jalan (Pengembangan Jalan Umum)
- Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer (Kec. Insana Barat-Kota Kefamenanu, Kec. Insana-Kec. Insana Tengah, Kec. Biboki Tanpah-Kec. Insana, Kec. Bikomi Selatan-Kec. Noemuti, Kec. NoemutiKec. Bikomi Utara-Kec. Miomaffo Timur)
 - Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (Saenam - NunpoKec. Miomaffo Barat, Kec. Bikomi Selatan-Kec. Miomaffo Tengah, Kec. Biboki Anleu-Kec. Insana Utara, Kec. Insana Fafinesu-Kec. Naibenu, Kec. Insana Utara-Kec. Naibenu, Kec. Mutis)
 - Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Lokal Primer (Seluruh Kecamatan)
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang
- Pengembangan fungsi terminal tipe A ALBN (Kecamatn Bikomi Selatan)
 - Peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B (Kecamatan Kota Kefamenanu)
 - Pengembangan terminal penumpang tipe C 10 unit
 - Kecamatan Kefamenanu,
 - Eban (Kecamatan Miomaffo Barat),
 - Wini (Kecamatan Insana Utara),
 - Lurasik (Kecamatan Biboki Utara),
 - Ponu (Kecamatan Biboki Anleu),
 - Maubesi (Kecamatan Insana Tengah),
 - Napan (Kecamatan Bikomi Utara),
 - Manufui (Kecamatan Biboki Selatan),
 - Haumeni (Kecamatan Bikomi Nilulat) dan
 - Oenopu (Kecamatan Biboki Tanpah).
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Barang
Pengembangan dan pemeliharaan terminal barang (meliputi Terminal Wini yang terdapat di Kecamatan Insana Utara.)
5. Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (Kecamatan Kota Kefamenanu)
6. Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Penghubung
7. Pengembangan Pelabuhan Laut



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.115-

- Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
 - Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul
 - Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan
8. Sistem Jaringan Energi
- Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) diseluruh kecamatan
 - Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kefamenau dan PLTD Naekake
 - Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PLTS Wini
 - Rencana Pembangunan 1 unit Gardu Induk (Kec. Bikomi Selatan)
9. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT 70 kV GI Kefamenanu – GI Atambua
 - Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT 70 kV GI Nnohanis – GI Kefamenanu
 - Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT GI Amfoang ke IBT Kefamenanu
 - Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT IBT Kefamenanu ke GI Malaka
 - Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)
 - Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver Station (BTS)
10. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder
 - Pemeliharaan saluran drainase (Sungai-sungai yang melintasi Kabupaten TTU)
 - Pengembangan dan pemeliharaan bendungan
11. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM Temef)
 - Rencana IPAL individu komunal pada Kawasan permukiman, permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan social
 - Pengelolaan limbah B3
 - Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST)
 - Pembangunan TPA (KM 9 di Kota Kefamenanu)
 - Perencanaan pengelolaan sampah melalui pengembangan sistem zero waste, bank sampah, dan 3R (reduce, reuse, recycle) di seluruh kecamatan.

b. Program yang Kaitannya dengan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara

Program-program dalam pengembangan pola ruang di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat didorong untuk mendukung kemajuan Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 20 Tahun yang dapat pula mendukung kedudukan Nusa Tenggara Timur sebagai “koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” meliputi:

1. Rehabilitasi Kawasan konservasi rehabilitasi Kawasan cagar alam di kecamatan Miomaffo barat dan Kecamatan Mutis
2. Pelestarian Kawasan cagar budaya berkaitan dengan Rumah Adat dan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.116-

- Rumah Raja.
3. Rehabilitasi dan reboisasi Kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Insana Utara.
 4. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan meliputi Pengembangan kegiatan Agropolitan. Base sektor ekonomi tanaman pangan yakni padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau.
 5. Pengembangan kawasan hortikultura meliputi Penyediaan jaringan irigasi dan pupuk organik. Base sektor ekonomi berdasar analisis LQ hortikultura (buah-Buahan) adalah mangga, durian, jeruk, pisang, papaya, salak, nanas, dan alpukat. Komoditi sayur-sayuran adalah bawang merah, cabai besar, cabe rawit, kentang, kubis, tomat, bawang putih, sawi dan terung. Tanaman Biofarma terdiri dari terdiri dari jahe, laos/lengkuas, kencur, dan kunyit. Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, Kecamatan Mutis, dan Kecamatan Naibenu.
 6. Pengembangan Kawasan peternakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
 7. Pengembangan perikanan budidaya di Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu
 8. Pengembangan lahan garam dan Pengembangan industri hasil garam di Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu
 9. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yakni pengembangan industry kopi dan Pengembangan Kawasan sentra industri kecil dan menengah
 10. Pengembangan Kawasan Pariwisata Pengembangan pariwisata akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati jika pengembangannya sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis wisata yang dapat dikembangkan adalah Jenis wisata alam (Kecamatan Mutis, Insana Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu), wisata budaya (Kecamatan Kota Kefamenanu, Noemuti, Miomaffo Barat, Insana, Biboki Selatan) dan wisata buatan (Insana Utara, Bikomi Utara Miomaffo Timur, dan Neomuti).
 11. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan
 - a. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara didapat berdasarkan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dengan luas kurang lebih 112.339 Ha Permukiman di perkotaan yang memiliki fungsisebagai PKW dan PKL. Permukiman tersebut dapat dikembangkan di Perkotaan Kefamenanu
 - b. Permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Perkembangan permukiman perkotaan kecil ini perlu dibatasi terutama bagi kecamatan yang memiliki lahan dengan tingkat produktifitas lahan tinggi.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-II.117-

- c. Permukiman pedesaan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil survey lapangan dan hasil analisis kesesuaian lahan yang direncanakan dengan luas kurang lebih 5.425 Ha. Serta pengembangan kawasan permukiman transmigrasi lokal di wilayah Pantai Utara dengan pusat di Ponu meliputi Kecamatan Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Tengah, Insana Utaram Insana dan Naibenu

- c. Program Kawasan Strategis dalam RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara
Kawasan strategis merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis, penting dan prioritas dikarenakan memiliki pengaruh yang luas terhadap perkembangan wilayah. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategi kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Program-program dalam pengembangan Kawasan strategis di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat didorong untuk mendukung kemajuan Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 20 Tahun meliputi 4 lokasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, 2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya dan 1 kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa Kawasan Strategis Manamas Manufonu.

Dimana dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terletak di Kawasan Strategis Wini (Kecamatan Insana Utara), Kawasan Strategis Kota Kefa (Kec. Kota Kefamenanu), Kawasan Strategis Eban (Kec. Miomaffo Barat), dan Kawasan Startegis Lurasik (Kec. Biboki Utara). Kawasan-kawasan tersebut merupakan Kawasan stretgis ekonomi yang tumbuh cepat, menjadi pendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara, jika didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi serta mempercepat pertumbuhan Kawasan tersebut. Sedangkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya lokasi Kawasan strategisnya meliputi Kawasan Strategis Sonaf Raja Oelolok (Kec, Insana), Kawasan stretgis Kampung Adat Tamkesi (Kec. Insana), Upaya pengembangan Kawasan strategis social budaya kedepannya dapat menjadi ciri khas dalam bidang social budaya yang dapat mempengaruhi perkembangan sebuah wilayah atau kota. Serta Kawasan Strategis Manamas Manufonu (Kec. Insana Utara) yang merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.1-

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

3.1 Permasalahan

3.1.1. Permasalahan Global

Permasalahan global terkait pembangunan suatu wilayah identic dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kestaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Berdasarkan hasil penghitungan dan pengelolaan data capaian TPB untuk Kabupaten Timor Tengah Utara; dari 220 indikator nasional sesuai dengan metadata 1 yang digunakan, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 202 indikator yang relevan dengan kondisi Kabupaten. Rincian dari 202 indikator tersebut berupa 96 indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (47,52%), 77 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (38,12%), 9 indikator belum dilaksanakan dan belum ada target (4,46%), serta 20 indikator tidak memiliki data (9,90%).

**Tabel 3. 1
Capaian Indikator TPB Kab.TTU Terhadap Target Nasional**

No	Capaian	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Hukum Tata Kelola	Jumlah	%
1	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	42	33	11	10	96	47,52
2	Sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target (SB)	46	14	12	5	77	38,12
3	Belum dilaksanakan, Belum ada target (TT)	0	1	7	1	9	4,46
4	Indikator tidak memiliki data (NA)	7	8	2	3	20	9,9
Total		95	56	32	19	202	100

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten TTU 2025-2045

Indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dilaksanakan namun tidak mencapai target nasional menjadi sebuah perhatian tersendiri. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.2-

Tabel 3. 2
Ketidaktercapaian TPB Kabupaten Timor Tengah Utara

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ISU KETIDAKTERCAPAIAN TPB
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Masih tingginya angka kemiskinan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	SDM yang masih rendah
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Belum meratanya program bantuan penduduk miskin
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin.	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sumber air bersih
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Penanganan sanitasi masyarakat yang belum optimal
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Belum optimalnya kelembagaan pelayanan masyarakat
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Belum optimalnya pelayanan jaringan energi listrik
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum optimalnya penanganan bencana
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Masih tingginya risiko bencana
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Belum optimalnya penanganan bencana
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Belum optimalnya penanganan bencana
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Masih tingginya risiko bencana
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Masih tingginya risiko bencana
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Masih tingginya risiko bencana
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Masih tingginya angka kemiskinan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Tingginya angka stunting
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 Tahun, berdasarkan tipe.	Tingginya angka stunting
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	SDM yang masih rendah
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.3-

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ISU KETIDAKTERCAPAIAN TPB
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 Tahun	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 Tahun.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 Tahun	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/	Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.4-

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	ISU KETIDAKTERCAPAIAN TPB
	sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana /KB yang tidak terpenuhi).	Belum optimalnya pelayanan kesehatan

Sumber: KLHS RPJPD TTU 2025-2045

3.1.2 Permasalahan Nasional

Permasalahan nasional sebagai tercantum dalam Naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relative tertinggal
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
12. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relative terbatas
14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
15. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sehingga untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada 2045, menjadi tantangan utama
16. Kualitas pendidikan masih rendah
17. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.5-

- sosial masih rendah
18. Regulasi yang berlebihan (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik pusat maupun daerah
 19. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
 20. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
 21. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D
 22. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik
 23. Belum meratanya kualitas pelayanan publik
 24. kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
 25. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
 26. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik
 27. Partisipasi masyarakat koruptif, sipil dan dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal
 28. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya diurusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
 29. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
 30. Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan
 31. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.
 32. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.
 33. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat
 34. ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
 35. ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi.
 36. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya
 37. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
 38. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.6-

- dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang
39. kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

3.1.3 Permasalahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tercantum dalam dokumen ialah:

1) Kemiskinan

Kemiskinan di NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari Tahun ke Tahun. Jumlah penduduk miskin di NTT pada maret 2023 adalah sebesar 1,14 juta jiwa (19,96%), menurun dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 1,13 juta jiwa (20,05%). Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di NTT pada maret 2023 menurun sebesar 8,23% dibandingkan Maret 2005 yang sebesar 28,19%. Sebaran penduduk miskin di NTT pada Maret 2023 masih didominasi wilayah pedesaan yaitu sebanyak 1,01 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 135,57 ribu jiwa.

2) Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)

Wilayah Provinsi NTT saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,632. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Selain itu jika dilihat dari kontribusi PDRB berdasarkan Kabupaten/Kota, perekonomian NTT masih didominasi oleh Kota Kupang yaitu sebesar 22,11 persen pada Tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi lebih banyak berpusat di Kota Kupang dengan sarana prasarana yang lebih memadai dari daerah lain di NTT. Kesenjangan dan ketertinggalan daerah identic dengan ketersediaan dan pemerataan layanan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal dalam mendukung logistik serta pengembangan sektor unggulan pariwisata. Konektivitas laut dan penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal dalam mendukung sektor unggulan pariwisata dan komoditas perikanan, perkebunan, dan peternakan. Sejumlah pelabuhan belum dirancang untuk melayani angkutan pariwisata, seperti kapal cruise. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di NTT, menyebabkan kapal-kapal kontainer (Lift-On/Lift-Off atau LoLo) belum beroperasi secara optimal. Sementara itu, kapal RoRo angkutan barang yang



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-III.7-

memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan dan fasilitas bongkar muat, belum dikembangkan. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan ALKI II dan III di wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Bandara perairan dan seaplane belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Sumbawa, Trans Flores, dan jalan trans lainnya, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di Wilayah Kupang.

Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi permasalahan dalam pemanfaatan EBT. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi EBT yang signifikan, tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal dalam memenuhi kebutuhan energi listrik untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal tersebut di antaranya disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola EBT dan belum optimalnya faktor kelembagaan dalam mendukung pengembangan EBT sehingga banyak pembangkit EBT (off-mini grid) yang rusak atau tidak beroperasi.

Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah. Sistem Nusa Tenggara masih belum terinterkoneksi menyeluruh di masing-masing pulau utama. Sistem Infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara terdiri dari berbagai subsistem kecil tersebar yang melayani ibukota provinsi, kabupaten dan kota dengan menggunakan transmisi tegangan 70 kV dan 150 kV. Sistem tenaga listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 63 sistem tenaga listrik untuk melayani beban tersebar di beberapa pulau dari yang terbesar sampai ke yang terkecil sampai dengan perbatasan Timor Leste. Sistem Timor dan Sistem Flores merupakan sistem yang terbesar dan selebihnya beroperasi secara terpisah. Sistem besar mendapatkan pasokan dari PLTU, PLTMG, PLTM, dan beberapa PLTD. Sistem lainnya yang terpisah dipasok dari PLTD, PLTP, PLTM, dan PLTS komunal.

Pelayanan ketenagalistrikan Wilayah Bali Nusa-Tenggara masih didominasi rumah tangga dengan tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah. Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sumber energi primer energi baru dan terbarukan yang besar dan beraneka ragam seperti surya, panas bumi, air, dan angin dengan potensi masing-masing sekitar 414,46 GW; 1,62 GW; 0,09 GW; dan 17,56 GW. Pulau Sumba memiliki luasan lahan yang tidak produktif serta potensi sumber energi surya sangat besar dengan rata-rata iradiasi paling tinggi dibandingkan daerah lain di seluruh Indonesia.

Pada sektor infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum merata, khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara umum, jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 95,9 persen dari area wilayah pemukiman sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 96,97 persen. Jangkauan jaringan seluler 4G di wilayah Provinsi



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-III.8-

Nusa Tenggara Timur masing-masing sekitar 93,48 persen dari total area wilayah pemukiman. Pemanfaatan jaringan digital masih terbatas untuk telekomunikasi. Pemanfaatan untuk kepentingan lainnya cenderung masih rendah.

Permasalahan lainnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada permasalahan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang rendah hal tersebut juga dihadapi Kabupaten Timor Tengah Utara. Permasalahan akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pariwisata. Kebutuhan air baku dipenuhi terutama melalui ekstraksi air tanah yang berdampak turunnya permukaan tanah. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko banjir pesisir dan abrasi terutama di pulau-pulau terkecil. Selanjutnya permasalahan yang juga dihadapi adalah infrastruktur air minum, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan, serta rumah layak huni masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini berdampak pada kualitas hidup sumber daya manusia. Akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi NTT cukup rendah dari angka nasional. Permasalahan dalam penyediaan rumah layak huni adalah pemenuhan standar kelayakan terhadap fisik bangunan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi geografis wilayah Provinsi NTT yang berupa kepulauan menyebabkan banyaknya permukiman kumuh terapung di sekitar badan air.

3) Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan Nilai-Nilai Budaya

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada Tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2013) secara keseluruhan penduduk Nusa Tenggara Timur diproyeksikan pada Tahun 2035 sebanyak 6.829,1 dengan komposisi umur produktif yakni 15-64 % sebanyak 61,9% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 61.6% pada Tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

Secara umum, berdasarkan analisis growth diagnostics, faktor penghambat pembangunan ekonomi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, khususnya Wilayah Nusa Tenggara adalah SDM Ketenagakerjaan. Untuk Provinsi NTT, faktor penghambat lainnya adalah SDM pendidikan, infrastruktur, dan daya saing hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.9-

**Tabel 3. 3
Growth Diagnostics Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi
Nusa Tenggara dibandingkan Wilayah Sekitarnya (Provinsi Bali dan Nusa
Tenggara Barat)**

	Pembiayaan	SDM: Ketenagakerjaan	SDM: Pendidikan	SDM: Kesehatan	Infrastruktur	Regulasi dan Institusi	Makro dan Fiskal	Daya Saling
Bali	●	●	●	●	●	●	●	●
Nusa Tenggara Barat	●	●	●	●	●	●	●	●
Nusa Tenggara Timur	●	●	●	●	●	●	●	●

Bukan Faktor Penghambat Faktor Penghambat Utama

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti KEK, KI, serta kawasan pengembangan komoditas unggulan seperti SKPT, khususnya di Wilayah Nusa Tenggara belum mampu memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya karena belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kawasan-kawasan yang dikembangkan. Faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut, yaitu kualitas SDM khususnya dalam keterampilan teknologi pengolahan. Secara rinci, berbagai isu strategis lainnya dan akar masalah pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara dijabarkan dalam berbagai bidang sebagai berikut.

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Provinsi NTT memiliki IPM di bawah rata-rata nasional yaitu peringkat 32 secara nasional, dengan akar permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. NTT masih dihadapkan pada permasalahan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan SD. Rendahnya IPM di Provinsi NTT disebabkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA dan Perguruan Tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Selain itu, Provinsi NTT juga dihadapkan pada kondisi kualitas tenaga pendidik yang kurang memadai karena masih banyaknya tenaga pendidik dengan pendidikan terakhir kurang dari S1/D4. Faktor lainnya yang memengaruhi rendahnya IPM di Wilayah Nusa Tenggara, yaitu angka prevalensi untuk stunting, penyakit malaria dan kusta, serta rendahnya APM. Ketimpangan capaian pembangunan kesehatan menjadi tantangan antara Bali dan Nusa Tenggara, misalnya prevalensi stunting Tahun 2022 di Bali (8,0 persen) menjadi terendah se-Indonesia dan jauh dibandingkan capaian NTB (32,7 persen) dan NTT (35,3 persen). Pada permasalahan malaria, Kabupaten/Kota di NTT belum sepenuhnya mencapai eliminasi malaria dibandingkan Bali yang sudah mencapai 100 persen. Akses terhadap air minum dan sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih rendah daripada Bali menunjang disparitas capaian kesehatan. Masih tingginya penyakit tropis terabaikan seperti kusta dan penyakit malaria di NTT juga gambaran dampak dari rendahnya kualitas lingkungan dan gaya hidup masyarakat yang belum



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-III.10-

memenuhi aspek kesehatan. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan RS masih terbatas, terutama di NTT. Selain itu, Pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih rendah, hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang rendah pula.

Kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka kemiskinan yang tinggi. Kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih rendah ini salah satunya ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang sangat tinggi di atas rata-rata nasional, yakni berada di peringkat ke-3 tertinggi secara nasional. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, yaitu mayoritas masyarakat baik di Provinsi NTT bekerja di sektor informal (75,24 persen). Sedangkan menurut BPS (2021) pada Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2021 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 58.330 orang atau sebanyak 22,62 persen (%), hal tersebut naik dari sebelumnya hanya 20,89 persen atau 50.720 orang.

Tingginya angka pekerja sektor informal berpengaruh terhadap lebih rendahnya rata-rata pendapatan yang diterima serta lemahnya perlindungan hak-hak di tempat kerja. Wilayah Nusa Tenggara menghadapi permasalahan kesenjangan intra wilayah dan ketertinggalan daerah. Ketertinggalan daerah yang dihadapi oleh Wilayah Nusa Tenggara ditunjukkan dengan masih terdapat beberapa daerah tertinggal. Secara spesifik, Empat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Belu, dan Malaka. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang semula ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode sebelumnya, kini menyusul Kota Kupang sebagai daerah yang tidak dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi ketertinggalan di wilayah ini terutama dipengaruhi oleh infrastruktur dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan TIK) yang belum optimal, kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah (PDRB per kapita, pengeluaran, dan pekerjaan), serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi.

- 4) Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi)

Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada Tahun 2022. Sementara sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi Provinsi NTT untuk mengembangkan Sektor Industri Pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia, seperti halnya provinsi-provinsi maju di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) yang kontribusi sektor industri pengolahannya sangat besar terhadap ekonomi daerah. Namun di satu sisi, ini menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTT untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan (Pertanian, Perikanan dan Pertambangan). Provinsi NTT perlu mengembangkan sub sektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.11-

unggulan daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.

5) **Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan pengembangan sentra komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan ekonomi wilayah. Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi NTT masih jauh dari angka nasional. Nilai IPEI Provinsi NTT menduduki peringkat terendah ke-3 secara nasional disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya masih belum dapat menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan belum terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan akibat terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat tersebut.

Selain itu, pengembangan koridor pariwisata khususnya di Wilayah Nusa Tenggara belum optimal dalam menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara. Padahal Provinsi NTT memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan yang tersebar di provinsi NTT, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effects pada berbagai sektor terkait. Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.

Kawasan pariwisata yang telah dikembangkan sejak 2017 dan menjadi prioritas nasional di Wilayah Nusa Tenggara seperti di DPP Labuan Bajo di Provinsi NTT. Namun demikian, keterhubungan pembangunan pariwisata dalam koridor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah wisatawan Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni 744 ribu wisatawan Nusantara dan 58 ribu wisatawan mancanegara di Provinsi NTT, apabila dibandingkan Provinsi Bali yang lebih tinggi yakni 8,1 juta wisatawan Nusantara dan 2,2 juta wisatawan mancanegara. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena konektivitas wilayah yang menghubungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal, serta daya tarik wisata yang belum dikembangkan dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga wisatawan domestik dan mancanegara masih bertumpu pada Bali, sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terkendala terbatasnya kapasitas masyarakat akan pengembangan pariwisata. Potensi pariwisata juga belum didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks potensi ekonomi kreatif daerah khususnya di Provinsi NTT.

6) **Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau**

Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan dimana akses terhadap sumber daya dapat diterima manfaatnya oleh generasi sekarang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan di



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.12-

masa depan.

a. Ekonomi Biru

Salah satu kebijakan dalam pembangunan Sektor Kelautan adalah Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama, yaitu Arus Laut, Gelombang Laut dan Temperatur Laut. Lokasi potensial bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Boleng dan Selat Molo. NTT juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut, sehingga sumber daya laut di NTT sangat potensial untuk dikembangkan.

b. Ekonomi Hijau

Konsep pertumbuhan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, tetapi merupakan bentuk konkrit dan sistematis dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Provinsi NTT menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB NTT yaitu 29,60 persen pada Tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT dalam jangka panjang sangat penting untuk dilakukan.

NTT merupakan wilayah kering yang berisiko lebih parah dengan adanya perubahan iklim, rawan bencana, rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat ekplorasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan.

7) Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam

Utamanya energi, air, dan pangan menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (The Triple Planetary Crisis) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris Agreement Tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019)³ menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di Tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-III.13-

sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan.

Saat ini, potensi tenaga surya di Provinsi NTT yang mencapai 369,50 GW, dapat dikembangkan sebagai modal dasar transisi energi di masa depan. Sementara itu, terdapat pula potensi tenaga angin di Provinsi NTT sebesar 12,02 GW yang juga dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan di masa mendatang. Pengembangan EBT tenaga surya dapat memanfaatkan potensi lahan kering di NTT. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara.

Provinsi NTT termasuk pada kategori daerah dengan resiko rawan bencana yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks resiko 139,23 (kategori sedang). Bencana yang sering terjadi di Provinsi NTT di dominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan. Selain itu, NTT juga memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara Pula Nusa Tenggara, serta erupsi gunung aktif. Tantangan lainnya terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya wilayah yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Secara historis, dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT, dimana bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

8) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber-sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah.

9) Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum

Proses penegakan hokum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.14-

sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Beberapa data yang dapat menggambarkan potret pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4
Potret Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2022**

No	Indikator	Nasional	Nusa Tenggara Timur
Bidang Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	3,05
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,57	20,23
3	Rasio Gini	0,381	0,340
4	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,00	5,24
Bidang Sosial			
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,91	65,90
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	3,54
Kondisi Kesehatan			
7	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71,85	67,47
8	Prevalensi Stunting (%)	21,60	35,30
9	Jumlah Kab/Kota Belum Tereliminasi Malaria (Kab/Kota)	196	15
Kondisi Pendidikan			
10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,69	7,70
11	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,10	13,21
12	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- SD/ sederajat (persen)	97,88	96,08
	- SMP/ sederajat (persen)	80,89	70,05
	- SMA/ sederajat (persen)	61,97	56,00
Jaminan Sosial			
13	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (persen)	86,9	93,0
14	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)		
	- Pekerja Formal (persen)	56,19	37,98
	- Pekerja Informal (persen)	13,06	4,88
Bidang Sarana dan Prasarana			
15	Tampungan per Kapita (m3/kap)	57,53	13,75
16	Air Minum Jaringan Perpipaan (persen)	19,47	18,95
17	Sanitasi Aman (persen)	10,16	2,35
18	Penanganan Persampahan*** (persen)	33,27	6,02
19	Rumah Layak Huni (persen)	60,66	41,8
20	Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	1.122	217,84
21	Porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan (persen)	15,47	7,9
22	Jangkauan 4G di kawasan pemukiman (persen)	96,97	93,48
23	Kemantapan Jalan*		
	- Nasional (persen)	92,55	94,69
	- Provinsi (persen)	74,46	70,41
	- Kabupaten/Kota (persen)	62,26	55,54
Bidang Tata Kelola			
24	Indeks Pelayanan Publik	-	Cukup
25	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,43	74,42
26	Indeks Integritas	71,94	66,86
Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			
27	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	135,56	139,23
28	Indeks Ketahanan Pangan	60,20	68,42
29	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (persen)	10,21	13,74

Catatan:

warna merah: Kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional, warna hijau: kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional

*Data Tahun 2021

**Data Tahun 2020

**Data Tahun 2019

Sumber: BPS 2020-2022, SSGI 2022, KemenPANRB (diolah), Komisi Informasi Pusat RI, SPI, Jaga.id, BNPB-IRBI 2022, Badan Pangan Nasional 2022, KemenPUPR 2021/2022



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-III.15-

3.1.4 Permasalahan Kabupaten Timor Tengah Utara

Permasalahan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai tercantum dalam dokumen melalui identifikasi kondisi eksisting, serta penjarangan aspirasi masyarakat. Identifikasi kondisi eksisting dinilai melalui berbagai aspek yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta dianggap perlu menjadi perhatian karena mengalami tren memburuk. Adapun penjarangan aspirasi masyarakat diperoleh dari kuisioner yang disebar kepada masyarakat.

A. Kondisi Eksisting

Kondisi eksisting Kabupaten Timor Tengah Utara yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1) Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi yang perlu menjadi perhatian khusus adalah:

- Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada dibagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australias, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
- Klasifikasi kawasan hutan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 41.669,27 Ha atau sekitar 37,44% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara wajib berhati-hati agar tidak ada pemanfaatan di dalam kawasan hutan lindung.
- Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air (grid), Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi dengan wilayah belum terlampaui seluas 174472.49 ha (66,74%). Adapun wilayah dengan daya dukung air telah terlampaui seluas 86970.69 ha (33,26%). Wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui menandakan bahwa wilayah tersebut masih menyimpan cadangan ketersediaan air yang lebih besar dibandingkan permintaan penduduk. Hal ini sama halnya dengan daya dukung air melalui pendekatan jasa lingkungan penyedia air bersih, dimana didominasi kategori rendah seluas 112639,39 ha (39,23%). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kehati-hatian dalam pemanfaatan lahan, terutama untuk pemanfaatan yang membutuhkan air dalam jumlah banyak seperti pertanian.
- Jasa lingkungan penyedia pangan sangat rendah mendominasi, yaitu seluas 190112,44 ha (67,21%) dengan demikian wilayahnya tidak diarahkan untuk pertanian tanaman pangan, sehingga



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.16-

akan lebih banyak ekspor dari daerah lain.

- Sebanyak 110.061,58 ha wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk rawan bencana gempa bumi kategori tinggi (42%), rawan longsor kategori tinggi seluas 133.263,02 ha (50,94%), rawan tsunami kategori tinggi seluas 863,85 ha (0,33%), kekeringan kategori tinggi seluas 147.336,53 ha (56,32%), rawan likuifaksi kategori tinggi seluas 8.980,37 ha (3,43%)
- Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada distribusi penduduk. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu sejumlah 49.589 jiwa, dan paling kecil terdapat di Kecamatan Biboki Feotleu sejumlah 4.379 jiwa. Sama halnya jika dilihat dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota Kefamenanu yaitu 666 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Biboki Feotleu yaitu 38 jiwa/km². Hal ini terutama dikarenakan kondisi fisik geografis beberapa wilayah yang sulit terjangkau.
- Potensi utama sumber daya alam yang cukup variatif namun belum dimanfaatkan dengan baik

2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat yang perlu menjadi perhatian adalah:

- Pengeluaran masyarakat masih diarahkan ke kebutuhan makanan (56,27%), dibandingkan non makanan (43,27%), meskipun dari tren 2021-2022 terdapat pergeseran pengeluaran ke arah non makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa, masyarakat masih berupaya memenuhi kebutuhan dasar hidup dibandingkan investasi.
- Nilai tukar petani masih defisit <100 (nilai tukar usaha petani 95,70 dan nilai tukar nelayan 91,55) dimana Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.
- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 (21,85%) mengalami peningkatan dari Tahun 2022 (21,50%) dan hal ini masih jauh dari target nasional (6-7%) pada 2024.
- IPM Kabupaten TTU pada Tahun 2023 sebesar 65,16 mengalami peningkatan 0,25 dari Tahun 2022 yakni sebesar 64,91. Jika dibandingkan, IPM Kabupaten TTU masih berada di bawah angka IPM Provinsi NTT sebesar 66,68 dengan selisih 1,52. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten TTU juga perlu ditingkatkan terus agar kedepannya minimal bisa setara dengan IPM tingkat Provinsi NTT.
- Indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Timor Tengah Utara (95,85) lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi NTT (93,33) dan nasional (91,85) artinya ketimpangan pembangunan perempuan dibandingkan laki-laki sangat kecil. Meskipun demikian, indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Timor Tengah Utara (56,91) masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (75,1) dan nasional (76,9), dalam hal ini partisipasi aktif



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.17-

perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik masih rendah. Indeks ketimpangan gender (IKG) di Kabupaten Timor Tengah Utara (0,519) masih lebih tinggi dibandingkan provinsi NTT (0,428) sehingga tingkat ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara masih lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi NTT.

3) Aspek Daya Saing

Aspek daya saing yang perlu menjadi perhatian adalah:

- Nilai PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena kontribusi paling besar untuk PDRB wilayah adalah sektor mentah (belum ada proses produksi) dengan nilai ekonomi masih rendah.
- Pemerataan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara masih lebih rendah dibandingkan rata-rata di Indonesia, meskipun hampir semua kabupaten/kota di Provinsi NTT memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Hal ini terlihat dari angka indeks ekonomi inklusif Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2021 (5,28) yang lebih rendah daripada rata-rata Indonesia (6), meskipun sedikit lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi NTT (5,24).
- Harapan lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara (13,35 Tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah (8,16 Tahun). Kondisi tersebut sangat disayangkan karena penduduk Timor Tengah Utara memiliki kesadaran terhadap pendidikan tinggi (sampai tingkat SMA lebih) namun banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga hanya sampai jenjang pendidikan dasar (SMP).
- Adanya penurunan jumlah pekerja dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada Tahun 2020, Kabupaten TTU memiliki nilai TPAK sebesar 78,13%, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 78,41%, terus meningkat pada Tahun 2022 mencapai 79,95%. Kemudian pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,64% sehingga menjadi 75,77%.
- Adanya indikasi peningkatan daya saing dilihat dari angka ketergantungan dan stunting. Angka ketergantungan Kabupaten Timor Tengah mengalami penurunan dari 2017 sebesar 67,6 menjadi 60,2 pada 2022, meskipun demikian masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kupang pada 2022 sebesar 46,68 maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 55,56. Angka stunting Kab. TTU dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami penurunan, dari 25% pada Tahun 2021, menurun 1% pada Tahun 2022, dan mengalami penurunan menjadi 23% pada Tahun 2023. Namun Kab. TTU memiliki nilai stunting lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka stunting dengan Provinsi NTT dan Nasional. Pada Tahun 2023, Provinsi NTT memiliki nilai stunting sebesar 15% jika dibandingkan dengan angka nasional yakni 21,5%.

4) Aspek Pelayanan Umum



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.18-

- Tata kelola pemerintahan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari nilai indeks reformasi birokrasi Kab Timor Tengah Utara pada 2021 sebesar 44,54 dan pada 2022 sebesar 49,03. Bahkan dilihat dari indeks pelayanan public termasuk cukup (kategori C). Hal ini termasuk lebih rendah dibandingkan Kabupaten Belu yang mendapat nilai B- (baik dengan catatan), namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang yang mendapat nilai C- (cukup dengan catatan). Nilai tersebut sama dengan Kota Kupang yang mendapat C. Selain itu pengelolaan pemerintahan belum terintegrasi secara digital terutama dilihat dari indeks SPBE (1,83/ cukup) yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTT (3,55 / baik).
- Masih rendahnya tingkat inovasi daerah, dimana nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (25,13/ kurang inovatif). Hal ini masih kalah dibandingkan Kabupaten Belu yang memiliki skor 49,28 (inovatif), Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki skor 37,47 (inovatif), serta Kabupaten Kupang yang memiliki skor 35,08 (inovatif). Meskipun demikian, hasilnya masih lebih baik dibandingkan Kota Kupang yang memiliki skor 19,44 (kurang inovatif).

5) Evaluasi RPJPD

Beberapa indikator yang ada dalam RPJPD belum mencapai target perencanaan RPJPD seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk dan Jumlah kasus kriminal hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni belum optimalnya Pendataan dan screening ibu hamil belum dilaksanakan secara maksimal, belum optimalnya pemanfaatan buku pemantauan akseptor, belum optimalnya Pemantauan kantong persalinan, ronda siaga 7 di puskesmas belum berjalan maksimal, kurangnya kerja sama antara petugas dan kader dalam pendampingan calon ibu bersalin untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan serta adanya persalinan di luar faskes kesehatan sehingga tidak terpenuhi 5 indikator pelayanan Bayi Baru Lahir, pengetahuan masyarakat tentang gizi pada makanan, tidak cukupnya ketersediaan pangan yang memadai dan gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit kronis, misalnya diare kronis atau TBC. Serta Faktor Internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketanagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan faktor eksternal yang menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat adalah keadaan dalam pengaruh alokohol yang membuat seseorang melakukan tindak pidana.

6) Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana

Kepadatan penduduk dengan klasifikasi sangat padat yaitu berada Kota Kefamenanu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Sedangkan kecamatan lain bervariasi dari rendah sampai tinggi.

B. Aspirasi Masyarakat

Kuisisioner penjangkauan aspirasi masyarakat disebarikan secara daring sehingga dalam waktu yang ditentukan terdapat 166 responden, dimana



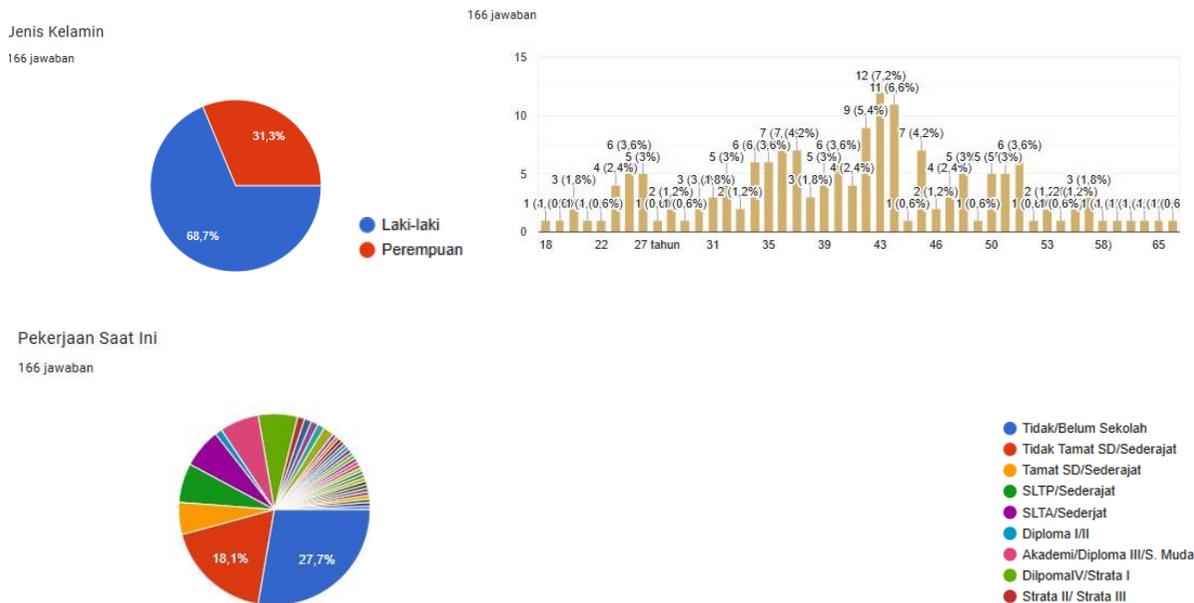
**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.19-

sebagian besar adalah laki-laki (68,7%) dengan umur paling banyak 43 Tahun (7,2%) dan pekerjaan mayoritas ASN, TNI-Polri, BUMN, BUMD (27,7%) serta pendidikan terakhir mayoritas Diplo,a IV/Strata I (58,4%).

Gambar 3. 1

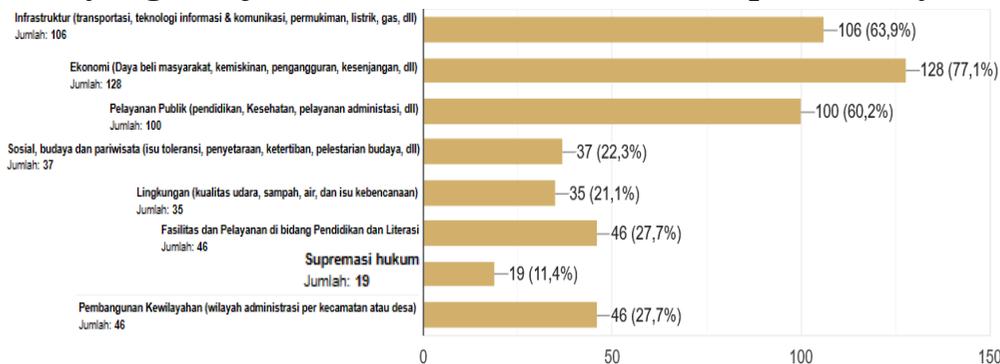
Latar Belakang Masyarakat yang Memberikan Aspirasi Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, sektor yang dianggap bermasalah dan perlu diperbaiki



Latar Belakang Masyarakat yang Memberikan Aspirasi Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, sektor yang dianggap bermasalah dan perlu diperbaiki secara umum adalah Ekonomi (Daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dll), Sosial, budaya dan pariwisata (isu toleransi, penyetaraan, ketertiban, pelestarian budaya, dll), Lingkungan (kualitas udara, sampah, air, dan isu kebencanaan) yaitu sebesar 77,1%. Disusul kemudian sektor Infrastruktur (transportasi, teknologi informasi & komunikasi, permukiman, listrik, gas, dll) (63,9%), dan Pelayanan Publik (pendidikan, Kesehatan, pelayanan administrasi, dll), Supremasi hukum, Pembangunan Kewilayahan (wilayah administrasi per kecamatan atau desa) (60,2%).

Gambar 3. 2

Sektor yang Menjadi Permasalahan Menurut Aspirasi Masyarakat





**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.20-

3.2 Analisis Isu Strategis Daerah Kabupaten TTU

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, serta dari hasil penjarangan isu masyarakat, maka isu strategis di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.21-

Tabel 3. 5

Tabel Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Masalah					No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Scoring	Isu Strategis
Tantangan Global	RPJPN	RPJPD NTT	KLHS	Penjaringan Aspirasi				
Pendidikan Berkualitas	1. kondisi kualitas tenaga pendidik yang kurang memadai 2. aspek kesehatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah	-	Belum optimalnya layanan pendidikan	belum meratanya fasilitas pendidikan yang memadai	1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan formal dan nonformal (pelatihan/pemagangan)	1	Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia
Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan RS masih terbatas 2. aspek kesehatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah 3. rendahnya kualitas lingkungan dan gaya hidup masyarakat yang belum memenuhi aspek kesehatan	-	Belum optimalnya layanan kesehatan	1. Tidak memiliki Rumah sakit Tipe A 2. masih terdapatnya masyarakat yang stunting	2	Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat	1	
Tanpa Kemiskinan	belum dapat mengurangi kemiskinan	Kemiskinan	Masih tingginya angka Kemiskinan		3	Masih tingginya angka kemiskinan	1	
-	daya tarik wisata yang belum dikembangkan berdasarkan kewilayahan (kecamatan dan desa)	Belum optimalnya pengembangan pariwisata	-	Kurang optimalnya pengelolaan destinasi wisata	4	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai salah satu sumber ekonomi	1	Belum optimalnya pembangunan ekonomi
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	belum dapat menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja	Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industry pengolahan (hilirisasi)	-	1. pengelolaan sumber daya alam yang masih tradisional seperti Pertanian dan peternakan 2. Sarana prasarana pertanian masih kurang menyebabkan gagal tanam	5	Belum optimalnya pengelolaan nilai tambah sektor utama	1	
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1. belum dapat menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja 2. daya beli masyarakat rendah	Rendahnya kualitas dan daya saing SDM serta kemerosotan nilai-nilai budaya	1. Peningkatan sumber daya manusia yang masih terbatas 2. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas 3. Masih tingginya	1. pemberdayaan masyarakat dan pemberian modal usaha bagi pemuda 2. angkatan kerja tidak memiliki kapasitas yang cukup 3. kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang bagi	6	Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Manusia lokal yang dibutuhkan pada bidang tertentu	1	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.22-

Tantangan Global	Masalah				No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Scoring	Isu Strategis
	RPJPN	RPJPD NTT	KLHS	Penjaringan Aspirasi				
			angka Kemiskinan	anak daerah untuk mengabdikan pada daerah				
-	1. Pemanfaatan jaringan digital masih terbatas untuk telekomunikasi 2. sektor infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum merata	-	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	1. belum meratanya akses internet 2. pemasangan kabel listrik, wifi, telkom yg di pinggir jalan dibuat rapi sesuai aturan tinggi berapa meter dari permukaan jalan	7	Belum optimalnya digitalisasi	1	
Industri, Inovasi dan Infrastruktur	rendahnya kapasitas fiskal provinsi dan kabupaten/kota	-	-	1. Belum maksimalnya pembangunan ekonomi di setiap desa 2. akses pasar bagi petani 3. Masih banyak pasar desa yang belum berjalan efektif 4. Pasar baru kurang adanya penataan sehingga sering terjadi kemacetan	8	belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pengembangan sentra komoditas unggulan	1	
						5 akar masalah		
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	good governance yang masih rendah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya akses pelayanan pencatatan sipil	proses pencairan keuangan setiap OPD yg terhambat	9	Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan, pengadaan, pembangunan, dll) belum optimal	1	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
	1. Indeks Pelayanan Publik yang masuk dalam kategori cukup. 2. Tata kelola dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	-	Belum optimalnya layanan	Kurangnya transparansi pengelola pemerintahan terutama dalam peregrutan tenaga honorer				
	pemenuhan SPM yang belum optimal	-	Tata kelola dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	Lambatnya pelayanan terhadap desa terkait pencairan anggaran				
						1 akar masalah		
	good governance yang masih rendah	Belum optimalnya supremasi hukum yang	Upaya perlindungan masyarakat dari	Lambatnya pelayanan terhadap desa terkait	10	belum mampu mempertautkan jarak antara <i>law in books</i> dan <i>law</i>	1	Penegakan hukum belum



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.23-

Tantangan Global	Masalah				No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Scoring	Isu Strategis
	RPJPN	RPJPD NTT	KLHS	Penjaringan Aspirasi				
		menjamin keadilan, kepastian hukum	kejahatan serta penciptaan keamanan wilayah belum optimal	pencairan anggaran		<i>in action.</i>		optimal
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi	Belum optimalnya supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum	Upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan serta penciptaan keamanan wilayah belum optimal	kurang optimalnya penerangan jalan (Lampu lalu lintas) di tiap perempatan /pertigaan.	11	Upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan serta penciptaan keamanan wilayah belum optimal	1	
-	pemenuhan SPM yang belum optimal	-	1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia 2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat (semua lapisan masyarakat dan kesetaraan gender) dalam Pembangunan	Belum maksimalnya pembangunan ekonomi di setiap desa	12	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	
						3 akar masalah		
-	-	-		1. Mengenalkan kembali budaya - budaya yang ada pada TTU dan nilai - nilai yang terkandung dalam budaya 2. Masuknya nilai dan budaya luar dari TTU	13	Adanya pengaruh budaya luar dan kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya	1	Belum optimalnya resiliensi sosial budaya dan lingkungan hidup
Kesetaraan Gender	-	-	1. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak belum optimal 2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat (semua lapisan masyarakat	-	14	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak belum optimal	1	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.24-

Tantangan Global	Masalah				No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Scoring	Isu Strategis
	RPJPN	RPJPD NTT	KLHS	Penjaringan Aspirasi				
			dan kesetaraan gender) dalam Pembangunan					
Ekosistem Daratan	-	-	-	Masalah lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan	15	Perlu upaya peningkatan perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem	1	
-	-		-		16	Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sanitasi	1	
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	-	-	-	saluran/got yg kurang berfungsi,sampah dan kebersihan kota	17	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	1	
-	-	-	-	1. Kelangkaan air bersih akibat penggundulan hutan 2. Permasalahan jalan & drainase dalam kota yg sudah tidak memadai,	18	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	1	
Tanpa Kelaparan	-	Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penanggulangan bencana	Belum meratanya akses pangan masyarakat	-	19	Belum meratanya akses pangan sehat masyarakat	1	
Energi Bersih dan Terjangkau	1. rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola Energi baru terbarukan (EBT) 2. belum optimalnya faktor kelembagaan dalam mendukung pengembangan EBT	-	-	-	20	Belum optimalnya efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan	1	
Penanganan Perubahan Iklim	kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana,	Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan penanggulangan bencana	-	risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan mungkin menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat	21	Penanggulangan Bencana Yang Belum Optimal serta ancaman perubahan iklim	1	
						9 akar masalah		
Berkurangnya Kesenjangan	1. permasalahan kesenjangan intra wilayah dan ketertinggalan daerah 2. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas 3. permasalahan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang rendah	Kesenjangan dan ketertinggalan daerah (masih banyaknya daerah tertinggal)	Pengembangan Sumber Pendapatan daerah	kemiskinan dan infrastruktur yg belum merata di antara kecamatan dan desa	22	Masih adanya kesenjangan wilayah (kota-desa, dan daerah tertinggal)	1	Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.25-

Tantangan Global	Masalah				No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Scoring	Isu Strategis
	RPJPN	RPJPD NTT	KLHS	Penjaringan Aspirasi				
-	1. konektivitas wilayah yang menghubungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal 2. terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pengelolaan dan pasar	-	-	-				
						1 akar masalah		
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	penyediaan rumah layak huni adalah pemenuhan standar kelayakan terhadap fisik bangunan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat.	-	-	Penataan Pusat Kota sebagai landmark utama	23	Belum optimalnya perencanaan pembangunan pemukiman	1	Sarana dan prasarana belum terjangkau, merata dan saling terhubung bagi masyarakat
-	-	-	-	1. Kurangnya akses jalan dan transportasi umum ke desa-desa terpencil 2. pengelolaan jalur transportasi dalam kota 3. Pengaspalan jalan lingkungan di kecamatan	24	Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi	1	
						2 akar masalah		
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	-	-	-	-	25	Belum memaksimalkan kerjasama swasta dalam berinvestasi	1	Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder lain
-	-	-	-	-	26	Investasi daerah yang terbatas	1	
						2 akar masalah		

Sumber: Hasil analisis, 2024



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.26-

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa isu strategis pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia
 - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan formal dan nonformal (pelatihan/ pemagangan)
 - Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat
 - Masih tingginya angka kemiskinan
2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi
 - Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai salah satu sumber ekonomi
 - Belum optimalnya pengelolaan nilai tambah sektor utama
 - Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Manusia lokal yang dibutuhkan pada bidang tertentu
 - Belum optimalnya digitalisasi
 - belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pengembangan sentra komoditas unggulan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan, pengadaan, pembangunan, dll) belum optimal
4. Penegakan hukum belum optimal
 - belum mampu mempertautkan jarak antara law in books dan law in action.
 - Upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan serta penciptaan keamanan wilayah belum optimal
 - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Belum optimalnya resiliensi sosial budaya dan lingkungan hidup
 - Adanya pengaruh budaya luar dan kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya
 - Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak belum optimal
 - Perlu upaya peningkatan perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem
 - Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sanitasi
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan
 - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
 - Belum meratanya akses pangan sehat masyarakat
 - Belum optimalnya efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan
 - Penanggulangan Bencana Yang Belum Optimal serta ancaman perubahan iklim
6. Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah
 - Masih adanya kesenjangan wilayah (kota-desa, dan daerah tertinggal)
7. Sarana dan prasarana belum terjangkau, merata dan saling terhubung bagi masyarakat
 - Belum optimalnya perencanaan pembangunan pemukiman
 - Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-III.27-

8. Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder lain
 - Belum memaksimalkan kerjasama swasta dalam berinvestasi
 - Investasi daerah yang terbatas



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

-IV.1-

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran citacita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1 Visi RPJPD Kab.TTU

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 Tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.

Gambar 4. 1
Konsep Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara



Perumusan dari Visi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara 2045 berdasarkan pada masalah utama dan isu strategis pembangunan. Isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu: (1) Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia; (2) Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang merata antar wilayah dan berkelanjutan; (3) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; (4) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang masih kurang; (5) Masih terdapat berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan (daya dukung dan daya tampung); (6) Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah; (7) Sarana dan prasarana belum terjangkau, merata dan saling terhubung bagi masyarakat; serta (8) Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder lain. Perumusan pokok-pokok visi berdasarkan masalah utama atau isu



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-IV.2-

strategis pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara, dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Isu Strategis	Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia	Daya Saing, Kesejahteraan, Maju	Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan
2	Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang merata antar wilayah dan berkelanjutan	Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan, Maju	
3	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sejahtera, Maju, Berdaya Saing	
4	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang masih kurang	Sejahtera	
5	Masih terdapat berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan (daya dukung dan daya tampung)	Sejahtera, maju, berkelanjutan	
6	Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah	Sejahtera, maju, berkelanjutan	
7	Sarana dan prasarana belum terjangkau, merata dan saling terhubung bagi Masyarakat	Sejahtera, dan maju	
8	Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder lain	Maju, Berdaya Saing	

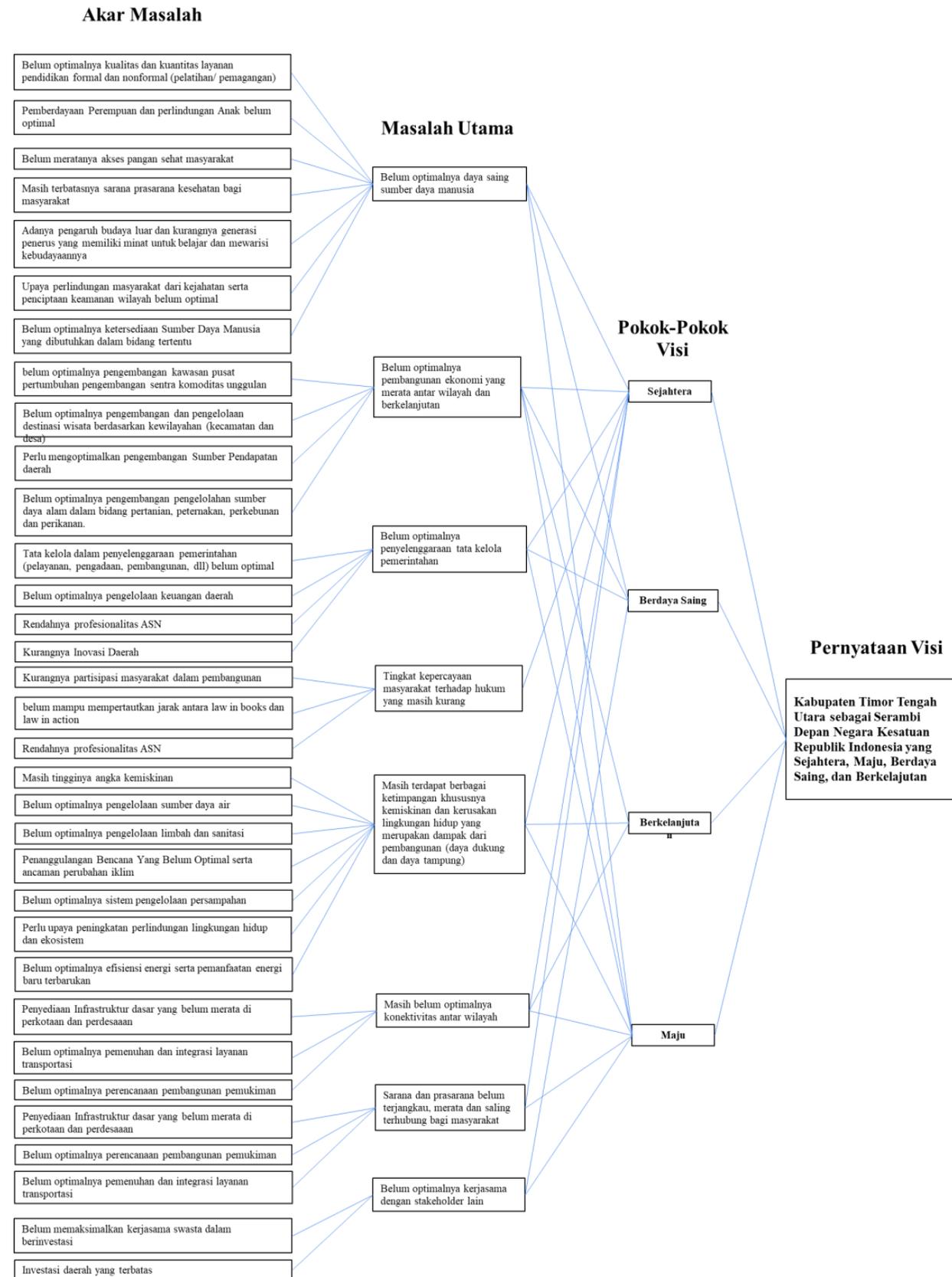
Sumber: Hasil olahan, 2023



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

-IV.3-

Gambar 4. 2
Diagram Konsep Visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber: Hasil olahan, 2023

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut dan berdasarkan letak geografis dari Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah serambi (terdepan) berbatasan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-IV.4-

langsung dengan Negara Timor Leste sejak Tahun 1999, sehingga kata serambi memberikan arti kesan pertama kepada seseorang sebelum memasuki 'bangunan utama' dari Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka visi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025- 2045 adalah:

“Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. **Serambi Depan.** Berdasarkan letak geografis dari Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah serambi (terdepan) berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste sejak Tahun 1999, sehingga kata serambi memberikan arti kesan pertama kepada seseorang sebelum memasuki 'bangunan utama' dari Negara Indonesia.
2. **Sejahtera.** Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.
3. **Maju.** Terwujudnya yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang adaptif terhadap IPTEK dalam pengembangan ekonomi dan sosial, Tata Kelola Pemerintah Daerah, pelayanan publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah.
4. **Berdaya Saing.** Terwujudnya Kabupaten Timor Tengah Utara yang unggul, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah, tata kelola pemerintahan yang *good governance*, dan perekonomian yang maju.
5. **Berkelanjutan.** Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

4.2 Sasaran Visi RPJPD Kab.TTU

Sasaran visi merupakan variabel penilaian umum yang digambarkan untuk ketercapaian dari sebuah visi yang direncanakan. Visi Kabupaten TTU adalah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Visi tersebut tersusun dari sasaran visi sebagai berikut: 1) Pendapatan per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang meningkat; 2) Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kemiskinan satu digit dan ketimpangan berkurang; 3) Kepemimpinan kepala daerah yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; 4) Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara Berkualitas Unggul; dan 5) Kabupaten Timor Tengah Utara menuju net zero emission dan ramah lingkungan. Sasaran visi tersebut terdapat penyertaan indikator terdapat pada tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Sasaran Visi RPJP Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten TTU	Indikator	Baseline	Target 2045
1	Pendapatan per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang meningkat	a. PDRB per Kapita (Rp Juta)	17,77	23,00
		b. Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	40,79	50



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-IV.5-

No	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten TTU	Indikator	Baseline	Target 2045
		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	1,15	2,76
2	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kemiskinan 0 persen dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	21,85	3,51
		b. Rasio Gini	0,316	0,290
		c. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)*	3,76	3,93
3	Daya Saing Daerah Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	2,89	4,00
4	Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara Berkualitas Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,16	80
5	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,86	73,11
		b. Penurunan Intesitas GRK	0	51,51

Keterangan:

* Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota merupakan kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi

4.3 Misi RPJPD Kab.TTU

Misi Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Unggul, Inovatif, dan Berdaya Saing Tinggi**
2. **Mewujudkan Perekonomian Berkelanjutan yang berdaya saing melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan**
3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance***
4. **Mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi yang adil dan konsisten**
5. **Mewujudkan Pembangunan yang inklusif berbasis ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup**
6. **Mewujudkan Pembangunan berbasis kewilayahan Perkotaan dan Perdesaan yang Terhubung, Merata, dan Seimbang**
7. **Mewujudkan Mutu Sarana dan Prasarana yang Terjangkau, Terpadu, dan Ramah Lingkungan**
8. **Mewujudkan Pembangunan daerah yang Berkesinambungan**

Misi-misi tersebut dengan berlandaskan pemikiran persandingan dari pemetaan masalah, pokok masalah, dan isu strategis. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan Tantangan Global, RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta hasil dari penjarangan aspirasi masyarakat Timor Tengah Utara. Perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3

Banchmarking Masalah, Masalah Pokok, dan Isu Strategis menjadi Misi Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara 2045

No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan formal dan nonformal (pelatihan/ pemagangan)	Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia	Daya Saing, Kesejahteraan, Maju	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-IV.6-

No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
2	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak belum optimal			Berkualitas Unggul, Inovatif, dan Berdaya Saing Tinggi
3	Belum meratanya akses pangan sehat Masyarakat			
4	Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat			
5	Adanya pengaruh budaya luar dan kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya			
6	Upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan serta penciptaan keamanan wilayah belum optimal			
7	Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya yang dibutuhkan pada bidang tertentu			
8	belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pengembangan sentra komoditas unggulan	Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang merata antar wilayah dan berkelanjutan	Sejahtera, Berdaya Saing, Berkelanjutan, Maju	
9	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata berdasarkan kewilayahan (kecamatan dan desa)			
10	Perlu mengoptimalkan pengembangan Sumber Pendapatan daerah			
11	Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sumber daya alam dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.			
12	Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan, pengadaan, pembangunan, dll) belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sejahtera, Maju, Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance
13	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah			
14	Rendahnya profesionalitas ASN			
15	Kurangnya Inovasi Daerah			
16	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang masih kurang	Sejahtera	Misi 4: Mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi yang adil dan konsisten
17	belum mampu mempertautkan jarak antara <i>law in books</i> dan <i>law in action</i> .			
18	Rendahnya profesionalitas ASN			
19	Masih tingginya angka kemiskinan	Masih terdapat berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang	Sejahtera, maju, berkelanjutan	Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang inklusif berbasis ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup
20	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air			
21	Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sanitasi			
22	Penanggulangan Bencana Yang Belum Optimal serta ancaman perubahan iklim			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-IV.7-

No	Masalah Pokok/Akar Masalah	Isu Strategis	Pokok Visi	Misi
23	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	merupakan dampak dari pembangunan (daya dukung dan daya tampung)		
24	Perlu upaya peningkatan perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem			
25	Belum optimalnya efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan			
26	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata di perkotaan dan perdesaaan	Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah	Sejahtera, maju, berkelanjutan	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan berbasis kewilayahan Perkotaan dan Perdesaan yang Terhubung, Merata, dan Seimbang
27	Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi			
28	Belum optimalnya perencanaan pembangunan pemukiman			
29	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata di perkotaan dan perdesaaan	Sarana dan prasarana belum terjangkau, merata dan saling terhubung bagi masyarakat	Sejahtera, dan maju	Misi 7: Mewujudkan Mutu Sarana dan Prasarana yang Terjangkau, Terpadu, dan Ramah Lingkungan
30	Belum optimalnya perencanaan pembangunan pemukiman			
31	Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi			
32	Belum memaksimalkan kerjasama swasta dalam berinvestasi	Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder lain	Maju, Berdaya Saing	Misi 8: Mewujudkan Pembangunan daerah yang Berkesinambungan
33	Investasi daerah yang terbatas			

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.4 Keselarasan Visi, Sasaran Visi, Misi RPJPD Timor Tengah Utara dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT

Keselarasn antar dokumen perencanaan pusat dan daerah perlu diperhatikan karena merupakan salah satu indikator konsisten pembangunan nasional, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga keselarasn Visi, Sasaran Visi, dan Misi antar dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi NTT, dengan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara dijabarkan pada tabel 4.4, sebagai berikut:

**Tabel 4. 4
Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT**

Variabel	RPJP Nasional 2045	RPJP Daerah Provinsi NTT	RPJP Daerah Kabupaten TTU
Visi	Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.	Nusa Tenggara Timur yang Mandiri Maju dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045	Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan
Sasaran Visi	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	Pendapatan per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang meningkat



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-IV.8-

Variabel	RPJP Nasional 2045	RPJP Daerah Provinsi NTT	RPJP Daerah Kabupaten TTU
	kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;	Kemiskinan menuju satu digit dan ketimpangan berkurang	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kemiskinan satu digit dan ketimpangan berkurang
	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat	Kepemimpinan kepala daerah yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara Berkualitas Unggul
	intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju net zero emission dan ramah lingkungan
Misi	Transformasi Sosial	Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi dan Inovatif
	Transformasi Ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan Perekonomian Berkelanjutan yang berdaya saing melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan
	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang <i>Good Governance</i>
	Supremasi Hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi yang adil dan konsisten
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Pembangunan yang inklusif berbasis ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup
	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan berbasis kewilayahan Perkotaan dan Perdesaan yang Terhubung, Merata, dan Seimbang
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Mutu Sarana dan Prasarana yang Terjangkau, Terpadu, dan Ramah Lingkungan
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan Pembangunan daerah	Mewujudkan Pembangunan daerah yang Berkesinambungan

Sumber: Hasil Olahan, 2024



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.1-

**BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam 20 Tahun diterjemahkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Arah kebijakan merupakan pedoman dari serangkaian prioritas kerja sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada setiap periode pembangunan. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran pokok selama 4 (empat) periode pembangunan. Dalam proses perumusan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2025. Arah kebijakan yang menjadi prioritas pada setiap tahapan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045, sebagai berikut.

**Tabel 5. 1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045**

Misi	Arah Kebijakan			
	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Unggul, Inovatif, dan Berdaya Saing Tinggi	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM, berkualitas dan inklusi	Penguatan Daya Saing SDM dan berkelanjutan Kesejahteraan melalui Transformasi Digital	Pemantapan kualitas Sumberdaya Manusia TTU yang berdaya saing dan unggul
Mewujudkan Perekonomian Berkelanjutan yang berdaya saing melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi	Percepatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau dan biru	Penguatan rantai nilai dan rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekspansi ke pasar baru melalui transformasi digital berbasis ekonomi hijau dan biru	Mewujudkan Kabupaten TTU sebagai daerah yang memiliki pendapatan menengah atas
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang <i>Good Governance</i>	Pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan SPM	Percepatan tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi antar stakeholder	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis transformasi digital	Mewujudkannya Tata Kelola Pemerintahan yang <i>Good Governance</i>
Mewujudkan supremasi hukum	Memperkuat supremasi	Mempercepat terwujudnya	Mewujudkan penegakan	Mewujudkan Kabupaten TTU



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.2-

Misi	Arah Kebijakan			
	Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045
dan demokrasi yang adil dan konsisten, serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	stabilitas ekonomi makro dalam pembangunan daerah dengan pemantapan supremasi hukum dan demokrasi	keadilan, bebas korupsi, dan penghormatan HAM, pemajuan pemenuhan perlindungan penegakan HAM serta berdemokrasi.	yang aman, damai dan adil
Mewujudkan Pembangunan berbasis ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup	Memperkuat modal dasar pembangunan daerah melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui kolaborasi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Pembangunan TTU yang terpadu dan berkelanjutan
Mewujudkan Pembangunan berbasis kewilayahan yang Terhubung, Merata, dan Seimbang	Pemenuhan pemerataan pembangunan antar wilayah	Mendorong akselerasi pembangunan antar wilayah	Mewujudkan daya saing wilayah untuk mencapai kesejahteraan yang merata	Mewujudkan pemerataan dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan Mutu Sarana dan Prasarana yang Terjangkau, Terpadu, dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana disetiap wilayah yang saling terintegrasi	Mempercepat pemerataan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	Pemantapan pembangunan sarana dan prasarana yang terpadu dan berkelanjutan	Mewujudkan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Mewujudkan Pembangunan daerah yang Berkesinambungan	Memperkuat pembangunan daerah	Mendorong kerjasama percepatan pembangunan daerah	Mewujudkan pembangunan daerah secara merata dan berkeadilan	Menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan arah kebijakan tersebut perlu dilakukannya upaya arah kebijakan trasformatif daerah dari Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045. Arah kebijakan trasformatif daerah dilakukan berdasarkan karakteristik daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan berdasarkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.3-

**Tabel 5. 2
Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
2025-2045**

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara)		
Transformasi	Arah Kebijakan	
Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
	2	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi penayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP.
	3	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
	4	Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.
	5	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.
	6	Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan kepulauan dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.
	7	Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun pra-sekolah dan 12 Tahun pendidikan dasar dan menengah).
	8	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.
	9	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.
	10	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.
	11	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
	12	Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif.
	13	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
	14	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
	15	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
	16	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
	17	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
	18	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
Transformasi Ekonomi	19	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.
	20	Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestic dan internasional.
	21	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industry pariwisata dan industri kreatif lainnya.
	22	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra-sentra ekonomi lokal.
	23	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.
	24	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.
	25	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.4-

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara)		
Transformasi	Arah Kebijakan	
	26	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau <i>ecotourism</i> .
	27	Pengembangan kawasan pariwisata massal (<i>mass tourism</i>) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.
	28	Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.
	29	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
	30	Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.
	31	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.
	32	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.
	33	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	34	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.
	35	Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.
	36	Pengembangan industri dan sentra Perternakan sapi
	37	Peningkatan produktivitas BUMD, dan BUMDes/ BUMDesMa
	38	Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.
	39	Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV).
	40	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
	41	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
	42	Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.
	43	Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif.
	44	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e- commerce dan penguatan branding produk.
	45	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
	46	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.
	47	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.
	48	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
Transformasi Tata Kelola	49	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.
	50	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil penguatan dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
	51	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik Masyarakat
	52	Penguatan kapasitas aparat daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
	53	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	54	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.5-

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara)		
Transformasi	Arah Kebijakan	
	55	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
	56	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.
	57	Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.
	58	Penguatan Integritas Partai Politik.
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	59	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
	60	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	61	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	62	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
	63	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi	64	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
	65	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
	66	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.
	67	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
	68	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
	69	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.
	70	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.
	71	Modernisasi irigasi.
	72	Pembangunan wilayah pesisir dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.
	73	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor <i>pentahelix</i> dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.
	74	Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan dari risiko abrasi.
	75	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
	76	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.
Implementasi Transformasi	77	Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.
	78	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
	79	Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah dan negara.
	80	Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
	81	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (<i>Roll-On/Roll-Off</i>) angkutan barang untuk mengangkut komoditas Perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.
	82	Pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan/daerah.
	83	Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.
	84	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.
	85	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
	86	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	87	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
	88	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	89	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
	90	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.6-

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara)		
Transformasi	Arah Kebijakan	
	91	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
	92	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
	93	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten).
	94	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
	95	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	96	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
	97	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
	98	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
	99	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
	100	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.
	101	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil penyelerasan dari fasilitasi, koordinasi dan asistensi sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Indikator-indikator pada sasaran pokok dilengkapi dengan target yang harus dicapai sesuai arah pembangunan. Sasaran pokok periode 20 Tahun dijabarkan dalam arah pembangunan periode jangka menengah atau 5 (lima) Tahunan. Arah pembangunan tersebut merujuk pada arah kebijakan yang telah dipetakan pada tabel 5.1. Sedangkan indikator tersebut merupakan indikator makro yang menggambarkan kinerja pada level *impact* sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang yang lebih memberikan arahan umum pembangunan, serta merujuk pada 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045 yang disesuaikan dengan konteks daerah.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-v.7-

**Tabel 5. 3
Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045**

MISI	NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET	
						BASELINE	2045
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Unggul, Inovatif, dan Berdaya Saing Tinggi						
	IE1	Kesehatan untuk semua	Mewujudkan kesehatan yang berkualitas	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,47	80
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
					a) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	354,19	16
					b) Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	5,29	0
					c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	42,7	7,5
				3	Insidensi Tuberkulosis		
					a.Penanganan Tuberkulosis:		
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	36,77	100
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	84,42	100
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	100
	IE2	Pendidikan yang berkualitas dan merata	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata	5	Hasil Pembelajaran:		
					a) <i>Persentase satuan pendidikan SD/Mi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:</i>		
					i) Literasi Membaca	38,18	82
					ii) Numerasi	28,47	80
					b) <i>Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:</i>		
					i) Literasi Membaca	34,93	82
					ii) Numerasi	23,55	80,00
					c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur diatas 15 Tahun (Tahun)	8,16	13
					d) Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	7,97	14,81
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,93	15
				7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	58,33	75



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.8-

MISI	NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET	
						BASELINE	2045
	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Angka Kemiskinan (%)	21,85	3,51
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	12,69	72,35
				10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15	45
2	Mewujudkan Perekonomian Berkelanjutan yang berdaya saing melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan						
	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatkan pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,15	2,76
				12	Pengembangan Pariwisata:		
					a) Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,55	2,65
					b) Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	18.671	120.000
				13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0	0,1
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
					a) Proporsi IKM Non Pangan pada Level Kabupaten	14,29	20
					b) Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	969	1069
					c) Rasio Kewirausahaan Daerah	2,9	8
					d) Persentase Koperasi Aktif (%)	54,98	75
					e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,04	4,56
				15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,96	1
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	68,48	85,4
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK:		
					a) Indeks Inovasi Daerah	25,13	60
	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:		
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	67,04	83,47
					b) Persentase Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,33	58,03
	IE6	Transformasi Digital	Mewujudkan Transformasi Digital	19	Akselerasi transformasi digital		
					a) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,3	7,30
	IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatkan Integrasi Ekonomi Domestik	20	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB (Disesuaikan dengan Indikator RPJPN)	5,29	6,5
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,98	57,3
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-40,12	1,6
	IE8			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.9-

MISI	NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		
						BASELINE	2045	
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah terhadap provinsi (%)	3,76	3,93		
				b) Persentase Rumah Layak Huni (%)	63	85		
				c) Jumlah Desa Mandiri	0	24		
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance							
	IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	55,96	85	
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,83	4	
				26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5	
				27	Indeks Integritas Nasional	65,63	79,08	
4	Mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi yang adil dan konsisten							
	IE10	Hukum berkeadilan, keamanan Daerah yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	Menciptakan supremasi hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman, adil, nyaman dan tentram	28	Indeks Pembangunan Hukum*	0,60	0,84	
					Pembentukan dan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum		9	92
				30	Demokrasi:	a) Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	75	100
						b) Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	90<	97-100
						Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		62,8
	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,24	4,8	
				32	Tingkat Inflasi (%)	4,0-4,5	1 - 1,5	
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	37,37	79,5
						b) Total Kredit/PDRB (%)	30,52	90
						34	Inklusi Keuangan (%)	0
	IE.12	Ketangguhan Diplomasl den Petahanan	Mewujudkan Ketangguhan Diplomasl den	35	Jumlah Kerjasama Antar Daerah (Komulatif)	0	10	
				36	Persentase Pilar Batas Daerah yang terpasang (%)	25	100	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.10-

MISI	NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		
					BASELINE	2045	
		Berdaya Gentar Kawasan	Petahanan Berdaya Gentar Kawasan				
5	Mewujudkan Pembangunan yang inklusif berbasis ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup						
	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Meningkatkan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	50,7	64,47 (tinggi)
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,85	86	
	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0	80
			40	Indeks Ketimpangan Gender	0,519	0,19	
	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0	0,628
			42	Kualitas Lingkungan hidup			
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,86	73,11	
				b) Persentase Akses Sanitasi Layak	80,56	95	
			c) Pengelolaan Sampah: -Proporsi Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	39,59	100		
	IE16	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:		
			a) Ketahanan Energi:				
			- Rasio elektrifikasi	94,48	100		
			b) Ketahanan Pangan:				
			- Indeks Ketahanan Pangan	69,36	90		
			- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	75,1	97		
		- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	10,42	2,83			
		c) Ketahanan air:					
		- Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	88,71	100			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.11-

MISI	NO	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET	
						BASELINE	2045
	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,13	118,60
				45	Persentase penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK)	0	51,51
					a) Kumulatif	0	47,82
					b) Tahunan	0	91,18

Sumber: Hasil Olah, 2024



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.12-

5.3 Upaya Transformasi Super Prioritas Kabupaten Timor Tengah Utara (*Game Changers* TTU)

RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045 sebagai pedoman memuat aspek pembangunan jangka panjang dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam upaya ikut serta dan mendorong mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) yang sesuai kebutuhan dan telah disesuaikan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara:

**Tabel 5. 4
Game Changers TTU Tahun 2025-2045**

Transformasi	Game Changers
Transformasi Sosial	1. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar)
	2. Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta)
	3. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegritas
Transformasi Ekonomi	4. Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri
	5. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
	6. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
	7. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
	8. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
	9. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan perlindungan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual
Transformasi Tata Kelola	10. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
	11. Penguatan integritas partai politik
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	12. Percepatan Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum
	13. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
	14. Reformasi energi terbarukan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	15. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	16. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
	17. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>)

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 (diolah)

Pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui upaya transformatif super prioritas (*Game Changers*) merupakan usaha percepatan pembangunan daerah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan RPJPN 2025- 2045 dan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-V.13-

disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Timor Tengah Utara. *Game Changers* pada tabel 5.4 tersebut berdasarkan kewenangan standar pelayanan minimum (SPM) kabupaten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun 2018 mengenai SPM, sehingga ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang tersebut wajib dilakukan khususnya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan berhak diperoleh setiap masyarakat Timor Tengah Utara secara minimal. Selain itu, *Game Changers* dapat mempercepat pertumbuhan dan mampu mengatasi faktor penghambat pembangunan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni SDM Ketenagakerjaan, infrastruktur, dan daya saing berdasarkan analisis *growth diagnostics*.

Secara khusus berdasarkan RPJPN 2025-2045, fokus utama dari Indonesia Emas 2045 yakni pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berupaya melalui Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*) yang dikembangkan guna mendukung Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara. Hal tersebut menjadi langkah penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempromosikan destinasi wisata dan budaya lokal dari Kabupaten Timor Tengah Utara dengan juga melibatkan stakeholder lainnya seperti industri/bisnis, akademisi, media, dan lainnya yang menghasilkan nilai tambah melalui ekspresi kreatif, inovasi, dan kreativitas dari masyarakat.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

-VI.1-

**BAB VI
PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 20 Tahun kedepan yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada setiap sektor. Dokumen ini merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama kurun waktu 20 Tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara yang berdimensi waktu lima Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara yang berdimensi Tahunan.

Perubahan RPJPD ini dapat dilakukan apabila 1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Per Undang-Undangan; 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan; dan 3) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJPD ini tidak dapat dilakukan bila masa berlaku kurang dari 7 (Tujuh) Tahun.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mewujudkan visi "*Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan*" dan dijabarkan 8 misi beserta arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikatornya perlu didukung oleh (1) komitmen dari Bupati sebagai pimpinan daerah beserta perangkat daerah (PD) yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (3) kolaborasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara seperti masyarakat, swasta/ industri, akademisi, serta media; (4) menjaga keberlanjutan dan keseimbangan rencana dan pembangunan.

Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPJPD ini.

BURATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID